

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP- 331 /PB/2021

TENTANG

KODEFIKASI SEGMENT AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan transaksi keuangan yang memerlukan penggunaan kode akun baru serta untuk mewujudkan keselarasan Bagan Akun Standar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KODEFIKASI SEGMENT AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR.
- PERTAMA : Menetapkan Kodefikasi Segment Akun pada Bagan Akun Standar yang terdiri atas:
- a. Segment Akun Kas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
  - b. Penjelasan Uraian Segment Akun Kas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
  - c. Segment Akun AkruaI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini; dan
  - d. Penjelasan Uraian Segment Akun AkruaI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.



KEDUA : Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mulai digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.

KETIGA : Khusus untuk Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar berikut ini mulai digunakan pada Tahun Anggaran 2022, yaitu:

Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi.
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi.
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman.
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi BLU.
525163	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi BLU.
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman BLU
523125	Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan Kementerian Negara/Lembaga lain yang memiliki transaksi sejenis. BMP antara lain terdiri dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamina, Methanol. Serta Belanja atas SPO (Special Oil Non Pertamina), yaitu pelumas khusus yang tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkan untuk operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidroulic, Petronas Gear, Skydrol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, Shell Omala, Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Sapphire, Nycolube 22, Neox 800, dst. SPO ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli di Luar Negeri. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
  - b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri/Pimpinan Lembaga;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



## SEGMENT AKUN NERACA KAS

KODE AKUN	URAIAN AKUN
1	ASET
11	ASET LANCAR
111	KAS DAN SETARA KAS
1111	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah
11111	Kas di Bank Indonesia dalam Rupiah
111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah
111112	Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat
111113	Kas di Rekening SAL
111114	Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong
111115	Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah
111116	Kas di Rekening Antara Reksus
111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah
111118	Kas di Rekening Sub BUN Talangan
111119	Kas di Rekening Penampungan Pendapatan Rekening Pembangunan Hutan
11112	Kas di Rekening Sub RKUN
111121	Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan
111122	Kas di Rekening Sub RKUN Pengeluaran
111123	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah
11113	Kas di Rekening Surat Utang Negara
111131	Kas di Rekening Penerimaan Surat Utang Negara
111132	Kas di Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara
11114	Kas di Rekening Persepsi Pusat
111141	Kas di Rekening Persepsi Pusat
111142	Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
11115	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-SPAN
111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
1112	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing
11121	Kas di Bank Indonesia dalam Valuta Asing
111211	Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD
111212	Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
111213	Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya
111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing
111215	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD
111216	Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen
111217	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Yen
111218	Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro



KODE AKUN	URAIAN AKUN
111219	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro
11122	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing
111221	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
111222	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
111223	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
11123	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas
111231	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas USD - Non Gaji
111232	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas Euro - Non Gaji
1113	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya
11131	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia
111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah
111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>
111319	Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
11132	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
111322	Kas Pemerintah yang ada di K/L
111323	Kas Pemerintah yang ada di BLU
111324	Kas di Rekening PFK
111325	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
111326	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Hibah Luar Negeri Bencana Alam
111327	Kas di Rekening PHLN
111328	Kas di Rekening Dana Bergulir
111329	Kas lainnya
11134	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	111341 Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji
	111342 Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji
	111343 Kas di Rekening Retur Reksus Pinjaman/Hibah/Surat Berharga Syariah Negara
1114	Kas di Rekening Kas di KPPN
11141	Kas di Bank Indonesia
	111411 Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
	111412 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah
11142	Kas di Bank Umum
	111421 Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
	111422 Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
	111423 Kas di Rekening Retur BO/Pos (KPPN)
11143	Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valuta Asing
	111431 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD
	111432 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen
	111433 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro
11144	Kas KPPN di Bank Umum dalam Valuta Asing
	111441 Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) dalam Valuta USD
11145	Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
	111451 Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
11146	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing
	111461 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD
	111462 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen
	111463 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro
	111469 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya
1115	Kas dalam Transito
11151	Kas dalam Transito - BUN
	111511 Kas dalam Transito - BUN
	111512 Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/Hibah
	111513 Kas dalam Transito TUP
	111514 Kas dalam Transito UP
	111515 Kas dalam Transito BLU
	111516 Kas dalam Transito-Transaksi Non Kas
	111517 Kas dalam Transito-Transaksi DTP
	111519 Kas dalam Transito Lainnya

KODE AKUN	URAIAN AKUN
11152	Kas dalam Transito - K/L
111521	Kas dalam Transito - Perwakilan Luar Negeri
1116	Kas di Bendahara Pengeluaran
11161	Kas di Bendahara Pengeluaran
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
1117	Kas di Bendahara Penerimaan
11171	Kas di Bendahara Penerimaan
111711	Kas di Bendahara Penerimaan
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas
11181	Setara Kas
111811	Surat Berharga
111812	Penempatan di Bank Umum
111813	Reverse Repo
111814	Foreign Exchange
111819	Setara Kas lainnya
11182	Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
111823	Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
111826	Kas Lainnya di BLU
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
1119	Kas pada Badan Layanan Umum
11191	Kas - BLU
111911	Kas dan Bank - BLU
111912	Dana yang akan Dijaminkan - BLU
111913	Dana yang akan Dipadankan - BLU
111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
11192	Setara Kas - BLU
111921	Surat Berharga - BLU
111929	Setara kas Lainnya - BLU
112	UANG MUKA REKENING BUN
1121	Uang Muka Dari Rekening KUN
11211	Uang Muka KUN UP
112111	Uang Muka KUN UP - PP
1122	Uang Muka Dari Rekening Khusus
11221	Uang Muka Reksus UP
112211	Uang Muka Reksus UP - PP Reksus

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	11222 Uang Muka Reksus Non UP
	112221 Uang Muka Reksus Kosong
1123	Talangan kepada RKUN
	11231 Talangan kepada RKUN
	112311 Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
	112312 Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
	112313 Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
113	INVESTASI JANGKA PENDEK
1131	Investasi dalam Deposito
	11311 Investasi dalam Deposito
	113111 Investasi dalam Deposito Jangka Pendek
1132	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	11321 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	113211 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	11322 Investasi Jangka Pendek pada Surat Berharga Negara
	113221 Investasi Jangka Pendek pada SBN dalam Rangka Stabilisasi Pasar
	113222 Investasi Jangka Pendek pada SBN dalam Rangka Optimalisasi Kas
1133	Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum
	11331 Deposito Jangka Pendek - BLU
	113311 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU yang Sudah Disahkan
	113319 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
1134	Bagian Lancar Investasi Non Permanen
	11341 Bagian Lancar Investasi Non Permanen
	113411 Bagian Lancar Investasi Non Permanen
1139	Investasi Jangka Pendek Lainnya
	11391 Investasi Jangka Pendek Lainnya
	113911 Investasi Jangka Pendek Lainnya

2 KEWAJIBAN

21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

211 UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA

2111 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

21111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) I

211111 Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai

211112 Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara

211113 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Beras Bulog
211114	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji
211115	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan
211116	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri
211117	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja
211118	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
211119	Utang Dana PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
21112	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya
211121	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain
211122	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penutupan Rekening
211123	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah
21115	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) II
211151	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
211152	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Pusat
211153	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Daerah
211154	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pemberi Kerja Pemerintah Daerah
211155	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan
211156	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG
21116	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga PFK Setoran Pajak Rokok dan Pengalihan Piutang
211161	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok
211162	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengalihan Piutang
211163	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
211164	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
211165	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kontribusi Penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan
211166	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa

KODE AKUN	URAIAN AKUN
219	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
2193	Uang Muka Rekening Khusus
21931	Uang Muka Rekening Khusus
219311	Uang Muka Rekening Khusus
2194	Uang Muka
21941	Uang Muka dari KUN
219411	Uang Muka dari KUN
219412	Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga
2195	Uang Muka dari KPPN
21951	Uang Muka dari KPPN
219511	Uang Muka dari KPPN
2197	Utang Kepada KUN
21971	Utang Kepada KUN
219711	Utang Kepada KUN
21972	Utang Kepada kas BLU
219721	Utang Kepada kas BLU
2198	Utang Kepada RPL
21981	Utang Kepada RPL
219811	Utang Kepada RPL
21982	Utang Talangan
219821	Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
219822	Utang Talangan Dana Cadangan DBH
219823	Utang Talangan Dana Cadangan PMN
3	EKUITAS
31	EKUITAS
311	EKUITAS
3111	SAL
31111	SAL
311111	SAL
311112	Penggunaan SAL
311113	Penggunaan SAL <i>Earmark</i>
3112	SILPA
31121	SILPA
311211	SILPA
311212	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu
311213	Koreksi Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
311214	Surplus/Defisit
311215	Pembiayaan Netto
3113	SAL dan SILPA BLU
31131	SAL - BLU
311311	SAL - BLU
311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran

f

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Yang Lalu
	311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi
	311314 Penggunaan SAL BLU
	311315 Penyesuaian SAL BLU
31132	SILPA BLU
	311321 SILPA BLU
3117	Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi
	31171 Selisih Kurs
	311711 Selisih Kurs
3119	Ekuitas Dana Lancar Lainnya
	31191 Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
	311911 Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
39	EKUITAS
391	EKUITAS
	3911 Ekuitas
	39114 Ekuitas Surplus BLU
	391141 Setoran Surplus BLU
	391142 Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU lain
	391143 Transfer Masuk Kas BLU dari BLU lain
399	EKUITAS KONSOLIDASI BUN
	3999 Ekuitas Konsolidasi BUN
	39991 Ekuitas Konsolidasi BUN I
	399911 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual dari Kas BP KL
	399912 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual dari Kas BLU KL
	399913 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual dari Kas Hibah KL
	399914 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Akun Non Anggaran TAYL
	399915 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Akun Aset/Kewajiban
	399916 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas BUN
	399917 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas RPL
	399918 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas KPPN
	399919 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas BLU
	39992 Ekuitas Konsolidasi BUN II
	399921 Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas Hibah



KODE AKUN	URAIAN AKUN
399922	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas Transitoris
399923	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas <i>Escrow</i>

**SEGMENT AKUN PENDAPATAN - LRA**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
4	PENDAPATAN NEGARA
41	PENDAPATAN PERPAJAKAN
411	PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan
41111	Pendapatan PPh Migas
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
41112	Pendapatan PPh Non-Migas
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
411124	Pendapatan PPh Pasal 23
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
411128	Pendapatan PPh Final
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya
41114	Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
41121	Pendapatan PPN
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
411212	Pendapatan PPN Impor
411219	Pendapatan PPN Lainnya
41122	Pendapatan PPnBM
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
411222	Pendapatan PPnBM Impor
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
41124	Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah
411241	Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	411242 Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah - Penanganan Pandemi COVID-19
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411313	Pendapatan PBB Perkebunan
411314	Pendapatan PBB Kehutanan
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
411319	Pendapatan PBB Lainnya
4115	Pendapatan Cukai
41151	Pendapatan Cukai
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
411513	Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai
411519	Pendapatan Cukai Lainnya
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
411611	Pendapatan Bea Meterai
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
411613	Pendapatan PPn Batubara
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
41163	Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah
412	PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
412111	Pendapatan Bea Masuk
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	412115 Denda atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
	412116 Pendapatan BM-DTP
	412119 Pendapatan Pabean Lainnya
41212	Pendapatan Bea Masuk Tindakan
	412121 Pendapatan Bea Masuk Antidumping
	412122 Pendapatan Bea Masuk Imbalan
	412123 Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
4122	Pendapatan Bea Keluar
	41221 Pendapatan Bea Keluar
	412211 Pendapatan Bea Keluar
	412212 Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	412213 Pendapatan Bunga Bea Keluar
419	PENDAPATAN PAJAK LAIN-LAIN
	4199 Pendapatan Pajak Lain-lain
	41999 Pendapatan Pajak Lain-lain
	419999 Pendapatan Pajak Lain-lain
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
421	PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM
	4211 Pendapatan Minyak Bumi
	42111 Pendapatan Minyak Bumi
	421111 Pendapatan Minyak Bumi
4212	Pendapatan Gas Bumi
	42121 Pendapatan Gas Bumi
	421211 Pendapatan Gas Bumi
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara
	42132 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara
	421321 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi
	421322 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi
	421323 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat
	42133 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara
	421331 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara
	421332 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga
	421333 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas
	421334 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya
42134	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
4214	Pendapatan Kehutanan
42141	Pendapatan Dana Reboisasi
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
4215	Pendapatan Perikanan
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
4216	Pendapatan Panas Bumi
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
422	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
4222	Pendapatan Dari KND Lainnya
42221	Pendapatan dari Surplus Lembaga
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan
422219	Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
424133	Pendapatan Program Modal Ventura
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
424136	Pendapatan Investasi
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

KODE AKUN	URAIAN AKUN
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
42414	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya - Uang
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN
42441	Pendapatan dari Alokasi APBN
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	424422 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
4249	Pendapatan BLU Lainnya
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
42493	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
42494	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN BLU
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
42495	Pendapatan BLU Lainnya dari Asuransi BMN BLU
424951	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU
425	<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA</b>
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
425144	Pendapatan atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
42517	Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum
425211	Pendapatan Paspor
425212	Pendapatan Visa
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233	Pendapatan Ongkos Perkara
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
42525	Pendapatan Perizinan
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
425264	Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi
425281	Pendapatan Akreditasi
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
42533	Pendapatan Jasa Karantina
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan
42534	Pendapatan Jasa Agraria
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
425342	Pendapatan Penerimaan Hak atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
42541	Pendapatan Pendidikan
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan
425451	Pendapatan Museum
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika
42551	Pendapatan Jasa Transportasi
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI
4256	Pendapatan Jasa Lainnya
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425611	Pendapatan Wisata Alam
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
42569	Pendapatan Jasa Lainnya
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol
425694	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
425699	Pendapatan Jasa Lainnya
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
42571	Pendapatan Bunga
425711	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
425712	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah
425715	Pendapatan Komitmen Pemberian Pinjaman
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
425719	Pendapatan Bunga Lainnya
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang
425722	Pendapatan dari Transaksi Security Lending
425723	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing
425724	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang
425725	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang
42573	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
425732	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN
425743	Pendapatan Kupon SBN
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo
425745	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan <i>Loss Limit</i>
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
425771	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian

KODE AKUN	URAIAN AKUN
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
4258	Pendapatan Denda
42581	Pendapatan Denda I
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi
42582	Pendapatan Denda II
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Pemberian Pinjaman
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
42583	Pendapatan Denda III
425839	Pendapatan Denda Lainnya
4259	Pendapatan Lain-Lain
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
42598	Pendapatan Lain-Lain I
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman
425982	Penerimaan Pengembalian dan Pencatatan Akumulasi luran Pensiun
425983	Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan
42599	Pendapatan Lain-Lain II
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	425994 Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
	425995 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
	425996 Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN
	425997 Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
	425998 Pendapatan dari Retur SP2D
	425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain
43	PENDAPATAN HIBAH
431	PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lembaga/Badan Usaha
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lainnya
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Jasa
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Surat Berharga
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/ Badan Usaha
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Lainnya
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
43124	Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan
431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan
439	PENDAPATAN HIBAH LAIN-LAIN
4399	Pendapatan Hibah Lain-lain
43999	Pendapatan Hibah Lain-lain
439999	Pendapatan Hibah Lain-lain

**SEGMENT AKUN BELANJA**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5	BELANJA NEGARA
51	BELANJA PEGAWAI
511	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111	Belanja Gaji PNS
511111	Belanja Gaji Pokok PNS
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS
51112	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS
511127	Belanja Tunjangan Kemahalan PNS
511128	Belanja Tunjangan Lauk pauk PNS
511129	Belanja Uang Makan PNS
51113	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511131	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS
511132	Belanja Tunjangan Cacat PNS
511133	Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS
511135	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
511136	Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan pada Sekolah/ PT Swasta/ Badan/Komisi
511137	Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
511139	Belanja Tunjangan SAR PNS
51114	Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/ Staff di Luar Negeri
511141	Belanja Tunjangan Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
511142	Belanja Tunjangan Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
511143	Belanja Tunjangan <i>Social Security</i> PNS (Staff di LN)
511144	Belanja Tunjangan Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
511145	Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
511146	Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	511147 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri
	511149 Belanja Lokal Staff Lainnya
51115	Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS
	511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
	511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru
	511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
	511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
	511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
	511156 Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen
	511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
	511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
51116	Belanja Gaji- PNS TNI/Polri
	511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
51117	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
	511171 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TNI/Polri
	511172 Belanja Tunjangan Anak PNS TNI/Polri
	511173 Belanja Tunjangan Struktural PNS TNI/Polri
	511174 Belanja Tunjangan Fungsional PNS TNI/Polri
	511175 Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/Polri
	511176 Belanja Tunjangan Beras PNS TNI/Polri
	511177 Belanja Tunjangan Kemahalan PNS TNI/Polri
	511178 Belanja Tunjangan Lauk pauk PNS TNI/Polri
	511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
51118	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri
	511181 Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	511182 Belanja Tunjangan Cacat PNS TNI/Polri
	511183 Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	511184 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	511185 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	511187 Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	511188 Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	511189 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
51119	Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
	511191 Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	511192 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
	511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
	511194 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
	511195 Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan PNS TNI
	511196 Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS Polri
	511197 Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51121	Belanja Gaji TNI/POLRI
	511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
	511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
51122	Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
	511221 Belanja Tunjangan Suami/Istri TNI/POLRI
	511222 Belanja Tunjangan Anak TNI/POLRI
	511223 Belanja Tunjangan Struktural TNI/POLRI
	511224 Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI
	511225 Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI
	511226 Belanja Tunjangan Beras TNI/POLRI
	511227 Belanja Tunjangan Kemahalan TNI/POLRI
	511228 Belanja Tunjangan Lauk Pauk TNI/POLRI
	511229 Belanja Uang Makan TNI/POLRI
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
	511231 Belanja Tunjangan Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	511232 Belanja Tunjangan Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	511233 Belanja Tunjangan Babinkamtibmas TNI/POLRI
	511234 Belanja Tunjangan Khusus Papua untuk TNI/POLRI
	511235 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
	511236 Belanja Tunjangan Brevet TNI/POLRI
	511237 Belanja Tunjangan Keahlian/ Keterampilan TNI/POLRI
	511238 Belanja Tunjangan Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	511239 Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
	511241 Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
	511242 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	511243 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil TNI/Polri
	511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	511245 Belanja Santunan Cacat TNI
	511246 Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/ Perbatasan Polri
	511247 Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar TNI/Polri
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51131	Belanja Gaji Pejabat Negara
	511311 Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
	511319 Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
51132	Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
	511321 Belanja Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara
	511322 Belanja Tunjangan Anak Pejabat Negara
	511323 Belanja Tunjangan Struktural Pejabat Negara
	511324 Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara
	511325 Belanja Tunjangan Beras Pejabat Negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
	511331 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
	511333 Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	511334 Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	511335 Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	511336 Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	511337 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	511338 Belanja Tunjangan Fasilitas KPK
	511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
5114	Belanja Gaji Dokter PTT
51141	Belanja Gaji Dokter PTT
	511411 Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
	511412 Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	511413 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	511414 Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
	511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
	511512 Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS
	511513 Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
	511514 Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Jabatannya
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS
51152	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS
511529	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
51161	Belanja Gaji PPPK
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
51162	Belanja Tunjangan-tunjangan I PPPK
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK
511626	Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK
511627	Belanja Tunjangan Lauk Pauk PPPK
511628	Belanja Uang Makan PPPK
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK
51163	Belanja Tunjangan-tunjangan II PPPK
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PPPK
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK
512	BELANJA HONORARIUM/LEMBUR /TUNJANGAN KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO
5121	Belanja Honorarium
51211	Belanja Honorarium
512111	Belanja Uang Honor Tetap
5122	Belanja Lembur
51221	Belanja Lembur
512211	Belanja Uang Lembur
512212	Belanja Uang Lembur PPPK
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)
512412	Belanja Pegawai Transito
512413	Belanja Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan sebagai Dampak Reformasi Birokrasi

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/ Kinerja PPPK
513	BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
513115	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
51313	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513132	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim
51314	Belanja Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI
513141	Kontribusi APBN sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI
51315	Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP
513151	Belanja Tunjangan Veteran
513152	Belanja Dana Kehormatan Veteran
513153	Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP
51316	Belanja Tunjangan Hari Tua
513161	Belanja Tunjangan Hari Tua ( <i>Unfunded Liability</i> )
5132	Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai
51321	Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513211	Belanja Askes PNS
513212	Belanja Askes Pejabat Negara
51322	Belanja Askes Penerima Pensiun
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun
51323	Belanja Askes TNI/Kemhan
513231	Belanja Askes TNI/Kemhan
51324	Belanja Askes Polri
513241	Belanja Askes Polri
51325	Belanja Askes Veteran
513251	Belanja Askes Veteran
51326	Belanja Katastropik
513261	Belanja Katastropik

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
51327	Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
513271	Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
51328	Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai
513281	Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai
5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
5134	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
51341	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
513411	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
5135	Belanja Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pegawai
51351	Belanja Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pegawai
513511	Belanja Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pemerintah Pusat
52	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>
521	<b>BELANJA BARANG</b>
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521111	Belanja Keperluan Perkantoran
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
521116	Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
52112	Belanja Barang Operasional kepada BLU
521121	Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
521122	Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
52113	Belanja Barang Operasional - Darurat Bencana
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
521211	Belanja Bahan
521212	Belanja Barang Transito
521213	Belanja Honor Output Kegiatan
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan
521215	Belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	521216 Belanja Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
	521217 Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
	521218 Belanja dalam Rangka <i>Refund</i> Dana PHLN
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
52122	Belanja Barang Non Operasional kepada BLU
	521221 Belanja Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	521222 Belanja Barang Non Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
52123	Belanja Barang Bantuan Pemerintah
	521231 Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang
	521232 Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang
	521233 Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang
	521234 Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang
52124	Belanja Barang Non Operasional - Darurat Bencana
	521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
52125	Belanja Barang Ekstrakomptabel
	521252 Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel
	521253 Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel
	521254 Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel
5215	Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC
	52151 Belanja Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC
	521511 Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC
	521512 Belanja Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC
	521513 Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC
5217	Belanja Kontribusi dan Kompensasi
	52171 Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>
	521711 Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>
	52172 Belanja Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan
	521721 Belanja Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan ( <i>Viability Gap Fund</i> )
	521722 Belanja Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek ( <i>Project Development Facility</i> )

KODE AKUN	URAIAN AKUN
521723	Belanja Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )
521724	Belanja Kompensasi Finansial Penjaminan Infrastruktur
521725	Belanja Regres Penjaminan Infrastruktur
52173	Belanja Kompensasi Penugasan - Penanganan Pandemi COVID-19
521731	Belanja Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
521732	Belanja Selisih Harga Biodiesel
521733	Belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
5218	Belanja Barang Persediaan
52181	Belanja Barang untuk Persediaan
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
52182	Belanja Barang Persediaan untuk proses produksi
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses
52183	Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya
52184	Belanja Barang Persediaan - Darurat Bencana
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19
522	BELANJA JASA
5221	Belanja Jasa
52211	Belanja Langganan Daya dan Jasa
522111	Belanja Langganan Listrik
522112	Belanja Langganan Telepon
522113	Belanja Langganan Air
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
52212	Belanja Jasa Pos dan Giro
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro
52213	Belanja Jasa Konsultan
522131	Belanja Jasa Konsultan
52214	Belanja Sewa
522141	Belanja Sewa
52215	Belanja Jasa Profesi
522151	Belanja Jasa Profesi



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	522152 Belanja Imbalan Jasa Invensi
52216	Belanja Jasa kepada BLU
	522161 Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	522162 Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
52217	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
	522171 Belanja <i>Fee</i> Pelayanan Bank/Pos Persepsi
	522172 Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
52219	Belanja Jasa Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya
	522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
523	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>
5231	Belanja Pemeliharaan
52311	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	523113 Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan
	523114 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19
	523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
52312	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
	523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	523124 Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor
	523125 Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
	523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52313	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
	523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi
	523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan
	523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	523135 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi
	523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
	523137 Belanja Asuransi Jembatan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
52319	Belanja Pemeliharaan Lainnya
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya
524	<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
52411	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5242	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
52421	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
524212	Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri
525	<b>BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)</b>
5251	Belanja Barang BLU
52511	Belanja Barang dan Jasa BLU I
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan
525112	Belanja Barang
525113	Belanja Jasa
525114	Belanja Pemeliharaan
525115	Belanja Perjalanan
525116	Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>
525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
525118	Belanja Ketersediaan Layanan BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
52512	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
525122	Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU
525127	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU
52513	Belanja Asuransi BMN di BLU
	525131 Belanja Asuransi BMN Gedung dan Bangunan - BLU
	525132 Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor - BLU
	525133 Belanja Asuransi BMN Jembatan - BLU
52514	Belanja Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain
	525141 Belanja Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	525142 Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	525144 Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
52515	Belanja Barang dan Jasa BLU II
	525151 Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup
	525152 Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	525153 Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	525154 Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	525155 Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	525156 Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
52516	Belanja Barang Ekstrakomptabel BLU
	525162 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU
	525163 Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU
	525164 Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU
526	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMDA
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
	52611 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda
	526111 Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	526114 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
52612	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang
	526121 Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	526122 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	526123 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	526124 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
52613	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda - Darurat Bencana
	526131 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	526132 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
	52621 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah
	526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
	526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
	52622 Belanja Barang Fisik Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
	526222 Belanja Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
	526223 Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
	526224 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	52631 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	526311 Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah
52632	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda - Darurat Bencana

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	526321 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	526322 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19
	526323 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
527	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN
5271	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
52711	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527111	Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
53	BELANJA MODAL
531	BELANJA MODAL TANAH
5311	Belanja Modal Tanah
53111	Belanja Modal Tanah
531111	Belanja Modal Tanah
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
53112	Belanja Modal Tanah II
531121	Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang Dilakukan oleh LMAN
532	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	532116 Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
	532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
	532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
	532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19
	53212 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
	532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
533	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
5331	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>
53311	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19
	53312 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
	533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
534	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>
5341	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
53411	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
534116	Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
53412	<b>Belanja Modal Irigasi</b>
	534121 Belanja Modal Irigasi
	534122 Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
	534123 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	534124 Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
	534125 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
	534126 Belanja Modal Perijinan Irigasi
	534127 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
	534128 Belanja Modal Perjalanan Irigasi
53413	Belanja Modal Jaringan
	534131 Belanja Modal Jaringan
	534132 Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
	534133 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
	534134 Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
	534135 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
	534136 Belanja Modal Perijinan Jaringan
	534137 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	534138 Belanja Modal Perjalanan Jaringan
53414	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
	534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
53415	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
	534151 Belanja Penambahan Nilai Irigasi
53416	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
	534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan
536	BELANJA MODAL LAINNYA
5361	Belanja Modal Lainnya
53611	Belanja Modal Lainnya
	536111 Belanja Modal Lainnya
	536112 Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya
	536113 Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya
	536114 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya
	536115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya
	536116 Belanja Modal Perizinan Aset Tetap lainnya/ Aset Lainnya
	536117 Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya
	536118 Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19
53612	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
	536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
537	BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5371	Belanja Modal BLU
53711	Belanja Modal BLU
537111	Belanja Modal Tanah - BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU
53712	Belanja Modal BLU - Darurat Bencana
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
537125	Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
54	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG
541	BELANJA PEMBAYARAN BUNGA UTANG
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Pendek
54111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Rupiah
541112	Belanja Pembayaran Kupon SBN-TDR
541113	Belanja Pembayaran Bunga Repo-TDR
541119	Belanja Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
54112	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
541121	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
541122	Belanja Pembayaran Kupon SBN Valas-TDR
541123	Belanja Pembayaran Bunga Repo Valas-TDR
541129	Belanja Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
5412	Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang
54121	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah
541219	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
54122	Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541221	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
541229	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya
54123	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	541232 Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN
54124	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
	541241 Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
54125	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
	541251 Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
	541259 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
5413	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara
54131	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
	541311 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
	541312 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
54132	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
	541321 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
	541322 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
54133	Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
	541331 Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
	541332 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- Imbalan SPN Syariah
54134	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
	541341 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
	541342 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas
54135	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas
	541351 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas
	541352 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas
5414	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang
54141	Belanja Bunga Pinjaman program
	541411 Belanja Bunga Pinjaman Program
	541419 Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
54142	Belanja Bunga Pinjaman Proyek
	541421 Belanja Bunga Pinjaman Proyek

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	541429 Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
54144	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadwalan Kembali Pinjaman
	541441 Belanja Bunga Utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Program
	541442 Belanja Bunga Utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Proyek
	541449 Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadwalan Kembali Pinjaman
54146	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
	541461 Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
542	<b>BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA</b>
5421	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara
	54211 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara
	542111 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara
	542119 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara
54212	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara
	542121 Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara
	542129 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Obligasi Negara
54213	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
	542131 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
	542139 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
54214	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas
	542141 Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas
	542149 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Obligasi Negara Valas
544	<b>BELANJA PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION</b>
5441	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara
	54411 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara
	544111 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara
	544112 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara
	544113 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas
	544114 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Negara Valas
545	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
5451	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara
54511	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
545111	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
545119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
54513	Belanja Pembayaran Discount SPN Syariah
545131	Belanja Pembayaran Discount SPN Syariah
545139	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Discount SPN Syariah
54514	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
545141	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
545149	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas
54515	Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
545151	Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
545159	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
547	BELANJA DENDA
5471	Belanja Pembayaran Denda
54711	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga
547112	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
547113	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
547119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
55	BELANJA SUBSIDI
551	BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA
5511	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
5512	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM
55121	Belanja Subsidi BBM
551211	Belanja Subsidi Avgas
551212	Belanja Subsidi Avtur
551213	Belanja Subsidi Premium
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	551216 Belanja Subsidi Minyak Diesel
	551217 Belanja Subsidi Minyak Tanah
	551218 Belanja Subsidi Elpiji
	551219 Belanja Subsidi <i>Liquefied Gas For Vehicle (LGV)</i>
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM
55131	Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya
	551311 Belanja Subsidi Pangan
	551312 Belanja Subsidi Listrik
	551313 Belanja Subsidi Benih
	551314 Belanja Subsidi Obat
	551315 Belanja Subsidi Gula
	551316 Belanja Subsidi Pupuk
	551317 Belanja Subsidi Perawatan Beras
	551318 Belanja Subsidi Pengawasan Pupuk
	551319 Belanja Subsidi Harga/Biaya Lainnya
55132	Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak
	551321 Belanja Subsidi PPh-DTP
	551323 Belanja Subsidi BM-DTP
55133	Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya
	551331 Belanja Subsidi Haji
	551332 Belanja Subsidi Kendaraan Bermotor
	551339 Belanja Subsidi Lainnya
55134	Belanja Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II
	551341 Belanja Subsidi Minyak Goreng
5514	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO
55141	Belanja Subsidi dalam rangka PSO
	551411 Belanja Subsidi PT KAI
	551412 Belanja Subsidi PT PELNI
	551413 Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
	551414 Belanja Subsidi TVRI
	551415 Belanja Subsidi BULOG
	551419 Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya
552	BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	552111 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	552112 Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
55212	Belanja Subsidi – Bunga Kredit
	552121 Belanja Subsidi Bunga KUT
	552122 Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	552123 Belanja Subsidi Bunga KOP
	552124 Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	552125 Belanja Subsidi Bunga KPR
	552126 Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
	552127 Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
	552128 Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
	552129 Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya
55213	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing
	552131 Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
	552132 Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
55214	Belanja Subsidi Kredit Program II
	552141 Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
	552142 Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan
	552143 Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
	55221 Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
	552211 Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
554	BELANJA SUBSIDI - DARURAT BENCANA
5541	Belanja Subsidi - Darurat Bencana I
	55411 Belanja Subsidi - Darurat Bencana
	554111 Belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi COVID-19
	554112 Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan - Penanganan Pandemi COVID-19
	554113 Belanja Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi COVID-19
	554114 Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19
	554115 Belanja Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19
	554116 Belanja Subsidi BM-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19
	554117 Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
	554118 Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
	554119 Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19
	55412 Belanja Subsidi - Darurat Bencana II
	554121 Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
	554122 Belanja Subsidi PPnBM Ditanggung Pemerintah - Penanganan Pandemi COVID-19

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
56	BELANJA HIBAH
561	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI
5611	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
56111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
562	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL
5621	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
562111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
563	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
5631	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56311	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56312	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah
563121	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
563122	Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
563123	Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
56313	Belanja Hibah - Darurat Bencana
563131	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
565	BELANJA HIBAH LAINNYA
5651	Belanja Hibah Lainnya
56511	Belanja Hibah Lainnya
565111	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL
571	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
57111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang
571113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Jasa
571114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
571115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
572	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL
5721	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
57211	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
572112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang
572113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Jasa
572114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
572115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19
573	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL
5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
57311	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang
573113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Jasa
573114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
573115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19
574	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
57411	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang
574112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang
574113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jasa
574114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
574115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19
575	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
57511	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang
575112	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang
575113	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Jasa
575114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
575115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19
576	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
57611	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang
576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang
576113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa
576114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
576115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19
576116	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
58	BELANJA LAIN-LAIN
581	BELANJA LAIN-LAIN
5811	Belanja Lain-lain Dana Cadangan
58111	Belanja Lain-lain Cadangan I
581111	Belanja Cadangan Umum
581112	Belanja Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
581113	Belanja Cadangan Dana Reboisasi
581114	Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri
581115	Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah ( <i>Land Capping</i> )
581116	Belanja Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro
581117	Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
581118	Belanja Cadangan Risiko Lifting
581119	Belanja Cadangan Lainnya



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
58112	Belanja Lain-lain Cadangan II
581121	Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)
581122	Belanja Cadangan Beras Pemerintah
581123	Belanja Cadangan Benih Nasional
5812	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
58121	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
581211	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
581212	Belanja Operasional Kegiatan SKK Migas
5813	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
58131	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
581311	Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi
581312	Belanja Jasa Surveyor
581314	Belanja Jasa Pelayanan Bank Operasional
581315	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
581316	Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog
581319	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya
5814	Belanja Lain-lain BUN
58141	Belanja Lain-lain BUN
581411	Belanja Iuran ke Lembaga Internasional
581412	Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua
581413	Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga
581414	Belanja Dana Penunjang (PHLN)
581415	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
581417	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM
581418	Belanja Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum
581419	Belanja Lain-lain BUN Lainnya
58142	Belanja Lain-lain BUN II
581421	Belanja Selisih Harga SBN
581422	Belanja karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/Atase Teknis BA Belanja Lainnya
5815	Belanja Lain-lain Tanggap Darurat
58151	Belanja Lain-lain Tanggap Darurat
581511	Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga
581512	Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
58152	Belanja Lain-Lain - Penanganan Pandemi COVID-19
581521	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19
581522	Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	581523 Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
5816	Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
58161	Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
581611	Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan <i>Exotic Currency</i>
5819	Belanja Lain-lain Lainnya
58191	Belanja Lain-lain Lainnya
581911	Belanja Pemilu
581919	Belanja Lain-lain

**SEGMENT AKUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
6	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
61	DANA BAGI HASIL
611	DANA BAGI HASIL PAJAK
6111	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan
61111	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan
611111	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21
611112	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP
6112	Dana Bagi Hasil PBB
61121	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611211	Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi
611212	Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
611213	Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
611214	Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota
611215	Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota
611216	Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota
612	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
6121	Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi
61211	Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
612111	Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
612112	Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%
612113	Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
6122	Dana Bagi Hasil -SDA Gas Bumi
61221	Dana Bagi Hasil Gas Bumi
612211	Dana Bagi Hasil Gas Bumi
612212	Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%
612213	Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
6123	Dana Bagi Hasil -SDA Pertambangan Umum
61231	Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum
612311	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap
612312	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti
6124	Dana Bagi Hasil -SDA Pertambangan Panas Bumi
61241	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi
612411	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	612412 Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap
	612413 Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
6125	Dana Bagi Hasil -SDA Kehutanan
61251	Dana Bagi Hasil Kehutanan
	612511 Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH
	612512 Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH
	612513 Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi
6126	Dana Bagi Hasil Perikanan
61261	Dana Bagi Hasil Perikanan
	612611 Dana Bagi Hasil Perikanan
613	DANA BAGI HASIL CUKAI
6131	Dana Bagi Hasil Cukai
	61311 Dana Bagi Hasil Cukai
	613111 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
62	DANA ALOKASI UMUM
621	DANA ALOKASI UMUM
6211	Dana Alokasi Umum
	62111 Dana Alokasi Umum
	621111 Dana Alokasi Umum
	621114 Koreksi Dana Alokasi Umum
63	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
631	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
6311	Dana Alokasi Khusus Reguler
	63111 Dana Alokasi Khusus Reguler
	631111 Dana Alokasi Khusus Reguler
	631113 Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler
6312	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan
63121	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan
	631211 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan
6313	Dana Alokasi Khusus Affirmasi
	63131 Dana Alokasi Khusus Affirmasi
	631311 Dana Alokasi Khusus Affirmasi
6314	Tambahan DAK Fisik
	63141 Tambahan DAK Fisik
	631411 Tambahan DAK Fisik

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
64	DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN DANA INSENTIF DAERAH
641	DANA OTONOMI KHUSUS
6411	Dana Otonomi Khusus Aceh
64111	Dana Otonomi Khusus Aceh
641111	Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
6412	Dana Otonomi Khusus Papua
64121	Dana Otonomi Khusus Papua
641211	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
641212	Dana Tambahan Infrastruktur Papua
6413	Dana Otonomi Khusus Papua Barat
64131	Dana Otonomi Khusus Papua Barat
641311	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
641312	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
642	DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
6421	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
64211	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
642111	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
643	DANA INSENTIF DAERAH
6431	Dana Insentif Daerah
64311	Dana Insentif Daerah
643111	Dana Insentif Daerah
65	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
654	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
6541	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
65411	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
654111	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)
654112	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
6542	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
65421	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
654211	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
6543	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
65431	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
654311	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
6545	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
65451	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
654511	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
6546	Dana Darurat
65461	Dana Darurat
654611	Dana Darurat
6547	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
65471	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
654711	Dana Bantuan Operasional Kesehatan
654712	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
65472	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
654721	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
6548	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisataaan
65481	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan
654811	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
654812	Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
654813	Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
654814	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
65482	Dana Pelayanan Kepariwisataaan
654821	Dana Pelayanan Kepariwisataaan
6549	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya
65491	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
654911	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
654912	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan
65492	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya
654921	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya
655	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK II
6552	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
65521	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
655211	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
6553	Dana Fasilitasi Penanaman Modal
65531	Dana Fasilitasi Penanaman Modal
655311	Dana Fasilitasi Penanaman Modal
6554	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
65541	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
655411	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
66 DANA DESA	
662 DANA DESA	
6621 Dana Desa	
66211 Dana Desa	
662111 Dana Desa	

**SEGMENT AKUN PEMBIAYAAN**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
7	PEMBIAYAAN
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
711	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
7111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
71111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
711111	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
711112	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
711113	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
711114	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan
711115	Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU
711116	Penerimaan Pembiayaan SAL <i>Earmark</i>
71112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium
711121	Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan
71121	Penerimaan Kembali Investasi
711211	Penerimaan Hasil Privatisasi
711212	Penerimaan Kembali Investasi pada BUMN
711213	Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
711219	Penerimaan Kembali Investasi Lainnya
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711312	Penerimaan Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Eks. BPPN
711313	Penerimaan Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)
7114	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara
71141	Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara
711411	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Surat Perbendaharaan Negara
711412	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN <i>Non Public Goods</i>
71142	Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara
711421	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Obligasi Negara
711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara
711423	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Obligasi Negara



KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Dalam Rangka Pembiayaan <i>Public Goods</i> Untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19
711424	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan <i>Non-Public Goods</i> Untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19
71144	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang
711442	Penerimaan Imbalan Dibayar Di Muka SBSN - Jangka Panjang
71145	Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah
711451	Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah
71146	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS
711461	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS
7115	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
71151	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
711511	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
7116	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing
71161	Penerimaan Obligasi Negara - Valuta Asing
711611	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Obligasi Negara - Valuta Asing
711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valuta Asing
71162	Penerimaan Surat Perbendaharaan Negara - Valuta Asing
711621	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Surat Perbendaharaan Negara - Valuta Asing
71163	Penerimaan dari Penjualan SPN Syariah Valas
711631	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah Valas
71164	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang
711641	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang
711642	Penerimaan Imbalan Dibayar Di Muka SBSN Valas - Jangka Panjang
71165	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS
711651	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS
7117	Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

KODE AKUN	URAIAN AKUN
71172	Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri
711721	Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah
711722	Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN
711723	Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah
712	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
7121	Penarikan Pinjaman Tunai
71213	Penarikan Pinjaman Tunai
712131	Penarikan Pinjaman Tunai
7122	Penarikan Pinjaman Kegiatan
71226	Penarikan Pinjaman Kegiatan
712261	Penarikan Pinjaman Kegiatan
713	PENERIMAAN DARI PENJADWALAN KEMBALI POKOK UTANG LUAR NEGERI
7131	Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71311	Penerimaan Pinjaman Tunai dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
713111	Penerimaan Pinjaman Tunai dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71312	Penerimaan Pinjaman Kegiatan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
713121	Penerimaan Pinjaman Kegiatan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
714	PENERIMAAN DARI PENJADWALAN KEMBALI BUNGA UTANG LUAR NEGERI
7141	Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
71411	Penjadwalan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
714111	Penerimaan Pembiayaan dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
715	PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN
7151	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri
71511	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda
715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMN
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
7152	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri
71521	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar negeri kepada Daerah Tahun

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Anggaran Berjalan
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
715214	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Non Pemerintah
71522	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Lalu
715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
715222	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
715223	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
717	PENERIMAAN CICILAN POKOK INVESTASI PEMERINTAH
7171	Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah
71711	Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah
717111	Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah
717112	Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi Pemerintah Untuk Pembiayaan Dana Geothermal
71712	Penerimaan Pengembalian Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
717121	Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman PEN Daerah
7172	Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah
71721	Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah
717211	Penerimaan Cicilan atas Penjaminan Pemerintah
717212	Penerimaan atas Pencairan Dana Cadangan Pemerintah
717213	Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
717214	Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19
7173	Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara
71731	Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara
717311	Penerimaan Kembali Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
717312	Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Jangka Panjang
719	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
7192	Penerimaan Piutang Yang Belum Direkonsiliasi
71921	Penerimaan Piutang Yang Belum Direkonsiliasi
719211	Penerimaan Piutang Yang Belum Diidentifikasi
719212	Penerimaan Selisih Piutang ( <i>on Account</i> )
719213	Penerimaan Piutang Yang Belum Disesuaikan
7193	Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
71931	Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
719311	Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
721	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
7211	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
72111	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
721111	Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan
721112	Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
72112	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium
721121	Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7212	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan
72121	Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
721211	Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
72122	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional
721221	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional
7213	Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara
72131	Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
721312	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali
72132	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara
721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara
721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali
721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara
72134	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
721341	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	721342 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	721343 Pengeluaran Pembayaran Imbalan dibayar dimuka Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
72135	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah
	721351 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah
	721352 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah-melalui Pembelian Kembali
7214	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
	72141 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
	721411 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
	721412 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
7215	Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing
	72151 Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara - Valas
	721511 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas
	721512 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali
	721513 Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
72152	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas
	721521 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas
	721522 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas melalui Pembelian Kembali
72153	Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Valas
	721531 Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Valas
	721532 Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Valas melalui Pembelian Kembali
72154	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
	721541 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
	721542 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas-Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	721543 Pembayaran Imbalan Dibayar Di Muka Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
7216	Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri
	72163 Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri
	721631 Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah
	721632 Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN
	721633 Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Perusahaan Daerah
722	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
7221	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai
72211	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai
722113	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai
7222	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan
72221	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan
722213	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan
7224	Pengembalian Pinjaman
72241	Pengembalian Pinjaman
722411	Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i>
723	PELUNASAN POKOK UTANG LUAR NEGERI MELALUI PENJADWALAN KEMBALI
7231	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali - Pinjaman Tunai
72311	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Tunai
723111	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Tunai
7232	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali - Pinjaman Kegiatan
72321	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Kegiatan
723211	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Kegiatan
7233	Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali - Pinjaman Kegiatan
72331	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723311	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
724	PENYERTAAN MODAL NEGARA
7241	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
72411	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
724111	PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
724112	Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN
724113	Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
7242	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
72421	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	724211 Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
7244	Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
	72441 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
	724411 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
7249	Penyertaan Modal Negara Lainnya
	72491 Penyertaan Modal Negara Lainnya
	724911 Penyertaan Modal Negara Lainnya
	724912 Penyertaan Modal Negara SMF
	724913 Penyertaan Modal Negara ke Bank Indonesia
	724914 Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
725	PEMBERIAN PINJAMAN YANG BERSUMBER DARI <i>SUBSIDIARY LOAN AGREEMENT</i>
7251	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri
	72511 Pemberian Pinjaman Dalam Negeri
	725111 Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah
	725112 Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD
	725113 Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMN
	725114 Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
7252	Pemberian Pinjaman Luar Negeri
	72521 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
	725211 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	725212 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
	725213 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
	72522 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
	725221 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
	725222 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
	725223 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
726	DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
	7261 Dukungan Infrastruktur
	72611 Dukungan Infrastruktur
	726111 Dukungan Infrastruktur
727	PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH
	7271 Investasi Pemerintah
	72711 Investasi Pemerintah

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	727111 Investasi Pemerintah
	727112 Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Dana Geothermal
	727113 Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
	727114 Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional
72712	Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah
	727121 Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah
72713	Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset Negara
	727131 Pengeluaran Pembiayaan untuk Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
	727132 Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional
72714	Pengeluaran Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
	727141 Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah
7272	Investasi Pemerintah Untuk Kemudian Dipinjamkan
	72721 Investasi Pemerintah Untuk Kemudian Dipinjamkan Kepada BUMN
	727211 Investasi Pemerintah Untuk Kemudian Dipinjamkan Kepada BUMN
7273	Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah
	72731 Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah
	727311 Pembayaran Penjaminan Pemerintah kepada Pihak Ketiga/ Kreditur
	727312 Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
	727313 Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN – Penanganan Pandemi COVID-19
729	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
	7292 Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	72921 Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	729211 Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
79	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
798	SUSPENSE PEMBIAYAAN
	7981 Suspense Penerimaan Pembiayaan
	79811 Suspense Penerimaan Pembiayaan

1



KODE AKUN	URAIAN AKUN
798111	Suspense Penerimaan Pembiayaan
79812	Suspense Pengeluaran Pembiayaan
798121	Suspense Pengeluaran Pembiayaan

**SEGMENT AKUN TRANSITORIS**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
8	NON ANGGARAN
81	PENERIMAAN NON ANGGARAN
811	PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK
8111	Penerimaan PFK 10 % Gaji
81111	Penerimaan PFK 10% Gaji Pemerintah Daerah
811113	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah
811114	Penerimaan Setoran/Potong Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 8% Gaji PNS Daerah
811115	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota
811116	Penerimaan Setoran PFK 8% Gaji Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota
81113	Penerimaan PFK 10% Gaji Pemerintah Pusat
811131	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
811132	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat
811133	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri
811134	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan
811135	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PNS Pusat
811136	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Anggota Polri dan PNS Polri
811137	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Prajurit TNI dan PNS Kemhan
811138	Penerimaan Setoran/Potong PFK 8% Gaji Pejabat Negara
81114	Penerimaan Setoran/Potong Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN
811141	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN Pemerintah Pusat
811142	Penerimaan Setoran/Potong PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS-APBN
811143	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN pada Satker BLU yang berasal dari Pendapatan BLU
811144	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN dari Satker BLU selaku Pemberi Kerja
811145	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPK pada Satker BLU yang berasal dari Pendapatan BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	811146 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dari Satker BLU selaku Pemberi Kerja
	811147 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Pemerintah Pusat
81115	Penerimaan Setoran/Potongannya Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBD
	811151 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN Pemerintah Daerah
	811152 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja
	811153 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Pemerintah Daerah
	811154 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja
81116	Penerimaan Setoran/Potongannya Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara
	811161 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara
	811162 Penerimaan Setoran/Potongannya PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pejabat Negara
81117	Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pihak Ketiga
	811171 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara dari PT. Taspen
	811172 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri dari PT Asabri
81118	Penerimaan Setoran / Potongannya Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Daerah
	811181 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
	811182 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja
8112	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
	81121 Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
	811212 Penerimaan Setoran / Potongannya PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
8113	Penerimaan PFK Beras BULOG
	81131 Penerimaan PFK Beras BULOG
	811311 Penerimaan Setoran / Potongannya PFK Bulog PNS Pusat
	811312 Penerimaan Setoran / Potongannya PFK Bulog Polri & PNS POLRI
	811313 Penerimaan Setoran/ Potongannya PFK Bulog TNI & PNS Dephan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
8114	Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah
81141	Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah
811411	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi selaku Pemberi Kerja
811412	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Pemberi Kerja
8115	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
81151	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
811511	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
8116	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
81161	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat bagian Pekerja Pemerintah Pusat
811611	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PNS Pusat
811612	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PNS Kemhan
811613	Penerimaan Potongan Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PNS Kepolisian RI
811614	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Prajurit TNI
811615	Penerimaan Potongan Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Anggota Kepolisian RI
811616	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pejabat Negara di Pusat
811617	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PPPK Pusat
81162	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat bagian Pekerja Pemerintah Daerah
811621	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PNS Daerah
811622	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pejabat Negara di Daerah
811623	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PPPK Daerah
81163	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat bagian Pemberi Kerja Pemerintah Daerah

KODE AKUN	URAIAN AKUN
811631	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja PNS Daerah
811632	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pejabat Negara di Daerah
811633	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja PPPK Daerah
8117	Penerimaan Setoran/Potong PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain
81171	Penerimaan Setoran/Potong PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga yang Lain
811711	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PNS Pusat
811712	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Anggota Polri dan PNS Polri
811713	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Prajurit TNI dan PNS Kemhan
811714	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PNS Daerah
811715	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Pejabat Negara
811716	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota
811717	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Pimpinan dan Anggota DPRD
811718	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PPNPN Pusat
811719	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PPPK Pusat
81172	Penerimaan Setoran/Potong PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga yang Lain II
811721	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PPNPN Daerah
811722	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PPPK Daerah
8118	Penerimaan PFK Penutupan Rekening
81181	Penerimaan PFK Penutupan Rekening
811811	Penerimaan Setoran Penutupan Rekening
8119	Penerimaan PFK Lain-lain
81192	Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu
811921	Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu

KODE AKUN	URAIAN AKUN
81193	Penerimaan Setoran PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah
811931	Penerimaan Dana PFK Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi
811932	Penerimaan Dana PFK Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota
812	PENERIMAAN WESEL PEMERINTAH
8121	Penerimaan Wesel Pemerintah
81211	Penerimaan Wesel Pemerintah
812111	Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN
812112	Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP
813	PENERIMAAN REIMBURSEMENT DALAM RANGKA PREFINANCING (PP) DAN PFK BUN LAINNYA
8131	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
81311	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
813116	Penggantian Dana dari Reksus ke Rekening BUN karena Prefinancing Reksus
813117	Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran <i>ineligible</i> )
813118	Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan Reksus Kosong
81312	Penerimaan Dana Talangan
813122	Penerimaan Dana Talangan dari dana Moratorium
813123	Penerimaan Dana Talangan dari Rekening Lainnya
813124	Penerimaan Pengembalian Dana Talangan ke rekening lainnya
813125	Penerimaan Talangan Dana Cadangan Subsidi
813126	Penerimaan Talangan Dana Cadangan DBH
813127	Penerimaan Talangan Dana Cadangan PMN
815	PENERIMAAN TRANSITO
8151	Penerimaan Transito
81511	Penerimaan Transito
815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan
815113	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)
815114	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
815115	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
81512	Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN
815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	815122 Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL
81513	Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
	815131 Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
81514	Penerimaan Atas Transaksi Pemindahan Kas Antar BLU
	815141 Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU Dari BLU Lain
8153	Penerimaan Persekot/ Uang Muka
	81532 Penerimaan Uang Muka Transfer
	815321 Penerimaan Uang Muka Dana Perimbangan
	815322 Penerimaan Uang Muka Dana Otonomi Khusus
8154	Suspense Currency Loan
	81541 Suspense <i>Currency Loan</i>
	815411 Suspense <i>Currency Loan</i>
8155	Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan
	81551 Penerimaan Transito Uang Persediaan
	815511 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
	815513 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)
	815514 Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
	815515 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
8156	Penerimaan <i>Escrow</i>
	81561 Penerimaan <i>Escrow</i>
	815611 Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Reboisasi
	815612 Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Subsidi/PSO
	815613 Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Bagi Hasil SDA
	815614 Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Penyertaan Modal Negara
	815615 Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan
	815616 Penerimaan Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
	815617 Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Penjaminan
	815618 Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
	815619 Penerimaan Non Anggaran Dana Cadangan Alutsista
81562	Penerimaan Pengembalian <i>Escrow</i>
	815621 Penerimaan Pengembalian <i>Escrow</i> Pajak
	815622 Penerimaan Pengembalian <i>Escrow</i> PNB

↑

KODE AKUN	URAIAN AKUN
81563	Penerimaan Escrow II
815631	Penerimaan Pemindahbukuan Dana Investasi Pemerintah PEN dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia
815632	Penerimaan Nonanggaran Penyetoran Penyelesaian Pokok dan/atau Hasil Investasi Pemerintah Dalam Bentuk Kas Ke Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia
8157	Transito Diskonto Surat Berharga Negara
81571	Transito Diskonto Surat Berharga Negara
815711	Penerimaan Transito Diskonto Surat Berharga Negara
8158	Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemerintah
81581	Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman
815811	Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman
816	KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN
8161	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
81611	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
816111	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
8162	Penerimaan Jasa Perbankan
81621	Penerimaan Jasa Perbankan
816211	Penerimaan Jasa Perbankan
8163	Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan
81631	Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan
816311	Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan
817	PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA
8171	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
81711	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
817111	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening
817113	Penerimaan Non Anggaran setoran dana rekening retur ke kas negara
81712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan
817121	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan
8172	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya
81721	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam
817211	Penerimaan Setoran Migas
817212	Penerimaan Setoran Pertambangan
817213	Penerimaan Setoran Panas Bumi
817214	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	817215 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN
	817216 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	817217 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Penggantian Bonus Produksi
	817218 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
81722	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
	817221 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
	817222 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel Online
81723	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya
	817231 Penerimaan dari Aset Lainnya (Rek.Dana Talangan)
	817232 Penerimaan dari Aset Lainnya (Rek.Bapertarum)
	817233 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu
	817234 Penerimaan dari Aset Lainnya
8173	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas
81731	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas
	817311 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
	817312 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	817313 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Lainnya
	817314 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Fee KKKS
	817315 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
	817316 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
	817317 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Fee BP Migas
	817318 Penerimaan Pihak Ketiga Migas - Fee Penjualan Migas Bagian Negara
81732	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito I
	817321 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
	817322 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
	817323 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
	817324 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	817325 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
	817326 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
	817327 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
	817328 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
	817329 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Migas Lainnya
81733	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito II
	817331 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
8174	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas
81741	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas
	817411 Penerimaan Pihak Ketiga Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
	817412 Penerimaan Pihak Ketiga Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas
	817413 Penerimaan Pihak Ketiga Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
	817414 Penerimaan Pihak Ketiga Penerbitan Surat Utang Negara
	817415 Penerimaan Pihak Ketiga-Penjualan SPN
	817416 Penerimaan Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
	817417 Penerimaan Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN
	817418 Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi
	817419 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN
81742	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito
	817421 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito - Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	817422 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito - Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
81743	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Panas Bumi
	817431 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
8175	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus
81751	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman
	817511 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
	817512 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
81752	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Khusus Hibah
817521	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri
8176	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya
81761	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum I
817611	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
817612	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817613	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
817614	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
817615	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i>
817616	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i>
817617	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah
817619	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
81762	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN
817621	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
817622	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817623	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen
817624	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	dalam Valuta Euro
817626	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
817627	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
817628	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Bunga Reverse Repo Ditangguhkan
817629	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
81763	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo
817631	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
817632	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817633	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
817634	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
817639	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
81764	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo
817641	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
817642	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817643	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
817644	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
817649	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
81765	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah
817651	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD
817652	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening

KODE AKUN	URAIAN AKUN
817653	Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro
817659	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya
81766	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817661	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah
817662	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen
817663	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro
817669	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya
81767	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
817671	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah
817672	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD
817673	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro
817679	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya
81768	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
817681	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah
817682	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD
817683	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen
817689	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya
81769	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum II
817691	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i>
817692	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i>
8177	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya
81771	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya
817711	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok
817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang
817713	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
817714	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
817715	Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan
817716	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan
817717	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa
817718	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN
8179	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
81791	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	817911 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
818	PENERIMAAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK
8181	Kiriman Uang antar Rekening Bank
81811	Kiriman Uang antar Rekening Bank
818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank
82	PENGELUARAN NON ANGGARAN
821	PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK
8211	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10% Gaji
82113	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10% Gaji
821131	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai
821132	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Taspen
821133	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Taspen
821134	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Asabri
821135	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Asabri
8212	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
82121	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
821211	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara
821212	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
821213	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri
8213	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
82131	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
821311	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
821312	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri
821313	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan
8214	Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan
82141	Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan
821411	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja
8215	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
82151	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	PTT
	821511 Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
8216	Pengembalian Penerimaan PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
82161	Pengembalian Penerimaan PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
821611	Pengeluaran Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pemerintah Pusat
821612	Pengeluaran Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pemerintah Daerah
821613	Pengeluaran Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pemerintah Daerah
8217	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji
82171	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji
821711	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain
8218	Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening
82181	Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening
821811	Pengembalian Penerimaan Setoran Penutupan Rekening Pihak Ketiga
8219	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
82191	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS
821911	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
821912	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
82192	Pengembalian Penerimaan PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
821921	Pengeluaran Dana PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah
822	PELUNASAN WESEL PEMERINTAH
8221	Pelunasan Wesel Pemerintah
82211	Pelunasan Wesel Pemerintah
822111	Pelunasan Wesel Pemerintah
823	PEMBAYARAN PFK PREFINANCING DAN PFK BUN LAINNYA
8231	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
82311	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
823116	Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
823117	Pengisian Rekening Dana SAL
823118	Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus



KODE AKUN	URAIAN AKUN
	kosong
82312	Pengembalian Dana Talangan
823122	Pengembalian Dana Talangan ke dana moratorium
823123	Pengeluaran dana talangan dari rekening lainnya
823124	Pengembalian dana talangan ke rekening lainnya
823125	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan Subsidi
823126	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan DBH
823127	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan PMN
825	PENGELUARAN TRANSITO
8251	Pengeluaran Transito
82511	Pengeluaran Transito
825111	Pengeluaran Uang Persediaan
825113	Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)
825114	Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
825115	Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
82512	Pengembalian Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN
825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU
825122	Pengembalian Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL
82513	Pengeluaran penysetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
825131	Pengeluaran penysetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
82514	Pengeluaran Atas Transaksi Pemindahan Kas Antar BLU
825141	Pengeluaran Atas Transfer Keluar Kas BLU Kepada BLU Lain
8252	Suspense TUP
82521	Suspense TUP
825211	Suspense TUP
8253	Pengeluaran Persekot/Uang Muka
82532	Pengeluaran Uang Muka Transfer
825321	Pengeluaran Uang Muka Dana Perimbangan
825322	Pengeluaran Uang Muka Dana Otonomi Khusus
8255	Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan
82551	Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan
825511	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan
825513	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)
825514	Pengeluaran Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	825515 Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
8256	Pengeluaran Escrow
82561	Pengeluaran Escrow
825611	Pengeluaran Escrow Dana Reboisasi
825612	Pengeluaran Escrow Dana Subsidi/PSO
825613	Pengeluaran Escrow Dana Bagi Hasil SDA
825614	Pengeluaran Escrow Dana Penyertaan Modal Negara
825615	Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan
825616	Pengeluaran Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
825617	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Penjaminan
825618	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
825619	Pengeluaran Non Anggaran Dana Cadangan Alutsista
82562	Pengeluaran Pengembalian Escrow
825621	Pengeluaran Pengembalian Escrow Pajak
825622	Pengeluaran Pengembalian Escrow PNPB
82563	Pengeluaran Escrow II
825631	Pengeluaran Nonanggaran Pemindahbukuan Dana Investasi Pemerintah PEN dari Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia ke Rekening Kas Umum Negara
825632	Pengeluaran Nonanggaran Pencairan Dana Investasi Pemerintah PEN dari Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia ke Rekening Penerima Investasi
8257	Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara
82571	Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara
825711	Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara
8258	Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemerintah
82581	Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman
825811	Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman
826	KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN
8261	Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan
82611	Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan
826111	Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan
827	PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA
8271	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga
82711	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga
827111	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	kesalahan Rekening
827113	Pengeluaran Non Anggaran Pembayaran Kembali Retur kepada Pihak Ketiga
82712	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan
827121	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan
8272	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya
82721	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam
827211	Pengeluaran Setoran Migas
827212	Pengeluaran Setoran Pertambangan
827213	Pengeluaran Setoran Panas Bumi
827214	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pembayaran Kembali Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya
827215	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN
827216	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
827217	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pengembalian Bonus Produksi
827218	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
82722	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
827221	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
827222	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel Online
82723	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya
827231	Pengeluaran ke Aset Lainnya (Rek.Dana Talangan)
827232	Pengeluaran ke Aset Lainnya (Rek.Bapertarum)
827233	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu
827234	Pengeluaran dari Aset Lainnya
8273	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas
82731	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas
827311	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
827312	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
827313	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Lainnya
827314	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	DMO Fee KKKS
827315	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPh KKKS
827316	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
827317	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Fee BP Migas
827318	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas - Fee Penjualan Migas Bagian Negara
82732	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito I
827321	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
827322	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
827323	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
827324	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
827325	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
827326	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
827327	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Dalam Negeri
827328	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
827329	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Migas Lainnya
82733	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito II
827331	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
8274	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas
82741	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas
827411	Pengeluaran Pihak Ketiga Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
827412	Pengeluaran Pihak Ketiga Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas
827413	Pengeluaran Pihak Ketiga Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
827414	Pengeluaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Utang Negara
827415	Pengeluaran Pihak Ketiga-Penjualan SPN
827416	Pengeluaran Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
827417	Pengeluaran Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN
827418	Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi
827419	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi-

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Reimbursement PPN
82742	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito
827421	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
827422	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
82743	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Panas Bumi
827431	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
8275	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus
82751	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman
827511	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam Negeri
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
82752	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah
827521	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri
8276	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya
82761	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum I
827611	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah
827612	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
827613	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
827614	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
827615	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i>
827616	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i>

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	827617 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah
	827619 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
82762	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN
	827621 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	827622 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	827623 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	827624 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	827626 Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
	827627 Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
	827628 Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Bunga Reverse Repo Ditangguhkan
	827629 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
82763	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo
	827631 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	827632 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	827633 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	827634 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	827639 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
82764	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo
	827641 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah

KODE AKUN	URAIAN AKUN
827642	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
827643	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen
827644	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
827649	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
82765	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah
827651	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD
827652	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen
827653	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro
827659	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya
82766	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
827661	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah
827662	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen
827663	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro
827669	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya
82767	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
827671	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	827672 Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD
	827673 Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro
	827679 Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya
82768	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	827681 Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah
	827682 Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD
	827683 Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen
	827689 Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya
82769	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum II
	827691 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i>
	827692 Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i>
8277	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya
82771	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya
	827711 Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok
	827712 Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang
	827713 Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas



KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
827714	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
827715	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan
827716	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan
827717	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa
827718	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN
8279	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
82791	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
827911	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
828	PENGELUARAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK
8281	Kiriman Uang antar Rekening Bank
82811	Kiriman Uang antar Rekening Bank
828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank
83	OUTPUT KINERJA
831	OUTPUT KINERJA
8311	Output Kinerja
83111	Output Kinerja
831111	Output Kinerja

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



*Hadiyanto*  
HADIYANTO Cy

**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN NERACA-KAS**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>ASET</b>
	Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>
	Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
<b>111</b>	<b>KAS DAN SETARA KAS</b>
	Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
<b>1111</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah
<b>11111</b>	<b>Kas di Bank Indonesia dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat kas yang ada di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah
<b>111111</b>	<b>Kas di Rekening KUN dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN dalam Rupiah 502.000000980
<b>111112</b>	<b>Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 500.000000980
<b>111113</b>	<b>Kas di Rekening SAL</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening SAL
<b>111114</b>	<b>Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong
<b>111115</b>	<b>Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah 518.000122980
<b>111116</b>	<b>Kas di Rekening Antara Reksus</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Antara Reksus
<b>111117</b>	<b>Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah
<b>111118</b>	<b>Kas di Rekening SUBBUN Talangan</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Sub BUN Talangan
<b>111119</b>	<b>Kas di Rekening Penampungan Pendapatan Rekening Pembangunan Hutan</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>11112</b>	<b>Kas di Rekening Sub RKUN</b>
111121	Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat pelimpahan penerimaan negara dari seluruh bank persepsi ke Rekening sub RKUN penerimaan. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111122	Kas di Rekening Sub RKUN Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran pinjaman luar negeri dan transaksi SP2D Valas. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111123	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah
<b>11113</b>	<b>Kas di Rekening Surat Utang Negara</b>
111131	Kas di Rekening Penerimaan Surat Utang Negara
	Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari penerbitan SUN. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111132	Kas di Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara
	Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran cicilan kupon atau pelunasan SUN. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
<b>11114</b>	<b>Kas di Rekening Persepsi Pusat</b>
111141	Kas di Rekening Persepsi Pusat
	Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan dari bank persepsi. Rekening ini dibuat pada bank umum dan PT Pos dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111142	Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
<b>11115</b>	<b>Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-SPAN</b>
111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
<b>1112</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing</b>
<b>11121</b>	<b>Kas di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
111211	Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD
111212	Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
111213	Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya 600.000411980
111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing

AKUN	PENJELASAN
111215	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD 608.001411980
111216	Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen 600.502111980
111217	Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen 608.000111980
111218	Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro 600.502991980
111219	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro 608.000991980
<b>11122</b>	<b>Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing</b>
111221	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
111222	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
111223	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
<b>11123</b>	<b>Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas</b>
111231	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas USD - Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas USD - Non Gaji
111232	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas Euro - Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas EURO - Non Gaji
<b>1113</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya</b>
<b>11131</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia</b>
111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> .
111319	Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
<b>11132</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum</b>
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
111322	Kas Pemerintah yang ada di K/L
	Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di K/L
111323	Kas Pemerintah yang ada di BLU
	Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di BLU
111324	Kas di Rekening PFK
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening PFK
111325	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
111326	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Hibah luar negeri bencana alam
	Digunakan untuk mencatat transaksi pinjaman dan hibah luar negeri melalui rekening khusus. Rekening ini dimiliki oleh satker Direktorat Pengelolaan Kas negara (PKN). Akun ini terdiri dari rekening khusus yang dibuat di Bank Indonesia dan Bank Umum.
111327	Kas di Rekening PHLN
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening PHLN
111328	Kas di Rekening Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Dana Bergulir
111329	Kas lainnya
	Digunakan untuk mencatat Kas lainnya
<b>11134</b>	<b>Kas di Rekening Retur Kuasa BUN</b>
111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji.
111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji.
111343	Kas di Rekening Retur Reksus Pinjaman/Hibah/Surat Berharga Syariah Negara

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Pinjaman/Hibah/Surat Berharga Syariah Negara.
<b>1114</b>	<b>Kas di Rekening Kas di KPPN</b>
<b>11141</b>	<b>Kas di Bank Indonesia</b>
111411	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
111412	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah
<b>11142</b>	<b>Kas di Bank Umum</b>
111421	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
111422	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
111423	Kas di Rekening Retur BO/Pos (KPPN)
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BO/BO KPPN
<b>11143</b>	<b>Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
111431	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD
111432	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen
111433	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro
<b>11144</b>	<b>Kas KPPN di Bank Umum dalam Valuta Asing</b>
111441	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) dalam Valuta USD.
<b>11145</b>	<b>Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah</b>
111451	Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah.
<b>11146</b>	<b>Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing</b>
111461	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD.
111462	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen.
111463	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro.
111469	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>1115</b>	<b>Kas dalam Transito</b>
<b>11151</b>	<b>Kas dalam Transito - BUN</b>
111511	Kas dalam Transito - BUN

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat selisih kiriman uang/pemindahbukuan antara pengeluaran dan penerimaan pada BUN.
111512	Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/Hibah
	Digunakan untuk mencatat Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/Hibah
111513	Kas dalam Transito TUP
	Akun antara pada SPAN untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban TUP satker. Akun ini adalah akun yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan menghubungkan pembayaran GTUP Nihil dengan pemotongan dana TUP ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111514	Kas dalam Transito UP
	Akun antara untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban UP satker. Akun ini adalah akun yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan menghubungkan pembayaran GUP Nihil dengan pemotongan dana UP ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111515	Kas dalam Transito BLU
	Akun antara untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban UP satker. Akun ini adalah akun yang tidak memiliki nomor rekening bank dan menghubungkan pembayaran Pengesahan Transaksi BLU ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111516	Kas dalam Transito-Transaksi Non Kas
	Akun antara yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan dibutuhkan untuk menciptakan aliran kas masuk dan keluar pada proses transaksi hibah non kas. Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111517	Kas dalam Transito-Transaksi DTP
	Digunakan untuk mencatat proses in out dari penerimaan pajak ditanggung pemerintah. Jika menggunakan akun kas ini maka tidak akan masuk LAK.
111519	Kas dalam Transito Lainnya
	Akun antara untuk mencatat pertanggungjawaban transaksi transito yang melalui modul Penerimaan dan Pembayaran. Akun ini menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) yang ada pada segmen bank.
<b>11152</b>	<b>Kas dalam Transito - K/L</b>
111521	Kas dalam Transito - Perwakilan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat kiriman sisa UP/Kas di Bendahara Pengeluaran Satket Perwakilan RI di luar negeri yang sudah disetorkan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima.
<b>1116</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
<b>11161</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
<b>1117</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
<b>11171</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
111711	Kas di Bendahara Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara.
<b>1118</b>	<b>Kas Lainnya dan Setara Kas</b>
<b>11181</b>	<b>Setara Kas</b>
111811	Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat setara kas Surat Berharga
111812	Penempatan di Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat setara kas Penempatan di Bank Umum, termasuk penempatan setara kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN
111813	Reverse Repo
	Digunakan untuk mencatat setara kas Reverse Repo
111814	<i>Foreign Exchange</i>
	Digunakan untuk mencatat setara kas transaksi <i>Foreign Exchange</i> .
111819	Setara Kas lainnya
	Digunakan untuk mencatat Setara Kas lainnya
<b>11182</b>	<b>Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga</b>
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya dan Setara Kas, yang mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.
111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Langsung yang telah disahkan.
111823	Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi
	Digunakan untuk mencatat reklasifikasi Kas Besi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satker Perwakilan RI di Luar Negeri selama Uang Persediaan belum diterima. Digunakan pada BA Kementerian Luar Negeri (011).
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat kas lainnya di bendahara penerimaan yang berasal dari



AKUN	PENJELASAN
	penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan.
111826	Kas Lainnya di BLU
	Digunakan untuk mencatat saldo Kas BLU yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU, seperti dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA Rupiah Murni dan/atau DIPA PNB
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Kas di K/L dari hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan
<b>1119</b>	<b>Kas pada Badan Layanan Umum</b>
<b>11191</b>	<b>Kas - BLU</b>
111911	Kas dan Bank - BLU
	Digunakan untuk mencatat Kas Pada BLU, yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di BLU (yang sudah disahkan BUN).
111912	Dana yang akan Dijaminkan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan Dijaminkan - BLU
111913	Dana yang akan dipadankan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan dipadankan - BLU
111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
<b>11192</b>	<b>Setara Kas - BLU</b>
111921	Surat Berharga - BLU
	Digunakan untuk mencatat Surat Berharga - BLU
111929	Setara kas Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Setara kas Lainnya - BLU
<b>112</b>	<b>UANG MUKA REKENING BUN</b>
<b>1121</b>	<b>Uang Muka Dari Rekening KUN</b>
<b>11211</b>	<b>Uang Muka KUN UP</b>
112111	Uang Muka KUN UP - PP
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka KUN UP - PP
<b>1122</b>	<b>Uang Muka Dari Rekening Khusus</b>
<b>11221</b>	<b>Uang Muka Reksus UP</b>
112211	Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
<b>11222</b>	<b>Uang Muka Reksus Non UP</b>
112221	Uang Muka Reksus Kosong
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Reksus Kosong
<b>1123</b>	<b>Talangan kepada RKUN</b>
<b>11231</b>	<b>Talangan kepada RKUN</b>
112311	Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
112312	Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
112313	Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
<b>113</b>	<b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>
<b>1131</b>	<b>Investasi dalam Deposito</b>
<b>11311</b>	<b>Investasi dalam Deposito</b>
113111	Investasi dalam Deposito Jangka Pendek
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Deposito Jangka Pendek, termasuk penempatan investasi jangka pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN.
<b>1132</b>	<b>Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara</b>
<b>11321</b>	<b>Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara</b>
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
113211	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
<b>11322</b>	<b>Investasi Jangka Pendek pada Surat Berharga Negara</b>
113221	Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka stabilisasi pasar
	Digunakan untuk mencatat Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka stabilisasi pasar
113222	Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka optimalisasi kas
	Digunakan untuk mencatat Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka optimalisasi kas
<b>1133</b>	<b>Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum</b>
<b>11331</b>	<b>Deposito Jangka Pendek - BLU</b>
113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
113319	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
	Digunakan untuk mencatat Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
<b>1134</b>	<b>Bagian Lancar Investasi Non Permanen</b>
<b>11341</b>	<b>Bagian Lancar Investasi Non Permanen</b>
113411	Bagian Lancar Investasi Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Investasi Non Permanen.
<b>1139</b>	<b>Investasi Jangka Pendek Lainnya</b>
<b>11391</b>	<b>Investasi Jangka Pendek Lainnya</b>
113911	Investasi Jangka Pendek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Pendek Lainnya

AKUN	PENJELASAN
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>211</b>	<b>UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA</b>
<b>2111</b>	<b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga</b>
<b>21111</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) I</b>
	Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pungutan Iuran Askes, Bulog, Taspen/Asabri dan Taperum serta badan lainnya. Termasuk akun ini antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bulog, Bapertarum, dan Askes.
211111	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
211112	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
211113	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
211114	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji
211115	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan
211116	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
211117	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
211118	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT

AKUN	PENJELASAN
211119	Utang Dana PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
<b>21112</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya</b>
211121	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
211122	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat Bagian penerimaan PFK Penutupan rekening sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
211123	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga Wesel Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga Wesel Pemerintah
<b>21115</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) II</b>
211151	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 8% Gaji TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada PT Asabri.
211152	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja pemerintah pusat
211153	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja pemerintah daerah.
211154	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pemberi Kerja Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pemberi Kerja pemerintah daerah.
211155	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan.
211156	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG.
<b>21116</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga PFK Setoran Pajak Rokok dan Pengalihan Piutang</b>
211161	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga setoran pajak rokok dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga setoran pajak rokok.
211162	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengalihan Piutang
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga pengalihan piutang dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga pengalihan piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah induk yang tidak

AKUN	PENJELASAN
	memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.
211163	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank dalam Likuidasi.
211164	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga pemotongan DAU atau DBH dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD).
211165	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Kontribusi Penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga kontribusi Penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan dan pengeluaran non anggaran setoran kontribusi penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan.
211166	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa dan pengeluaran non anggaran pihak ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa.
<b>219</b>	<b>UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</b>
	Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di Muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan dan utang jangka pendek lainnya.
<b>2193</b>	<b>Uang Muka Rekening Khusus</b>
<b>21931</b>	<b>Uang Muka Rekening Khusus</b>
219311	Uang Muka Rekening Khusus
	Digunakan untuk mencatat Uang muka dari rekening khusus (valas)
<b>2194</b>	<b>Uang Muka</b>
<b>21941</b>	<b>Uang Muka dari KUN</b>
219411	Uang Muka dari KUN
	Digunakan untuk mencatat uang muka dari kas umum negara yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
219412	Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga
<b>2195</b>	<b>Uang Muka dari KPPN</b>
<b>21951</b>	<b>Uang Muka dari KPPN</b>
219511	Uang Muka dari KPPN
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari KPPN (uang persediaan dan tambahan uang persediaan) yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
<b>2197</b>	<b>Utang Kepada KUN</b>
<b>21971</b>	<b>Utang Kepada KUN</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
219711	Utang Kepada KUN
	Digunakan untuk mencatat utang-utang kepada Kas Umum Negara
<b>21972</b>	<b>Utang Kepada kas BLU</b>
219721	Utang Kepada kas BLU
	Digunakan untuk mencatat Utang kepada Kas BLU.
<b>2198</b>	<b>Utang Kepada RPL</b>
<b>21981</b>	<b>Utang Kepada RPL</b>
219811	Utang Kepada RPL
	Digunakan untuk mencatat utang-utang kepada Rekening Pemerintah Lainnya
<b>21982</b>	<b>Utang Talangan</b>
219821	Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
219822	Utang Talangan Dana Cadangan DBH
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan DBH
219823	Utang Talangan Dana Cadangan PMN
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan PMN
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>
	Digunakan untuk mencatat pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
<b>31</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>311</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>3111</b>	<b>SAL</b>
<b>31111</b>	<b>SAL</b>
311111	SAL
	Digunakan untuk mencatat SAL sebagai akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.
311112	Penggunaan SAL
	Digunakan untuk mencatat penggunaan SAL.
311113	Penggunaan SAL Earmark
	Digunakan untuk mencatat Penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Earmark.
<b>3112</b>	<b>SILPA</b>
<b>31121</b>	<b>SILPA</b>
311211	SILPA
	Digunakan untuk mencatat SILPA sebagai selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.
311212	Koreksi pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Koreksi pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu
311213	Koreksi belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Koreksi belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
311214	Surplus/Defisit
	Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
311215	Pembiayaan Netto
	Digunakan untuk mencatat Pembiayaan Netto
<b>3113</b>	<b>SAL dan SILPA BLU</b>
<b>31131</b>	<b>SAL - BLU</b>
311311	SAL - BLU
	Digunakan untuk mencatat SAL - BLU
311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU
	Digunakan untuk mencatat SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU
311314	Penggunaan SAL BLU
	Digunakan untuk mencatat Penggunaan SAL BLU
311315	Penyesuaian SAL BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyesuaian SAL BLU
<b>31132</b>	<b>SILPA BLU</b>
311321	SILPA BLU
	Digunakan untuk mencatat SILPA BLU
<b>3117</b>	<b>Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi</b>
<b>31171</b>	<b>Selisih Kurs</b>
311711	Selisih Kurs
	Digunakan untuk mencatat Selisih Kurs belum terealisasi sebelum direklas menjadi akun pendapatan LO/Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<b>3119</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar Lainnya</b>
<b>31191</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung</b>
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
<b>39</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>391</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>3911</b>	<b>Ekuitas</b>
<b>39114</b>	<b>Ekuitas Surplus BLU</b>
391141	Setoran Surplus BLU
	Digunakan untuk mencatat Setoran Surplus BLU
391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU lain
	Digunakan untuk mencatat transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transfer Kas BLU dari Kementerian Keuangan
391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU lain
	Digunakan untuk mencatat transfer masuk Kas BLU dari BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transfer Kas BLU dari Kementerian Keuangan
<b>399</b>	<b>EKUITAS KONSOLIDASI BUN</b>
<b>3999</b>	<b>Ekuitas Konsolidasi BUN</b>

AKUN	PENJELASAN
<b>39991</b>	<b>Ekuitas Konsolidasi BUN I</b>
399911	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual dari Kas BP KL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga pada Neraca BUN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399912	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual dari Kas BLU KL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari Pencatatan Kas Badan Layanan Umum Kementerian Negara/Lembaga pada Neraca BUN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399913	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual dari Kas Hibah KL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari Pencatatan Kas Hibah Kementerian Negara/Lembaga pada Neraca BUN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399914	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Akun Non Anggaran TAYL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari Pencatatan nilai akun non anggaran TAYL untuk kebutuhan perhitungan SAL. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399915	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Akun Aset/Kewajiban
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari Pencatatan nilai akun non anggaran TAYL untuk kebutuhan perhitungan SAL. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399916	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas BUN
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas BUN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399917	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas RPL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas RPL. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399918	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas KPPN
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas KPPN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399919	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas BLU
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas BLU. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
<b>39992</b>	<b>Ekuitas Konsolidasi BUN II</b>
399921	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas Hibah
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas Hibah. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399922	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas Transitoris
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas Transitoris. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399923	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas <i>Escrow</i>
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas <i>Escrow</i> . Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.



**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN PENDAPATAN-LRA**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>
<b>411</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI</b>
<b>4111</b>	<b>Pendapatan Pajak Penghasilan</b>
<b>41111</b>	<b>Pendapatan PPh Migas</b>
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari PPh minyak bumi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran PPh Minyak Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB PPh Minyak Bumi; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Minyak Bumi.</li> </ul>
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan ke kas negara yang berasal PPh gas bumi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran PPh Gas Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB PPh Gas Bumi; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Gas Bumi.</li> </ul>
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran PPh Lainnya dari Gas Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Bumi;</li> <li>- SKPKB PPh Lainnya dari Gas Bumi; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Bumi.</li> </ul>
<b>41112</b>	<b>Pendapatan PPh Non-Migas</b>
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa/Angsuran Tahunan;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua,</li> <li>- Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);</li> <li>- SKPKB PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua,</li> <li>- Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon;</li> <li>- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);</li> <li>- SKPKBT PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua,</li> <li>- Uang Tebusan Pensiun, dan</li> <li>- Uang pesangon.</li> </ul>

AKUN	PENJELASAN
411122	<p>Pendapatan PPh Pasal 22</p> <p>Penerimaan dari transaksi dalam negeri yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa;</li><li>- PPh Penebusan Migas;</li><li>- PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri;</li><li>- PPh yang dipungut Bendaharawan; PPh yang dipungut Badan Pemungut Lainnya;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- SKPKB; SKPKB PPh Penebusan Migas;</li><li>- SKPKB PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri;</li><li>- SKPKBT;</li><li>- SKPKBT PPh Penebusan Migas; dan</li><li>- SKPKBT PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri.</li></ul>
411123	<p>Pendapatan PPh Pasal 22 Impor</p> <p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- SKPKB;</li><li>- SKPKBT.</li></ul>
411124	<p>Pendapatan PPh Pasal 23</p> <p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa;</li><li>- Dividen;</li><li>- Bunga;</li><li>- Royalti;</li><li>- Jasa;</li><li>- PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- STP Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa;</li><li>- SKPKB;</li><li>- SKPKB Dividen, Bunga Royalti dan Jasa;</li><li>- SKPKB PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi;</li><li>- SKPKBT;</li><li>- SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti dan Jasa; dan</li><li>- SKPKBT PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi.</li></ul>
411125	<p>Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi</p> <p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa/Angsuran;</li></ul>

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahunan;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB; dan</li> <li>- SKPKBT.</li> </ul>
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa/Angsuran;</li> <li>- Tahunan;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB; dan</li> <li>- SKPKBT.</li> </ul>
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa/Angsuran;</li> <li>- Dividen;</li> <li>- Bunga;</li> <li>- Royalti;</li> <li>- Jasa;</li> <li>- Laba setelah pajak BUT;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- STP Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT;</li> <li>- SKPKB;</li> <li>- SKPKB Dividen, Bunga Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT;</li> <li>- SKPKBT; dan</li> <li>- SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT.</li> </ul>
411128	Pendapatan PPh Final
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiskal Luar Negeri;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan OP;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Orang Pribadi;</li> </ul>

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Orang Pribadi;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konsultasi Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Badan;</li> <li>- PPh Final Pasal 19 Revaluasi Aktiva Tetap Badan;</li> <li>- PPh Final Lainnya;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final;</li> <li>- SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi;</li> <li>- SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan;</li> <li>- SKPKB PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi;</li> <li>- SKPKB PPh Final Pasal 15 Badan;</li> <li>- SKPKB PPh Final Pasal 19 Badan;</li> <li>- SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi;</li> <li>- SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan;</li> <li>- SKPKBT PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi;</li> <li>- SKPKBT PPh Final Pasal 15 Badan;</li> <li>- SKPKBT PPh Final Pasal 19 Badan</li> </ul>
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya
	<p>Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPh Lainnya dari Minyak Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi;</li> <li>- SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan;</li> <li>- SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi.</li> </ul> <p>Pendapatan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan</p>

AKUN	PENJELASAN
	penambangan Gas Alam, yang terdiri dari: - PPh Lainnya dari Gas Alam; - Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam; - SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam; dan - SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.
<b>41114</b>	<b>Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah</b>
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah.
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah.
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah.
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah.
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah.
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah.
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah.
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah.
<b>4112</b>	<b>Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai</b>
<b>41121</b>	<b>Pendapatan PPN</b>
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: - Setoran Masa; - Setoran Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; - Setoran Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean; - Setoran Kegiatan Membangun Sendiri; - Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan; - STP; - SKPKB Masa; - SKPKB Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; - SKPKB Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri;</li> <li>- SKPKB Pemungut PPN;</li> <li>- SKPKBT Masa;</li> <li>- SKPKBT Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;</li> <li>- SKPKBT Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;</li> <li>- SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri;</li> <li>- SKPKBT Pemungut PPN;</li> <li>- PPN Final Membangun Sendiri;</li> <li>- Pemungut.</li> </ul>
411212	Pendapatan PPN Impor
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran Masa;</li> <li>- STP;</li> <li>- SKPKB PPN Impor;</li> <li>- SKPKBT PPN Impor;</li> <li>- Pemungut.</li> </ul>
411219	Pendapatan PPN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPN.
<b>41122</b>	<b>Pendapatan PPnBM</b>
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran Masa/Angsuran;</li> <li>- STP;</li> <li>- SKPKB Masa;</li> <li>- SKPKB Pemungut PPn BM;</li> <li>- SKPKBT Masa;</li> <li>- SKPKBT Pemungut PPnBM;</li> <li>- Pemungut.</li> </ul>
411222	Pendapatan PPnBM Impor
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran Masa;</li> <li>- STP;</li> <li>- SKPKB PPn BM Impor;</li> <li>- SKPKBT PPn BM Impor;</li> <li>- Pemungut.</li> </ul>
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPnBM, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPnBM.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>41124</b>	<b>Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah</b>
411241	Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah
411242	Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah - Penanganan Pandemi COVID-19 Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
<b>4113</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
<b>41131</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
411313	Pendapatan PBB Perkebunan Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkebunan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411314	Pendapatan PBB Kehutanan Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor kehutanan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pertambangan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. Mulai digunakan untuk tahun 2009.
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Panas Bumi. Mulai digunakan untuk tahun 2014.
411319	Pendapatan PBB Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan PBB Lainnya.
<b>4115</b>	<b>Pendapatan Cukai</b>
<b>41151</b>	<b>Pendapatan Cukai</b>
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari cukai hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak menggunakan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya pasal 4 ayat (1) c UU No. 11 Tahun 1995.
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari cukai Ethyl Alkohol atau etanol meliputi barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari cukai MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung ethyl alkohol yang

AKUN	PENJELASAN
	dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya dengan tidak menggunakan bahan antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky (pasal 4 a).
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
411519	Pendapatan Cukai Lainnya
	Pendapatan cukai lainnya adalah penerimaan dari cukai yang tidak tertampung pada Cukai Hasil Tembakau, Ethyl alcohol, Minuman Ethyl Alkohol dan Denda Administrasi Cukai (pasal 7 ayat (7) UU No. 11 tahun 1995).
<b>4116</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
<b>41161</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
411611	Pendapatan Bea Meterai
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari penggunaan Bea Meterai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985.
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
	Penerimaan dana hasil Penjualan Benda Meterai oleh PT. Pos Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA.015).
411613	Pendapatan PPn Batubara
	Digunakan untuk mencatat Pajak Penjualan (PPn) yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penjualan bagi Kontraktor PKP2B Generasi I.
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 Tahun 2000.
<b>41162</b>	<b>Pendapatan Bunga Penagihan Pajak</b>
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPh yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Tahun 2000.
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPnBM yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLT
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PTLT yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.



<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>41163</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah</b>
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah.
<b>412</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL</b>
<b>4121</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
<b>41211</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
412111	Pendapatan Bea Masuk
	Pendapatan yang berasal dari pungutan bea atas barang-barang impor.
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah sesuai dengan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabean Pasal 25/26.
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean
	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
	Pendapatan bea masuk atas barang impor yang dibayar oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE denganmendapatkan fasilitas pengembalian Bea masuk.
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
	Dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabean, Ditjen Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau). Denda ini berasal dari penerapan peraturan pasal 4,7,8 dan 9 UU No 17 tahun 2006.
412116	Pendapatan BM-DTP
	Untuk mencatat pendapatan bea masuk yang ditanggung pemerintah dan pada saat bersamaan dibayarkan Belanja Subsidi BM-DTP.
412119	Pendapatan Pabean Lainnya
	Pendapatan pabean lainnya adalah Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari : - Sanksi administrasi berupa denda (pasal 37 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995); - Bunga (pasal 38 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995).
<b>41212</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk Tindakan</b>
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping
	Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh

AKUN	PENJELASAN
	industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
<b>4122</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
<b>41221</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
412211	Pendapatan Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang diekspor (sebelumnya disebut pajak ekspor).
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari Denda Administrasi atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari beban Bunga atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
<b>419</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK LAIN-LAIN</b>
<b>4199</b>	<b>Pendapatan Pajak Lain-lain</b>
<b>41999</b>	<b>Pendapatan Pajak Lain-lain</b>
<b>419999</b>	Pendapatan Pajak Lain-lain
	Hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Pajak Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkat LKPP.
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>
<b>421</b>	<b>PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>4211</b>	<b>PENDAPATAN MINYAK BUMI</b>
<b>42111</b>	<b>Pendapatan Minyak Bumi</b>
421111	Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).
<b>4212</b>	<b>PENDAPATAN GAS BUMI</b>
<b>42121</b>	<b>Pendapatan Gas Bumi</b>
421211	Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan gas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (999.99).
<b>4213</b>	<b>PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>
<b>42132</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).

AKUN	PENJELASAN
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan usaha pertambangan di bidang Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42133</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan tembaga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan emas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan perak. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan nikel. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan timah. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan komoditi tambang selain batubara, tembaga, emas, perak, nikel, timah dan besi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42134</b>	<b>Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)</b>
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari bagian pemerintah atas keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>4214</b>	<b>PENDAPATAN KEHUTANAN</b>
42141	Pendapatan Dana Reboisasi

AKUN	PENJELASAN
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)
<b>42142</b>	<b>Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan</b>
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42143</b>	<b>Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)</b>
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) antara lain Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR).Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42144</b>	<b>Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan</b>
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>4215</b>	<b>PENDAPATAN PERIKANAN</b>
<b>42152</b>	<b>Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan</b>
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikanan bidang perikanan tangkap antara lain Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI)
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikanan bidang pembudidayaan ikan antara lain Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan dan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM).
<b>42153</b>	<b>Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan</b>
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam rangka penangkapan ikan antara lain Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
<b>4216</b>	<b>PENDAPATAN PANAS BUMI</b>
<b>42162</b>	<b>Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi</b>
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari setoran bagian pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42163</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi</b>
421631	Pendapatan iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi perusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi perusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42164</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi</b>
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan perusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>422</b>	<b>PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)</b>
<b>4221</b>	<b>PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN</b>
<b>42213</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN</b>
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Non Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>42214</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan</b>
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>4222</b>	<b>PENDAPATAN DARI KND LAINNYA</b>
<b>42221</b>	<b>Pendapatan dari Surplus Lembaga</b>
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang menjadi bagian Pemerintah.
422219	Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus lembaga lainnya yang menjadi bagian Pemerintah.

7

AKUN	PENJELASAN
424	<b>PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM</b>
4241	<b>Pendapatan Jasa Layanan Umum</b>
42411	<b>Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Penyedia Barang dan Jasa dari hasil pelayanan jasa yang merupakan <i>core bussiness</i> -nya sebagaimana terlampir.
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan (BA 024) maupun kementerian lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> rumah sakit/instansi kesehatan walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti rumah sakit yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan pendidikan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti perguruan tinggi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari kegiatan jasa layanan bantuan tenaga terampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan bantuan tenaga terampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU jasa layanan IT yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari jasa pencetakan dokumen, buku dan sejenisnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa pencetakan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa pencetakan yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari jasa kegiatan bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa kegiatan bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa pelabuhan yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Pendapatan BLU atas kegiatan layanan penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi melalui media atau sarana yang ada seperti alat telekomunikasi dan sejenisnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan

AKUN	PENJELASAN
	<i>core business</i> layanan jasa telekomunikasi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa telekomunikasi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas layanan lainnya, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU atas jasa layanan kegiatan pemasaran produk-produk tertentu yang ditujukan bagi konsumen atau pengguna produk atau jasa yang ditawarkan. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan kegiatan pemasaran, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan kegiatan pemasaran yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan penyediaan barang untuk kepentingan masyarakat atau instansi pengguna lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan penyediaan barang, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan penyediaan barang yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan di luar penyediaan barang dan jasa lainnya selain dari yang telah dijelaskan pada akun 424111, 424112, 424113, 424114, 424115, 424116, 424117, dan 424118. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
42412	<b>Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu dari hasil pelayanannya termasuk pendapatan yang berasal dari kerjasama operasional dan sewa menyewa.
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Otorita yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Fasilitas Umum milik Pemerintah.
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
	Pendapatan BLU dari hasil diluar pengelolaan kawasan otorita, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan fasilitas umum lainnya.
42413	<b>Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat</b>
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan.

AKUN	PENJELASAN
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan Syariah.
424133	Pendapatan Program Modal Ventura
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program Modal Ventura.
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Sektoral.
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Syariah.
424136	Pendapatan Investasi
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang-bidang tertentu.
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
	Pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	Pendapatan BLU yang berasal dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana khusus lainnya.
<b>42414</b>	<b>Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang</b>
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil kelolaan BMN pada satuan kerja pengelola aset BUN. Dicatat pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (015).
<b>4242</b>	<b>Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang diterima oleh Satker BLU.
<b>42421</b>	<b>Pendapatan Hibah Terikat - Uang</b>
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Lembaga / Badan Usaha.
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Pemda.
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara.
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang



AKUN	PENJELASAN
	Pendapatan Hibah terikat Dalam/ Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
<b>42422</b>	<b>Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang</b>
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari lembaga/Badan Usaha.
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari pemda.
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara lain.
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
<b>4243</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dan sewa menyewa bagi semua BLU selain Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu.
<b>42431</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU</b>
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : perorangan.
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Lembaga/Badan Usaha.
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Pemda.
<b>4244</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b>
<b>42441</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b>
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU yang berasal dari DIPA sumber dana Rupiah Murni (RM), yang akan dieliminasi dalam proses konsolidasi LKKL
<b>42442</b>	<b>Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b>
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga

AKUN	PENJELASAN
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
<b>4249</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hasil kerja sama BLU, dan pendapatan hibah BLU, dengan rincian sesuai dengan kode akun 6 digitnya.
<b>42491</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari penempatan endowment fund dan dana cadangan pendidikan oleh BLU bidang pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan.
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
	Digunakan untuk mencatat Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lain-lain BLU
<b>42492</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa</b>
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin

AKUN	PENJELASAN
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
<b>42493</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU</b>
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
<b>42494</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN BLU</b>
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
<b>42495</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Asuransi BMN BLU</b>
424951	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU
	Digunakan untuk mencatat penerimaan klaim asuransi BMN dan penerimaan lain-lain terkait pengasuransian BMN di BLU sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

AKUN	PENJELASAN
<b>425</b>	<b>PENDAPATAN PNPB LAINNYA</b>
<b>4251</b>	<b>Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN</b>
<b>42511</b>	<b>Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang</b>
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya yang tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian dan/atau pengembangan. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penjualan dokumen lelang. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah dalam rangka menstabilkan harga beras di pasaran
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan selain kelompok pendapatan atas penjualan-penjualan di atas dan tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian/pengembangan, antara lain berasal dari hasil penjualan produk ekonomi kreatif, penjualan obat-obatan dan hasil farmasi. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
<b>42512</b>	<b>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN</b>
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah negara, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	Digunakan untuk mencatat pendapatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033) .
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Tanah, Gedung dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi dan

AKUN	PENJELASAN
	jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>42513</b>	<b>Pendapatan dari Pemanfaatan BMN</b>
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua Kementerian/Lembaga.
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>42514</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang</b>
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari KKKS, baik masih berada dalam penguasaan KKKS maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

AKUN	PENJELASAN
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik masih berada dalam penguasaan Kontraktor PKP2B maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (999.99)
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari aset saham dan surat berharga lain eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa dividen, bunga dan denda keterlambatan. Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (999.99)
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi aset bekas milik Asing/Tionghoa.
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengelolaan barang pada pengelola barang selain yang berasal dari KKKS, Kontraktor PKP2B, aset eks BLBI dan aset bekas milik asing/Tionghoa, termasuk pendapatan atas pelunasan piutang kepada Yayasan Supersemar.
<b>42515</b>	<b>Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi</b>
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
<b>42516</b>	<b>Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas</b>
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang timbul akibat selisih harga beli BBM Pemerintah dari Badan Usaha (harga patokan) lebih rendah/kecil dari harga jual BBM Pemerintah kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Perpres. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari selisih antara nilai minyak mentah DMO / <i>Domestic Market Obligation</i> dengan harga ICP / <i>Indonesian Crude Price</i> dengan <i>DMO Fee</i> . Nilai minyak mentah DMO adalah hasil penjualan minyak mentah bagian KKKS (Kontraktor Kontrak kerja Sama) diserahkan kepada Pemerintah atau dibeli Pemerintah. Sedangkan <i>DMO Fee</i> adalah pembayaran atau harga beli Pemerintah atas penyerahan minyak mentah DMO bagian KKKS. Penerimaan ini bersifat kontijensi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).

AKUN	PENJELASAN
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha hulu migas antara lain penerimaan bonus dari KKKS, transfer material, dan <i>firm commitment</i> .
<b>42517</b>	<b>Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN</b>
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM.
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha niaga dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan klaim asuransi BMN dan penerimaan lain-lain terkait pengasuransian BMN sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>4252</b>	<b>PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM</b>
<b>42521</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum</b>
425211	Pendapatan Paspor
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia antara lain berupa paspor biasa, paspor pengganti, surat perjalanan laksana paspor, dan pas lintas batas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425212	Pendapatan Visa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Visa, antara lain berupa visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> )
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pemberian Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ) antara lain berupa izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan keimigrasian selain paspor, visa, dan izin keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ), antara lain berupa biaya beban keimigrasian, <i>Smart Card</i> , pembuatan Surat Keterangan Keimigrasian, pembuatan dan penggantian Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC) / <i>APEC Business Travel Card</i> (ABTC), pemberian fasilitas AFFIDAVIT. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan fidusia antara lain berupa pendaftaran jaminan fidusia dan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Badan Hukum antara lain berupa pendirian badan usaha, yayasan, dan perseroan. Masuk Bagian

AKUN	PENJELASAN
	AnggaranKementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa hukum selain pelayanan fidusia dan pelayanan badan hukum, antara lain berupa Pendapatan dari pelayanan perdata umum, notariat, harta peninggalan, pengambilan sidik jari (daktiloskopi), partai politik, kewarganegaraan dan perwarganegaraan RI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan atas kekayaan intelektual antara lain berupa hak cipta, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan indikasi geografis, dan Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum selain pelayanan keimigrasian, pelayanan jasa hukum dan pelayanan kekayaan intelektual, antara lain kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan masyarakat. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
<b>42522</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri</b>
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari visa Republik Indonesia di luar negeri. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425222	Pendapatan Paspur Republik Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari paspor Republik Indonesia di luar negeri, termasuk Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler. Antara lain pengesahan tandatangan/legalisasi salinan dokumen, surat keterangan jalan, surat keterangan usaha/ bisnis dan buku pengenalan diri ( <i>ID Book</i> ). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pelayanan pada KDEI di Luar Negeri, meliputi pendapatan paspor, visa, fasilitas keimigrasian ( <i>affidavit</i> ) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Dokumen Konsuler, dan pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh KDEI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan lainnya di luar negeri antara lain pendapatan fasilitas keimigrasian ( <i>affidavit</i> ) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Surat Keterangan Keimigrasian, pelayanan kepelautan, pelayanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, dan pelayanan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari administrasi di luar negeri antara lain pendapatan cicilan Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR), pengembalian <i>Value Added Tax</i> (VAT), dan pendapatan administrasi lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).



AKUN	PENJELASAN
<b>42523</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi</b>
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengesahan surat di bawah tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005).
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005).
425233	Pendapatan Ongkos Perkara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari ongkos perkara. Masuk Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005), Kejaksaan Agung (BA 006), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (093).
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari lelang barang-barang gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil sitaan dan/atau temuan berupa barang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana selain Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain berupa denda hasil tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kejaksaan dan peradilan lainnya, antara lain berupa pendaftaran pengangkatan sita, hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil orang yang berhak, hasil pemulihan kerugian negara, hasil kerja sama di bidang hukum dengan negara lain, sisa panjar biaya perkara, dan hak redaksi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Mahkamah Agung (BA 005).
<b>42524</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang</b>
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan tindak pidana pencucian

AKUN	PENJELASAN
	uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana korupsi dan hasil penjualan barang sita eksekusi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana korupsi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian uang Negara tanpa putusan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil sitaan dan/atau temuan berupa uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, antara lain berupa uang sitaan dari tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
<b>42525</b>	<b>Pendapatan Perizinan</b>
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (BA 026).
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan pengajuan Hak dan Perizinan di bidang pertanian antara lain berupa jasa pelayanan perlindungan varietas tanaman (PVT), jasa pendaftaran pupuk, jasa pendaftaran pestisida, jasa pendaftaran obat hewan, dan jasa sertifikasi obat hewan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), jasa pengujian dalam rangka persyaratan izin tanda pabrik dan izin tipe alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, izin usaha di bidang

AKUN	PENJELASAN
	perdagangan berjangka komoditi, dan perizinan lainnya di bidang perdagangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan kefarmasian, perizinan alat kesehatan, izin edar alat kesehatan, dan izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (BA 024)
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa iuran izin pemanfaatan kawasan, iuran izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (IUPJL), penerbitan izin lingkungan, dan penerbitan izin pengendalian pencemaran air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan selain perizinan Tenaga Kerja Asing, perizinan Pertanian, perizinan bidang perdagangan, perizinan bidang kesehatan dan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain berupa perizinan undian berhadiah serta perizinan penelitian, perizinan pelaksanaan reklamasi dan pengembangan bagi peneliti asing, iuran tahunan akibat penerapan hak, dan Penerbitan Rekomendasi Importir dan Eksportir Terdaftar Prekursor Narkotika Nonfarmasi.
<b>42526</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian I</b>
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425264	Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara

AKUN	PENJELASAN
	Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Ujian Keterampilan Mengemudisesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerahsesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihsesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42527</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian II</b>
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesiasesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesiasesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak serta penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Satuan Pengaman, yaitu penerbitan kartu anggota satuan pengaman, penerbitan ijazah satuan pengaman,

AKUN	PENJELASAN
	dan penerbitan surat izin operasional badan usaha jasa pengamanan sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu dan Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu termasuk pelatihan internal auditor obyek vital nasional dan objek tertentu dan jasa pengawalan terhadap uang/barang yang bersifat komersial, sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Kepolisian Lainnya, termasuk pelayanan penyelenggaraan assesment center Polri sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42528</b>	<b>Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi</b>
425281	Pendapatan Akreditasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari akreditasi antara lain akreditasi pada Badan Standardisasi Nasional. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga.
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari antara lain pendapatan dari sertifikasi benih, Jasa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jasa Pengujian Benih Tanaman Kehutanan, Pengujian Bibit Tanaman Hutan, dan Jasa Laboratorium. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (BA 019) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi serta pelayanan teknis mesin.
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (BA 090) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian kalibrasi dan verifikasi, pelayanan inspeksi teknik, pelayanan teknis mesin, pelayanan teknis sertifikasi, serta jasa tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus.
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (BA 024) antara lain

AKUN	PENJELASAN
	meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi dan pelayanan teknis sertifikasi.
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033)
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian selain dari pengujian kendaraan bermotor, Sertifikasi, dan Kalibrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (BA 022) antara lain meliputi sertifikasi angkutan penyeberangan lintas dalam negeri, sertifikasi kompetensi pengawakan angkutan umum, sertifikasi SDM perkeretaapian, sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian, penerbitan lisensi dan sertifikasi bidang transportasi udara, dan kalibrasi peralatan penerbangan.
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi selain di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan pekerjaan umum, antara lain pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi di bidang tenaga nuklir dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
<b>4253</b>	<b>PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN</b>
<b>42531</b>	<b>Pendapatan Jasa Kesehatan</b>
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) termasuk yang berasal dari Dana Kapitasi dan Dana Klaim Nonkapitasi.
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya selain dari BPJS Kesehatan.
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa karantina kesehatan antara lain karantina kapal yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pemberian vaksin kesehatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian

AKUN	PENJELASAN
	Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari registrasi tenaga kesehatan, meliputi dokter, dokter gigi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
<b>42532</b>	<b>Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan</b>
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pengawasan obat dan makanan antara lain berupa pendaftaran, sertifikasi, dan pengujian obat dan makanan. Masuk Bagian Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BA 063).
<b>42533</b>	<b>Pendapatan Jasa Karantina</b>
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina pertanian dan peternakan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>42534</b>	<b>Pendapatan Jasa Agraria</b>
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, pelayanan pendaftaran tanah, pelayanan informasi pertanahan, pelayanan lisensi, dan pelayanan di bidang pertanahan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan penetapan tanah obyek penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda (P3MB) sesuai Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
<b>42535</b>	<b>Pendapatan Jasa Keagamaan</b>
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari hasil pelayanan Jasa Kantor Urusan Agama dari pencatatan nikah dan rujuk. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025).
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya, antara lain pendapatan dari pengelolaan asrama haji, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, dan pencetakan Al Qur'an. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025).
<b>4254</b>	<b>PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI</b>
<b>42541</b>	<b>Pendapatan Pendidikan</b>
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Ujian/Seleksi Masuk

AKUN	PENJELASAN
	Pendidikan pada Sekolah maupun Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP).
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Pendidikan di Sekolah maupun PTP yang dibayarkan selama masa pendidikan antara lain berupa uang kuliah tunggal, SPP, uang praktikum, cuti akademik, semester pendek, bimbingan karya ilmiah akhir, Praktik Kerja Lapangan, ujian remedial, dan ujian komprehensif.
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah maupun PTP, antara lain kerjasama dengan instansi pemerintah/swasata dalam rangka kajian reorientasi pembangunan pedesaan, kajian dalam kebijakan strategis dalam pemetaan cluster sektor unggulan, kajian pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif).
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan pendidikan pada Sekolah maupun PTP selain pendapatan ujian masuk/seleksi masuk pendidikan, pendapatan biaya pendidikan, dan pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Antara lain berupa wisuda, kartu perpustakaan, penjualan hasil praktik pendidikan, dan pendapatan <i>try out</i> .
42542	<b>Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, termasuk pendidikan dan pelatihan investigasi bagi PNS dan Sertifikasi Satuan Pengamanan, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya di berbagai Kementerian/Lembaga selain layanan pendidikan dan/atau pelatihan serta assessment dan sertifikasi kompetensi. Antara lain berasal dari <i>assessment center</i> dan psikometri, sertifikasi kepabeanaan,sertifikasi <i>welding</i> , jasa registrasi kompetensi nasional bidang lingkungan hidup, dan sertifikasi penanggulangan bencana.
42543	<b>Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek</b>
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga, antara lain berupa pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>current meter type propeler OTT C2</i> (Jasa Instrumentasi Peralatan Lapang).
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain pengolahan data sosial ekonomi pertanian, jasa survey dan pemetaan dalam rangka survey hidro oseanografi.
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.Masuk Bagian Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BA 075).



AKUN	PENJELASAN
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Penelitian/Riset dan hasil Pengembangan Iptek. merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan dari laboratorium bank gen.
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain peta laut navigasi, buku nautis, peta navigasi elektronik.
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
	Digunakan untuk mencatat pendapatan royalti atas kekayaan intelektual. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan royalti dari kekayaan intelektual yang berasal dari alih teknologi hasil litbang kesehatan.
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Penelitian/Riset, Survei, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya, antara lain jasa penggunaan peralatan survey dan pemetaan, jasa penimbangan peralatan nautika dan tiket masuk kebun raya dan balai konservasi tumbuhan.
<b>42545</b>	<b>Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan</b>
425451	Pendapatan Museum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari museum antara lain berupa tiket masuk museum dan pameran. Merupakan penerimaan yang (bisa) ada di Kementerian/Lembaga, antara lain museum Basoeki Abdullah, Museum Nasional, museum Sumpah Pemuda, museum geologi.
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan di bidang sejarah dan kebudayaan lainnya antara lain kerja sama pengelolaan cagar budaya (contoh: Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Pawon, dan Candi Mendut).
<b>4255</b>	<b>PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
<b>42551</b>	<b>Pendapatan Jasa Transportasi</b>
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa pengujian kendaraan bermotor antara lain berupa uji tipe kendaraan, uji sampel kendaraan dan penerbitan surat sertifikat uji tipe (SUT) serta surat registrasi uji tipe (SRUT). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri antara lain berupa jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan orang, penggunaan sarana dan prasarana di pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi pelayaran antara lain berupa penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran, pelayanan jasa telekomunikasi pelayaran, pelayanan jasa salvage dan pekerjaan bawah air. Masuk

AKUN	PENJELASAN
	Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerimaan uang perkapalan dan kepelautan antara lain berupa surat pengukuran kapal, dokumen kepelautan, dan pengawasan barang berbahaya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan di bandar udara antara lain berupa pelayanan jasa penumpang pesawat udara, pelayanan jasa pendaratan penempatan dan penyimpanan pesawat udara, jasa kargo dan pos pesawat udara, penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara serta penerbitan izin masuk daerah keamanan terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi penerbangan, antara lain <i>terminal navigation charge, enroute charge dan overflying</i> . Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari konsesi di bidang transportasi, antara lain konsesi jasa kepelabuhanan dan konsesi jasa kebandarudaraan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan di bidang transportasi selain pengujian kendaraan bermotor, penggunaan prasarana perkeretaapian, jasa kepelabuhanan, jasa navigasi pelayaran, jasa perkapalan dan kepelautan, jasa kebandarudaraan, jasa navigasi penerbangan, dan pendapatan dari konsesi bidang transportasi.  Penerimaan Jasa Transportasi Lainnya antara lain berupa penerbitan izin angkutan jalan, penerbitan izin bidang perkeretaapian, penerbitan Surat izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), dan penerbitan izin bidang angkutan udara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
<b>42552</b>	<b>Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika</b>
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Pos. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
<b>42553</b>	<b>Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik</b>
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116).
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116).
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran yang meliputi jasa penyiaran, jasa digitalisasi penyiaran, jasa produksi program dan royalti atas hak kekayaan intelektual produksi program. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117).
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran yang meliputi jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian, jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi, jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi dan jasa multipleksing. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117).
<b>4256</b>	<b>PENDAPATAN JASA LAINNYA</b>
<b>42561</b>	<b>Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>
425611	Pendapatan Wisata Alam
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wisata alam di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam, pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam, pungutan jasa kegiatan wisata alam, dan karcis masuk di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pariwisata alam (KPA) dan taman buru (TB). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pembayarannya dilakukan secara periodik, antara lain berupa iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan, pungutan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pungutan usaha pemanfaatan air (PUPA), dan pungutan usaha pemanfaatan energi air (PUPEA). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan selain pendapatan wisata alam, dan pendapatan iuran di bidang

AKUN	PENJELASAN
	lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang, hasil silvopastural system, hasil <i>silvofishery system</i> , penerbitan rekomendasi pengangkutan dan registrasi bahan berbahaya dan beracun (B3), pendapatan dari pengumpulan benih dan anakan dan transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42562</b>	<b>Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan</b>
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan
	Pendapatan dari pelayanan di pelabuhan perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan selain Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, antara lain berupa pungutan dari penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>42569</b>	<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga antara lain berupa jasa inspeksi, jasa surveilans dan jasa audit.
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga, antara lain jasa tenaga ahli, jasa perpustakaan, jasa rancang bangun dan perekayasaan, dan jasa konsultasi.
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa layanan jalan tol. Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033).
425694	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033).
425699	Pendapatan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk pendapatan atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PKP2B Generasi I pada Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>4257</b>	<b>PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>
<b>42571</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>
425711	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
425712	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari BPPN yang bersumber dari investasi/ pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.

AKUN	PENJELASAN
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas.
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang berasal dari pemberian kredit pemerintah termasuk kredit investasi pemerintah dan kredit bidang perkebunan dan kehutanan.
425715	Pendapatan Komitmen Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari biaya komitmen yang timbul akibat pemberian pinjaman, merupakan transaksi BA BUN Satker Direktorat SMI.
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga transaksi kredit program.
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
	Digunakan untuk mencatat PNBPN yang berasal dari bunga dari pengelolaan rekening pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
425719	Pendapatan Bunga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga selain yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya.
<b>42572</b>	<b>Pendapatan Gain on Bond Redemption</b>
425721	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih <i>carrying value</i> Obligasi yang dibeli kembali dengan <i>clean price</i> yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali Obligasi ( <i>buyback</i> ). <i>Carrying Value</i> Obligasi ialah nominal Obligasi setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau premium.
425722	Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i> .
425723	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing.
425724	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang.
425725	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valas Jangka Panjang.
<b>42573</b>	<b>Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara</b>
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> )

AKUN	PENJELASAN
	dengan nominal SUN yang diterbitkan.
425732	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SBSN.
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SBSN.
<b>42574</b>	<b>Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara</b>
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas imbal jasa penjaminan infrastruktur.
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Harga SBN.
425743	Pendapatan Kupon SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Kupon SBN.
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas transaksi <i>reverse repo</i> .
425745	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama. Masuk Bagian Anggaran 999.01 (Sistem Akuntansi Utang Pemerintah).
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan lain-lain atas rekening tujuan tertentu.
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan <i>Loss Limit</i>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan usaha yang menerima dukungan <i>Loss Limit</i> dalam rangka kegiatan dukungan penjaminan pemerintah.
<b>42575</b>	<b>Pendapatan dari Selisih Kurs</b>
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	Digunakan untuk mencatat untung selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat realisasi kentungan selisih kurs uang persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
	Selisih positif transaksi belanja dalam valuta asing antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda.
<b>42576</b>	<b>Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening</b>

AKUN	PENJELASAN
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari layanan jasa perbankan.
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa bank akibat transaksi pemberian pinjaman.
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas biaya management fee, komitmen fee dan fee-fee yang terjadi karena transaksi pemberian pinjaman.
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penutupan rekening pemerintah.
<b>42577</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara</b>
425771	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA. Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Umum. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> . Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Sentral. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penempatan uang sebelum rekonsiliasi.
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari remunerasi/imbal hasil atas pengelolaan rekening khusus (reksus) dana pinjaman dan/atau hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
<b>42578</b>	<b>Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara</b>
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 015).

AKUN	PENJELASAN
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Pegadaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
<b>42579</b>	<b>Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara</b>
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
<b>4258</b>	<b>PENDAPATAN DENDA</b>
<b>42581</b>	<b>Pendapatan Denda I</b>
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari pelaku usaha yang telah mendapatkan putusan tetap dari peradilan. Masuk Bagian Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Administratif atas pelanggaran tidak mendaftarkan Prospektus dan Perjanjian Waralaba; Denda Administratif atas pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).



AKUN	PENJELASAN
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA. Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> . Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99)
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa denda, bunga, dan penalti keterlambatan terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas.
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda administrasi atas Keterlambatan dan Kekurangan Penyetoran Bagian Pemerintah dari Pengusahaan Panas Bumi.
<b>42582</b>	<b>Pendapatan Denda II</b>
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan menyalurkan dana SP2D/SP2D-R ke rekening yang berhak dan keterlambatan membukukan dana SP2D-R pada tanggal diterimanya dana ke Rekening RR SPAN/Rekening RR Gaji. Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman, merupakan transaksi BA BUN satker Direktorat SMI.
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan penerimaan denda karena bank yang ditunjuk terlambat menyalurkan dana kredit program kepada pihak yang berhak menerima.
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk juga imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur KUMK.

AKUN	PENJELASAN
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur Pemberian Pinjaman.
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III.
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan (DPEH), denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, dan ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
<b>42583</b>	<b>Pendapatan Denda III</b>
425839	Pendapatan Denda Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda yang tidak termasuk ke dalam kelompok Pendapatan Denda I& II.
<b>4259</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>
<b>42591</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I</b>
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL.
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Subsidi TAYL.
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Hibah TAYL.
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Lain-lain TAYL.

AKUN	PENJELASAN
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL.
<b>42592</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II</b>
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL.
<b>42593</b>	<b>Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan</b>
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai PNS yang sudah pensiun.
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Prajurit TNI/PNS Kemhan yang sudah pensiun.
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Anggota Polri/PNS Polri yang sudah pensiun.
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Pejabat Negara yang sudah pensiun.
<b>42598</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain I</b>
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali atas pelunasan piutang pemberian pinjaman yang telah dihapuskan, meliputi piutang pokok penerusan pinjaman dan piutang non pokok, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, serta penerimaan kembali atas aset lainnya kredit program yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya.
425982	Penerimaan Pengembalian dan Pencatatan Akumulasi luran Pensiun
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Akumulasi luran Pensiun yang disetorkan oleh Badan Penyelenggara yaitu PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) serta untuk mencatat Penerimaan Akumulasi luran Pensiun untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA 999.99).
425983	Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari sumbangan dana kampanye yang dilarang pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yang berdasar ketentuan harus disetorkan ke Kas Negara.
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi bagian Pemerintah.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42599</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain II</b>
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Pembayaran Premi dalam rangka Penjaminan Perbankan Nasional.
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima Pemerintah dari Bank Umum atau PT Pos sebagai pengelola kas negara (Bank Operasional).
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi.
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak. Merupakan pendapatan BA 015.06 (Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan).
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN. Merupakan pendapatan BUN.
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan.
425998	Pendapatan dari Retur SP2D
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Retur SP2D yang disetorkan ke kas negara. Dibukukan pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus).
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>43</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>
<b>431</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</b>
<b>4311</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri</b>
<b>43111</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana</b>
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
	Penerimaan hibah dalam negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
<b>43112</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk barang.
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk Jasa.
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga.
<b>43113</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang</b>
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
	Penerimaan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha
	Penerimaan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah.
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
	Penerimaan hibah dalam negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).
<b>4312</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri</b>
<b>43121</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana</b>
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral. (BA 999.02).
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral. (BA 999.02).
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
	Penerimaan hibah luar negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. (BA 999.02).
<b>43122</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga</b>
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk barang.
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk Jasa.
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga.
<b>43123</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang</b>
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Penerimaan hibah luar negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
	Penerimaan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral (BA 999.02).
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
	Penerimaan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral (BA 999.02).
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
	Penerimaan hibah luar negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral (BA 999.02).
<b>43124</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan</b>
431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan.
431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan.
431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan.
<b>439</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH LAIN-LAIN</b>
<b>4399</b>	<b>Pendapatan Hibah Lain-lain</b>
<b>43999</b>	<b>Pendapatan Hibah Lain-lain</b>
<b>439999</b>	Pendapatan Hibah Lain-lain
	Hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkat LKPP.

**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN BELANJA**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>
<b>51</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>
<b>511</b>	<b>BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN</b>
<b>5111</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan PNS</b>
<b>51111</b>	<b>Belanja Gaji PNS</b>
511111	Belanja Gaji Pokok PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
<b>51112</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS</b>
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PNS.
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS.
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural PNS.
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan fungsional PNS.
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511127	Belanja Tunjangan Kemahalan PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan kemahalan PNS.
511128	Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511129	Belanja Uang Makan PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS.
<b>51113</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS</b>
511131	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS.
511132	Belanja Tunjangan Cacat PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan cacat PNS.
511133	Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS.

AKUN	PENJELASAN
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).
511135	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511136	Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
511137	Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.
511139	Belanja Tunjangan SAR PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran Tunjangan <i>Search and Rescue</i> untuk Pegawai Negeri Sipil.
<b>51114</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri</b>
511141	Belanja Tunjangan Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN).
511142	Belanja Tunjangan Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN).
511143	Belanja Tunjangan Social Security PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN).
511144	Belanja Tunjangan Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN).
511145	Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN).
511146	Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN).
511147	Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri.



<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
511149	Belanja Lokal Staff Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji, tunjangan dan uang lembur lokal staff.
<b>51115</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS</b>
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNS yang telah lulus ujian sertifikasi guru dan mendapatkan NIRG (Nomor Induk Registrasi Guru).
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi dosen PNS yang telah lulus ujian sertifikasi dosen.
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan kehormatan profesor yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
511156	Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen
	Digunakan untuk Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen PNS.
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim.
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
<b>51116</b>	<b>Belanja Gaji- PNS TNI/Polri</b>
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
<b>51117</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri</b>
511171	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/istri PNS TNI/Polri.
511172	Belanja Tunjangan Anak PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511173	Belanja Tunjangan Struktural PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511174	Belanja Tunjangan Fungsional PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan fungsional PNS TNI/Polri.
511175	Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh PNS TNI/Polri.
511176	Belanja Tunjangan Beras PNS TNI/Polri

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura untuk PNS TNI/Polri.
511177	Belanja Tunjangan Kemahalan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kemahalan PNS TNI Polri.
511178	Belanja Tunjangan Lauk pauk PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik) untuk PNS TNI/Polri.
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang makan PNS TNI/Polri.
<b>51118</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri</b>
511181	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNI/Polri.
511182	Belanja Tunjangan Cacat PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan cacat PNS TNI/Polri.
511183	Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS TNI/Polri.
511184	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selam ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987.
511185	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511187	Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
511188	Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.
<b>51119</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI</b>
511191	Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Medis PNS TNI/POLRI.
511192	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran Tunjangan Umum PNS TNI/Polri.

AKUN	PENJELASAN
511194	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI.
511195	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada pulau terluar dan wilayah perbatasan PNS TNI Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan bagi PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
511196	Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.
511197	Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan dosen PNS TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar PNS TNI/Polri.
<b>5112</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri</b>
<b>51121</b>	<b>Belanja Gaji TNI/POLRI</b>
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok TNI/POLRI.
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/ POLRI.
<b>51122</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI</b>
511221	Belanja Tunjangan Suami/Istri TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI.
511222	Belanja Tunjangan Anak TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI.
511223	Belanja Tunjangan Struktural TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI.
511224	Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI.
511225	Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI.
511226	Belanja Tunjangan Beras TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI.
511227	Belanja Tunjangan Kemahalan TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/16/X/2001.
511228	Belanja Tunjangan Lauk pauk TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).

AKUN	PENJELASAN
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang makan TNI/POLRI.
<b>51123</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI</b>
511231	Belanja Tunjangan Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI.
511232	Belanja Tunjangan Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI.
511233	Belanja Tunjangan Babinkamtibmas TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Babinsa TNI/POLRI.
511234	Belanja Tunjangan Khusus Papua untuk TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI.
511235	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI.
511236	Belanja Tunjangan Brevet TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan brevet TNI/POLRI.
511237	Belanja Tunjangan Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI.
511238	Belanja Tunjangan Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan keterampilan khusus TNI/POLRI.
511239	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan bagi prajurit TNI yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau terkecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
<b>51124</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI</b>
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Medis TNI/POLRI.
511242	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511243	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI.
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum TNI/POLRI sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
511245	Belanja Santunan Cacat TNI
	Santunan yang diberikan kepada anggota TNI yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.
511246	Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLRI
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Anggota POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.

AKUN	PENJELASAN
511247	Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar TNI/Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan dosen TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar TNI/Polri.
<b>5113</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara</b>
<b>51131</b>	<b>Belanja Gaji Pejabat Negara</b>
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok pejabat Negara.
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaji pokok pejabat negara.
<b>51132</b>	<b>Belanja Tunjangan-Tunjangan I Pejabat Negara</b>
511321	Belanja Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/istri pejabat negara.
511322	Belanja Tunjangan Anak Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anak pejabat negara.
511323	Belanja Tunjangan Struktural Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural pejabat negara.
511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh pejabat negara.
511325	Belanja Tunjangan Beras Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras pejabat negara.
<b>51133</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara</b>
511331	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan komunikasi intensif pejabat negara.
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang kehormatan pejabat negara.
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan paket harian pejabat negara.
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara.
511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara.
511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat Negara.
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara.
511338	Belanja Tunjangan Fasilitas KPK
	Untuk pembayaran tunjangan pejabat KPK seperti fasilitas yang diterima.

AKUN	PENJELASAN
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Belanja atas tunjangan penghasilan untuk Pejabat Negara (TPPN).
<b>5114</b>	<b>Belanja Gaji Dokter PTT</b>
<b>51141</b>	<b>Belanja Gaji Dokter PTT</b>
511411	Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji Dokter dan Bidan PTT.
511412	Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT.
511413	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT.
511414	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW).
<b>5115</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>
<b>51151</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
511513	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya
	Digunakan untuk mencatat pembayaran Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Wakil Menteri.
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
<b>51152</b>	<b>Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS</b>
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS.
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga penyuluh non PNS, termasuk tunjangan penyuluh agama non PNS.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
511529	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS termasuk tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional.
<b>5116</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK</b>
<b>51161</b>	<b>Belanja Gaji PPPK</b>
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok PPPK.
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok PPPK.
<b>51162</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan I PPPK</b>
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PPPK.
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PPPK.
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan jabatan struktural PPPK.
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional PPPK.
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511626	Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan kemahalan PPPK.
511627	Belanja Tunjangan Lauk Pauk PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para PPPK sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511628	Belanja Uang Makan PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PPPK.
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja PPPK

AKUN	PENJELASAN
	<p>sebagaimana yang berlaku bagi PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No.SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No.SE 83-/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).</p>
<b>51163</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan II PPPK</b>
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PPPK
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PPPK.
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PPPK yang bertugas/bekerja di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PPPK sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
<b>512</b>	<b>BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/TUNJANGAN KHUSUS &amp; BELANJA PEGAWAI TRANSITO</b>
<b>5121</b>	<b>Belanja Honorarium</b>
<b>51211</b>	<b>Belanja Honorarium</b>
512111	Belanja Uang Honor Tetap
	Digunakan untuk pembayaran honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan.
<b>5122</b>	<b>Belanja Lembur</b>
<b>51221</b>	<b>Belanja Lembur</b>
512211	Belanja Uang Lembur
	Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
512212	Belanja Uang Lembur PPPK
	Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur PPPK termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
<b>5124</b>	<b>Belanja Tunjangan Khusus &amp; Belanja Pegawai Transito</b>
<b>51241</b>	<b>Belanja Tunjangan Khusus &amp; Belanja Pegawai Transito</b>
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512412	Belanja Pegawai Transito
	Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di



AKUN	PENJELASAN
	lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
512413	Belanja Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi
	Belanja pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>513</b>	<b>BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL</b>
<b>5131</b>	<b>Belanja Pensiun dan Uang Tunggu</b>
<b>51311</b>	<b>Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara</b>
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Pusat dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Daerah dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS TNI/Kemhan dan uang tunggu bagi PNS TNI/Kemhan yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513115	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Eks Pegadaian dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51312</b>	<b>Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri</b>
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989.
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun Prajurit TNI dan uang tunggu bagi Prajurit TNI yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun anggota Polri dan uang tunggu bagi anggota Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.

AKUN	PENJELASAN
<b>51313</b>	<b>Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara</b>
513131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Pejabat Negara yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513132	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Hakim yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51314</b>	<b>Belanja Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS KEMHUB pada PT KAI</b>
513141	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS KEMHUB pada PT KAI
	Belanja dalam rangka pembayaran pensiun eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api sebagai pelaksanaan dari PP No 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia.
<b>51315</b>	<b>Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP</b>
513151	Belanja Tunjangan Veteran
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan veteran RI.
513152	Belanja Dana Kehormatan Veteran
	Digunakan untuk pembayaran Dana Kehormatan Veteran.
513153	Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dan Komite Nasional Indonesia Pusat.
<b>51316</b>	<b>Belanja Tunjangan Hari Tua</b>
513161	Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability)
	Digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa Unfunded Liability (kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai
<b>5132</b>	<b>Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai</b>
<b>51321</b>	<b>Belanja Askes PNS/Pejabat Negara</b>
513211	Belanja Askes PNS
	Digunakan untuk pembayaran iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS.
513212	Belanja Askes Pejabat Negara
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Pejabat Negara.
<b>51322</b>	<b>Belanja Askes Penerima Pensiun</b>
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun
	Digunakan untuk pembayaran iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Penerima Pensiun.
<b>51323</b>	<b>Belanja Askes TNI/Kemhan</b>
513231	Belanja Askes TNI/Kemhan
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNI/Kemhan.
<b>51324</b>	<b>Belanja Askes Polri</b>
513241	Belanja Askes Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Polri.

AKUN	PENJELASAN
<b>51325</b>	<b>Belanja Askes Veteran</b>
513251	Belanja Askes Veteran
	Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Penerima Tunjangan Veteran yang ditanggung pemerintah pusat.
<b>51326</b>	<b>Belanja Katastropik</b>
513261	Belanja Katastropik
	Digunakan untuk mencatat belanja katastrofik.
<b>51327</b>	<b>Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai</b>
513271	Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
	Digunakan untuk mencatat Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.
<b>51328</b>	<b>Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai</b>
513281	Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai
	Digunakan untuk mencatat Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.
<b>5133</b>	<b>Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran</b>
<b>51331</b>	<b>Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran</b>
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
	Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Non Tuvet yang ditanggung pemerintah pusat.
<b>5134</b>	<b>Belanja Cadangan Perubahan Sharing</b>
<b>51341</b>	<b>Belanja Cadangan Perubahan Sharing</b>
513411	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
	Digunakan untuk pembayaran cadangan perubahan sharing kepada pegawai.
<b>5135</b>	<b>Belanja Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pegawai</b>
<b>51351</b>	<b>Belanja Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pegawai</b>
513511	Belanja Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat pembayaran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat bagian Pemerintah Pusat selaku Pemberi Kerja
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>
<b>521</b>	<b>BELANJA BARANG</b>
<b>5211</b>	<b>Belanja Barang Operasional</b>
<b>52111</b>	<b>Belanja Barang Operasional</b>
521111	Belanja Keperluan Perkantoran
	Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain : - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya

AKUN	PENJELASAN
	<p>penerimaan tamu.</p> <p>- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.</p>
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan makanan.
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
	Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan bahan makanan/ minuman/ obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
	Digunakan untuk mencatat membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
	Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBPN (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honoronya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
521116	Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Republik Indonesia di Luar Negeri yang tidak menghasilkan barang persediaan.
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
	Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.
<b>52112</b>	<b>Belanja Barang Operasional kepada BLU</b>
521121	Belanja Barang Operasional Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
521122	Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.

AKUN	PENJELASAN
52113	<b>Belanja Barang Operasional - Darurat Bencana</b>
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5212	<b>Belanja Barang Non Operasional</b>
52121	<b>Belanja Barang Non Operasional</b>
521211	Belanja Bahan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi/bahan makanan;</li> <li>- Dokumentasi;</li> <li>- Spanduk;</li> <li>- Biaya fotokopi;</li> </ul> yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.
521212	Belanja Barang Transito
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada satuan kerja-satuan kerja yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran / Kementerian Negara / Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.
521213	Belanja Honor Output Kegiatan
	Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat). Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
521215	Belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun
	Digunakan untuk mencatat biaya yang diperlukan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. AsaFbri (Persero) untuk operasional penyelenggaraan pembayaran dana belanja Pensiun.
521216	Belanja Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).
521217	Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
	Digunakan untuk mencatat belanja atas denda keterlambatan pembayaran atas tagihan kepada negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

AKUN	PENJELASAN
	mengenai Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Negara atas Tagihan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Belanja Negara.
521218	Belanja dalam Rangka <i>Refund</i> Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat belanja sebagai akibat kewajiban pemerintah untuk mengembalikan penarikan dana PHLN, termasuk penarikan dana PHLN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai dari PHLN kepada pemberi PHLN.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya <i>Crash Program</i> . Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.
<b>52122</b>	<b>Belanja Barang Non Operasional kepada BLU</b>
521221	Belanja Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang non operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
521222	Belanja Barang Non Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang non operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
<b>52123</b>	<b>Belanja Barang Bantuan Pemerintah</b>
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian beasiswa Non PNS dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk barang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah

AKUN	PENJELASAN
	pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>52124</b>	<b>Belanja Barang Non Operasional - Darurat Bencana</b>
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Non Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
52125	Belanja Barang Ekstrakomptabel
	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi.
521253	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi.
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman.
<b>5215</b>	<b>Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC</b>
<b>52151</b>	<b>Belanja Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC</b>
521511	Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPN dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
521512	Belanja Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPh dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
521513	Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
<b>5217</b>	<b>Belanja Kontribusi dan Kompensasi</b>
<b>52171</b>	<b>Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund</b>
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99); dan pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
<b>52172</b>	<b>Belanja Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan</b>
521721	Belanja Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan ( <i>Viability Gap Fund</i> )
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang merupakan dukungan

AKUN	PENJELASAN
	pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
521722	Belanja Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek ( <i>Project Development Facility</i> )
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berupa bantuan teknis penyiapan dan transaksi proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan untuk menghasilkan <i>Bankable Business Case Project</i> dan dapat mencapai <i>Financial Close</i> . Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
521723	Belanja Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )
	Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
521724	Belanja Kompensasi Finansial Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pembayaran kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJKP sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama dan sesuai dengan peraturan mengenai Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
521725	Belanja Regres Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pembayaran regres/tagihan Penjaminan kepada PJKP atas apa yang telah dibayarkan Penjaminan kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial PJKP dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut ( <i>time value of money</i> ) sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
52173	<b>Belanja Kompensasi Penugasan - Penanganan Pandemi COVID-19</b>
521731	Belanja Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran kompensasi atas penugasan kepada PT Reasuransi Indonesia Utama untuk melaksanakan operasionalisasi Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Telah Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
521732	Belanja Selisih Harga Biodiesel
	Digunakan untuk mencatat Pembayaran Selisih Harga Biodiesel dari dana APBN Rupiah Murni sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.



AKUN	PENJELASAN
521733	Belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi.
<b>5218</b>	<b>Belanja Barang Persediaan</b>
<b>52181</b>	<b>Belanja Barang untuk Persediaan</b>
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti: - ATK; - Bahan cetakan; - Alat-alat rumah tangga; - dll
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa amunisi.
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa Pita Cukai, Meterai dan Leges.
<b>52182</b>	<b>Belanja Barang Persediaan untuk proses produksi</b>
521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk proses produksi berupa bahan baku.
521822	Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang dalam proses produksi.
<b>52183</b>	<b>Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya</b>
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan lainnya.
<b>52184</b>	<b>Belanja Barang Persediaan - Darurat Bencana</b>
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang yang menghasilkan persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>522</b>	<b>BELANJA JASA</b>
<b>5221</b>	<b>Belanja Jasa</b>
<b>52211</b>	<b>Belanja Langganan Daya dan Jasa</b>
522111	Belanja Langganan Listrik
	Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.

AKUN	PENJELASAN
522112	Belanja Langganan Telepon
	Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
522113	Belanja Langganan Air
	Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
	Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.
<b>52212</b>	<b>Belanja Jasa Pos dan Giro</b>
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro
	Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
<b>52213</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan</b>
522131	Belanja Jasa Konsultan
	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir ( <i>brainware</i> ).
<b>52214</b>	<b>Belanja Sewa</b>
522141	Belanja Sewa
	Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
<b>52215</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>
522151	Belanja Jasa Profesi
	Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.
522152	Belanja Imbalan Jasa Invensi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja imbalan yang diberikan kepada Inventor dari sebuah Invensi yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor
<b>52216</b>	<b>Belanja Jasa kepada BLU</b>
522161	Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
522162	Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.

AKUN	PENJELASAN
<b>52217</b>	<b>Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan</b>
522171	Belanja <i>Fee</i> Pelayanan Bank/Pos Persepsi
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan <i>Treasury Single Account</i> (TSA).
522172	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa ( <i>fee</i> ) Kustodian.
<b>52219</b>	<b>Belanja Jasa Lainnya</b>
522191	Belanja Jasa Lainnya
	Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan ( <i>skillware</i> ) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>523</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>
<b>5231</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>
<b>52311</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan</li> <li>- Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).</li> </ul>
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan.
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan

AKUN	PENJELASAN
	Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/ TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
<b>52312</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
	Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan Kementerian Negara/Lembaga lain yang memiliki transaksi sejenis. BMP antara lain terdiri dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamina, Methanol. Serta Belanja atas SPO (Special Oil Non Pertamina), yaitu pelumas khusus yang tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkan untuk operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidrolic, Petronas Gear, Skydrol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, Shell Omala, Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Sapphire, Nycolube 22, Neox 800, dst. SPO ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli di Luar Negeri. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan darat/apung/udara bermotor atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
523125	Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
	Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan Kementerian Negara/Lembaga lain yang memiliki transaksi sejenis. BMP antara lain terdiri dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamina, Methanol. Serta Belanja atas SPO (Special Oil Non Pertamina), yaitu pelumas khusus yang tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkan untuk operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidrolic, Petronas Gear, Skydrol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, Shell

AKUN	PENJELASAN
	Omala, Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Sapphire, Nycolube 22, Neox 800, dst. SPO ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli di Luar Negeri. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
<b>52313</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.
523134	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.
523135	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan irigasi.
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan jaringan.
523137	Belanja Asuransi Jembatan
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>52319</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Lainnya</b>
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan lainnya.
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya

AKUN	PENJELASAN
	yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.
<b>524</b>	<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>
<b>5241</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>
<b>52411</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	<p>Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>b. Pengumandahan (detasering);</li> <li>c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;</li> <li>d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;</li> <li>e. Memperoleh pengobatan;</li> <li>f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;</li> <li>g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;</li> <li>h. Mengikuti diklat;</li> <li>i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;</li> <li>j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.</li> </ol>
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
	<p>Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.</p>
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	<p>Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>b. Pengumandahan (detasering);</li> <li>c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;</li> <li>d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;</li> <li>e. Memperoleh pengobatan;</li> <li>f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;</li> <li>g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;</li> <li>h. Mengikuti diklat;</li> </ol>

AKUN	PENJELASAN
	i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
	<p>Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:</p> <p>a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</p> <p>b. Biaya paket meeting (<i>halfday/fullday/fullboard</i>);</p> <p>c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;</p> <p>d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/ atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.</p> <p>Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.</p>
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
	<p>Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:</p> <p>a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</p> <p>b. Biaya paket meeting (<i>fullboard</i>);</p> <p>c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</p> <p>d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.</p> <p>Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.</p>
5242	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>
52421	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.
524212	Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar

AKUN	PENJELASAN
	negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.
<b>525</b>	<b>BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)</b>
<b>5251</b>	<b>Belanja Barang BLU</b>
<b>52511</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLU I</b>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
525112	Belanja Barang
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525113	Belanja Jasa
	Digunakan untuk mencatat memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525114	Belanja Pemeliharaan
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan BMN BLU.
525115	Belanja Perjalanan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU.
525116	Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>
	Digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang digunakan untuk pengelolaan <i>Endowment Fund</i> dan Dana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan sesuai maksud pembentukannya.
525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	Belanja BLU yang digunakan dalam rangka pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
525118	Belanja Ketersediaan Layanan BLU
	Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang dibayarkan oleh Satker BLU dengan sumber dana dari PNBPU BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
	Digunakan untuk mencatat keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.
<b>52512</b>	<b>Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU</b>
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
525122	Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU



AKUN	PENJELASAN
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU
525127	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU
<b>52513</b>	<b>Belanja Asuransi BMN di BLU</b>
525131	Belanja Asuransi BMN Gedung dan Bangunan - BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
525132	Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor - BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan darat/apung/udara bermotor di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
525133	Belanja Asuransi BMN Jembatan - BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>52514</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLU Kepada BLU Lain</b>
525141	Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
525142	Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU Lain yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.

AKUN	PENJELASAN
525143	Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
525144	Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU Lain yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
<b>52515</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLU II</b>
525151	Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup
	Digunakan untuk mencatat penyaluran dana program lingkungan hidup oleh BLU kepada penerima manfaat sesuai dengan mandat/perjanjian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
525155	Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Perjalanan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
52516	Belanja Barang Ekstrakomptabel BLU
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi BLU

AKUN	PENJELASAN
525163	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel BLU
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi BLU
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya – Ekstrakomptabel BLU
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman BLU.
<b>526</b>	<b>BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA</b>
<b>5261</b>	<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>
<b>52611</b>	<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>
526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Gedung dan Bangunan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk gedung/bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan Barang Fisik Lainnya oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.
<b>52612</b>	<b>Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang</b>
526121	Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk

AKUN	PENJELASAN
	sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan Dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung Dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk gedung/bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526124	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>52613</b>	<b>Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda - Darurat Bencana</b>
526131	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
526132	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.

AKUN	PENJELASAN
5262	<b>Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah</b>
52621	<b>Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah</b>
526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Dekonsentrasi. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
52622	<b>Belanja Barang Fisik Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah</b>
526222	Belanja Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526224	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa jalan, irigasi, dan jaringan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
5263	<b>Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>
52631	<b>Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>

AKUN	PENJELASAN
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk Rumah Aspirasi Anggota DPR. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>52632</b>	<b>Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda - Darurat Bencana</b>
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.
526323	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk jasa sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
<b>527</b>	<b>BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN</b>

AKUN	PENJELASAN
5271	<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden</b>
52711	<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden</b>
527111	Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
527112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
527113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>
<b>531</b>	<b>BELANJA MODAL TANAH</b>
<b>5311</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>
<b>53111</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>
531111	Belanja Modal Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola).
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengurukan/penimbunan, perataan dan

AKUN	PENJELASAN
	pematangan tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531116	<b>Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah</b>
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531117	<b>Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah</b>
	Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
<b>53112</b>	<b>Belanja Modal Tanah II</b>
531121	Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang Dilakukan oleh LMAN
	Digunakan untuk mencatat pengesahan Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang Dilakukan oleh LMAN.
<b>532</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>
<b>5321</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>
<b>53211</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku peralatan dan mesin pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola.
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan peralatan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



AKUN	PENJELASAN
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>53212</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin</b>
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
<b>533</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
<b>5331</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>
<b>53311</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pengadaan Gedung dan Bangunan secara swakelola.
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan.
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perizinan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

AKUN	PENJELASAN
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>53312</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</b>
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
	Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
<b>534</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>
<b>5341</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>53411</b>	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku Jalan dan Jembatan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola.
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534116	Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat

AKUN	PENJELASAN
	pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jalan dan jembatan secara swakelola.
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
<b>53412</b>	<b>Belanja Modal Irigasi</b>
534121	Belanja Modal Irigasi
	Digunakan untuk mencatat memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai.
534122	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku irigasi pada saat pengadaan irigasi secara swakelola.
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534124	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534125	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534126	Belanja Modal Perijinan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan irigasi secara swakelola.
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
<b>53413</b>	<b>Belanja Modal Jaringan</b>
534131	Belanja Modal Jaringan
	Digunakan untuk mencatat memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku jaringan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola.
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jaringan secara swakelola.
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
<b>53414</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan</b>
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
<b>53415</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Irigasi</b>
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
	Belanja Modal setelah perolehan irigasi yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
<b>53416</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Jaringan</b>
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
	Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
<b>536</b>	<b>BELANJA MODAL LAINNYA</b>
<b>5361</b>	<b>Belanja Modal Lainnya</b>
<b>53611</b>	<b>Belanja Modal Lainnya</b>

AKUN	PENJELASAN
536111	Belanja Modal Lainnya
	Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan <i>software</i> , pengembangan <i>website</i> , pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun yang dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya: pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.
536112	Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku Aset Lainnya pada saat pengadaan Aset lainnya secara swakelola sampai Aset Lainnya tersebut siap digunakan.
536113	Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan Aset Lainnya secara swakelola sampai dengan Aset Lainnya tersebut siap digunakan.
536114	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan Aset Lainnya secara swakelola sampai dengan Aset Lainnya tersebut siap digunakan.
536115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan Aset Lainnya secara swakelola sampai dengan Aset Lainnya tersebut siap digunakan.
536116	Belanja Modal Perizinan Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perizinan yang diperlukan pada saat pengadaan Aset Lainnya secara swakelola sampai dengan Aset Lainnya tersebut siap digunakan.
536117	Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan Aset Lainnya secara swakelola sampai dengan Aset Lainnya tersebut siap digunakan.
536118	Belanja Modal Lainnya – Penanganan Pandemi COVID-19

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>53612</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya</b>
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
	Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.
<b>537</b>	<b>BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)</b>
<b>5371</b>	<b>Belanja Modal BLU</b>
<b>53711</b>	<b>Belanja Modal BLU</b>
537111	Belanja Modal Tanah - BLU
	Belanja Modal Tanah BLU.
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU.
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU.
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU.
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU
	Belanja Modal Lainnya BLU.
<b>53712</b>	<b>Belanja Modal BLU - Darurat Bencana</b>
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
537125	Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Modal Lainnya BLU sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

AKUN	PENJELASAN
	Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>54</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG</b>
<b>541</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN BUNGA UTANG</b>
<b>5411</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek</b>
<b>54111</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara</b>
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Rupiah
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan surat Berharga lainnya.
541112	Belanja Pembayaran Kupon SBN-TDR
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja kupon SBN pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
541113	Belanja Pembayaran Bunga Repo - TDR
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja bunga transaksi repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
541119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk pengeluaran kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga Surat perbendaharaan Negara.
<b>54112</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas</b>
541121	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas.
541122	Belanja Pembayaran Kupon SBN Valas-TDR
	Digunakan untuk mencatat pembayaran kupon SBN Valas pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
541123	Belanja Pembayaran Bunga Repo Valas-TDR
	Digunakan untuk mencatat pembayaran bunga repo valas pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
541129	Belanja Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas.
<b>5412</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang</b>
<b>54121</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara</b>
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga Obligasi Negara yang harus dibayar oleh pemerintah.
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara.
<b>54122</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya</b>
541221	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan.
541229	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>54123</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri</b>
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri.
541232	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN Digunakan untuk mencatat Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN.
<b>54124</b>	<b>Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri</b>
541241	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri.
<b>54125</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas</b>
541251	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas.
541259	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara.
<b>5413</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara</b>
<b>54131</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang</b>
541311	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Panjang.
<b>54132</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek</b>
541321	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka Pendek.
541322	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Pendek.
<b>54133</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah</b>
541331	Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah.
541332	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah.
<b>54134</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas</b>
541341	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas.



AKUN	PENJELASAN
541342	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas.
<b>54135</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas</b>
541351	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas.
541352	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas.
<b>5414</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang</b>
<b>54141</b>	<b>Belanja Bunga Pinjaman program</b>
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
541419	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
	Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.
<b>54142</b>	<b>Belanja Bunga Pinjaman proyek</b>
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.
541429	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek.
<b>54144</b>	<b>Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadwalan Kembali Pinjaman</b>
541441	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Program
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga terhadap utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Program.
541442	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga terhadap utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Proyek.
541449	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadwalan Kembali Pinjaman
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadwalan kembali pinjaman.
<b>54146</b>	<b>Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri</b>
541461	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri.

AKUN	PENJELASAN
<b>542</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA</b>
<b>5421</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara</b>
<b>54211</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara</b>
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan surat perbendaharaan Negara.
542119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara.
<b>54212</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara</b>
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan obligasi Negara.
542129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount obligasi.
<b>54213</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas</b>
542131	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas.
542139	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas.
<b>54214</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas</b>
542141	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas Digunakan untuk pembayaran Discount Obligasi Negara Valas.
542149	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Valas Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Valas.
<b>544</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION</b>
<b>5441</b>	<b>Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara</b>
<b>54411</b>	<b>Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara</b>
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Digunakan untuk mencatat belanja yang timbul dari selisih lebih <i>clean price</i> yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN ( <i>buyback</i> ) dengan <i>carrying value</i> SUN. <i>Carrying value</i> SUN ialah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau <i>premium</i> .
544112	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.
544113	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Belanja <i>Pembayaran Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas.
544114	Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara Valas.
<b>545</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA</b>
<b>5451</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara</b>
<b>54511</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang</b>
545111	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang.
545119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang.
<b>54513</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount SPN Syariah</b>
545131	Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah
	Digunakan untuk pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah
545139	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah
<b>54514</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas</b>
545141	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas.
545149	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk pembayaran Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas.
<b>54515</b>	<b>Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas</b>
545151	Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
	Digunakan untuk pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
545159	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
<b>547</b>	<b>BELANJA DENDA</b>
<b>5471</b>	<b>Belanja Pembayaran Denda</b>
<b>54711</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Bunga</b>
547112	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas pinjaman perbankan.

AKUN	PENJELASAN
547113	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai.
547119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
<b>55</b>	<b>BELANJA SUBSIDI</b>
<b>551</b>	<b>BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA</b>
<b>5511</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Keuangan</b>
<b>55111</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Keuangan</b>
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	Digunakan untuk pembayaran subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR.
<b>5512</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM</b>
<b>55121</b>	<b>Belanja Subsidi BBM</b>
551211	Belanja Subsidi Avgas
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.
551212	Belanja Subsidi Avtur
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur.
551213	Belanja Subsidi Premium
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.
551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.
551218	Belanja Subsidi Elpiji
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan elpiji.
551219	Belanja Subsidi <i>Liquefied Gas for Vehicle (LGV)</i>
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi LGV yaitu

AKUN	PENJELASAN
	selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan LGV.
<b>5513</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM</b>
<b>55131</b>	<b>Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya</b>
551311	Belanja Subsidi Pangan
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK dengan Harga Pokok Beras BULOG.
551312	Belanja Subsidi Listrik
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero).
551313	Belanja Subsidi Benih
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.
551314	Belanja Subsidi Obat
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana.
551315	Belanja Subsidi Gula
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551316	Belanja Subsidi Pupuk
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551317	Belanja Subsidi Perawatan Beras
	Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Perawatan Beras.
551318	Belanja Subsidi Pengawasan Pupuk
	Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Pengawasan Pupuk.
551319	Belanja Subsidi Harga/Biaya Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih, subsidi pangan dan subsidi listrik.
<b>55132</b>	<b>Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak</b>
551321	Belanja Subsidi PPh-DTP
	Digunakan untuk mencatat menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551323	Belanja Subsidi BM-DTP
	Digunakan untuk mencatat menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

AKUN	PENJELASAN
<b>55133</b>	<b>Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya</b>
551331	Belanja Subsidi Haji
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551332	Belanja Subsidi Kendaraan Bermotor
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA, BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.
551339	Belanja Subsidi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>55134</b>	<b>Belanja Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II</b>
551341	Belanja Subsidi Minyak Goreng
	Subsidi harga minyak goreng, berupa PPN penjualan minyak goreng yang ditanggung pemerintah, untuk mengendalikan harga minyak goreng agar terjangkau masyarakat.
<b>5514</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO</b>
<b>55141</b>	<b>Belanja Subsidi dalam Rangka PSO</b>
551411	Belanja Subsidi PT KAI
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia.
551412	Belanja Subsidi PT PELNI
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI.
551413	Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indonesia.
551414	Belanja Subsidi TVRI
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada TVRI.
551415	Belanja Subsidi BULOG
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada BULOG.
551419	Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya.
<b>552</b>	<b>BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA</b>
<b>5521</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Keuangan</b>
<b>55211</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Keuangan</b>
552111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552112	Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bantuan uang muka yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana penyalur bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
<b>55212</b>	<b>Belanja Subsidi - Bunga Kredit</b>
552121	Belanja Subsidi Bunga KUT
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT).

AKUN	PENJELASAN
552122	Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi.
552123	Belanja Subsidi Bunga KOP
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop).
552124	Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA).
552125	Belanja Subsidi Bunga KPR
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
552126	Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi Bunga yang dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi.
552127	Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program eks KLBI.
552128	Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program Biofuel (Revitalisasi Perkebunan).
552129	Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya.
<b>55213</b>	<b>Belanja Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing</b>
552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
	Digunakan untuk mencatat pembayaran subsidi imbalan jasa penjaminan KUR kepada lembaga penjaminan yang seharusnya dibayar oleh penerima KUR.
552132	Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Klaim Resiko yang harus dibayar pemerintah kepada Perusahaan Penjaminan terhadap Penyaluran KKP (KKP).
<b>55214</b>	<b>Belanja Subsidi Kredit Program II</b>
552141	Belanja Subdidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Pemberian Pinjaman Kepada Pengusaha NAD dan Nias.
552142	Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

AKUN	PENJELASAN
552143	Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Subsidi Resi Gudang.
<b>5522</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan</b>
<b>55221</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan</b>
552211	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
<b>554</b>	<b>BELANJA SUBSIDI - DARURAT BENCANA</b>
<b>5541</b>	<b>Belanja Subsidi - Darurat Bencana</b>
<b>55411</b>	<b>Belanja Subsidi - Darurat Bencana I</b>
554111	Belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero).
554112	Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan -Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bantuan uang muka yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana penyalur bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
554113	Belanja Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
554114	Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit usaha rakyat dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
554115	Belanja Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 termasuk untuk PPh Pasal 21 DTP dan PPh Final UMKM DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri



AKUN	PENJELASAN
	Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
554116	Belanja Subsidi BM-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
554117	Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Lembaga Penyalur Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN terhadap Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
554118	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)-Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi imbal jasa penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada PT Jamkrindo, PT Askrindo, LPEI dan/atau PTPH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Telah Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Telah Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
554119	Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara atas pembayaran PPN yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 termasuk PPN DN DTP dan PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>55412</b>	<b>Belanja Subsidi - Darurat Bencana II</b>
554121	Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Pupuk pada BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
554122	Belanja Subsidi PPnBM Ditanggung Pemerintah - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi pajak berupa PPnBM Ditanggung

AKUN	PENJELASAN
	Pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19
<b>56</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>
<b>561</b>	<b>BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI</b>
<b>5611</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri</b>
<b>56111</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri</b>
561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.
<b>562</b>	<b>BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL</b>
<b>5621</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional</b>
<b>56211</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional</b>
562111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
<b>563</b>	<b>BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>5631</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah</b>
<b>56311</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah</b>
563111	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah.
<b>56312</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah</b>
563121	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
563122	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
563123	Belanja Hibah Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
<b>56313</b>	<b>Belanja Hibah - Darurat Bencana</b>
563131	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
	Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk pengeluaran penyaluran Hibah Pariwisata dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah penerima Hibah.
<b>565</b>	<b>BELANJA HIBAH LAINNYA</b>
<b>5651</b>	<b>Belanja Hibah Lainnya</b>
<b>56511</b>	<b>Belanja Hibah Lainnya</b>
565111	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya yang terkait dengan pendapatan

AKUN	PENJELASAN
	dan belanja hibah baik DN/LN. Biaya-biaya dimaksud antara lain <i>banking commission, bank chargers</i> dan <i>fee</i> lainnya. Akun ini hanya digunakan pada BA Es 999.02 (Pengelolaan Hibah).
<b>57</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>
	Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
<b>571</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>5711</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial</b>
<b>57111</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial</b>
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
571113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Jasa
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
571114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
571115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.
<b>572</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL</b>
<b>5721</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial</b>
<b>57211</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial</b>
572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan

AKUN	PENJELASAN
	sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
572113	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Jasa</b>
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
572114	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19</b>
	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
572115	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19</b>
	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.
<b>573</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
<b>5731</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial</b>
<b>57311</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial</b>
573111	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang</b>
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalan potensi dan sumber daya;</li> <li>3. Penggalan nilai-nilai dasar;</li> <li>4. Pemberian akses; dan/atau</li> <li>5. Pemberian bantuan usaha.</li> </ol>
573113	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Jasa</b>
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalan potensi dan sumber daya;</li> </ol>

AKUN	PENJELASAN
	3. Penggalian nilai-nilai dasar; 4. Pemberian akses; dan/atau 5. Pemberian bantuan usaha. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya..
573114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
573115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.
<b>574</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL</b>
<b>5741</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial</b>
<b>57411</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial</b>
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: -Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. -Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. -Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
574113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jasa
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan.

AKUN	PENJELASAN
	<p>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</p> <p>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</p> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
574114	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19</p>
	<p>Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.</p>
574115	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19</p>
	<p>Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.</p>
<b>575</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>
<b>5751</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>
<b>57511</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>
575111	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang</p>
	<p>Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul>
575113	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Jasa</p>
	<p>Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial;</li> <li>- Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> </ul>

AKUN	PENJELASAN
	- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
575114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
575115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.
576	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA</b>
5761	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana</b>
57611	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana</b>
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk mencatat belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li> <li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li> <li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li> <li>- Santunan duka cita; dan</li> <li>- Santunan kecacatan</li> </ul>
576113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li> </ul>

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li> <li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li> <li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li> <li>- Santunan duka cita; dan</li> <li>- Santunan kecacatan.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
576114	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19</p>
	<p>Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.</p>
576115	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang Penanganan Pandemi COVID-19</p>
	<p>Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporan.</p>
576116	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</p>
	<p>Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.</p>
<b>58</b>	<b>BELANJA LAIN-LAIN</b>
<b>581</b>	<b>BELANJA LAIN-LAIN</b>
<b>5811</b>	<b>Belanja Lain-lain Dana Cadangan</b>
<b>58111</b>	<b>Belanja Lain-lain Cadangan I</b>
581111	Belanja Cadangan Umum
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran dalam rangka membentuk yang menggunakan dana cadangan umum.
581112	Belanja Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang sifatnya darurat. Bagian Anggaran 999.08 (BA Belanja Lainnya).
581113	Belanja Cadangan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.
581114	Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran selisih harga beras PNS/TNI/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG.



AKUN	PENJELASAN
581115	Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah ( <i>Land Capping</i> )
	Pengeluaran yang diberikan kepada Departemen Keuangan untuk membiayai kenaikan harga tanah pada saat pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.
581116	Belanja Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro.
581117	Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan.
581118	Belanja Cadangan Risiko Lifting
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Risiko Lifting.
581119	Belanja Cadangan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Lainnya.
<b>58112</b>	<b>Belanja Lain-lain Cadangan II</b>
581121	Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik).
581122	Belanja Cadangan Beras Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Beras Pemerintah.
581123	Belanja Cadangan Benih Nasional
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Benih Nasional.
<b>5812</b>	<b>Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian</b>
<b>58121</b>	<b>Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian</b>
581211	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
	Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian.
581212	Belanja Operasional Kegiatan SKK Migas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Operasional Kegiatan SKK Migas.
<b>5813</b>	<b>Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN</b>
<b>58131</b>	<b>Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN</b>
581311	Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).
581312	Belanja Jasa Surveyor
	Pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan survey yang dilakukan oleh pihak ketiga oleh Kementerian Negara/ Lembaga tertentu yang khusus dilakukan untuk keperluan tugas pokok fungsinya termasuk proses pengalihan ilmu/pembelajaran pada SDM K/L yang bersangkutan dalam rangka survei tersebut.
581314	Belanja Jasa Pelayanan Bank Operasional
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank Operasional atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
581315	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan

AKUN	PENJELASAN
	anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (fee) Bank Kustodian.
581316	Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog.
581319	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya.
<b>5814</b>	<b>Belanja Lain-lain BUN</b>
<b>58141</b>	<b>Belanja Lain-lain BUN I</b>
581411	Belanja Iuran ke Lembaga Internasional
	Digunakan untuk mencatat Iuran Pemerintah ke Lembaga Internasional
581412	Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua
	Digunakan untuk mencatat Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua.
581413	Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga.
581414	Belanja Dana Penunjang (PHLN)
	Digunakan untuk mencatat pelaksanaan kegiatan Pemda bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda.
581415	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	Digunakan untuk mencatat rugi selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
581417	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	Pengeluaran yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.
581418	Belanja Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum
	Digunakan untuk mencatat Belanja Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum.
581419	Belanja Lain-lain BUN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain BUN Lainnya.
<b>58142</b>	<b>Belanja Lain-lain BUN II</b>
581421	Belanja Selisih Harga SBN
	Digunakan untuk mencatat Belanja Selisih Harga SBN.
581422	Belanja karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis BA Belanja Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Belanja karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis yang dialokasikan dari BA 999.08 (Belanja Lainnya).
<b>5815</b>	<b>Belanja Lain-lain Tanggap Darurat</b>
<b>58151</b>	<b>Belanja Lain-lain Tanggap Darurat</b>
581511	Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga
	Digunakan untuk mencatat Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga.

AKUN	PENJELASAN
581512	Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
	Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana.
58152	Belanja Lain-Lain - Penanganan Pandemi COVID-19
581521	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.
581522	Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja – Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.
581523	Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Dana Bantuan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan dampak pandemi COVID-19 termasuk pemberian bantuan pembayaran tagihan listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan golongan industri, bisnis, dan sosial.
<b>5816</b>	<b>Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D</b>
<b>58161</b>	<b>Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D</b>
581611	Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan <i>Exotic Currency</i>
	Selisih negatif transaksi belanja dalam valuta asing antara antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda serta selisih dari <i>Exotic Currency</i> .
<b>5819</b>	<b>Belanja Lain-lain Lainnya</b>
<b>58191</b>	<b>Belanja Lain-lain Lainnya</b>
581911	Belanja Pemilu
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan.
581919	Belanja Lain-lain
	Digunakan untuk pengeluaran belanja lainnya.

**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN TRANSFER KE DAERAH  
DAN DANA DESA**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>
<b>61</b>	<b>DANA BAGI HASIL</b>
<b>611</b>	<b>DANA BAGI HASIL PAJAK</b>
<b>6111</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
<b>61111</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
611111	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611112	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
<b>6112</b>	<b>Dana Bagi Hasil PBB</b>
<b>61121</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>
611211	Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611212	Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupaten/Kota sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611213	Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611214	Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611215	Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.
611216	Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota
	Digunakan untuk mencatat Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota.
<b>612</b>	<b>DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>6121</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi</b>
<b>61211</b>	<b>Dana Bagi Hasil Minyak Bumi</b>
612111	Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
612112	Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
612113	Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
	Digunakan untuk pembayaran tambahan Dana Bagi Hasil minyak bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
<b>6122</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi</b>
<b>61221</b>	<b>Dana Bagi Hasil Gas Bumi</b>
612211	Dana Bagi Hasil Gas Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil.
612212	Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
612213	Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
	Digunakan untuk pembayaran tambahan dana bagi hasil gas bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
<b>6123</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum</b>
<b>61231</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum</b>
612311	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612312	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil.
<b>6124</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi</b>
<b>61241</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi</b>
612411	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612412	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612413	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
<b>6125</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan</b>
<b>61251</b>	<b>Dana Bagi Hasil Kehutanan</b>
612511	Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil.
612512	Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota penghasil.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
612513	Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi
	Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kabupaten/kota.
<b>6126</b>	<b>Dana Bagi Hasil Perikanan</b>
<b>61261</b>	<b>Dana Bagi Hasil Perikanan</b>
612611	Dana Bagi Hasil Perikanan
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
<b>613</b>	<b>DANA BAGI HASIL CUKAI</b>
<b>6131</b>	<b>Dana Bagi Hasil Cukai</b>
<b>61311</b>	<b>Dana Bagi Hasil Cukai</b>
613111	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi sesuai dengan UU tentang APBN dan PP tentang Dana Perimbangan.
<b>62</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>
<b>621</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>
<b>6211</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>
<b>62111</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>
621111	Dana Alokasi Umum
	Pengeluaran Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian Propinsi.
621114	Koreksi Dana Alokasi Umum
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Dana Alokasi Umum.
<b>63</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>
<b>631</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>
<b>6311</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Reguler</b>
<b>63111</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Reguler</b>
631111	Dana Alokasi Khusus Reguler
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Reguler.
631113	Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler.
<b>6312</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan</b>
<b>63121</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan</b>
631211	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
631212	Dana Alokasi Khusus Penugasan
	Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik yang digunakan untuk mencapai sasaran prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah, dengan menu dan lokasi yang terbatas sesuai dengan UU APBN dan Perpres Rincian APBN.
<b>6313</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Afirmasi</b>
<b>63131</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Afirmasi</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
631311	Dana Alokasi Khusus Affirmasi
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Affirmasi
<b>6314</b>	<b>Tambahan DAK Fisik</b>
<b>63141</b>	<b>Tambahan DAK Fisik</b>
631411	Tambahan DAK Fisik
	Digunakan untuk mencatat tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik yang antara lain terdiri dari Penyelesaian DAK Fisik 2016, Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan, Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Irigasi.
<b>64</b>	<b>DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN DANA INSENTIF DAERAH</b>
<b>641</b>	<b>DANA OTONOMI KHUSUS</b>
<b>6411</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Aceh</b>
<b>64111</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Aceh</b>
641111	Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk NAD.
<b>6412</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Papua</b>
<b>64121</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Papua</b>
641211	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
641212	Dana Tambahan Infrastruktur Papua
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua.
<b>6413</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Papua Barat</b>
<b>64131</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Papua Barat</b>
641311	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua Barat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
641312	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Barat.
<b>642</b>	<b>DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>
<b>6421</b>	<b>Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>
<b>64211</b>	<b>Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>
642111	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
<b>643</b>	<b>DANA INSENTIF DAERAH</b>
<b>6431</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>
<b>64311</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
643111	Dana Insentif Daerah
	Digunakan untuk mencatat Dana Insentif Daerah.
<b>65</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK</b>
<b>654</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK</b>
<b>6541</b>	<b>Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus</b>
<b>65411</b>	<b>Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus</b>
654111	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)
	Digunakan untuk mencatat Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG).
654112	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
	Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik yang memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yaitu desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
<b>6542</b>	<b>Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah</b>
<b>65421</b>	<b>Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah</b>
654211	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran dana untuk Guru PNSD dan Tambahan Tunjangan Guru PNSD.
<b>6543</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>
<b>65431</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>
654311	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
<b>6545</b>	<b>Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)</b>
<b>65451</b>	<b>Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)</b>
654511	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
	Digunakan untuk mencatat Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).
<b>6546</b>	<b>Dana Darurat</b>
<b>65461</b>	<b>Dana Darurat</b>
654611	Dana Darurat
	Digunakan untuk mencatat Dana Darurat.
<b>6547</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</b>
<b>65471</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana</b>
654711	Dana Bantuan Operasional Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan
654712	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana



AKUN	PENJELASAN
<b>65472</b>	<b>Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</b>
654721	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
	Digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan.
<b>6548</b>	<b>Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisata</b>
<b>65481</b>	<b>Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan</b>
654811	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
654812	Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
654813	Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
654814	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
	Digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
<b>65482</b>	<b>Dana Pelayanan Kepariwisata</b>
654821	Dana Pelayanan Kepariwisata
	Digunakan untuk menyediakan dukungan dana bagi 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dengan fokus pada 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas.
<b>6549</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya</b>
<b>65491</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)</b>
654911	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
654912	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan
	Digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal.
<b>65492</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</b>
654921	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya
	Digunakan untuk menyediakan dukungan pendanaan bagi pemeliharaan dan

AKUN	PENJELASAN
	pemberdayaan museum dan taman budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.
<b>655</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK II</b>
<b>6552</b>	<b>Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>
<b>65521</b>	<b>Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>
655211	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Digunakan untuk mencatat bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
<b>6553</b>	<b>Dana Fasilitas Penanaman Modal</b>
<b>65531</b>	<b>Dana Fasilitas Penanaman Modal</b>
655311	Dana Fasilitas Penanaman Modal
	Digunakan untuk mencatat dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitas penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>6554</b>	<b>Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>
<b>65541</b>	<b>Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>
655411	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Digunakan untuk mencatat dana yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
<b>66</b>	<b>DANA DESA</b>
<b>662</b>	<b>DANA DESA</b>
<b>6621</b>	<b>Dana Desa</b>
<b>66211</b>	<b>Dana Desa</b>
662111	Dana Desa
	Digunakan untuk mencatat penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN PEMBIAYAAN**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>
<b>71</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>
<b>711</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>
<b>7111</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan</b>
<b>71111</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan</b>
	Penerimaan yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dari Bank dalam negeri.
711111	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
	Penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya dan besar penggunaan dalam pembiayaan dengan persetujuan DPR.
711112	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
	Penerimaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening dana investasi
711113	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
	Penerimaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening BUN untuk Obligasi
711114	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan.
711115	Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU.
711116	Penerimaan Pembiayaan SAL Earmark
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Earmark.
<b>71112</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Dana Moratorium</b>
711121	Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh
	Penerimaan dari cadangan moratorium Aceh
<b>7112</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan</b>
<b>71121</b>	<b>Penerimaan Kembali Investasi</b>
711211	Penerimaan Hasil Privatisasi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari hasil penjualan saham.
711212	Penerimaan Kembali Investasi pada BUMN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Investasi pada BUMN
711213	Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
711219	Penerimaan Kembali Investasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi selain yang berasal dari privatisasi.
<b>7113</b>	<b>Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi</b>
<b>71131</b>	<b>Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi</b>

AKUN	PENJELASAN
711311	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
	Penerimaan dari penjualan aset restrukturisasi perbankan/ pengembalian dana talangan dari BPPN
711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks. BPPN
	Penerimaan dari penjualan/ penyelesaian aset yang selama ini dimiliki oleh BPPN
711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).
<b>7114</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara</b>
<b>71141</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara</b>
711411	Penerimaan Penerbitan / Penjualan Surat Perbendaharaan Negara
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Perbendaharaan Negara yang jatuh tempo dalam periode tidak lebih dari satu tahun.
711412	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN <i>Non Public Goods</i>
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Perbendaharaan Negara yang jatuh tempo dalam periode tidak lebih dari satu tahun dalam rangka pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) <i>non public goods</i> serta <i>burden sharing</i> antara Bank Indonesia dan Pemerintah
<b>71142</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara</b>
711421	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Obligasi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari penerbitan/penjualan Obligasi Negara Rupiah Jangka Panjang
711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan bunga akrual obligasi negara jangka panjang dari obligor yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
711423	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan <i>Public Goods</i> Untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari penerbitan atau penjualan Obligasi Negara dalam rangka pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) <i>public goods</i> serta <i>burden sharing</i> antara Bank Indonesia dan Pemerintah.
711424	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan <i>Non-Public Goods</i> Untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari penerbitan atau penjualan Obligasi Negara dalam rangka pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) <i>non public goods</i> serta <i>burden sharing</i> antara Bank Indonesia dan Pemerintah

AKUN	PENJELASAN
<b>71144</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang</b>
711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka panjang
	Penerimaan dari penerbitan atau penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
711442	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Jangka panjang
	Penerimaan dari imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
<b>71145</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah</b>
711451	Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah
<b>71146</b>	<b>Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS</b>
711461	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui Surat Berharga Syariah Negara - PBS
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang dananya berasal dari penerbitan SBSN <i>Project Based Sukuk</i> .
<b>7115</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir</b>
<b>71151</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir</b>
711511	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir.
<b>7116</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara-Valuta Asing</b>
<b>71161</b>	<b>Penerimaan Obligasi Negara - Valuta Asing</b>
711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valas.
711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara-Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Utang Bunga Akrual Obligasi Negara-Valas.
<b>71162</b>	<b>Penerimaan Surat Perbendaharaan Negara-Valuta Asing</b>
711621	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara-Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara-Valas.
<b>71163</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan SPN Syariah Valas</b>
711631	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah Valas
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah Valas
<b>71164</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri-Jangka Panjang</b>
711641	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang.
711642	Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Valas-jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Valas-jangka Panjang.

AKUN	PENJELASAN
<b>71165</b>	<b>Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS</b>
711651	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang dananya berasal dari penerbitan SBSN Valas Project Based Sukuk.
<b>7117</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri</b>
<b>71172</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri</b>
711721	Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah.
711722	Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN.
711723	Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah
<b>712</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>
<b>7121</b>	<b>Penarikan Pinjaman Tunai</b>
<b>71213</b>	<b>Penarikan Pinjaman Tunai</b>
712131	Penarikan Pinjaman Tunai
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penarikan Pinjaman Tunai.
<b>7122</b>	<b>Penarikan Pinjaman Kegiatan</b>
<b>71226</b>	<b>Penarikan Pinjaman Kegiatan</b>
712261	Penarikan Pinjaman Kegiatan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penarikan Pinjaman Kegiatan.
<b>713</b>	<b>PENERIMAAN DARI PENJADWALAN KEMBALI POKOK UTANG LUAR NEGERI</b>
<b>7131</b>	<b>Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri</b>
<b>71311</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Tunai dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri</b>
713111	Penerimaan Pinjaman Tunai dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari Penjadwalan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman tunai. Akun 713111 menjadi penyeimbang akun 723111.
<b>71312</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Kegiatan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri</b>
713121	Penerimaan Pinjaman Kegiatan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari Penjadwalan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman kegiatan. Akun 1352/713121 menjadi penyeimbang akun 723211.
<b>714</b>	<b>PENERIMAAN DARI PENJADWALAN KEMBALI BUNGA UTANG LUAR NEGERI</b>
<b>7141</b>	<b>Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri</b>

AKUN	PENJELASAN
71411	<b>Penjadwalan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri</b>
714111	Penerimaan Pembiayaan dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari Penjadwalan kembali bunga utang luar negeri. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali. Akun 714111 menjadi penyeimbang akun 723311.
715	<b>PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN</b>
7151	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri</b>
71511	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri</b>
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemda
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari Pemda
715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari BUMD
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari BUMN
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari Lembaga Non Pemerintah
7152	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri</b>
71521	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan</b>
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
715214	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Non Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Non Pemerintah.
71522	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri tahun Anggaran Yang lalu</b>
715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu

AKUN	PENJELASAN
715222	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
715223	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
<b>717</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah</b>
<b>7171</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah</b>
<b>71711</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah</b>
717111	Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah
717112	Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi Pemerintah Untuk Pembiayaan Dana Geothermal
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi Pemerintah Untuk Pembiayaan Dana Geothermal
<b>71712</b>	<b>Penerimaan Pengembalian Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)</b>
717121	Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman PEN Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengembalian pokok Pinjaman PEN Daerah yang bersumber dari rupiah murni pengeluaran Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah
<b>7172</b>	<b>Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah</b>
<b>71721</b>	<b>Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah</b>
717211	Penerimaan Cicilan atas Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat penerimaan cicilan atas Piutang Penjaminan Pinjaman oleh BUMN/BUMD/Pemda.
717212	Penerimaan atas Pencairan Dana Cadangan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat penerimaan atas pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
717213	Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
717214	Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pemerintah atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19
<b>7173</b>	<b>Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara</b>
<b>71731</b>	<b>Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara</b>



AKUN	PENJELASAN
717311	Penerimaan Kembali Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali modal awal pembentukan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.
717312	Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Jangka Panjang untuk Pengadaan Tanah PSN.
<b>719</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN</b>
<b>7192</b>	<b>Penerimaan Piutang Yang Belum Direkonsiliasi</b>
<b>71921</b>	<b>Penerimaan Piutang Yang Belum Direkonsiliasi</b>
719211	Penerimaan Piutang Yang Belum Diidentifikasi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan piutang yang belum diidentifikasi siapa debiturnya.
719212	Penerimaan Selisih Piutang (on Account)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan atas selisih piutang.
719213	Penerimaan Piutang Yang Belum Disesuaikan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan piutang yang belum dilakukan penyesuaian.
<b>7193</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
<b>71931</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
719311	Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat pengembalian pinjaman PT. Lapindo Brantas Inc./PT. Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah atas pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak Lumpur Sidoarjo.
<b>72</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>
<b>721</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>
<b>7211</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan</b>
<b>72111</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan</b>
721111	Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
	Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri.
721112	Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
	Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri.
<b>72112</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan untuk Moratorium</b>
721121	Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
	Pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Eks Moratorium untuk Cadangan Aceh
<b>7212</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan</b>
<b>72121</b>	<b>Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi</b>

AKUN	PENJELASAN
721211	Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
	Pengeluaran untuk pembiayaan program restrukturisasi perbankan/dana talangan kepada BPPN
<b>72122</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional</b>
721221	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional.
<b>7213</b>	<b>Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara</b>
<b>72131</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara</b>
721311	Pengeluaran Pelunasan SPN
	Pelunasan/pembayaran kembali SPN.
721312	Pengeluaran Pelunasan SPN melalui Pembelian Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan penjadwalan kembali SPN. Karena tidak ada pengeluaran sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali.
<b>72132</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara</b>
721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara
	Pengeluaran karena pelunasan/pembayaran kembali Obligasi Negara jangka panjang.
721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan Obligasi Negara jangka panjang yang lewat pembelian kembali.
721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara
	Pembayaran bunga akrual obligasi negara jangka panjang kepada obligor (pembeli obligasi pemerintah) pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
<b>72134</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Panjang</b>
721341	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) – Jangka Panjang
	Pengeluaran untuk pelunasan SBSN jangka panjang.
721342	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara jangka panjang melalui pembelian kembali ( <i>buyback</i> ).
721343	Pengeluaran Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN-Jangka Panjang
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali ( <i>buyback</i> ) Imbalan dibayar Di muka Surat Berharga Syariah Negara - Jangka panjang.
<b>72135</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah</b>
721351	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah.
721352	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah-melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah-melalui Pembelian Kembali.
<b>7214</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir</b>
<b>72141</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
721411	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir.
721412	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
<b>7215</b>	<b>Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing</b>
<b>72151</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas</b>
721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas.
721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali.
721513	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
	Digunakan untuk mencatat Pembayaran Utang Bunga Akrual Obligasi Negara - Valas
<b>72152</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas</b>
721521	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas.
721522	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas melalui Pembelian Kembali.
<b>72153</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Valas</b>
721531	Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Valas
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Valas
721532	Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Valas melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Valas melalui Pembelian Kembali
<b>72154</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang</b>
721541	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang.
721542	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas-Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas-Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali.
721543	Pembayaran Imbalan Dibayar Di Muka Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pembayaran Imbalan Dibayar Di Muka Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang.

AKUN	PENJELASAN
7216	Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri
72163	Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri
721631	Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri – Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri – Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah
721632	Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri – Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN
	Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri – Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN
721633	Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri – Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah.
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri – Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah.
<b>722</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>
<b>7221</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai</b>
<b>72211</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai</b>
722113	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai
	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman tunai yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
<b>7222</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan</b>
<b>72221</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan</b>
722213	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan
	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman kegiatan yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
<b>7224</b>	<b>Pengembalian Pinjaman</b>
<b>72241</b>	<b>Pengembalian Pinjaman</b>
722411	Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i>
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i> pada BA 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah).
<b>723</b>	<b>PELUNASAN POKOK UTANG LUAR NEGERI MELALUI PENJADWALAN KEMBALI</b>
	Pengeluaran yang berasal dari Penjadwalan kembali utang luar-negeri jangka-panjang yang jatuh tempo selama tahun anggaran tetapi tidak dibayar kembali dengan uang. MAK-MAK di bawah sub kelompok ini hanya disediakan untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang luar negeri melalui penjadwalan kembali.
<b>7231</b>	<b>Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali – Pinjaman Tunai</b>
	Pengeluaran berkaitan dengan Penjadwalan kembali utang luar negeri dari pinjaman tunai.
<b>72311</b>	<b>Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Tunai</b>
723111	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Tunai
	Pengeluaran dari Penjadwalan kembali utang LN – pinjaman tunai.

AKUN	PENJELASAN
7232	<b>Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali – Pinjaman Kegiatan</b>
72321	<b>Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Kegiatan</b>
723211	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Kegiatan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Kegiatan.
7233	<b>Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali – Pinjaman Kegiatan</b>
72331	<b>Pengeluaran Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri</b>
723311	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
724	<b>PENYERTAAN MODAL NEGARA</b>
7241	<b>Penyertaan Modal Negara pada BUMN</b>
72411	<b>Penyertaan Modal Negara pada BUMN</b>
724111	PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Penyertaan modal negara pada BUMN
724112	Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN
	Digunakan untuk mencatat Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN.
724113	Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Negara pada BUMN untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
7242	<b>Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional</b>
72421	<b>Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional</b>
724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional.
7244	<b>Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah</b>
72441	<b>Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah</b>
724411	Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah.
7249	<b>Penyertaan Modal Negara Lainnya</b>
72491	<b>Penyertaan Modal Negara Lainnya</b>
724911	Penyertaan Modal Negara Lainnya
	Penyertaan modal pemerintah selain pada BUMN dan Badan Internasional.
724912	Penyertaan Modal Negara SMF
	Penyertaan modal negara pada SMF
724913	Penyertaan Modal Negara ke Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal negara pada Bank Indonesia

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
724914	Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
<b>725</b>	<b>PEMBERIAN PINJAMAN YANG BERSUMBER DARI SUBSIDIARY LOAN AGREEMENT</b>
<b>7251</b>	<b>Pemberian Pinjaman Dalam Negeri</b>
<b>72511</b>	<b>Pemberian Pinjaman Dalam Negeri</b>
725111	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah
	Investasi pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
725112	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD
	Investasi pemerintah pusat pada BUMD.
725113	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMN
	Investasi pemerintah pusat pada BUMN.
725114	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
	Investasi pemerintah pusat pada selain Pemda, BUMN, BUMD.
<b>7252</b>	<b>Pemberian Pinjaman Luar Negeri</b>
<b>72521</b>	<b>Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan</b>
725211	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	Pemberian pinjaman LN kepada Daerah tahun anggaran berjalan.
725212	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
	Pemberian pinjaman LN kepada BUMD tahun anggaran berjalan.
725213	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
	Pemberian pinjaman LN kepada BUMN tahun anggaran berjalan.
<b>72522</b>	<b>Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu</b>
725221	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu
	Pemberian pinjaman LN kepada daerah tahun anggaran yang lalu.
725222	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
	Pemberian pinjaman LN kepada BUMD tahun anggaran yang lalu.
725223	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
	Pemberian pinjaman LN kepada BUMN tahun anggaran yang lalu.
<b>726</b>	<b>DUKUNGAN INFRASTRUKTUR</b>
<b>7261</b>	<b>Dukungan Infrastruktur</b>
<b>72611</b>	<b>Dukungan Infrastruktur</b>
726111	Dukungan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat Dukungan Infrastruktur.
<b>727</b>	<b>PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH</b>
<b>7271</b>	<b>Investasi Pemerintah</b>
<b>72711</b>	<b>Investasi Pemerintah</b>
727111	Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran investasi pemerintah melalui BLU PIP

AKUN	PENJELASAN
	sesuai PP No.1/2008 tentang Investasi Pemerintah dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan.
727112	Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Dana Geothermal
	Digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Dana Geothermal.
727113	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
727114	Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan dan/atau penambahan dana kerja sama pembangunan internasional yang dikelola oleh BLU LDKPI.
<b>72712</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah</b>
727121	Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah.
<b>72713</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset Negara</b>
727131	Pengeluaran Pembiayaan untuk Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan investasi pemerintah dalam rangka pembentukan BLU LMAN sebagai modal awal.
727132	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan investasi Pemerintah dalam rangka pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
<b>72714</b>	<b>Pengeluaran Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)</b>
727141	Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah
	Digunakan untuk mencatat pemberian Pinjaman PEN Daerah yang bersumber dari rupiah murni pengeluaran Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah
<b>7272</b>	<b>Investasi Pemerintah untuk Kemudian Dipinjamkan</b>
<b>72721</b>	<b>Investasi Pemerintah untuk Kemudian Dipinjamkan kepada BUMN</b>
727211	Investasi Pemerintah untuk Kemudian Dipinjamkan kepada BUMN
	Digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah untuk Kemudian Dipinjamkan kepada BUMN.
<b>7273</b>	<b>Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah</b>
<b>72731</b>	<b>Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah</b>
727311	Pembayaran Penjaminan Pemerintah kepada Pihak Ketiga/ Kreditur
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam rangka pembayaran penjaminan pinjaman BUMN/BUMD/Pemda kepada kreditur.
727312	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
727313	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN – Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Penanganan Pandemi COVID-19
<b>729</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN</b>
<b>7292</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
<b>72921</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
729211	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat dana yang disiapkan Pemerintah sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai pinjaman dari Pemerintah kepada PT. Lapindo Brantas Inc./PT. Minarak Lapindo Jaya.
<b>79</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN</b>
<b>798</b>	<b>SUSPENSE PEMBIAYAAN</b>
<b>7981</b>	<b>Suspense Penerimaan Pembiayaan</b>
<b>79811</b>	<b>Suspense Penerimaan Pembiayaan</b>
798111	Suspense Penerimaan Pembiayaan
	Digunakan untuk mencatat selisih Penerimaan Pembiayaan antara Kementerian/Lembaga dengan BUN.
<b>79812</b>	<b>Suspense Pengeluaran Pembiayaan</b>
798121	Suspense Pengeluaran Pembiayaan
	Digunakan untuk mencatat selisih Pengeluaran Pembiayaan antara Kementerian/Lembaga dengan BUN.



**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN TRANSITORIS**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>8</b>	<b>NON ANGGARAN</b>
<b>81</b>	<b>PENERIMAAN NON ANGGARAN</b>
<b>811</b>	<b>PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK</b>
<b>8111</b>	<b>Penerimaan PFK 10 % Gaji</b>
<b>81111</b>	<b>Penerimaan PFK 10% Gaji Pemerintah Daerah</b>
811113	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah selaku Pekerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811114	Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji PNS Daerah
811115	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota selaku Pekerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811116	Penerimaan Setoran PFK 8% Gaji Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran PFK 8% Gaji Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota.
<b>81113</b>	<b>Penerimaan PFK 10% Gaji Pemerintah Pusat</b>
811131	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berasal dari PNS Pusat, POLRI/PNS POLRI, dan TNI/PNS Kemhan TNI
811132	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat.
811133	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri.
811134	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan.
811135	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan Dana PFK Iuran

AKUN	PENJELASAN
	Jaminan Kesehatan PNS Pusat selaku Pekerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811136	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Anggota Polri dan PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Anggota Polri dan PNS Polri selaku Pekerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811137	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Prajurit TNI dan PNS Kemhan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Prajurit TNI dan PNS Kemhan selaku Pekerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811138	Penerimaan Setoran/Potong PFK 8% Gaji Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong PFK 8% Gaji Pejabat Negara
<b>81114</b>	<b>Penerimaan Setoran/Potong Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN</b>
811141	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN Pemerintah Pusat selaku Pekerja.
811142	Penerimaan Setoran/Potong PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS-APBN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN.
811143	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN pada Satker BLU yang berasal dari Pendapatan BLU
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN selaku Pekerja pada Satker BLU yang berasal dari Pendapatan BLU
811144	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN dari Satker BLU selaku Pemberi Kerja
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN dari Satker BLU selaku Pemberi Kerja.
811145	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK pada Satker BLU yang berasal dari Pendapatan BLU
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK selaku Pekerja pada Satker BLU yang berasal dari Pendapatan BLU.
811146	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dari Satker BLU selaku Pemberi Kerja

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dari Satker BLU selaku Pemberi Kerja.
811147	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Pemerintah Pusat selaku Pekerja.
<b>81115</b>	<b>Penerimaan Setoran/Potongannya Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBD</b>
811151	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN Pemerintah Daerah selaku Pekerja.
811152	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja.
811153	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Pemerintah Daerah selaku Pekerja.
811154	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja.
<b>81116</b>	<b>Penerimaan Setoran/Potongannya Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara</b>
811161	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongannya Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara selaku Pekerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
811162	Penerimaan Setoran/Potongannya PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongannya PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pejabat Negara.
<b>81117</b>	<b>Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pihak Ketiga</b>
811171	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara dari PT. Taspen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara selaku pekerja yang dipungut oleh PT. Taspen berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.

AKUN	PENJELASAN
811172	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri dari PT Asabri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri selaku pekerja yang dipungut oleh PT Asabri berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
<b>81118</b>	<b>Penerimaan Setoran / Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Daerah</b>
811181	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD selaku Pekerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811182	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
<b>8112</b>	<b>Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan</b>
<b>81121</b>	<b>Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan</b>
811212	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
<b>8113</b>	<b>Penerimaan PFK Beras BULOG</b>
<b>81131</b>	<b>Penerimaan PFK Beras BULOG</b>
811311	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat
811312	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
811313	Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
<b>8114</b>	<b>Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah</b>
<b>81141</b>	<b>Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah</b>
811411	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi selaku Pemberi Kerja
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Provinsi selaku Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

AKUN	PENJELASAN
811412	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Pemberi Kerja
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
<b>8115</b>	<b>Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT</b>
<b>81151</b>	<b>Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT</b>
811511	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
<b>8116</b>	<b>Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat</b>
<b>81161</b>	<b>Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat bagian Pekerja Pemerintah Pusat</b>
811611	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari CPNS/PNS Pusat selaku Pekerja.
811612	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PNS Kemhan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari CPNS/PNS Kemhan selaku Pekerja
811613	Penerimaan Potongan Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PNS Kepolisian RI
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari CPNS/PNS Kepolisian RI selaku Pekerja
811614	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Prajurit TNI
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari dan Prajurit TNI selaku Pekerja.
811615	Penerimaan Potongan Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Anggota Kepolisian RI
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Anggota Kepolisian RI selaku Pekerja
811616	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pejabat Negara di Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pejabat Negara di Pusat selaku Pekerja

AKUN	PENJELASAN
811617	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PPPK Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari PPPK Pusat selaku Pekerja
<b>81162</b>	<b>Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat bagian Pekerja Pemerintah Daerah</b>
811621	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari PNS Daerah selaku Pekerja
811622	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pejabat Negara di Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pejabat Negara di Daerah (termasuk Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, dan Anggota DPD) selaku Pekerja.
811623	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja PPPK Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari PPPK Daerah selaku Pekerja
<b>81163</b>	<b>Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat bagian Pemberi Kerja Pemerintah Daerah</b>
811631	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja PNS Daerah
811632	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pejabat Negara di Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pejabat Negara di Daerah (termasuk Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, dan Anggota DPD)
811633	Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja PPPK Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja PPPK Daerah
8117	<b>Penerimaan Setoran/Potong PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain</b>
81171	<b>Penerimaan Setoran/Potong PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga yang Lain</b>

AKUN	PENJELASAN
811711	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari PNS Pusat berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811712	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Anggota Polri dan PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari Anggota Polri dan PNS Polri berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811713	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Prajurit TNI dan PNS Kemhan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari Prajurit TNI dan PNS Kemhan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811714	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari PNS Daerah berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811715	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari Pejabat Negara berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811716	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811717	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Pimpinan dan Anggota DPRD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Dana PFK Iuran Jaminan

AKUN	PENJELASAN
	Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811718	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PPNNP Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari PPNNP Pusat berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811719	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PPPK Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari PPPK Pusat berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
<b>81172</b>	<b>Penerimaan Setoran/Potong PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga yang Lain II</b>
811721	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PPNNP Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari PPNNP Daerah berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811722	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PPPK Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potong Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain dari PPPK Daerah berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
<b>8118</b>	<b>Penerimaan PFK Penutupan Rekening</b>
<b>81181</b>	<b>Penerimaan PFK Penutupan Rekening</b>
811811	Penerimaan Setoran Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Penutupan Rekening
<b>8119</b>	<b>Penerimaan PFK Lain-lain</b>
<b>81192</b>	<b>Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu</b>
811921	Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu.
<b>81193</b>	<b>Penerimaan Setoran PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah</b>



AKUN	PENJELASAN
811931	Penerimaan Dana PFK Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan setoran/potongan kewajiban iuran jaminan kesehatan yang belum dibayarkan oleh pemerintah provinsi kepada pihak penyelenggara program jaminan kesehatan, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
811932	Penerimaan Dana PFK Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Digunakan untuk mencatat penerimaan setoran/potongan kewajiban iuran jaminan kesehatan yang belum dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pihak penyelenggara program jaminan kesehatan, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
<b>812</b>	<b>PENERIMAAN WESEL PEMERINTAH</b>
<b>8121</b>	<b>Penerimaan Wesel Pemerintah</b>
<b>81211</b>	<b>Penerimaan Wesel Pemerintah</b>
812111	Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN
812112	Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP
<b>813</b>	<b>PENERIMAAN REIMBURESEMENT DALAM RANGKA PREFINANCING (PP) DAN PFK BUN LAINNYA</b>
<b>8131</b>	<b>Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya</b>
<b>81311</b>	<b>Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya</b>
813116	Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena Prefinancing REKSUS
	Digunakan untuk mencatat Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena Prefinancing REKSUS
813117	Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran <i>ineligible</i> )
	Digunakan untuk mencatat Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran <i>ineligible</i> )
813118	Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong
	Digunakan untuk mencatat Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong
<b>81312</b>	<b>Penerimaan Dana Talangan</b>
813122	Penerimaan Dana Talangan dari dana moratorium
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana Talangan dari dana moratorium
813123	Penerimaan Dana Talangan dari Rekening Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana Talangan dari Rekening Lainnya

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
813124	Penerimaan Pengembalian dana Talangan ke rekening lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian dana Talangan ke rekening lainnya
813125	Penerimaan Talangan Dana Cadangan Subsidi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan talangan dari Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
813126	Penerimaan Talangan Dana Cadangan DBH
	Digunakan untuk mencatat penerimaan talangan dari Dana Cadangan DBH kepada RKUN
813127	Penerimaan Talangan Dana Cadangan PMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan talangan dari Dana Cadangan PMN kepada RKUN
<b>815</b>	<b>PENERIMAAN TRANSITO</b>
<b>8151</b>	<b>Penerimaan Transito</b>
<b>81511</b>	<b>Penerimaan Transito</b>
815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Uang Persediaan baik yang sumber dananya Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri T.A. berjalan.
815113	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)
815114	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Uang Persediaan baik yang sumber dananya Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri T.A. yang lalu.
815115	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
<b>81512</b>	<b>Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN</b>
815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN.
815122	Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan/atau optimalisasi kas pemerintah.
<b>81513</b>	<b>Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan</b>
815131	Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dari Penyetoran dana Hibah Langsung yang telah disahkan ke kas negara.

AKUN	PENJELASAN
<b>81514</b>	<b>Penerimaan Atas Transaksi Pemindahan Kas Antar BLU</b>
815141	Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU Dari BLU Lain
	Digunakan untuk mencatat pengesahan pengeluaran non anggaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transfer Kas BLU dari Kementerian Keuangan
<b>8153</b>	<b>Penerimaan Persekot/ Uang Muka</b>
<b>81532</b>	<b>Penerimaan Uang Muka Transfer</b>
815321	Penerimaan Uang Muka Dana Perimbangan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Uang Muka Dana Perimbangan.
815322	Penerimaan Uang Muka Dana Otonomi Khusus
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Uang Muka Dana Otonomi Khusus.
<b>8154</b>	<b>Suspense Currency Loan</b>
<b>81541</b>	<b>Suspense Currency Loan</b>
815411	Suspense Currency Loan
	Akun Antara untuk mencatat perbedaan selisih kurs akibat perbedaan mata uang transaksi dengan mata uang pinjaman pada transaksi penarikan pinjaman. Pencatatan akun ini dilakukan untuk menihilkan saldo dari bank Lender (dummy Bank) pada masing-masing jenis mata uang.
<b>8155</b>	<b>Penerimaan Transitio Tambahan Uang Persediaan</b>
<b>81551</b>	<b>Penerimaan Transitio Uang Persediaan</b>
815511	Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
	Penerimaan transitio dari setoran kembali sisa TUP Dana Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri T.A. berjalan yang dipertanggungjawabkan oleh satker.
815513	Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBP (Swadana).
815514	Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu.
815515	Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak.
<b>8156</b>	<b>Penerimaan Escrow</b>
<b>81561</b>	<b>Penerimaan Escrow</b>
815611	Penerimaan Escrow Dana Reboisasi
	Penerimaan Escrow yang belum bisa dibagikan kepada pihak yang berhak s.d tahun anggaran berakhir.
815612	Penerimaan Escrow Dana Subsidi/PSO
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Escrow Dana Subsidi/PSO.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
815613	Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Bagi Hasil SDA
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Bagi Hasil SDA.
815614	Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Penyertaan Modal Negara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dana <i>escrow</i> dana penyertaan modal negara.
815615	Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan
815616	Penerimaan Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
815617	Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Penjaminan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Penjaminan
815618	Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
815619	Penerimaan Non Anggaran Dana Cadangan Alutsista
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Dana Cadangan Alutsista
<b>81562</b>	<b>Penerimaan Pengembalian <i>Escrow</i></b>
815621	Penerimaan Pengembalian <i>Escrow</i> Pajak
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pengembalian dana <i>escrow</i> pajak.
815622	Penerimaan Pengembalian <i>Escrow</i> PNPB
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pengembalian dana <i>escrow</i> PNPB.
<b>81563</b>	<b>Penerimaan <i>Escrow</i> II</b>
815631	Penerimaan Non Anggaran Pemindahbukuan Dana Investasi Pemerintah PEN dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pemindahbukuan Dana Investasi Pemerintah PEN dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Investasi Pemerintah PEN di BI
815632	Penerimaan Non Anggaran Penyetoran Penyelesaian Pokok dan/atau Hasil Investasi Pemerintah Dalam Bentuk Kas Ke Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Penyetoran Penyelesaian Pokok dan/atau Hasil Investasi Pemerintah Dalam Bentuk Kas Ke Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia
<b>8157</b>	<b>Transito Diskonto Surat Berharga Negara</b>
<b>81571</b>	<b>Transito Diskonto Surat Berharga Negara</b>
815711	Penerimaan Transito Diskonto Surat Berharga Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Transito Diskonto Surat Berharga Negara.
<b>8158</b>	<b>Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemerintah</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>81581</b>	<b>Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman</b>
815811	Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman Digunakan untuk mencatat Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman.
<b>816</b>	<b>KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN</b>
<b>8161</b>	<b>Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan</b>
<b>81611</b>	<b>Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan</b>
816111	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan Digunakan untuk mencatat Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
<b>8162</b>	<b>Penerimaan Jasa Perbankan</b>
<b>81621</b>	<b>Penerimaan Jasa Perbankan</b>
816211	Penerimaan Jasa Perbankan Biaya perbankan yang dicatat setelah ada rekonsiliasi bank
<b>8163</b>	<b>Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan</b>
<b>81631</b>	<b>Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan</b>
816311	Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan Kesalahan bank yang terdapat dalam rekening koran dan ditemukan saat proses rekonsiliasi bank (akun transaksi).
<b>817</b>	<b>PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA</b>
<b>8171</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga</b>
<b>81711</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga</b>
817111	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening
817113	Penerimaan Non Anggaran setoran dana rekening retur ke kas negara Digunakan untuk mencatat Penerimaan setoran uang dari rr kepada Bank Persepsi
<b>81712</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang Ditangguhkan</b>
817121	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan Penerimaan Pihak Ketiga setoran yang diterima dari RKUN yang belum teridentifikasi pihak penyeterannya. Pengakuan transaksi penerimaan kas ini di rekening kas ini belum dapat menambah nilai ekuitas dan dikategorikan dalam utang. Transaksi ini termasuk dalam transaksi yang ditangguhkan dan dicatat oleh satker BUN.
<b>8172</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya</b>
<b>81721</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam</b>
817211	Penerimaan Setoran Migas Penerimaan dari sektor migas yang masih belum diperhitungkan (bruto) dan dicatat oleh satker BUN
817212	Penerimaan Setoran Pertambangan Penerimaan dari sektor pertambangan yang masih belum diperhitungkan (bruto)
817213	Penerimaan Setoran Panas Bumi Penerimaan dari sektor geothermal yang masih belum diperhitungkan (bruto)
817214	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk menampung transaksi penerimaan retur atas pembayaran kewajiban kontraktual pemerintah sektor migas dan panas bumi pada Rekening Lainnya
817215	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN
817216	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
817217	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Penggantian Bonus Produksi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Penggantian Bonus Produksi
817218	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
<b>81722</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara</b>
817221	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
	Penerimaan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) secara bruto dan belum diperhitungkan.
817222	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel Online
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel <i>Online</i> .
<b>81723</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya</b>
817231	Penerimaan dari Aset Lainnya (Rek.Dana Talangan)
	Pelimpahan dari rekening dana talangan ke RKUN.
817232	Penerimaan dari Aset Lainnya (Rek.Bapertarum)
	Pelimpahan dari rekening Bapertarum ke RKUN.
817233	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rangka Tujuan Tertentu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu.
817234	Penerimaan dari Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan dari Aset Lainnya.
<b>8173</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas</b>
<b>81731</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas</b>
817311	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
	Penerimaan Pihak Ketiga Pajak Air Tanah bagian Pemda yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah diidentifikasi dengan Dit PNBPD DJA namun belum dibayarkan ke Pemda yang berhak.
817312	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	Penerimaan Pihak Ketiga Pajak Penerangan Jalan hak Pemda yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah diidentifikasi dgn Dit PNBPD DJA namun belum dibayarkan ke Pemda yang berhak.

AKUN	PENJELASAN
817313	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Lainnya pada Rekening Migas
817314	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Fee KKKS
	Penerimaan Pihak Ketiga Reimbursement DMO Fee KKKS yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah teridentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke KKKS yang berhak.
817315	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
	Penerimaan Pihak Ketiga Reimbursement PPN KKKS yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah teridentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817316	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
	Penerimaan Pihak Ketiga Reimbursement Underlifting KKKS yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817317	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Fee BP Migas
	Penerimaan Pihak Ketiga fee BP Migas yang telah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke BP Migas.
817318	Penerimaan Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
<b>81732</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito I</b>
817321	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
817322	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
817323	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
817324	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
817325	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
817326	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
817327	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
817328	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23

1

AKUN	PENJELASAN
817329	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Migas Lainnya
<b>81733</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito II</b>
817331	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
<b>8174</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas</b>
<b>81741</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas</b>
817411	Penerimaan Pihak Ketiga Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
	Penerimaan Pihak Ketiga Pertambangan yang telah diidentifikasi namun belum dibayarkan kepada Perusahaan Pertambangan Umum.
817412	Penerimaan Pihak Ketiga Penerbitan/ Penjualan Obligasi Negara - Valas
	Penerimaan Pihak ketiga Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas namun belum dibayarkan kepada yang berhak yang telah diidentifikasi dengan DJPU terkait.
817413	Penerimaan Pihak Ketiga Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
	Penerimaan Pihak Ketiga SPN-Bunga Obligasi Negara Valas namun belum dibayarkan kepada yang berhak yang telah diidentifikasi dengan DJPU terkait.
817414	Penerimaan Pihak Ketiga Penerbitan Surat Utang Negara
	Penerimaan Pihak Ketiga Surat Utang Negara yang telah diidentifikasi oleh DJPU namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817415	Penerimaan Pihak Ketiga-Penjualan SPN
	Penerimaan Pihak Ketiga penerbitan-Penjualan Obligasi Negara sesudah diidentifikasi dengan DJPU namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817416	Penerimaan Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
	Penerimaan Pihak Ketiga akibat penerbitan-Penjualan Obligasi Negara DN sesudah diidentifikasi oleh DJPU namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817417	Penerimaan Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN
	Penerimaan Pihak Ketiga yang telah diidentifikasi oleh DJPU terkait penerimaan SPN-Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817418	Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi
817419	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN
<b>81742</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito</b>
817421	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito - Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi.
817422	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito - Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito



AKUN	PENJELASAN
	Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi.
<b>81743</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Panas Bumi</b>
817431	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi.
<b>8175</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus</b>
<b>81751</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman</b>
817511	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri.
<b>8175</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus</b>
<b>81751</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman</b>
817511	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri.
<b>81752</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah</b>
817521	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri
<b>8176</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya</b>
<b>81761</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum I</b>
817611	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah.
817612	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.

AKUN	PENJELASAN
817613	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
817614	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
817615	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>NonPublic Goods</i>
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>NonPublic Goods</i>
817616	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>NonPublic Goods</i>
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>NonPublic Goods</i> .
817617	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah.
817619	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>81762</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN</b>
817621	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
817622	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
817623	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen.
817624	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.

AKUN	PENJELASAN
817626	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
817627	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
817628	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Bunga <i>Reverse Repo</i> Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Bunga <i>Reverse Repo</i> Ditangguhkan
817629	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>81763</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo</b>
817631	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
817632	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
817633	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
817634	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
817639	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>81764</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo</b>
817641	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
817642	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
817643	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi

AKUN	PENJELASAN
	Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen.
817644	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
817649	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>81765</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah</b>
817651	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD.
817652	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen.
817653	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro.
817659	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>81766</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD</b>
817661	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah.
817662	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen.
817663	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro.
817669	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi

AKUN	PENJELASAN
	Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>81767</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen</b>
817671	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah.
817672	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD.
817673	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro.
817679	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>81768</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro</b>
817681	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah.
817682	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD.
817683	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen.
817689	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>81769</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum II</b>
817691	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di

AKUN	PENJELASAN
	Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Public Goods
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Public Goods.
817692	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Public Goods
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Public Goods.
8177	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potong Pajak Rokok dan Piutang Lainnya</b>
81771	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potong Pajak Rokok dan Piutang Lainnya</b>
817711	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok sesuai dengan PMK 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang
	Digunakan untuk mencatat Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah induk yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.
817713	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan non anggaran hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi
817714	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan non anggaran Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
817715	Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Kontribusi Penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan sesuai dengan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.
817716	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana Hasil Pemotongan DAU Tambahan kepada sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan

AKUN	PENJELASAN
	Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
817717	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa
	Digunakan untuk mencatat penerimaan Dana Hasil Pemotongan (DHP) Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa.
817718	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN
	Digunakan untuk mencatat transaksi transitoris penerimaan Non Anggaran Pemotongan dan Pembayaran atas pengembalian pokok dan bunga Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN yang dananya bersumber selain dari Pemerintah Pusat.
<b>8179</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan</b>
<b>81791</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan</b>
817911	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan akibat transaksi mark as error pada SPAN.
<b>818</b>	<b>PENERIMAAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK</b>
<b>8181</b>	<b>Kiriman Uang antar Rekening Bank</b>
<b>81811</b>	<b>Kiriman Uang antar Rekening Bank</b>
818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank
	Penerimaan kiriman uang antar rekening yang dimiliki oleh satker BUN (KPPN dan Dit PKN )
<b>82</b>	<b>PENGELUARAN NON ANGGARAN</b>
<b>821</b>	<b>PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK</b>
<b>8211</b>	<b>Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10% Gaji</b>
<b>82113</b>	<b>Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10% Gaji</b>
821131	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
821132	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Taspen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Taspen.
821133	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Taspen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Taspen.
821134	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Asabri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Asabri

AKUN	PENJELASAN
821135	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Asabri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Asabri.
<b>8212</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan</b>
<b>82121</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan</b>
821211	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
821212	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
821213	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
<b>8213</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog</b>
<b>82131</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog</b>
821311	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
821312	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri
821313	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan
<b>8214</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan</b>
<b>82141</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan</b>
821411	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
<b>8215</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT</b>
<b>82151</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT</b>



AKUN	PENJELASAN
821511	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potong PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Setoran/Potong PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
<b>8216</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat</b>
<b>82161</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat</b>
821611	Pengeluaran Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pemerintah Pusat
821612	Pengeluaran Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pekerja Pemerintah Daerah
821613	Pengeluaran Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Dana PFK Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pemerintah Daerah
<b>8217</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji</b>
<b>82171</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji</b>
821711	Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
<b>8218</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening</b>
<b>82181</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening</b>
821811	Pengembalian Penerimaan Setoran Penutupan Rekening Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Setoran Penutupan Rekening Pihak Ketiga
<b>8219</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain</b>
<b>82191</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS</b>
821911	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
821912	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
<b>82192</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan</b>

AKUN	PENJELASAN
821921	Pengeluaran Dana PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Dana PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
<b>822</b>	<b>PELUNASAN WESEL PEMERINTAH</b>
<b>8221</b>	<b>Pelunasan Wesel Pemerintah</b>
<b>82211</b>	<b>Pelunasan Wesel Pemerintah</b>
822111	Pelunasan Wesel Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pelunasan Wesel Pemerintah
<b>823</b>	<b>PEMBAYARAN PFK PREFINANCING DAN PFK BUN LAINNYA</b>
<b>8231</b>	<b>Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya</b>
<b>82311</b>	<b>Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya</b>
823116	Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
	Digunakan untuk mencatat Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
823117	Pengisian Rekening Dana SAL
	Digunakan untuk mencatat Pengisian Rekening Dana SAL
823118	Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong
	Digunakan untuk mencatat Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong
<b>82312</b>	<b>Pengembalian Dana Talangan</b>
823122	Pengembalian Dana Talangan ke dana moratorium
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Dana Talangan ke dana moratorium
823123	Pengeluaran dana talangan dari rekening lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran dana talangan dari rekening lainnya
823124	Pengembalian dana talangan ke rekening lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian dana talangan ke rekening lainnya
823125	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan Subsidi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran talangan dari Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
823126	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan DBH
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran talangan dari Dana Cadangan DBH kepada RKUN
823127	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan PMN
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran talangan dari Dana Cadangan PMN kepada RKUN
<b>825</b>	<b>PENGELUARAN TRANSITO</b>
<b>8251</b>	<b>Pengeluaran Transito</b>
<b>82511</b>	<b>Pengeluaran Transito</b>
825111	Pengeluaran Uang Persediaan

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat penarikan Uang Persediaan baik yang sumber dananya Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri T.A. berjalan.
825113	Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana).
825114	Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu.
825115	Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak.
<b>82512</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN</b>
825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU.
825122	Pengembalian Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan/atau optimalisasi kas pemerintah.
<b>82513</b>	<b>Pengeluaran penysetoran dana hibah langsung yang telah disahkan</b>
825131	Pengeluaran penysetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran atas Penysetoran dana Hibah Langsung yang telah disahkan ke kas negara.
<b>82514</b>	<b>Pengeluaran Atas Transaksi Pemindahan Kas Antar BLU</b>
825141	Pengeluaran Atas Transfer Keluar Kas BLU Kepada BLU Lain
	Digunakan untuk mencatat pengesahan Penerimaan non anggaran atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transfer Kas BLU dari Kementerian Keuangan
<b>8252</b>	<b>Suspense TUP</b>
<b>82521</b>	<b>Suspense TUP</b>
825211	Suspense TUP
	Akun antara selisih setoran pengembalian TUP antara yang diterima dan yang disetor.
<b>8253</b>	<b>Pengeluaran Persekot/ Uang Muka</b>
<b>82532</b>	<b>Pengeluaran Uang Muka Transfer</b>
825321	Pengeluaran Uang Muka Dana Perimbangan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Uang Muka Dana Perimbangan.
825322	Pengeluaran Uang Muka Dana Otonomi Khusus
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Uang Muka Dana Otonomi Khusus.
<b>8255</b>	<b>Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan</b>
<b>82551</b>	<b>Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan</b>

AKUN	PENJELASAN
825511	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan
	Pengeluaran atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pembayaran TUP, baik yang sumber dananya Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
825513	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNB (Swadana).
825514	Pengeluaran Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu.
825515	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak.
<b>8256</b>	<b>Pengeluaran Escrow</b>
<b>82561</b>	<b>Pengeluaran Escrow</b>
825611	Pengeluaran Escrow Dana Reboisasi
	Pengeluaran atas pengajuan Resume Tagihan yang membebani Rekening Escrow.
825612	Pengeluaran Escrow Dana Subsidi/PSO
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Escrow Dana Subsidi/PSO.
825613	Pengeluaran Escrow Dana Bagi Hasil SDA
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Escrow Dana Bagi Hasil SDA.
825614	Pengeluaran Escrow Dana Penyertaan Modal Negara
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran dana escrow dana penyertaan modal negara.
825615	Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan
825616	Pengeluaran Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
825617	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Penjaminan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Penjaminan.
825618	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
825619	Pengeluaran Non Anggaran Dana Cadangan Alutsista
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Dana Cadangan Alutsista
<b>82562</b>	<b>Pengeluaran Pengembalian Escrow</b>
825621	Pengeluaran Pengembalian Escrow Pajak
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pengembalian dana escrow pajak.

AKUN	PENJELASAN
825622	Pengeluaran Pengembalian <i>Escrow</i> PNB
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pengembalian dana <i>escrow</i> PNB.
<b>82563</b>	<b>Pengeluaran Escrow II</b>
825631	Pengeluaran Non Anggaran Pemindahbukuan Dana Investasi Pemerintah PEN dari Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia ke Rekening Kas Umum Negara
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pemindahbukuan Dana Investasi Pemerintah PEN dari Rekening Investasi Pemerintah PEN di BI ke Rekening Kas Umum Negara
825632	Pengeluaran Non Anggaran Pencairan Dana Investasi Pemerintah PEN dari Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia ke Rekening Penerima Investasi
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pencairan Dana Investasi Pemerintah PEN dari Rekening Investasi Pemerintah PEN di Bank Indonesia ke Rekening Penerima Investasi
<b>8257</b>	<b>Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara</b>
<b>82571</b>	<b>Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara</b>
825711	Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara
	Digunakan untuk mencatat transito pengeluaran atas pengajuan resume tagihan diskonto SBN.
<b>8258</b>	<b>Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemerintah</b>
<b>82581</b>	<b>Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman</b>
825811	Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman.
<b>826</b>	<b>KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN</b>
<b>8261</b>	<b>Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan</b>
<b>82611</b>	<b>Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan</b>
826111	Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan
<b>827</b>	<b>PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA</b>
<b>8271</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga</b>
<b>82711</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga</b>
827111	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dari rr kepada Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening atau mencatat setoran dari rr kepada Bank Persepsi
827113	Pengeluaran Non Anggaran Pembayaran Kembali Retur kepada Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat pembayaran kembali retur kepada pihak ketiga yang dananya telah disetorkan dari rr ke Kas Negara (Persepsi)
<b>82712</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan</b>
827121	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan
	Pengeluaran dari setoran yang diterima dari RKUN yang belum teridentifikasi pihak penyetornya. Pengakuan transaksi penerimaan kas ini belum menambah nilai ekuitas dan dikategorikan dalam utang.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>8272</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya</b>
<b>82721</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam</b>
827211	Pengeluaran Setoran Migas pengeluaran dari sektor migas yang masih belum diperhitungkan (bruto).
827212	Pengeluaran Setoran Pertambangan Pengeluaran dari sektor pertambangan yang masih belum diperhitungkan (bruto)
827213	Pengeluaran Setoran Panas Bumi Pengeluaran dari sektor geothermal yang masih belum diperhitungkan (bruto)
827214	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pembayaran Kembali Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya Digunakan untuk mencatat pembayaran kembali retur atas pembayaran kewajiban kontraktual pemerintah sektor migas dan panas bumi pada Rekening Lainnya.
827215	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN
827216	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
827217	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pengembalian Bonus Produksi Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pengembalian Bonus Produksi
827218	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
<b>82722</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara</b>
827221	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara Pengeluaran penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) secara bruto dan belum diperhitungkan.
827222	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel Online Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel <i>Online</i>
<b>82723</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya</b>
827231	Pengeluaran ke Aset Lainnya (Rek.Dana Talangan) Pelimpahan dari RKUN ke rekening dana talangan.
827232	Pengeluaran ke Aset Lainnya (Rek.Bapertarum) Pelimpahan dari RKUN ke rekening Bapertarum.
827233	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu.
827234	Pengeluaran dari Aset Lainnya Digunakan untuk mencatat Pengeluaran dari Aset Lainnya.
<b>8273</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas</b>

AKUN	PENJELASAN
<b>82731</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas</b>
827311	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
	Pengeluaran Pihak Ketiga Pajak Air Tanah bagian Pemda yang terjadi akibat pengelolaan Migas setelah diidentifikasi dengan Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke Pemda yang berhak.
827312	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	Pengeluaran dari bagian Pajak Penerangan Jalan hak Pemda yang terjadi akibat adanya pengelolaan Migas setelah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke Pemda yang berhak.
827313	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Lainnya pada Rekening Migas.
827314	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Fee KKKS
	Pengeluaran dari bagian Reimbursement DMO Fee KKKS pengelolaan Migas setelah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke KKKS yang berhak.
827315	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
	Pengeluaran dari bagian Reimbursement PPN KKKS pengelolaan Migas setelah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
827316	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
	Pengeluaran dari bagian-Reimbursement Underlifting KKKS pengelolaan Migas setelah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
827317	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Fee BP Migas
	Pengeluaran dari bagian fee BP Migas setelah diidentifikasi Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke BP Migas.
827318	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas - Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan non anggaran Pihak Ketiga Migas - Fee Penjualan Migas Bagian Negara
<b>82732</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito I</b>
827321	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PPh minyak bumi saat reklasifikasi.
827322	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PPh gas bumi saat reklasifikasi.
827323	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PPh migas lainnya saat reklasifikasi.
827324	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan minyak bumi saat reklasifikasi.
827325	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PPh gas bumi saat reklasifikasi.
827326	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PBB minyak bumi

AKUN	PENJELASAN
	saat reklasifikasi.
827327	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
827328	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
827329	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Migas Lainnya
<b>82733</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito II</b>
827331	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
<b>8274</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas</b>
<b>82741</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas</b>
827411	Pengeluaran Pihak Ketiga Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
	Penerimaan Pihak Ketiga Pertambangan yang telah diidentifikasi namun belum dibayarkan kepada Perusahaan Pertambangan Umum.
827412	Pengeluaran Pihak Ketiga Penerbitan/ Penjualan Obligasi Negara - Valas
	Pengeluaran dari bagian hasil reklasifikasi dengan DJPU terkait penerimaan Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas sebelum dibayarkan kepada yang berhak.
827413	Pengeluaran Pihak Ketiga Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
	Pengeluaran dari bagian hasil reklasifikasi dengan DJPU terkait penerimaan Pihak Ketiga SPN-Bunga Obligasi Negara Valas sebelum dibayarkan kepada yang berhak.
827414	Pengeluaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Utang Negara
	Pengeluaran dari bagian hasil reklasifikasi dengan DJPU terkait penerimaan Pihak ketiga Surat Utang Negara sebelum dibayarkan kepada yang berhak.
827415	Pengeluaran Pihak Ketiga-Penjualan SPN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga-Penjualan SPN.
827416	Pengeluaran Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN.
827417	Pengeluaran Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN.
827418	Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi.
827419	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN.
<b>82742</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito</b>



AKUN	PENJELASAN
827421	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PBB pertambangan saat reklasifikasi.
827422	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan setoran bagian pemerintah pertambangan panas bumi saat reklasifikasi.
<b>82743</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Panas Bumi</b>
827431	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
<b>8275</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus</b>
<b>82751</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman</b>
827511	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri.
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri.
<b>82752</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah</b>
827521	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri.
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri.
<b>8276</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya</b>
<b>82761</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum I</b>
827611	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah.
827612	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.

AKUN	PENJELASAN
827613	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
827614	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
827615	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i>
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i> .
827616	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i>
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i> .
827617	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR Dalam Rupiah.
827619	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>82762</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN</b>
827621	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR SBN dalam Rupiah.
827622	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
827623	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
827624	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.

AKUN	PENJELASAN
827626	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
827627	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
827628	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Bunga <i>Reverse Repo</i> Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Bunga <i>Reverse Repo</i> Ditangguhkan
827629	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>82763</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo</b>
827631	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
827632	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
827633	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
827634	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
827639	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>82764</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo</b>
827641	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
827642	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunaka untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
827643	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi

AKUN	PENJELASAN
	Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
827644	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
827649	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>82765</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah</b>
827651	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD.
827652	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen.
827653	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro.
827659	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>82766</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD</b>
827661	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah.
827662	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen.
827663	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro.
827669	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya.

AKUN	PENJELASAN
<b>82767</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen</b>
827671	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah.
827672	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD.
827673	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro.
827679	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>82768</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro</b>
827681	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah.
827682	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD.
827683	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen.
827689	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>82769</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum II</b>
827691	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i>
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan

AKUN	PENJELASAN
	Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i> .
827692	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i>
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i> .
8277	<b>Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya</b>
82771	<b>Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya</b>
827711	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok sesuai dengan PMK 115/PMK.07/ 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
827712	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang
	Digunakan untuk mencatat Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah induk yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.
827713	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
	Digunakan untuk mencatat pengembalian penerimaan non anggaran hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi
827714	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
	Digunakan untuk mencatat penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
827715	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Kontribusi Penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan sesuai dengan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan
827716	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat penyetoran Dana Hasil Pemotongan DAU Tambahan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
827717	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa
	Digunakan untuk mencatat penyetoran Dana Hasil Pemotongan (DHP) Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
827718	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN
	Digunakan untuk mencatat transaksi transitoris pengeluaran Non Anggaran Pemotongan dan Pembayaran atas pengembalian pokok dan bunga Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN yang dananya bersumber selain dari Pemerintah Pusat
<b>8279</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan</b>
<b>82791</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan</b>
827911	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran akibat transaksi mark as error pada SPAN.
<b>828</b>	<b>PENGELUARAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK</b>
<b>8281</b>	<b>Kiriman Uang antar Rekening Bank</b>
<b>82811</b>	<b>Kiriman Uang antar Rekening Bank</b>
828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank
	Pelimpahan kiriman uang antar rekening yang dimiliki oleh satker BUN (KPPN dan Dit PKN).
<b>83</b>	<b>OUTPUT KINERJA</b>
<b>831</b>	<b>OUTPUT KINERJA</b>
<b>8311</b>	<b>Output Kinerja</b>
<b>83111</b>	<b>Output Kinerja</b>
831111	Output Kinerja
	Akun statistik untuk menghasilkan laporan kinerja

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



*Hadiyanto*  
HADİYANTO *dy*

### SEGMENT AKUN NERACA

KODE AKUN	URAIAN AKUN
1	ASET
11	ASET LANCAR
111	KAS DAN SETARA KAS
1111	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah
11111	Kas di Bank Indonesia dalam Rupiah
111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah
111112	Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat
111113	Kas di Rekening SAL
111114	Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong
111115	Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah
111116	Kas di Rekening Antara Reksus
111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah
111118	Kas di Rekening Sub BUN Talangan
111119	Kas di Rekening Penampungan Pendapatan Rekening Pembangunan Hutan
11112	Kas di Rekening Sub RKUN
111121	Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan
111122	Kas di Rekening Sub RKUN Pengeluaran
111123	Kas di Rekening Penerimaan Penysetoran Retur SP2D dalam Rupiah
11113	Kas di Rekening Surat Utang Negara
111131	Kas di Rekening Penerimaan Surat Utang Negara
111132	Kas di Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara
11114	Kas di Rekening Persepsi Pusat
111141	Kas di Rekening Persepsi Pusat
111142	Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
11115	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-SPAN
111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
1112	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Valuta Asing
11121	Kas di Bank Indonesia dalam Valuta Asing
111211	Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD
111212	Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
111213	Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya
111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing
111215	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD
111216	Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen
111217	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Yen
111218	Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro



KODE AKUN	URAIAN AKUN
111219	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro
11122	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing
111221	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
111222	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
111223	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
11123	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas
111231	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas USD - Non Gaji
111232	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas Euro - Non Gaji
1113	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya
11131	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia
111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah
111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>
111319	Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
11132	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
111322	Kas Pemerintah yang ada di K/L
111323	Kas Pemerintah yang ada di BLU
111324	Kas di Rekening PFK
111325	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
111326	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Hibah Luar Negeri Bencana Alam
111327	Kas di Rekening PHLN
111328	Kas di Rekening Dana Bergulir
111329	Kas lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
11134	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN
111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji
111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji
111343	Kas di Rekening Retur Reksus Pinjaman/Hibah/Surat Berharga Syariah Negara
1114	Kas di Rekening Kas di KPPN
11141	Kas di Bank Indonesia
111411	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
111412	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah
11142	Kas di Bank Umum
111421	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
111422	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
111423	Kas di Rekening Retur BO/Pos (KPPN)
11143	Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valuta Asing
111431	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD
111432	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen
111433	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro
11144	Kas KPPN di Bank Umum dalam Valuta Asing
111441	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/ Devisa Persepsi) dalam Valuta USD
11145	Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
111451	Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
11146	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing
111461	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD
111462	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen
111463	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro
111469	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya
1115	Kas dalam Transito
11151	Kas dalam Transito - BUN
111511	Kas dalam Transito - BUN
111512	Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/ Hibah
111513	Kas dalam Transito TUP
111514	Kas dalam Transito UP
111515	Kas dalam Transito BLU
111516	Kas dalam Transito-Transaksi Non Kas
111517	Kas dalam Transito-Transaksi DTP

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	111519 Kas dalam Transito Lainnya
11152	Kas dalam Transito - K/L
	111521 Kas dalam Transito - Perwakilan Luar Negeri
1116	Kas di Bendahara Pengeluaran
	11161 Kas di Bendahara Pengeluaran
	111611 Kas di Bendahara Pengeluaran
	111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
1117	Kas di Bendahara Penerimaan
	11171 Kas di Bendahara Penerimaan
	111711 Kas di Bendahara Penerimaan
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas
	11181 Setara Kas
	111811 Surat Berharga
	111812 Penempatan di Bank Umum
	111813 Reverse Repo
	111814 <i>Foreign Exchange</i>
	111819 Setara Kas lainnya
	11182 Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga
	111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
	111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
	111823 Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
	111824 Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi
	111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
	111826 Kas Lainnya di BLU
	111827 Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
1119	Kas pada Badan Layanan Umum
	11191 Kas - BLU
	111911 Kas dan Bank - BLU
	111912 Dana yang akan Dijaminkan - BLU
	111913 Dana yang akan Dipadankan - BLU
	111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
	11192 Setara Kas - BLU
	111921 Surat Berharga - BLU
	111929 Setara kas Lainnya - BLU
112	UANG MUKA REKENING BUN
	1121 Uang Muka Dari Rekening KUN
	11211 Uang Muka KUN UP
	112111 Uang Muka KUN UP - PP
	1122 Uang Muka Dari Rekening Khusus
	11221 Uang Muka Reksus UP

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	112211 Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
	11222 Uang Muka Reksus Non UP
	112221 Uang Muka Reksus Kosong
1123	Talangan kepada RKUN
	11231 Talangan kepada RKUN
	112311 Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
	112312 Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
	112313 Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
113	INVESTASI JANGKA PENDEK
1131	Investasi dalam Deposito
	11311 Investasi dalam Deposito
	113111 Investasi dalam Deposito Jangka Pendek
1132	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	11321 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	113211 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	11322 Investasi Jangka Pendek pada Surat Berharga Negara
	113221 Investasi Jangka Pendek pada SBN dalam Rangka Stabilisasi Pasar
	113222 Investasi Jangka Pendek pada SBN dalam Rangka Optimalisasi Kas
1133	Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum
	11331 Deposito Jangka Pendek - BLU
	113311 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
	113319 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
1134	Bagian Lancar Investasi Non Permanen
	11341 Bagian Lancar Investasi Non Permanen
	113411 Bagian Lancar Investasi Non Permanen
1139	Investasi Jangka Pendek Lainnya
	11391 Investasi Jangka Pendek Lainnya
	113911 Investasi Jangka Pendek Lainnya
114	BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA, DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
1141	Belanja Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	11411 Belanja Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	114111 Belanja Pegawai Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	114112 Belanja Barang yang Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	114113 Belanja Pembayaran Bunga Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	114114 Belanja Lain-Lain Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	114115 Belanja Modal Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	114116 Belanja Hibah Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	114117 Belanja Subsidi Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	114118 Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
1142	Uang Muka Belanja ( <i>prepayment</i> )
11421	Uang Muka Belanja Pemerintah Pusat ( <i>prepayment</i> )
114211	Uang Muka Belanja Pegawai ( <i>prepayment</i> )
114212	Uang Muka Belanja Barang ( <i>prepayment</i> )
114213	Uang Muka Belanja Modal ( <i>prepayment</i> )
114214	Uang Muka Belanja Pembayaran Bunga ( <i>prepayment</i> )
114215	Uang Muka Belanja Subsidi ( <i>prepayment</i> )
114216	Uang Muka Belanja Hibah ( <i>prepayment</i> )
114217	Uang Muka Belanja Bantuan Sosial ( <i>prepayment</i> )
114218	Uang Muka Belanja Lain-Lain ( <i>prepayment</i> )
11422	Uang Muka Transfer ke Daerah ( <i>prepayment</i> )
114221	Uang Muka Dana Perimbangan ( <i>prepayment</i> )
114222	Uang Muka Otonomi Khusus dan Penyesuaian ( <i>prepayment</i> )
1143	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
11431	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
115	PIUTANG
1151	Piutang Perpajakan
11511	Piutang Pajak PPh Migas
115111	Piutang PPh Minyak Bumi
115112	Piutang PPh Gas Bumi
115119	Piutang PPh Migas Lainnya
11512	Piutang Pajak PPh Non Migas
115121	Piutang PPh Pasal 21
115122	Piutang PPh Pasal 22
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor
115124	Piutang PPh Pasal 23
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan
115127	Piutang PPh Pasal 26
115128	Piutang PPh Final
115129	Piutang PPh Piutang PPh Fiskal Luar Negeri
11513	Piutang Pajak PPN
115131	Piutang PPN Dalam Negeri
115132	Piutang PPN Impor
115139	Piutang PPN Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
11514	Piutang Pajak PPnBM
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri
115142	Piutang PPnBM Impor
115149	Piutang PPnBM Lainnya
11515	Piutang Pajak PBB dan BPHTB
115151	Piutang PBB Pedesaan
115152	Piutang PBB Perkotaan
115153	Piutang PBB Perkebunan
115154	Piutang PBB Kehutanan
115155	Piutang PBB Pertambangan
115156	Piutang BPHTB
115159	Piutang PBB Lainnya
11516	Piutang Cukai dan Bea Meterai
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol
115163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai
115165	Piutang Bea Meterai
115169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya
11517	Piutang Pajak Lainnya
115171	Piutang Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM
115176	Piutang Bunga Penagihan PTL
11518	Piutang Pajak Perdagangan Internasional
115181	Piutang Bea Masuk
115182	Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya
115185	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar
11519	Piutang Bea Masuk Tindakan
115191	Piutang Bea Masuk Antidumping
115192	Piutang Bea Masuk Imbalan
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1152	Piutang Bukan Pajak

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
11521	Piutang Bukan Pajak
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
115212	Piutang Lainnya
11522	Piutang PT PPA
115221	Piutang PT. PPA
11523	Piutang Transfer ke Daerah
115231	Piutang Transfer Dana Perimbangan
115232	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
115239	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya
11524	Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
115241	Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
11525	Piutang Transfer ke Daerah-Diestimasi
115251	Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi
115252	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian-Diestimasi
11526	Piutang Subsidi
115261	Piutang Subsidi
1153	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
11531	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
115311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
11532	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU
115321	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU
1154	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
11541	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
11542	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
11543	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU
115431	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU
1155	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
11551	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
115511	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
115512	Bagian Lancar RDI
115513	Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
11552	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman
115521	Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	115522 Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	115523 Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	115524 Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman
	115525 Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
11553	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian AkruaI
	115531 Piutang Bunga Pemberian Pinjaman Penyesuaian
	115532 Piutang Denda Pemberian Pinjaman Penyesuaian
11559	Suspen Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman
	115591 Suspen Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	115592 Suspen Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	115593 Suspen Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	115594 Suspen Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman
	115595 Suspen Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
1156	Piutang dari KUN
11561	Piutang dari KUN
	115611 Piutang dari BUN
	115612 Piutang dari KPPN
	115613 Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima
	115614 Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima
	115615 Piutang dari Uang Muka Belanja Barang yang akan Diterima
	115616 Piutang dari Uang Muka Belanja Modal yang akan Diterima
	115617 Piutang dari Persekot Gaji yang akan Diterima
11563	Piutang dari Kas BLU
	115631 Piutang dari Kas BLU
11565	Piutang Kepada RKUN
	115651 Piutang Kepada RKUN
11566	Piutang Transit
	115661 Piutang dari Penerimaan Transit
11567	Piutang atas Komitmen <i>Treasury Dealing Room</i>
	115671 Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia
	115672 Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum
	115673 Piutang Komitmen atas Transaksi SBN-TDR
	115674 Piutang Komitmen atas Reverse Repo-TDR
	115675 Piutang Komitmen atas Repo-TDR



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	115676 Piutang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange-TDR</i>
11568	Piutang atas Transaksi <i>Treasury Dealing Room</i>
	115681 Piutang Bunga Penempatan pada Bank Indonesia
	115682 Piutang Bunga Penempatan pada Bank Umum
	115683 Piutang Kupon SBN
	115684 Piutang Bunga Reverse Repo
1157	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
	11571 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
	115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
	115712 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
	115713 Piutang BLU Penunjang Konstruksi
	115714 Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	115719 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	11572 Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
	115721 Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
	115722 Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	115729 Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	11573 Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
	115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
	115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
	115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
	11574 Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	115741 Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	11579 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
	115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
1158	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
	11581 Piutang Sewa - BLU
	115811 Piutang Sewa Tanah - BLU
	115812 Piutang Sewa Gedung - BLU
	115813 Piutang Sewa Ruangan - BLU
	115814 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU
	115815 Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya - BLU
	115819 Piutang Sewa Lainnya - BLU
	11582 Piutang dari Penjualan Aset - BLU
	115821 Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU
	115829 Piutang dari Penjualan Aset lainnya - BLU
	11583 Piutang dari Tukar Menukar Aset - BLU
	115831 Piutang dari Tukar Menukar Aset Tetap - BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	115839 Piutang dari Tukar Menukar Aset Lainnya - BLU
11589	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
	115891 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
1159	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya
	11591 Piutang Lancar Kredit Pemerintah
	115911 Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK)
	115912 Piutang Bunga Kredit Pemerintah (KUMK)
	115913 Piutang Denda Keterlambatan Bunga KUMK
	115914 Piutang Denda Penyaluran KUMK
11592	Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
	115921 Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
11593	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
	115931 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	115932 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar
	115939 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
116	<b>PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>
1161	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan</b>
	11611 <b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan</b>
	116111 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Migas
	116112 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas
	116113 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN
	116114 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPnBM
	116115 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB
	116116 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai
	116117 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya
	116118 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional
	116119 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bea Masuk Tindakan
1162	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak</b>
	11621 <b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak</b>
	116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB
	116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
11622	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA
116221	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA
11623	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
116231	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
116232	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar RDI
11624	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya
116241	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
116242	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
116243	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
116244	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar
116249	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
11625	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman
116251	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
116252	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
116253	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman
11626	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
116261	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
11627	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Subsidi
116271	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Subsidi
1163	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
11631	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
116311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1164	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
11641	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	116411 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
11642	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
	116421 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
1165	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
	11651 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
	116511 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
1166	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
	11661 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
	116611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
	116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
	116613 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi
	116614 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	116619 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	11662 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
	116621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
	116622 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	116629 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	11663 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
	116631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
	116632 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
	116639 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
11664	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	116641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
11669	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Operasional Lainnya BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
1167	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
11671	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa BLU
116711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
116712	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU
116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
116714	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
116719	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
11672	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset BLU
116721	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
116722	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
11673	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
116731	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
116732	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
11679	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Operasional Lainnya BLU
116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
1168	Investasi Diragukan Realisasinya
11681	Investasi Jangka Pendek Diragukan Realisasinya
116811	Investasi Jangka Pendek Pada SBN Diragukan Realisasinya
117	PERSEDIAAN
1171	Persediaan
11711	Persediaan Bahan untuk Operasional
117111	Barang Konsumsi
117112	Amunisi
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
117114	Suku Cadang
11712	Persediaan Bahan Untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
117121	Materai dan Leges
117122	Tanah Bangunan Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	117123 Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat
	117124 Peralatan dan Mesin Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	117125 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	117126 Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
	117127 Aset Lain-Lain Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
	117128 Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
	117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda – Dalam Proses
11713	Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
	117131 Bahan Baku
	117132 Barang dalam Proses
11714	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
	117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
11719	Persediaan Bahan Lainnya
	117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
	117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan
	117199 Persediaan Lainnya
1172	Persediaan Badan Layanan Umum
	11721 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
	117211 Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
	117212 Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
	117213 Persediaan BLU Penunjang Konstruksi
	117214 Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	117219 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	11722 Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
	117221 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
	117222 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	117229 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	11723 Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
	117231 Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
	117232 Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
	117239 Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya
1179	Persediaan yang Belum Diregister
	11791 Persediaan yang Belum Diregister
	117911 Persediaan yang Belum Diregister
118	PIUTANG PFK

KODE AKUN	URAIAN AKUN
1181	Piutang PFK I
11811	Piutang PFK I
118111	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai
118112	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara
118113	Piutang PFK Beras Bulog
118114	Piutang PFK 8% Gaji
118115	Piutang PFK Tabungan Wajib Perumahan
118116	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan Dan Anggota Polri/PNS Polri
118117	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Dari Pemerintah Selaku Pemberi Kerja
118118	Piutang PFK 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
118119	Piutang PFK Lain-lain
11812	Piutang PFK II
118121	Piutang PFK Wesel Pemerintah
118122	Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu
118123	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga yang Lain
118124	Piutang PFK 8% Gaji TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
118125	Piutang Dana PFK Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah
118126	Piutang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Pusat
1182	Piutang Pengembalian Escrow ke RKUN
11821	Piutang Pengembalian Escrow Pajak
118211	Piutang Pengembalian Escrow Pajak
11822	Piutang Pengembalian Escrow PNBP
118221	Piutang Pengembalian Escrow PNBP
12	INVESTASI JANGKA PANJANG
121	INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN
1212	Dana Restrukturisasi Perbankan
12121	Dana Restrukturisasi Perbankan
121211	Dana Restrukturisasi Perbankan
1213	Dana Bergulir
12131	Program Kemitraan (PK)
121311	Program Kemitraan (PK)
12132	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga
121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
12133	Dana Bergulir Lainnya
121331	Dana Bergulir Lainnya
1214	Investasi dalam Obligasi
12141	Investasi dalam Obligasi
121411	Investasi dalam Obligasi
1215	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
12151	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
121511	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
1216	Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
12161	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa - Non Permanen
121611	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen
121613	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen
121614	Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen
121615	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen
121619	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen
12162	Investasi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu - Non Permanen
121621	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Non Permanen
121622	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen
121629	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Non Permanen
12163	Investasi BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat - Non Permanen
121631	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen
121632	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen
121639	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen
1219	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
12191	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
12192	Investasi Non Permanen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
121921	Investasi Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah
122	INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN
1221	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
12211	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah
122111	Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero
122112	Penyertaan Modal Pemerintah pada PERUM
12212	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
122121	Penyertaan Modal Luar Negeri
12213	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya
122131	Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya
1222	Investasi Permanen Badan Layanan Umum
12221	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa - Permanen
122211	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen
122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen
122213	Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen
122214	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen
122219	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen
12222	Investasi BLU Pengelola Kawasan - Permanen
122221	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Permanen
122222	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen
122223	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Permanen
12223	Investasi BLU Pengelola Dana - Permanen
122231	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen
122232	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen
122239	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen
1229	Investasi Permanen Lainnya
12291	Investasi Permanen Lainnya
122911	Investasi dalam Obligasi
122912	Investasi pada Otorita
122913	Investasi pada Bank Indonesia
122919	Investasi Lain-lain
123	Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1231	Dana Bergulir Diragukan Tertagih
12311	Dana Bergulir Diragukan Tertagih
123111	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	123112 Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga
	123113 Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya
1232	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
	12321 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
	123211 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
1233	Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih
	12331 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Diragukan Tertagih
	123311 Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan Diragukan Tertagih
	123312 Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan Diragukan Tertagih
	123313 Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi Diragukan Tertagih
	123314 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Diragukan Tertagih
	123319 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Diragukan Tertagih
	12332 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu Diragukan Tertagih
	123321 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita Diragukan Tertagih
	123322 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Diragukan Tertagih
	123329 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya Diragukan Tertagih
	12333 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat Diragukan Tertagih
	123331 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Investasi Diragukan Tertagih
	123332 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih
	123339 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih
13	ASET TETAP
131	TANAH
	1311 Tanah
	13111 Tanah
	131111 Tanah
	1312 Tanah Belum Diregister
	13121 Tanah Belum Diregister
	131211 Tanah Belum Diregister

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
1313	Tanah Badan Layanan Umum
13131	Tanah - BLU
131311	Tanah - BLU
1314	Tanah Belum Diregister – BLU
13141	Tanah Belum Diregister – BLU
131411	Tanah Belum Diregister – BLU
132	PERALATAN DAN MESIN
1321	Peralatan dan Mesin
13211	Peralatan dan Mesin
132111	Peralatan dan Mesin
1322	Peralatan dan Mesin Belum Diregister
13221	Peralatan dan Mesin Belum Diregister
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister
1323	Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum
13231	Peralatan dan Mesin - BLU
132311	Peralatan dan Mesin - BLU
1324	Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU
13241	Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU
132411	Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU
133	GEDUNG DAN BANGUNAN
1331	Gedung dan Bangunan
13311	Gedung dan Bangunan
133111	Gedung dan Bangunan
1332	Gedung dan Bangunan Belum Diregister
13321	Gedung dan Bangunan Belum Diregister
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister
1333	Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
13331	Gedung dan Bangunan - BLU
133311	Gedung dan Bangunan - BLU
1334	Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU
13341	Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU
133411	Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU
134	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan
13411	Jalan, Irigasi dan Jaringan
134111	Jalan dan Jembatan
134112	Irigasi
134113	Jaringan
1342	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
13421	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister
	134212 Irigasi Belum Diregister
	134213 Jaringan Belum Diregister
1343	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum
	13431 Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU
	134311 Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU
1344	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU
	13441 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU
	134411 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU
135	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>
1351	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
	13511 Aset Tetap Renovasi
	135111 Aset Tetap Renovasi
	13512 Aset Tetap Lainnya
	135121 Aset Tetap Lainnya
1352	<b>Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum</b>
	13521 Aset Tetap Lainnya - BLU
	135211 Aset Tetap Lainnya - BLU
	13522 Aset Tetap Renovasi - BLU
	135221 Aset Tetap Renovasi - BLU
136	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>
1361	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>
	13611 Konstruksi Dalam Pengerjaan
	136111 Konstruksi Dalam pengerjaan
1362	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU</b>
	13621 Konstruksi Dalam Pengerjaan- BLU
	136211 Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU
137	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>
1371	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
	13711 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
	137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
	13712 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
	137121 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
1372	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
	13721 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
	137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
	13722 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
	137221 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
1373	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
13731	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan
13732	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
137321	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
1374	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
13741	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
13742	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
137421	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
139	<b>ASET TETAP YANG BELUM DIREGISTER</b>
1391	Aset Tetap yang Belum Diregister
13911	Aset Tetap yang Belum Diregister
139111	Aset Tetap yang Belum Diregister
14	<b>DANA CADANGAN</b>
141	<b>DANA CADANGAN</b>
1411	Dana Cadangan
14111	Dana Cadangan
141111	Dana Cadangan
15	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>
151	<b>PIUTANG TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN</b>
1511	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
15111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
151111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
1512	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU
15121	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum
151211	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum
152	<b>PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI</b>
1521	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
15211	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
1522	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
15221	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum
152211	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum
153	PIUTANG JANGKA PANJANG PEMBERIAN PINJAMAN
1531	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
15311	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
153111	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
153112	Aset Lainnya RDI
153113	Piutang yang belum tertagih ( <i>Unbilled</i> )
153114	Piutang yang belum teridentifikasi ( <i>Unidentified</i> )
153115	Selisih piutang ( <i>On Account</i> )
153116	Piutang yang belum terekonsiliasi ( <i>Unapplied</i> )
153117	Aset Lainnya Kredit Program
153118	Piutang Pemberian Pinjaman yang belum Disesuaikan
153119	Piutang Transito Pengalihan Pemberian Pinjaman
15319	Suspen Piutang Pemberian Pinjaman
153191	Suspen Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
154	PIUTANG JANGKA PANJANG KREDIT PEMERINTAH
1541	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah
15411	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
154111	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah KUT-TP 1999/2000
154112	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah Dana Cadangan KUT-TP
154113	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah KKop Pangan MP2000
154114	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah PIR dan UPP Perkebunan
154115	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah (KUMK)
154116	Piutang yang belum tertagih ( <i>unbilled</i> ) atas Kredit Pemerintah (KUMK)
15412	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah
154121	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah
154122	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah yang belum disesuaikan
15413	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah
155	PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA
1551	Piutang Jangka Panjang lainnya
15511	Piutang Jangka Panjang lainnya
155111	Piutang Jangka Panjang lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
15512	Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
155121	Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
15513	Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar
155131	Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar
1552	Piutang Jangka Panjang Subsidi
15521	Piutang Jangka Panjang Subsidi
155211	Piutang Jangka Panjang Subsidi
156	<b>PENYISIHAN PIUTANG JANGKA PANJANG</b>
1561	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran
15611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran
156111	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran
1562	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU
15621	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU
156211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU
1563	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
15631	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
1564	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
15641	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
156411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
1565	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
15651	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
156511	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
156512	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya RDI
156513	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya Kredit Program
1566	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah
15661	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah
156611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
156612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Kredit Investasi Pemerintah
15662	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Penjaminan Pemerintah
156621	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
1567	<b>PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG SUBSIDI</b>
15671	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi
156711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi
1569	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
15691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
15692	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
156921	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
15693	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar
156931	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar
16	<b>ASET LAINNYA</b>
161	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>
1611	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
16111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
1612	Aset Konsesi Jasa
16121	Aset Konsesi Jasa
161211	Aset Konsesi Jasa
16122	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Konsesi Jasa
161221	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Konsesi Jasa
162	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>
1621	Aset Tak Berwujud
16211	Goodwill
162111	Goodwill
16212	Hak Cipta
162121	Hak Cipta
16213	Royalti
162131	Royalti
16214	Paten



KODE AKUN	URAIAN AKUN
	162141 Paten
16215	Software
	162151 Software
16216	Lisensi
	162161 Lisensi
16217	Hasil Kajian/Penelitian
	162171 Hasil Kajian/Penelitian
16219	Aset Tak Berwujud Lainnya
	162191 Aset Tak Berwujud Lainnya
1622	Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum
16221	Software-Badan Layanan Umum
	162211 Software-Badan Layanan Umum
16222	Hak Cipta BLU
	162221 Hak Cipta BLU
16223	Royalti BLU
	162231 Royalti BLU
16224	Paten BLU
	162241 Paten BLU
16229	Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
	162291 Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
1623	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
16231	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
	162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
1624	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU
	16241 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU
	162411 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU
163	DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
1631	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
16311	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya I
	163111 Cadangan Dana Reboisasi
	163112 Cadangan Dana Subsidi/PSO
	163113 Cadangan Dana Bagi Hasil SDA
	163114 Dana untuk Penyertaan Modal Negara (PMN)
	163116 DAU yang belum dibagi
	163117 Dana pada Bapertarum
	163118 Cadangan Dana Sebelum disesuaikan
	163119 Dana Lainnya
16312	Trust Fund
	163121 Trust Fund
16313	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya II

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	163131 Dana Perhitungan Pihak Ketiga
	163132 Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Non Public Goods
	163133 Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Public Goods
	163134 Dana di Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)
	163135 Dana di Rekening Khusus Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Cluster A
	163136 Dana di Rekening Khusus Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Cluster B
1632	Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri
	16321 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri
	163211 Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri
164	DANA PENJAMINAN
	1641 Dana Cadangan Penjaminan
	16411 Dana Cadangan Penjaminan
	164111 Dana Cadangan Penjaminan
	1642 Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi
	16421 Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi
	164211 Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi
165	DANA KELOLAAN BLU
	1651 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
	16511 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
	165111 Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan
	165112 Dana Kelolaan BLU yang Ditarik ke Rekening BUN
	1652 Dana Jangka Panjang
	16521 Dana Jangka Panjang
	165211 Dana Jangka Panjang
166	ASET LAIN-LAIN
	1661 Aset Lain-lain
	16611 Aset Lain-lain K/L
	166111 Aset Lain-lain
	166112 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
	166113 Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan
	16612 Aset Lain-lain BUN
	166121 Aset Eks BPPN

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	166122 Aset yang Diserahkankelolakan pada PT Perusahaan Pengelola Aset
	166123 Aset dari BUMN yang belum ditetapkan Statusnya
	166124 Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
	166125 Aset Eks Kelolaan PT. PPA
	166126 Aset Eks Pertamina
	166127 Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
	166128 Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
	166129 Aset Lain-lain BUN
1662	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
16621	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
166211	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
166212	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
166213	Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
166214	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
1663	Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi
16631	Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP
166311	Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-PFK Minus
166312	Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPPR Minus
166313	Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPJ Minus
16632	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi
166321	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi - BPPR Minus
166322	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi - BPJ Minus
1664	Aset Lainnya yang Belum Diregister
16641	Aset Lainnya yang Belum Diregister
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister
167	ASET LAINNYA DARI UNIT PEMERINTAH LAINNYA
1671	Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya
16711	Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya
167111	Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya
168	ASET LAINNYA PEMBERIAN PINJAMAN
1681	Aset Lainnya Pemberian Pinjaman
16811	Aset Lainnya Pemberian Pinjaman
168111	Aset Lainnya Pemberian Pinjaman
168112	Aset Lainnya Piutang Jangka Panjang

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	168113 Aset Lainnya RDI
	168114 Aset Lainnya Kredit Program
169	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA
1691	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
16911	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
169112	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa
16912	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain K/L
169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
16913	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN
169131	Akumulasi Penyusutan Aset Eks BPPN
169132	Akumulasi Penyusutan Aset yang diserahkan/dikelola Pada PT Perusahaan Pengelola Aset
169133	Akumulasi Penyusutan Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya
169134	Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
169135	Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA
169136	Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina
169137	Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B
169138	Akumulasi Penyusutan Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
169139	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN
1692	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BLU
16921	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum
169211	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum
169212	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan Layanan Umum
1693	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
16931	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
169313	Akumulasi Amortisasi Royalti
169314	Akumulasi Amortisasi Paten
169315	Akumulasi Amortisasi Software
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
	169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan
1694	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya BLU
16941	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud-Badan Layanan Umum
169411	Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
169412	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU
169413	Akumulasi Amortisasi Royalti BLU
169414	Akumulasi Amortisasi Paten BLU
169415	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
169416	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
19	AKUN SETUP
191	AKUN SETUP
1911	Akun Set up A
19111	Akun Set up A
191111	Material
191112	Deffered COGS
1912	Cross Currency Type Account
19121	Cross Currency Type Account
191211	Cross Currency Type Account
2	KEWAJIBAN
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
211	UTANG PERHITUNGAN Fihak KETIGA
2111	Utang Perhitungan Fihak Ketiga
21111	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) I
211111	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai
211112	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara
211113	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
211114	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji
211115	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan
211116	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
211117	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Dari Pemerintah Selaku Pemberi Kerja
211118	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
211119	Utang Dana PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
21112	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya
211121	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain
211122	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penutupan Rekening
211123	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah
21115	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) II
211151	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji TNI/PNS Kemhan DAN Polri/PNS Polri
211152	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Pusat
211153	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Daerah
211154	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pemberi Kerja Pemerintah Daerah
211155	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan
211156	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG
21116	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok dan Pengalihan Piutang
211161	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok
211162	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengalihan Piutang
211163	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
211164	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
211165	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kontribusi Penerimaan Pajak Rokok untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan
211166	Utang perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa
211167	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN
212	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
2121	Utang kepada Pihak Ketiga I
21211	Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar
212114	Belanja Hibah yang Masih Harus Dibayar
212115	Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar
212116	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar
212119	Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar
21212	Utang kepada Pihak Ketiga BLU
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU
212122	Utang Usaha BLU
21213	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar
212131	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri yang Masih Harus Dibayar
212132	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar
212133	Penyertaan Modal Negara yang Masih Harus Dibayar
212134	RDI/RPD yang Masih Harus Dibayar
212135	Dukungan Infrastruktur yang Masih Harus Dibayar
212136	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar
212137	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar
21214	Pengeluaran Non Anggaran yang Masih Harus Dibayar
212141	Pengeluaran Non Anggaran PFK yang Masih Harus Dibayar
212142	Pelunasan Wesel Pemerintah yang Masih Harus Dibayar
212143	Pembayaran Prefinancing dan PFK BUN Lainnya yang Masih Harus Dibayar
212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar
212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar
21215	Utang Pihak Ketiga Migas
212151	Utang Pihak Ketiga – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
212152	Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
212153	Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
212154	Utang Pihak Ketiga Migas – PBB Migas dan Utang Lainnya
212155	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Bagian KKKS

KODE AKUN	URAIAN AKUN
212156	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
212157	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
212158	Utang Pihak Ketiga Migas Transito
212159	Utang Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara.
21216	Utang Pihak Ketiga Non Migas
212161	Utang Pihak Ketiga atas Penjualan SPN
212162	Utang Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
212163	Utang Pihak Ketiga-Bunga Obligasi Negara DN
212164	Utang Pihak Ketiga-Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas
212165	Utang Pihak Ketiga-Bunga Obligasi Negara Valas
212166	Utang Pihak Ketiga-Penerbitan Surat Utang Negara
212167	Utang Pihak Ketiga kepada Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
212168	Utang Pihak Ketiga Geothermal-Reimbursement PPN
212169	Utang Pihak Ketiga Non Migas Transito
21217	Utang Pihak Ketiga Komitmen <i>Treasury Dealing Room</i>
212171	Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia
212172	Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum
212173	Utang Komitmen atas Transaksi SBN-TDR
212174	Utang Komitmen atas Reverse Repo-TDR
212175	Utang Komitmen atas Repo-TDR
212176	Utang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange-TDR</i>
212177	Utang Komitmen atas Kupon SBN-TDR
21218	Utang Pihak Ketiga Transaksi <i>Treasury Dealing Room</i>
212181	Utang Repo-TDR
21219	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya I
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
212192	Dana Pihak Ketiga
212193	Dana Pihak Ketiga BLU
212194	Utang Pihak Ketiga - PBB Panas Bumi
212195	Utang Pihak Ketiga - Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi
212196	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – Reimbursement PPN
212197	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – PBB Panas Bumi



KODE AKUN	URAIAN AKUN
	212198 Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi - Penggantian Bonus Produksi
	212199 Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan
2122	Utang kepada Pihak Ketiga II
21221	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya II
	212211 Utang Pihak Ketiga - Reimbursement PPN Panas Bumi
	212212 Utang Transito Panas Bumi
213	UTANG BUNGA
2131	Utang Biaya Pinjaman
21311	Utang Bunga
	213111 Utang Bunga Luar Negeri
	213112 Utang Bunga Dalam Negeri
	213113 Utang Bunga-Pinjaman Dalam Negeri
21312	Discount
	213121 Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
	213122 Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
	213123 Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
	213124 Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing
	213125 Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah
	213126 Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	213127 Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
	213128 Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Valuta Asing
21313	Premium
	213131 Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.
	213132 Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Valuta Asing
	213133 Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	213134 Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
21314	Utang Diskonto yang Belum Disesuaikan
	213141 Utang Diskonto yang Belum Disesuaikan
21315	Utang Bunga Transaksi <i>Treasury Dealing Room</i>
	213151 Utang Bunga Repo-TDR
214	UTANG SUBSIDI
2141	Utang Subsidi

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
21411	Utang Subsidi
214111	Utang Subsidi
214112	Utang Subsidi - Estimasi
2142	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar
21421	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar
214211	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar
215	UTANG TRANSFER
2151	Utang Transfer
21511	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar
215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar
21512	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar - Estimasi
215121	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar - Estimasi
215122	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar - Estimasi
216	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG
2161	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
21611	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Pinjaman
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
21612	Bagian Lancar Obligasi Negara-Rupiah
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
21613	Bagian Lancar Obligasi Negara-Valuta Asing
216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing
21614	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
21615	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
217	UTANG SURAT BERHARGA NEGARA
2171	Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek
21711	Utang Surat Perbendaharaan Negara Rupiah
217111	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
217112	Utang Obligasi Negara dalam Rupiah
21712	Utang Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	217121 Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
	217122 Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing
21713	Utang Surat Berharga Syariah Negara-Rupiah Jangka Pendek
	217131 Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	217132 Surat Perbendaharaan Negara Syariah
21714	Utang Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing Jangka Pendek
	217141 Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
218	UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN
2181	Utang Yang Belum Ditagihkan
	21811 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
	218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
2182	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
	21821 Hibah Langsung yang Belum Disahkan
	218211 Hibah Langsung yang Belum Disahkan
219	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
2191	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
	21911 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
	219111 Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh
	219112 Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM
	219113 Utang Kelebihan Bayar Cukai
	219114 Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB
	219115 Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB
	219116 Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk
	219117 Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar
	21912 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak
	219121 Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Sumber Daya Alam
	219122 Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Bagian Laba BUMN
	219123 Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya
2192	Pendapatan Diterima di Muka
	21921 Pendapatan Diterima di Muka
	219211 Pendapatan Sewa Diterima Di Muka
	219212 Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Di Muka
	219214 Pendapatan Diterima di Muka BLU
	21922 Pendapatan Bea Masuk Diterima Di Muka
	219221 Pendapatan Bea Masuk Diterima Di Muka

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	219222 Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka KITE Diterima Di Muka
	219223 Pendapatan Pabean Lainnya Diterima Di Muka
	219224 Pendapatan Bea Masuk Antidumping Diterima Di Muka
	219225 Pendapatan Bea Masuk Imbalan Diterima Di Muka
	219226 Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Diterima Di Muka
	21923 Pendapatan Bea Keluar Diterima Dimuka
	219231 Pendapatan Bea Keluar Diterima Di Muka
2193	Uang Muka Rekening Khusus
	21931 Uang Muka Rekening Khusus
	219311 Uang Muka Rekening Khusus
2194	Uang Muka
	21941 Uang Muka dari KUN
	219411 Uang Muka dari KUN
	219412 Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga
2195	Uang Muka dari KPPN
	21951 Uang Muka dari KPPN
	219511 Uang Muka dari KPPN
2196	Pendapatan Yang Ditangguhkan
	21961 Pendapatan yang Ditangguhkan
	219611 Pendapatan yang Ditangguhkan
	219612 Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
	219613 Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
	219614 Pendapatan Bunga <i>Reverse Repo</i> Ditangguhkan
	21962 Pendapatan Migas yang Ditangguhkan
	219621 Pendapatan Panas Bumi Ditangguhkan
	219622 Pendapatan Migas Ditangguhkan
	219623 Pendapatan Setoran Pertambangan Ditangguhkan
	219624 Pendapatan yang Ditangguhkan karena Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya
	21963 Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan
	219631 Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Dalam Negeri
	219632 Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri
2197	Utang Kepada KUN
	21971 Utang Kepada KUN
	219711 Utang Kepada KUN
	21972 Utang Kepada kas BLU
	219721 Utang Kepada kas BLU

KODE AKUN	URAIAN AKUN
2198	Utang Kepada RPL
21981	Utang Kepada RPL
219811	Utang Kepada RPL
21982	Utang Talangan
219821	Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
219822	Utang Talangan Dana Cadangan DBH
219823	Utang Talangan Dana Cadangan PMN
2199	Utang Jangka Pendek Lainnya
21991	Utang Jangka Pendek lainnya
219911	Utang Jangka Pendek Perbankan
219912	Dana yang akan diserahkan kepada BLU Bidang Pendidikan
219913	Utang Jangka Pendek Lain-lain
219914	Utang Retensi
21992	Utang jangka Pendek dalam Rangka Rekening Khusus
219921	Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditanggungkan Dalam Negeri
219922	Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditanggungkan Luar Negeri
219923	Utang Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu
21993	Utang Escrow
219931	Utang Escrow Dana Reboisasi
219932	Utang Escrow Dana Subsidi/PSO
219933	Utang Escrow Dana Bagi Hasil SDA
219934	Utang Escrow Dana Penyertaan Modal Negara
219935	Utang Pengembalian Escrow Pajak
219936	Utang Pengembalian Escrow PNBK
219937	Utang Dana Penjaminan
21994	Utang Jangka Pendek Sementara
219941	Utang Jangka Pendek Sementara karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga
219942	Utang Jangka Pendek Sementara Pengembalian Uang Persediaan (UP)
219943	Utang Jangka Pendek Sementara Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP)
219944	Utang Jangka Pendek Sementara karena kesalahan Sistem Perbankan
21995	Utang Permintaan Uang Muka Belanja
219951	Utang Permintaan Persekot Gaji
21996	Utang Bendahara
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
219962	Utang Perwalian Bendahara yang Belum Disampaikan Kepada yang Berhak

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	219963 Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor
	219964 Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor
21997	Pembiayaan Surat Perbendaharaan Negara Ditangguhkan
	219971 Pembiayaan Surat Perbendaharaan Negara Ditangguhkan
	219972 Pembiayaan Surat Perbendaharaan Negara Syariah Ditangguhkan
21998	Pembiayaan yang diterima RKUN yang Ditangguhkan
	219981 Pembiayaan yang diterima RKUN yang Ditangguhkan
21999	Pembiayaan yang Ditangguhkan
	219991 Pembiayaan yang Ditangguhkan Dalam Negeri
	219992 Pembiayaan yang Ditangguhkan Luar Negeri
	219993 Pembiayaan Pinjaman Program yang Ditangguhkan
	219994 Pembiayaan Pinjaman Proyek yang Ditangguhkan
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
221	UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI
2211	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
	22111 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
	221111 Utang Perbankan Jangka Panjang
22112	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan BLU
	221121 Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
2212	Utang Jangka Panjang - Surat Berharga Negara
22121	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah
	221211 Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah
22122	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	221221 Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
22123	Utang Surat Berharga Syariah Negara Rupiah Jangka Panjang
	221231 Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah
22124	Utang Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Panjang
	221241 Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing
22125	Discount
	221251 Discount Obligasi Negara - dalam Rupiah
	221252 Discount Obligasi Negara - dalam Valuta Asing
	221253 Discount SBSN - dalam Rupiah

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	221254 Discount SBSN - dalam Valuta Asing
22126	Premium
	221261 Premium Obligasi Negara - dalam Rupiah
	221262 Premium Obligasi Negara - dalam Valuta Asing
	221263 Premium SBSN - dalam Rupiah
	221264 Premium SBSN - dalam Valuta Asing
2213	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
	22131 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
	221311 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
2214	Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan
	22141 Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan
	221411 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan
2215	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
	22151 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
	221511 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
2216	Utang Jangka Panjang Subsidi
	22161 Utang Jangka Panjang Subsidi
	221611 Utang Jangka Panjang Subsidi
2217	Utang Jangka Panjang - Pinjaman Dalam Negeri
	22177 Utang Jangka Panjang - Pinjaman Dalam Negeri
	221771 Utang Jangka Panjang - Pinjaman Dalam Negeri
2219	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
	22191 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
	221911 Utang Jangka Panjang Bapertarum
	221912 Utang Jangka Panjang Rekening Pembangunan Hutan
	221919 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
	22192 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
	221929 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
222	UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI
	2221 Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri
	22211 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan
	222115 Utang Program
	222116 Utang Proyek
	2222 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan
	22221 Utang Sewa-Beli
	222211 Utang Sewa-Beli
	2223 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
	22231 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
	222311 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lain-lain

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
225	UTANG TRANSFER JANGKA PANJANG
2251	Utang Transfer Jangka Panjang
22511	Utang Transfer Jangka Panjang
225111	Utang Transfer Dana Perimbangan Jangka Panjang
225112	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Jangka Panjang
226	KEWAJIBAN KONSESI JASA
2261	Kewajiban Konsesi Jasa
22611	Kewajiban Konsesi Jasa
226111	Kewajiban Konsesi Jasa
226112	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pembayaran Kepada Mitra
226113	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra
23	DICADANGKAN UNTUK KOMITMEN BELANJA
231	DICADANGKAN UNTUK KOMITMEN BELANJA
2311	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja
23111	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja
231111	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja
29	AKUN SETUP
291	AKUN SETUP
2912	Akun Set up A
29121	Akun Set up
291211	Inventory AP Accrual
291212	Expenses AP Acrual
291213	Unearned Revenue
3	EKUITAS
31	EKUITAS
311	EKUITAS
3113	SAL dan SILPA BLU
31131	SAL BLU
311311	SAL BLU
311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi
311314	Penggunaan SAL BLU
311315	Penyesuaian SAL BLU
31132	SILPA BLU
311321	SILPA BLU
3117	Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi
31171	Selisih Kurs
311711	Selisih Kurs



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
3119	Ekuitas Dana Lancar Lainnya
31191	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
313	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
3131	Due to - Due from
31311	Ditagihkan ke Entitas Lain
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain
31312	Diterima dari Entitas Lain
313121	Diterima dari Entitas Lain
3132	Transfer
31321	Transfer Keluar
313211	Transfer Keluar
31322	Transfer Masuk
313221	Transfer Masuk
31323	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU
313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU
39	EKUITAS
391	EKUITAS
3911	Ekuitas
39111	Ekuitas
391111	Ekuitas
391112	Surplus/Defisit-LO
391113	Koreksi Nilai Persediaan
391114	Revaluasi Aset Tetap
391115	Dana yang Disediakan Untuk Pengalihan Aset
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
391119	Koreksi Lainnya
39112	Ekuitas Transaksi Lainnya
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya
391122	Ekuitas Badan Lainnya
39113	Ekuitas Pengesahan Hibah
391131	Pengesahan Hibah Langsung
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL
39114	Ekuitas Surplus BLU
391141	Setoran Surplus BLU
391142	Transfer Keluar Kas BLU Kepada BLU Lain

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	391143 Transfer Masuk Kas BLU Dari BLU Lain
39115	Koreksi Atas Reklasifikasi Aset
	391151 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
399	EKUITAS KONSOLIDASI BUN
3999	Ekuitas Konsolidasi BUN
39991	Ekuitas Konsolidasi BUN I
399911	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual Dari Kas BP KL
399912	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual Dari Kas BLU KL
399913	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual Dari Kas Hibah KL
399914	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas Dari Akun Non Anggaran TAYL
399915	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas Dari Akun Aset/Kewajiban
399916	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas Dari Koreksi Kas BUN
399917	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas Dari Koreksi Kas RPL
399918	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas Dari Koreksi Kas KPPN
399919	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas Dari Koreksi Kas BLU
39992	Ekuitas Konsolidasi BUN II
399921	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas Dari Koreksi Kas Hibah
399922	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas Dari Koreksi Kas Transitoris
399923	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas Dari Koreksi Kas <i>Escrow</i>

**SEGMENT AKUN PENDAPATAN-LO**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
4	PENDAPATAN NEGARA
41	PENDAPATAN PERPAJAKAN
411	PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan
41111	Pendapatan PPh Migas
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
41112	Pendapatan PPh Non-Migas
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
411124	Pendapatan PPh Pasal 23
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
411128	Pendapatan PPh Final
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya
41114	Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
41121	Pendapatan PPN
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
411212	Pendapatan PPN Impor
411219	Pendapatan PPN Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
41122	Pendapatan PPnBM
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
411222	Pendapatan PPnBM Impor
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
41124	Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah
411241	Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah
411242	Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah – Penanganan Pandemi COVID-19
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411313	Pendapatan PBB Perkebunan
411314	Pendapatan PBB Kehutanan
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
411319	Pendapatan PBB Lainnya
4115	Pendapatan Cukai
41151	Pendapatan Cukai
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
411513	Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai
411519	Pendapatan Cukai Lainnya
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
411611	Pendapatan Bea Meterai
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
411613	Pendapatan PPn Batubara
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTL
41163	Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah
412	PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
412111	Pendapatan Bea Masuk

KODE AKUN	URAIAN AKUN
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
412116	Pendapatan BM-DTP
412119	Pendapatan Pabean Lainnya
41212	Pendapatan Bea Masuk Tindakan
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
4122	Pendapatan Bea Keluar
41221	Pendapatan Bea Keluar
412211	Pendapatan Bea Keluar
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
419	PENDAPATAN PAJAK LAIN-LAIN
4199	Pendapatan Pajak Lain-lain
41999	Pendapatan Pajak Lain-lain
419999	Pendapatan Pajak Lain-lain
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
421	PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM
4211	Pendapatan Minyak Bumi
42111	Pendapatan Minyak Bumi
421111	Pendapatan Minyak Bumi
4212	Pendapatan Gas Bumi
42121	Pendapatan Gas Bumi
421211	Pendapatan Gas Bumi
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	421332 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga
	421333 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas
	421334 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak
	421335 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel
	421336 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah
	421339 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya
42134	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
	421341 Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
4214	Pendapatan Kehutanan
	42141 Pendapatan Dana Reboisasi
	421411 Pendapatan Dana Reboisasi
	42142 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	421421 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
	421435 Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
	421441 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
4215	Pendapatan Perikanan
	42152 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan
	421521 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap
	421522 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
	421531 Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
4216	Pendapatan Panas Bumi
	42162 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
	421621 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi
	421631 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi
	421632 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
422	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
4222	Pendapatan Dari KND Lainnya
42221	Pendapatan dari Surplus Lembaga
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan
422219	Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
424133	Pendapatan Program Modal Ventura
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
424136	Pendapatan Investasi
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
42414	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang
42423	Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa
	424231 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa
	424232 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa
	424233 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang/Jasa
	424234 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang /Jasa
	424235 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa
	424236 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Barang/Jasa
	424239 Pendapatan Hibah Terikat-Lainnya - Barang/Jasa
42424	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa
	424241 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
	424242 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
	424243 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
	424244 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
	424245 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
	424246 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
	424249 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang / Jasa
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
	42431 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
	424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
	424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN
	42441 Pendapatan dari Alokasi APBN
	424411 Pendapatan dari Alokasi APBN
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	424422 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
4249	Pendapatan BLU Lainnya
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
42493	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
42494	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN BLU
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	424942 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
	424943 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
	424944 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
	424945 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
	424949 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
42495	Pendapatan BLU Lainnya Dari Asuransi BMN BLU
	424951 Pendapatan Dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425135 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
	425136 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	425137 Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)
	425138 Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)
	425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang
	425141 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS
	425142 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
	425143 Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
	425144 Pendapatan atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
	425145 Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
	425149 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas
	425161 Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	425162 Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
	425169 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
42517	Pendapatan Dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN
	425171 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
	425172 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
	425173 Pendapatan Dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum
	425211 Pendapatan Paspor
	425212 Pendapatan Visa
	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)
	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya
	425215 Pendapatan Pelayanan Fidusia
	425216 Pendapatan Pelayanan Badan Hukum
	425217 Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425218 Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
	425219 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri
	425221 Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri
	425222 Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri
	425223 Pendapatan Dokumen Kekonsuleran
	425224 Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri
	425228 Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri
	425229 Pendapatan Administrasi di Luar Negeri
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi
	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
	425233 Pendapatan Ongkos Perkara
	425234 Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
	425235 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
	425236 Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan
	425237 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
	425238 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
	425241 Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	425242 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	425243 Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	425244 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
	425245 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	425246 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
	425247 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
	425248 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
	425249 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42525	Pendapatan Perizinan
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
425264	Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi
425281	Pendapatan Akreditasi
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
42533	Pendapatan Jasa Karantina
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan
42534	Pendapatan Jasa Agraria
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
42541	Pendapatan Pendidikan
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425413 Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
	425419 Pendapatan Pendidikan Lainnya
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	425421 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
	425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek
	425431 Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek
	425432 Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan
	425433 Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
	425434 Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek
	425435 Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan
	425436 Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
	425439 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan
	425451 Pendapatan Museum
	425459 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika
42551	Pendapatan Jasa Transportasi
	425511 Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
	425512 Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge
	425513 Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
	425514 Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran
	425515 Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan
	425516 Pendapatan Jasa Kebandarudaraan
	425517 Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan
	425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi
	425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika
	425521 Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
	425522 Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
	425523 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
	425524 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos
	425525 Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425526 Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia
	425529 Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik
	425531 Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
	425532 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI
	425533 Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI
	425534 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI
4256	Pendapatan Jasa Lainnya
	42561 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	425611 Pendapatan Wisata Alam
	425612 Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	425619 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya
	42562 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan
	425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan
	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
	42569 Pendapatan Jasa Lainnya
	425691 Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan
	425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
	425693 Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol
	425694 Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
	425699 Pendapatan Jasa Lainnya
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
	42571 Pendapatan Bunga
	425711 Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	425712 Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
	425713 Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman
	425714 Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah
	425715 Pendapatan Komitmen Pemberian Pinjaman
	425716 Pendapatan Bunga Kredit Program
	425717 Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
	425719 Pendapatan Bunga Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang
425722	Pendapatan dari Transaksi Security Lending
425723	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing
425724	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang
425725	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang
42573	Pendapatan Premium Atas Surat Berharga Negara
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
425732	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN
425743	Pendapatan Kupon SBN
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo
425745	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan <i>Loss Limit</i>
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	425765 Pendapatan dari Penutupan Rekening
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
	425771 Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	425772 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	425774 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	425775 Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
	425776 Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara
	425781 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	425782 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
	425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
	425784 Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
	425785 Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
	425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
	425792 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
	425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
4258	Pendapatan Denda
42581	Pendapatan Denda I
	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	425812 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	425813 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan
	425814 Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	425815 Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi
42582	Pendapatan Denda II
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Pemberian Pinjaman
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
42583	Pendapatan Denda III
425839	Pendapatan Denda Lainnya
4259	Pendapatan Lain-Lain
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	Anggaran Yang Lalu
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
42598	Pendapatan Lain-Lain I
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman
425982	Penerimaan Pengembalian dan Pencatatan Akumulasi Iuran Pensiun
425983	Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan
42599	Pendapatan Lain-Lain II
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
425998	Pendapatan dari Retur SP2D
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
43	PENDAPATAN HIBAH
431	PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/ Badan Usaha
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
43124	Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	431241 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
	431242 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
	431243 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan
439	PENDAPATAN HIBAH LAIN-LAIN
4399	Pendapatan Hibah Lain-lain
43999	Pendapatan Hibah Lain-lain
439999	Pendapatan Hibah Lain-lain
49	PENDAPATAN PENYESUAIAN
491	PENDAPATAN PENYESUAIAN AKRUAL
4911	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
49111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
491112	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU
4912	Pendapatan Amortisasi Premium
49121	Pendapatan Amortisasi Premium
491211	Pendapatan Amortisasi Premium
4913	Pendapatan Penyesuaian Lainnya
49131	Pendapatan Penyesuaian Lainnya
491311	Pendapatan Penyesuaian Lainnya
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi
491314	Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya
491315	Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa
4914	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa
49141	Pendapatan Pelepasan Aset
491411	Pendapatan Pelepasan Aset
49142	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa
491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan
491422	Pendapatan Perolehan Jasa
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
4915	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset
49151	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
498	SUSPENSE PENDAPATAN
4981	Suspense Pendapatan
49811	Suspense Pendapatan
498111	Suspense Pendapatan

<b>KODE AKUN</b>		<b>URAIAN AKUN</b>	
499	AKUN SET UP		
4991	Akun Set Up		
	49911	Akun Set Up	
		499111	Akun Set Up
		499112	Unearned Discount
		499113	Sales Account
4999	Revenue		
	49999	Revenue	
		499999	Revenue



**SEGMENT AKUN BEBAN**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5	BEBAN NEGARA
51	BEBAN PEGAWAI
511	BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN
5111	Beban Gaji dan Tunjangan PNS
51111	Beban Gaji PNS
511111	Beban Gaji Pokok PNS
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS
51112	Beban Tunjangan-tunjangan I PNS
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS
511122	Beban Tunj. Anak PNS
511123	Beban Tunj. Struktural PNS
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS
511125	Beban Tunj. PPh PNS
511126	Beban Tunj. Beras PNS
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS
511128	Beban Tunj. Lauk pauk PNS
511129	Beban Uang Makan PNS
51113	Beban Tunjangan-tunjangan II PNS
511131	Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
511132	Beban Tunj. Cacat PNS
511133	Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
511136	Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan pada Sekolah/ PT Swasta/ Badan/Komisi
511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS
511139	Beban Tunjangan SAR PNS
51114	Beban Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/ Staff di Luar Negeri
511141	Beban Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
511142	Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
511143	Beban Tunj. <i>Social Security</i> PNS (Staff di LN)
511144	Beban Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
511146	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
511147	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri
511149	Beban Lokal Staff Lainnya
51115	Beban Tunjangan-tunjangan IV PNS
511151	Beban Tunjangan Umum PNS
511152	Beban Tunjangan Profesi Guru
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor
511155	Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
511156	Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim
511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc
51116	Beban Gaji - PNS TNI/Polri
511161	Beban Gaji Pokok PNS TNI/Polri
511169	Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
51117	Beban Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
511171	Beban Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
511172	Beban Tunj. Anak PNS TNI/Polri
511173	Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
511174	Beban Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
511175	Beban Tunj. PPh PNS TNI/Polri
511176	Beban Tunj. Beras PNS TNI/Polri
511177	Beban Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
511178	Beban Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
511179	Beban Uang Makan PNS TNI/Polri
51118	Beban Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri
511181	Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
511182	Beban Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
511183	Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
511184	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
511185	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
511187	Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
511188	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	511189 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
51119	Beban Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
	511191 Beban Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
	511192 Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
	511193 Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
	511194 Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
	511195 Beban Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan PNS TNI
	511196 Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS Polri
	511197 Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI Polri
5112	Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
	51121 Beban Gaji TNI/POLRI
	511211 Beban Gaji Pokok TNI/POLRI
	511219 Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI
51122	Beban Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
	511221 Beban Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
	511222 Beban Tunj. Anak TNI/POLRI
	511223 Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI
	511224 Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI
	511225 Beban Tunj. PPh TNI/POLRI
	511226 Beban Tunj. Beras TNI/POLRI
	511227 Beban Tunj. Kemahalan TNI/POLRI
	511228 Beban Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI
	511229 Beban Uang Makan TNI/POLRI
51123	Beban Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
	511231 Beban Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	511232 Beban Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	511233 Beban Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI
	511234 Beban Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI
	511235 Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
	511236 Beban Tunj. Brevet TNI/POLRI
	511237 Beban Tunj. Keahlian/ Keterampilan TNI/POLRI

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	511238 Beban Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	511239 Beban Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
51124	Beban Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
	511241 Beban Tunjangan Medis TNI/POLRI
	511242 Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI
	511243 Beban Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil TNI/Polri
	511244 Beban Tunjangan Umum TNI/Polri
	511245 Beban Santunan Cacat TNI
	511246 Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/ Perbatasan Polri
	511247 Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar TNI/Polri
5113	Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
	51131 Beban Gaji Pejabat Negara
	511311 Beban Gaji Pokok Pejabat Negara
	511319 Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara
51132	Beban Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
	511321 Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	511322 Beban Tunj. Anak Pejabat Negara
	511323 Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara
	511324 Beban Tunj. PPh Pejabat Negara
	511325 Beban Tunj. Beras Pejabat Negara
51133	Beban Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
	511331 Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	511332 Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara
	511333 Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara
	511334 Beban Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	511335 Beban Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	511336 Beban Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	511337 Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	511338 Beban Tunjangan Fasilitas KPK
	511339 Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
5114	Beban Gaji Dokter PTT
	51141 Beban Gaji Dokter PTT

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	511411 Beban Gaji Dokter dan Bidan PTT
	511412 Beban Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	511413 Beban Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	511414 Beban Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
5115	Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
	511511 Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS
	511512 Beban Tunjangan Pegawai Non PNS
	511513 Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
	511514 Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya
	511519 Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS
51152	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS
	511521 Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS
	511522 Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS
	511529 Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS
5116	Beban Gaji dan Tunjangan PPPK
51161	Beban Gaji PPPK
	511611 Beban Gaji Pokok PPPK
	511619 Beban Pembulatan Gaji PPPK
51162	Beban Tunjangan-tunjangan I PPPK
	511621 Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK
	511622 Beban Tunjangan Anak PPPK
	511623 Beban Tunjangan Struktural PPPK
	511624 Beban Tunjangan Fungsional PPPK
	511625 Beban Tunjangan Beras PPPK
	511626 Beban Tunjangan Kemahalan PPPK
	511627 Beban Tunjangan Lauk Pauk PPPK
	511628 Beban Uang Makan PPPK
	511629 Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK
51163	Beban Tunjangan-tunjangan II PPPK
	511631 Beban Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PPPK
	511632 Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK
	511633 Beban Tunjangan Umum PPPK
512	BEBAN HONORARIUM/LEMBUR /TUNJ. KHUSUS & BEBAN PEGAWAI

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
TRANSITO	
5121	Beban Honorarium
51211	Beban Honorarium
512111	Beban Uang Honor Tetap
5122	Beban Lembur
51221	Beban Lembur
512211	Beban Uang Lembur
512212	Beban Uang Lembur PPPK
5124	Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito
51241	Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja)
512412	Beban Pegawai Transito
512413	Beban Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan sebagai Dampak Reformasi Birokrasi
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK
513	BEBAN KONTRIBUSI SOSIAL
5131	Beban Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS
513112	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
513113	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
513114	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
513115	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian
51312	Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121	Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
513122	Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan
513123	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Polri
51313	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513131	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513132	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Hakim
51314	Beban Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI
513141	Kontribusi APBN sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI

KODE AKUN	URAIAN AKUN
51315	Beban Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP
513151	Beban Tunjangan Veteran
513152	Beban Dana Kehormatan Veteran
513153	Beban Tunjangan PKRI dan KNIP
51316	Beban Tunjangan Hari Tua
513161	Beban Tunjangan Hari Tua ( <i>Unfunded Liability</i> )
5132	Beban Program Jaminan Sosial Pegawai
51321	Beban Askes PNS/Pejabat Negara
513211	Beban Askes PNS
513212	Beban Askes Pejabat Negara
51322	Beban Askes Penerima Pensiun
513221	Beban Askes Penerima Pensiun
51323	Beban Askes TNI/Kemhan
513231	Beban Askes TNI/Kemhan
51324	Beban Askes Polri
513241	Beban Askes Polri
51325	Beban Askes Veteran
513251	Beban Askes Veteran
51326	Beban Katastropik
513261	Beban Katastropik
51327	Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
513271	Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
51328	Beban Program Jaminan Kematian Pegawai
513281	Beban Program Jaminan Kematian Pegawai
5133	Beban Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Beban Tunjangan Kesehatan Veteran
513311	Beban Tunjangan Kesehatan Veteran
5134	Beban Cadangan Perubahan Sharing
51341	Beban Cadangan Perubahan Sharing
513411	Beban Cadangan Perubahan Sharing
5135	Beban Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pegawai
51351	Beban Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pegawai
513511	Beban Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pemerintah Pusat
52	BEBAN BARANG DAN JASA
521	BEBAN BARANG
5211	Beban Barang Operasional
52111	Beban Barang Operasional

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	521111 Beban Keperluan Perkantoran
	521112 Beban Pengadaan Bahan Makanan
	521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
	521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
	521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja
	521116 Beban Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
	521119 Beban Barang Operasional Lainnya
52112	Beban Barang Operasional kepada BLU
	521121 Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	521122 Beban Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
52113	Beban Barang Operasional - Darurat Bencana
	521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
5212	Beban Barang Non Operasional
	52121 Beban Barang Non Operasional
	521211 Beban Bahan
	521212 Beban Barang Transito
	521213 Beban Honor Output Kegiatan
	521214 Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan
	521215 Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun
	521216 Beban Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
	521217 Beban Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
	521218 Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN
	521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya
52122	Beban Barang Non Operasional Kepada BLU
	521221 Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	521222 Beban Barang Non Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
52123	Beban Barang Bantuan Pemerintah
	521231 Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang
	521232 Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang



KODE AKUN	URAIAN AKUN
	521233      Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang
52124	Beban Barang Non Operasional - Darurat Bencana
	521241      Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
52125	Beban Barang Ekstrakomptabel
	521252      Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel
	521253      Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel
	521254      Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel
5215	Beban Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC
52151	Beban Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC
	521511      Beban Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC
	521512      Beban Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC
	521513      Beban Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC
5217	Beban Kontribusi dan Kompensasi
52171	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>
	521711      Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>
52172	Beban Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan
	521721      Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan ( <i>Viability Gap Fund</i> )
	521722      Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek ( <i>Project Development Facility</i> )
	521723      Beban Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )
	521724      Beban Kompensasi Finansial Penjaminan Infrastruktur
	521725      Beban Regres Penjaminan Infrastruktur
52173	Beban Kompensasi Penugasan - Penanganan Pandemi COVID-19
	521731      Beban Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
	521732      Beban Selisih Harga Biodiesel
	521733      Beban penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Pandemi COVID-19
522	BEBAN JASA
5221	Beban Jasa
52211	Beban Langganan Daya dan Jasa
522111	Beban Langganan Listrik
522112	Beban Langganan Telepon
522113	Beban Langganan Air
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
52212	Beban Jasa Pos dan Giro
522121	Beban Jasa Pos dan Giro
52213	Beban Jasa Konsultan
522131	Beban Jasa Konsultan
52214	Beban Sewa
522141	Beban Sewa
52215	Beban Jasa Profesi
522151	Beban Jasa Profesi
522152	Beban Imbalan Jasa Invensi
52216	Beban Jasa kepada BLU
522161	Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
522162	Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
52217	Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan
522171	Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi
522172	Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan
52219	Beban Jasa Lainnya
522191	Beban Jasa Lainnya
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
523	BEBAN PEMELIHARAAN
5231	Beban Pemeliharaan
52311	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
52312	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Mesin
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/ Udara Bermotor
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52313	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan
523137	Beban Asuransi Jembatan
52319	Beban Pemeliharaan Lainnya
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya
524	BEBAN PERJALANAN DINAS
5241	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
52411	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5242	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
52421	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
524212	Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri
525	BEBAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5251	Beban Barang BLU
52511	Beban Barang dan Jasa BLU I
525111	Beban Gaji dan Tunjangan
525112	Beban Barang
525113	Beban Jasa
525114	Beban Pemeliharaan
525115	Beban Perjalanan
525116	Beban atas Pengelolaan <i>Endowment</i>

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	<i>Fund</i>
	525117 Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	525118 Beban Ketersediaan Layanan BLU
	525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
52513	Beban Asuransi BMN di BLU
	525131 Beban Asuransi BMN Gedung dan Bangunan - BLU
	525132 Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor - BLU
	525133 Beban Asuransi BMN Jembatan - BLU
52514	Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain
	525141 Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	525142 Beban Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	525143 Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	525144 Beban Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
52515	Beban Barang dan Jasa BLU II
	525151 Beban Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup
	525152 Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	525154 Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	525155 Beban Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	525156 Beban Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
52516	Beban Barang Ekstrakomptabel BLU
	525162 Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU
	525163 Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU
	525164 Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU
526	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMDA
5261	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
52612	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang
526121	Beban Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang

KODE AKUN	URAIAN AKUN
526122	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
526124	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
52613	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda - Darurat Bencana
526131	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
5263	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda
52631	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah
52632	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda - Darurat Bencana
526321	Beban Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
526323	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk jasa- Penanganan Pandemi COVID-19
54	BEBAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG
541	BEBAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG
5411	Beban Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek
54111	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Rupiah
541112	Beban Pembayaran Kupon SBN-TDR
541113	Beban Pembayaran Bunga Repo-TDR
541119	Beban Pembayaran Biaya/ Kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
54112	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
541121	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
541122	Beban Pembayaran Kupon SBN Valas-TDR
541123	Beban Pembayaran Bunga Repo Valas-TDR
541129	Beban Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Negara – Valas
5412	Beban Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
54121	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
541219	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya Obligasi Negara
54122	Beban Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541221	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
541229	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya
54123	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
541231	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
541232	Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman Dalam Negeri
54124	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
541241	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
54125	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
541251	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
541259	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
5413	Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara
54131	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541311	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541312	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang
54132	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541321	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541322	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek
54133	Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah
541331	Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah
541332	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah
54134	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas
541341	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas
541342	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas
54135	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas
541351	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas
541352	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Valas
5414	Beban Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
54141	Beban Bunga Pinjaman program
	541411 Beban Bunga Pinjaman Program
	541419 Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program
54142	Beban Bunga Pinjaman Proyek
	541421 Beban Bunga Pinjaman Proyek
	541429 Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
54144	Beban Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
	541441 Beban Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
	541442 Beban Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
	541449 Beban Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
54146	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
	541461 Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
542	BEBAN PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA
5421	Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara
54211	Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara
	542111 Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara
	542119 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan
54212	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara
	542121 Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara
	542129 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara
54213	Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
	542131 Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
	542139 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
54214	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas
	542141 Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas
	542149 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Valas
544	BEBAN PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION
5441	Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Kembali Obligasi Negara
54411	Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara
544111	Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara
544112	Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN
544113	Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas
544114	Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Valas
545	BEBAN PEMBAYARAN <i>DISCOUNT</i> SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
5451	Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara
54511	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
545111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
545119	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
54513	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah
545131	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah
545139	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah
54514	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
545141	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
545149	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas
54515	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
545151	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
545159	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
547	BEBAN DENDA
5471	Beban Pembayaran Denda
54711	Beban Pembayaran Imbalan Bunga
547112	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan



KODE AKUN	URAIAN AKUN
547113	Beban Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
547119	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
<b>55</b>	<b>BEBAN SUBSIDI</b>
551	BEBAN SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA
5511	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
5512	Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM
55121	Beban Subsidi BBM
551211	Beban Subsidi Avgas
551212	Beban Subsidi Avtur
551213	Beban Subsidi Premium
551214	Beban Subsidi Minyak Bakar
551215	Beban Subsidi Minyak Solar
551216	Beban Subsidi Minyak Diesel
551217	Beban Subsidi Minyak Tanah
551218	Beban Subsidi Elpiji
551219	Beban Subsidi <i>Liquefied Gas For Vehicle (LGV)</i>
5513	Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM
55131	Beban Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya
551311	Beban Subsidi Pangan
551312	Beban Subsidi Listrik
551313	Beban Subsidi Benih
551314	Beban Subsidi Obat
551315	Beban Subsidi Gula
551316	Beban Subsidi Pupuk
551317	Beban Subsidi Perawatan Beras
551318	Beban Subsidi Pengawasan Pupuk
551319	Beban Subsidi Harga/Biaya Lainnya
55132	Beban Subsidi Non-BBM - Pajak
551321	Beban Subsidi PPh-DTP
551323	Beban Subsidi BM-DTP
55133	Beban Subsidi Non-BBM - Lainnya
551331	Beban Subsidi Haji
551332	Beban Subsidi Kendaraan Bermotor
551339	Beban Subsidi Lainnya
55134	Beban Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II
551341	Beban Subsidi Minyak Goreng

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5514	Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO
55141	Beban Subsidi dalam rangka PSO
551411	Beban Subsidi PT KAI
551412	Beban Subsidi PT PELNI
551413	Beban Subsidi PT Pos Indonesia
551414	Beban Subsidi TVRI
551415	Beban Subsidi BULOG
551419	Beban Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya
552	BEBAN SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA
5521	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
552111	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
552112	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
55212	Beban Subsidi – Bunga Kredit
552121	Beban Subsidi Bunga KUT
552122	Beban Subsidi Bunga KOP PIR
552123	Beban Subsidi Bunga KOP
552124	Beban Subsidi Bunga KOP PRIM
552125	Beban Subsidi Bunga KPR
552126	Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
552127	Beban Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
552128	Beban Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
552129	Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya
55213	Beban Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing
552131	Beban Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
552132	Beban Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
55214	Beban Subsidi Kredit Program II
552141	Beban Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
552142	Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan
552143	Beban Subsidi Kredit Resi Gudang
5522	Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan
55221	Beban Subsidi Lembaga Non Keuangan
552211	Beban Subsidi Lembaga Non Keuangan
553	BEBAN SUBSIDI - ESTIMASI
5531	Beban Subsidi - Estimasi

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
55311	Beban Subsidi - Estimasi
553111	Beban Subsidi - Estimasi
554	<b>BEBAN SUBSIDI - DARURAT BENCANA</b>
5541	Beban Subsidi - Darurat Bencana
55411	Beban Subsidi - Darurat Bencana
554111	Beban Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi COVID-19
554112	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan -Penanganan Pandemi COVID-19
554113	Beban Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi COVID-19
554114	Beban Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19
554115	Beban Subsidi PPH-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19
554116	Beban Subsidi BM-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19
554117	Beban Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
554118	Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)-Penanganan Pandemi COVID-19
554119	Beban Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19
55412	Beban Subsidi - Darurat Bencana II
554121	Beban Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
554122	Beban Subsidi PPnBM Ditanggung Pemerintah - Penanganan Pandemi COVID-19
56	<b>BEBAN HIBAH</b>
561	<b>BEBAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI</b>
5611	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
56111	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561111	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
562	<b>BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL</b>
5621	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional
562111	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional
563	<b>BEBAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH</b>
5631	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
56311	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563111	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56312	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah
563121	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
563122	Beban Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
563123	Beban Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
56313	Beban Hibah - Darurat Bencana
563131	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
565	BEBAN HIBAH LAINNYA
5651	Beban Hibah Lainnya
56511	Beban Hibah Lainnya
565111	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah
57	BEBAN BANTUAN SOSIAL
571	BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL
5711	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
57111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
571111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
571113	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Jasa
571114	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
572	BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL
5721	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
57211	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
572111	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
572113	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Jasa
572114	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
573	BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL
5731	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
57311	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

KODE AKUN	URAIAN AKUN
573111	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
573113	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Jasa
573114	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
574	BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
5741	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
57411	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang
574113	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jasa
574114	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
575	BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5751	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
57511	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang
575113	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Jasa
575114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
576	BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
5761	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
57611	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
576111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang
576113	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa
576114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
576116	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
58	BEBAN LAIN-LAIN

KODE AKUN	URAIAN AKUN
581	BEBAN LAIN-LAIN
5811	Beban Lain-lain Dana Cadangan
58111	Beban Lain-lain Cadangan I
581111	Beban Cadangan Umum
581112	Beban Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
581113	Beban Cadangan Dana Reboisasi
581114	Beban Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri
581115	Beban Cadangan Kenaikan Harga Tanah ( <i>Land Capping</i> )
581116	Beban Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro
581117	Beban Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
581118	Beban Cadangan Risiko Lifting
581119	Beban Cadangan Lainnya
58112	Beban Lain-lain Cadangan II
581121	Beban Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)
581122	Beban Cadangan Beras Pemerintah
581123	Beban Cadangan Benih Nasional
5812	Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian
58121	Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian
581211	Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian
581212	Beban Operasional Kegiatan SKK Migas
5813	Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
58131	Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
581311	Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi
581312	Jasa Surveyor
581314	Jasa Pelayanan Bank Operasional
581315	Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan
581316	Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog
581319	Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya
5814	Beban Lain-lain BUN
58141	Beban Lain-lain BUN
581411	Beban Iuran ke Lembaga Internasional
581412	Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua
581413	Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga
581414	Beban Dana Penunjang (PHLN)

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	581415 Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	581417 Beban Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	581418 Beban Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum
	581419 Beban Lain-lain BUN Lainnya
58142	Beban Lain-lain BUN II
	581421 Beban Selisih Harga SBN
	581422 Beban karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis BA Beban Lainnya
5815	Beban Lain-lain Tanggap Darurat
58151	Beban Lain-lain Tanggap Darurat
	581511 Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga
	581512 Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
58152	Beban Lain-Lain - Penanganan Pandemi COVID-19
	581521 Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19
	581522 Beban Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
	581523 Beban Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
5816	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
58161	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
	581611 Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan <i>Exotic Currency</i>
5819	Beban Lain-lain Lainnya
58191	Beban Lain-lain Lainnya
	581911 Beban Pemilu
	581919 Beban Lain-lain
59	<b>BEBAN PENYESUAIAN</b>
591	<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP</b>
5911	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
59111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
	591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
59112	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
	591121 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	- BLU
5912	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
59121	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
59122	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
591221	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
5913	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
59131	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
591312	Beban Penyusutan Irigasi
591313	Beban Penyusutan Jaringan
59132	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
591321	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
5914	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
59141	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
59142	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
591421	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
592	<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>
5921	Beban Amortisasi Aset Lainnya
59211	Beban Amortisasi Aset Lainnya
592111	Beban Amortisasi Goodwill
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta
592113	Beban Amortisasi Royalti
592114	Beban Amortisasi Paten
592115	Beban Amortisasi Software
592116	Beban Amortisasi Lisensi
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
59212	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Badan Layanan Umum
592121	Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
592122	Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU
592123	Beban Amortisasi-Royalti BLU
592124	Beban Amortisasi-Paten BLU
592125	Beban Amortisasi-Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum



<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
592126	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
5922	Beban Penyusutan Aset Lainnya
59221	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
592212	Beban Penyusutan Konsesi Jasa
59222	Beban Penyusutan Aset Lain-lain K/L
592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah
59223	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN
592231	Beban Penyusutan Aset Eks BPPN
592232	Beban Penyusutan Aset yang Diserahkan pada PT. PPA
592233	Beban Penyusutan Aset BUMN yang Belum Ditetapkan Statusnya
592234	Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
592235	Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA
592236	Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina
592237	Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
592238	Beban Penyusutan Aset Idle yang Sudah Diserahkan ke DJKN
592239	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN
59224	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU
592241	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU
592242	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU
593	<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>
5931	Beban Persediaan
59311	Beban Persediaan Bahan untuk Operasional
593111	Beban Persediaan konsumsi
593112	Beban Persediaan amunisi
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
593114	Beban Persediaan suku cadang
59312	Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
59313	Beban Persediaan untuk proses produksi
593131	Beban Persediaan bahan baku
593132	Beban Persediaan barang dalam proses
59314	Beban Persediaan Bahan Lainnya
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
593142	Beban Persediaan barang hasil sitaan
593149	Beban Persediaan Lainnya
5932	Beban Persediaan Badan Layanan Umum
59321	Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
593211	Beban Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
593212	Beban Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
593213	Beban Persediaan BLU penunjang Konstruksi
593214	Beban Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
593215	Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
59322	Beban Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
593221	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
593222	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
593229	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
59323	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	593231 Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
	593232 Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
	593239 Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya
5933	Beban Penyesuaian Nilai Aset
59331	Beban Penyesuaian Nilai Aset
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
594	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
5941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan
59411	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih
594111	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Migas
594112	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Non Migas
594113	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPN
594114	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPnBM
594115	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PBB dan BPHTB
594116	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai
594117	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya
594118	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional
594119	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bea Masuk Tindakan
5942	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
59421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPN
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
59422	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PT PPA
594221	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PT PPA
59423	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
594231	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
594232	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	- Bagian Lancar RDI
594233	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
594234	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
594235	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman
59424	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah dan Piutang Lainnya
594241	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
594242	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
594243	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
594244	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar
594249	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
59425	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
594251	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
59426	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Subsidi
594261	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi
594262	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Subsidi
5943	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
59431	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
594311	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
59432	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
594321	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
5944	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
59441	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

KODE AKUN	URAIAN AKUN
59442	- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
594421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
5945	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Investasi Permanen
59451	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Investasi Permanen
594511	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Investasi Permanen
5946	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
59461	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
594611	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
594613	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penunjang Konstruksi
594614	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
59462	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
594621	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
594622	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
594623	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
59463	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
594631	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
594639	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
59464	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Operasional Lainnya BLU
594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
59465	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
594651	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
5947	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Non Operasional BLU
59471	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU
594711	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU
594712	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU
594713	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU
594714	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
594719	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU
59472	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset BLU
594721	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
594722	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
59479	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU
594791	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
5948	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih
59481	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih
594811	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan
594812	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga
594813	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya
59482	Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
594821	Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
594822	Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5949	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang
59491	Beban Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran
594911	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran
59492	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
594921	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
59493	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
59494	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
594941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
59495	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
594951	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
594952	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya RDI
594953	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya Kredit Program
59496	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah
594961	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
594962	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Investasi Pemerintah
594963	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Penjaminan Pemerintah
59499	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya
594992	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
594993	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar
595	<b>BEBAN REKLASIFIKASI ASET</b>
5951	<b>Beban Aset Ekstrakomtabel</b>
59511	<b>Beban Aset Ekstrakomtabel</b>
595111	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
595116	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
595117	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud
59512	<b>Beban Aset Ekstrakomtabel – BLU</b>
595121	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah – BLU
595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin – BLU
595123	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan – BLU
595124	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan – BLU
595125	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya – BLU
595126	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan – BLU
595127	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud – BLU
596	<b>BEBAN PENURUNAN NILAI DAN LAINNYA</b>
5961	<b>Beban Pelepasan Aset</b>
59611	<b>Beban Pelepasan Aset</b>
596111	Beban Pelepasan Aset
596112	Tuntutan Ganti Rugi
596113	Beban Penggunaan Aset Lainnya Yang Berkarakteristik Persediaan
59612	<b>Beban Persediaan Rusak/Usang</b>
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang
59613	<b>Beban Penghapusan Piutang</b>
596131	Beban Penghapusan Piutang Pemberian Pinjaman



<b>KODE AKUN</b>		<b>URAIAN AKUN</b>
	596132	Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga
5962	Beban Belum Terealisasi	
	59621	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	596211	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	596212	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU
	59622	Beban Penyesuaian Nilai Investasi
	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi
	596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya
5963	Beban Pihak Ketiga	
	59631	Beban Pihak Ketiga Migas
	596311	Beban Pihak Ketiga Migas – Pajak Air Tanah ke Pemda
	596312	Beban Pihak Ketiga Migas – Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	596313	Beban Pihak Ketiga Migas – DMO Fee KKKS
	596314	Beban Pihak Ketiga Migas – Reimbursement PPN KKKS
	596315	Beban Pihak Ketiga Migas – Underlifting KKKS
	596316	Beban Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	596317	Beban Pihak Ketiga Migas – Beban Lainnya
	59632	Beban Pihak Ketiga Non Migas
	596321	Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Reimbursement PPN
	596322	Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
	596323	Beban diestimasi - Reimbursement PPN
	596324	Beban diestimasi - PBB Panas Bumi
	596325	Beban diestimasi - Penggantian Bonus Produksi
	596326	Beban diestimasi - setoran kepada Pemerintah
5964	Beban Penyesuaian Lainnya	
	59641	Beban Penyesuaian Lainnya
	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs
5965	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	
	59651	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara
	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara
5966	Beban Lain-Lain	
	59661	Beban Lain-Lain
	596611	Beban Lain-Lain
	596612	Beban Lainnya atas Pendapatan

KODE AKUN		URAIAN AKUN
		Perolehan Jasa
597	PEMBULATAN	
	5971	Pembulatan
		59711 Pembulatan
		597111 Pembulatan
598	SUSPENSE BEBAN	
	5981	Suspense Beban
		59811 Suspense Beban
		598111 Suspense Beban
599	AKUN SET UP	
	5991	Akun Set Up A
		59911 Akun Set up
		599111 Earned Discount
		599113 Discount Taken
		599114 Rounding
	5992	Akun Set Up B
		59921 Akun Set Up
		599211 PO Rate Variance Gain
		599212 PO Rate Variance Loss
		599213 Purchase Price Variance
		599214 Invoice Price Variance
	5993	Akun Set Up Bank
		59931 Akun Set Up Bank
		599311 Kesalahan Bank ( <i>Bank Error</i> )
		599312 Biaya Perbankan ( <i>Bank Charge</i> )

**SEGMENT AKUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
6	BEBAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
61	BEBAN DANA BAGI HASIL
611	BEBAN DANA BAGI HASIL PAJAK
6111	Beban Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan
61111	Beban Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan
611111	Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21
611112	Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP
6112	Beban Dana Bagi Hasil PBB
61121	Beban Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611211	Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi
611212	Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
611213	Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
611214	Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota
611215	Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota
611216	Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota
612	BEBAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
6121	Beban Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi
61211	Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
612111	Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
612112	Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%
612113	Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
6122	Beban Dana Bagi Hasil -SDA Gas Bumi
61221	Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi
612211	Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi
612212	Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%
612213	Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
6123	Beban Dana Bagi Hasil -SDA Pertambangan Umum
61231	Beban Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum
612311	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap
612312	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti
6124	Beban Dana Bagi Hasil -SDA Pertambangan Panas Bumi
61241	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi
612411	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	612412 Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap
	612413 Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
6125	Beban Dana Bagi Hasil -SDA Kehutanan
61251	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan
612511	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH
612512	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH
612513	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi
6126	Beban Dana Bagi Hasil Perikanan
61261	Beban Dana Bagi Hasil Perikanan
612611	Beban Dana Bagi Hasil Perikanan
613	BEBAN DANA BAGI HASIL CUKAI
6131	Beban Dana Bagi Hasil Cukai
61311	Beban Dana Bagi Hasil Cukai
613111	Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
62	BEBAN DANA ALOKASI UMUM
621	BEBAN DANA ALOKASI UMUM
6211	Beban Dana Alokasi Umum
62111	Beban Dana Alokasi Umum
621111	Beban Dana Alokasi Umum
621114	Beban Koreksi Dana Alokasi Umum
63	BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
631	BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
6311	Beban Dana Alokasi Khusus Reguler
63111	Beban Dana Alokasi Khusus Reguler
631111	Beban Dana Alokasi Khusus Reguler
631113	Beban Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler
6312	Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan
63121	Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan
631211	Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
631212	Beban Dana Alokasi Khusus Penugasan
6313	Beban Dana Alokasi Khusus Afirmasi
63131	Beban Dana Alokasi Khusus Afirmasi
631311	Beban Dana Alokasi Khusus Afirmasi
6314	Beban Tambahan DAK Fisik
63141	Beban Tambahan DAK Fisik
631411	Beban Tambahan DAK Fisik
64	BEBAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN DANA INSENTIF DAERAH

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
641	BEBAN DANA OTONOMI KHUSUS
6411	Beban Dana Otonomi Khusus Aceh
64111	Beban Dana Otonomi Khusus Aceh
641111	Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
6412	Beban Dana Otonomi Khusus Papua
64121	Beban Dana Otonomi Khusus Papua
641211	Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
641212	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua
6413	Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat
64131	Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat
641311	Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
641312	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
642	BEBAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
6421	Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
64211	Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
642111	Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
643	BEBAN DANA INSENTIF DAERAH
6431	Beban Dana Insentif Daerah
64311	Beban Dana Insentif Daerah
643111	Beban Dana Insentif Daerah
65	BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
654	BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
6541	Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
65411	Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
654111	Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)
654112	Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
6542	Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
65421	Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
654211	Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
6543	Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
65431	Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
654311	Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
6545	Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
65451	Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
654511	Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Desentralisasi (P2D2)
6546	Beban Dana Darurat
65461	Beban Dana Darurat
654611	Beban Dana Darurat
6547	Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
65471	Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
654711	Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan
654712	Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
65472	Beban Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
654721	Beban Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
6548	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisata
65481	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan
654811	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
654812	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
654813	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
654814	Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
65482	Beban Dana Pelayanan Kepariwisata
654821	Beban Dana Pelayanan Kepariwisata
6549	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya
65491	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
654911	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
654912	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan
65492	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya
654921	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya
655	BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK II
6552	Beban Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
65521	Beban Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
655211	Beban Dana Pelayanan Perlindungan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Perempuan dan Anak
6553	Beban Dana Fasilitasi Penanaman Modal
65531	Beban Dana Fasilitasi Penanaman Modal
655311	Beban Dana Fasilitasi Penanaman Modal
6554	Beban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
65541	Beban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
655411	Beban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
66	BEBAN DANA DESA
662	BEBAN DANA DESA
6621	Beban Dana Desa
66211	Beban Dana Desa
662111	Beban Dana Desa
69	BEBAN TRANSFER LAIN-LAIN
698	BEBAN SUSPENSE TRANSFER
6981	Beban Suspense Transfer
69811	Beban Suspense Transfer
698111	Beban Suspense Transfer

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



*Hadiyanto*  
HADIYANTO G

**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN NERACA**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>ASET</b>
	Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>
	Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
<b>111</b>	<b>KAS DAN SETARA KAS</b>
	Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
<b>1111</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah
<b>11111</b>	<b>Kas di Bank Indonesia dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat kas yang ada di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah
<b>111111</b>	<b>Kas di Rekening KUN dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN dalam Rupiah 502.000000980
<b>111112</b>	<b>Kas di Rekening SubRKUN Kuasa BUN Pusat</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 500.000000980
<b>111113</b>	<b>Kas di Rekening SAL</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening SAL
<b>111114</b>	<b>Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong
<b>111115</b>	<b>Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah 518.000122980
<b>111116</b>	<b>Kas di Rekening Antara Reksus</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Antara Reksus
<b>111117</b>	<b>Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah
<b>111118</b>	<b>Kas di Rekening Sub BUN Talangan</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Sub BUN Talangan
<b>111119</b>	<b>Kas di Rekening Penampungan Pendapatan Rekening Pembangunan Hutan</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan.



<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>11112</b>	<b>Kas di Rekening Sub RKUN</b>
111121	Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat pelimpahan penerimaan negara dari seluruh bank persepsi ke Rekening sub RKUN penerimaan. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111122	Kas di Rekening Sub RKUN Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran pinjaman luar negeri dan transaksi SP2D Valas. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111123	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah
<b>11113</b>	<b>Kas di Rekening Surat Utang Negara</b>
111131	Kas di Rekening Penerimaan Surat Utang Negara
	Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari penerbitan SUN. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111132	Kas di Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara
	Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran cicilan kupon atau pelunasan SUN. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
<b>11114</b>	<b>Kas di Rekening Persepsi Pusat</b>
111141	Kas di Rekening Persepsi Pusat
	Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan dari bank persepsi. Rekening ini dibuat pada bank umum dan PT Pos dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111142	Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
<b>11115</b>	<b>Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-SPAN</b>
111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
<b>1112</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Valuta Asing</b>
<b>11121</b>	<b>Kas di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
111211	Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD
111212	Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
111213	Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya 600.000411980
111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
111215	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD 608.001411980
111216	Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen 600.502111980
111217	Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen 608.000111980
111218	Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro 600.502991980
111219	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro 608.000991980
<b>11122</b>	<b>Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing</b>
111221	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
111222	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
111223	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
<b>11123</b>	<b>Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas</b>
111231	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas USD - Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas USD - Non Gaji
111232	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas Euro - Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN dalam Valas EURO - Non Gaji
<b>1113</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya</b>
<b>11131</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia</b>
111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah

AKUN	PENJELASAN
111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> .
111319	Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
<b>11132</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum</b>
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
111322	Kas Pemerintah yang ada di K/L
	Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di K/L
111323	Kas Pemerintah yang ada di BLU
	Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di BLU
111324	Kas di Rekening PFK
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening PFK
111325	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
111326	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Hibah luar negeri bencana alam
	Digunakan untuk mencatat transaksi pinjaman dan hibah luar negeri melalui rekening khusus. Rekening ini dimiliki oleh satker Direktorat Pengelolaan Kas negara (PKN). Akun ini terdiri dari rekening khusus yang dibuat di Bank Indonesia dan Bank Umum.
111327	Kas di Rekening PHLN
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening PHLN
111328	Kas di Rekening Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Dana Bergulir
111329	Kas lainnya
	Digunakan untuk mencatat Kas lainnya
<b>11134</b>	<b>Kas di Rekening Retur Kuasa BUN</b>
111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji.
111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji.
111343	Kas di Rekening Retur Reksus Pinjaman/Hibah/Surat Berharga Syariah Negara

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Pinjaman/Hibah/Surat Berharga Syariah Negara.
<b>1114</b>	<b>Kas di Rekening Kas di KPPN</b>
<b>11141</b>	<b>Kas di Bank Indonesia</b>
111411	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
111412	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah
<b>11142</b>	<b>Kas di Bank Umum</b>
111421	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
111422	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
111423	Kas di Rekening Retur BO/Pos (KPPN)
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BO/BO KPPN
<b>11143</b>	<b>Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
111431	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam valuta USD
111432	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam valuta Yen
111433	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam valuta Euro
<b>11144</b>	<b>Kas KPPN di Bank Umum dalam Valuta Asing</b>
111441	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) dalam Valuta USD.
<b>11145</b>	<b>Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah</b>
111451	Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah.
<b>11146</b>	<b>Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing</b>
111461	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD.
111462	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen.
111463	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro.
111469	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>1115</b>	<b>Kas dalam Transito</b>
<b>11151</b>	<b>Kas dalam Transito - BUN</b>
111511	Kas dalam Transito - BUN

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat selisih kiriman uang/pemindahbukuan antara pengeluaran dan penerimaan pada BUN.
111512	Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/Hibah
	Digunakan untuk mencatat Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/Hibah
111513	Kas dalam Transito TUP
	Akun antara pada SPAN untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban TUP satker. Akun ini adalah akun yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan menghubungkan pembayaran GTUP Nihil dengan pemotongan dana TUP ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111514	Kas dalam Transito UP
	Akun antara untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban UP satker. Akun ini adalah akun yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan menghubungkan pembayaran GUP Nihil dengan pemotongan dana UP ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111515	Kas dalam Transito BLU
	Akun antara untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban UP satker. Akun ini adalah akun yang tidak memiliki nomor rekening bank dan menghubungkan pembayaran Pengesahan Transaksi BLU ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111516	Kas dalam Transito-Transaksi Non Kas
	Akun antara yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan dibutuhkan untuk menciptakan aliran kas masuk dan keluar pada proses transaksi hibah non kas. Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111517	Kas dalam Transito-Transaksi DTP
	Digunakan untuk mencatat proses in out dari penerimaan pajak ditanggung pemerintah. Jika menggunakan akun kas ini maka tidak akan masuk LAK.
111519	Kas dalam Transito Lainnya
	Akun antara untuk mencatat pertanggungjawaban transaksi transito yang melalui modul Penerimaan dan Pembayaran. Akun ini menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) yang ada pada segmen bank.
<b>11152</b>	<b>Kas dalam Transito - K/L</b>
111521	Kas dalam Transito - Perwakilan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat kiriman sisa UP/Kas di Bendahara Pengeluaran Satket Perwakilan RI di luar negeri yang sudah disetorkan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima.
<b>1116</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
<b>11161</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
1117	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
11171	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
111711	Kas di Bendahara Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara.
1118	<b>Kas Lainnya dan Setara Kas</b>
11181	<b>Setara Kas</b>
111811	Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat setara kas Surat Berharga
111812	Penempatan di Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat setara kas Penempatan di Bank Umum, termasuk penempatan setara kas di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN
111813	Reverse Repo
	Digunakan untuk mencatat setara kas Reverse Repo
111814	<i>Foreign Exchange</i>
	Digunakan untuk mencatat setara kas transaksi <i>Foreign Exchange</i> .
111819	Setara Kas lainnya
	Digunakan untuk mencatat Setara Kas lainnya
11182	<b>Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga</b>
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya dan Setara Kas, yang mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.
111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Langsung yang telah disahkan.
111823	Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi
	Digunakan untuk mencatat reklasifikasi Kas Besi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satker Perwakilan RI di Luar Negeri selama Uang Persediaan belum diterima. Digunakan pada BA Kementerian Luar Negeri (011).
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat kas lainnya di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan.
111826	Kas Lainnya di BLU
	Digunakan untuk mencatat saldo Kas BLU yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU, seperti dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA Rupiah Murni dan/atau DIPA PNB
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di K/L yang berasal dari Hibah langsung bentuk uang yang Belum Disahkan
<b>1119</b>	<b>Kas pada Badan Layanan Umum</b>
<b>11191</b>	<b>Kas - BLU</b>
111911	Kas dan Bank - BLU
	Digunakan untuk mencatat Kas Pada BLU, yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di BLU (yang sudah disahkan BUN).
111912	Dana yang akan Dijaminkan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan Dijaminkan - BLU
111913	Dana yang akan dipadankan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan Dipadankan - BLU
111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
<b>11192</b>	<b>Setara Kas - BLU</b>
111921	Surat Berharga - BLU
	Digunakan untuk mencatat Surat Berharga - BLU
111929	Setara kas Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Setara kas Lainnya - BLU
<b>112</b>	<b>UANG MUKA REKENING BUN</b>
<b>1121</b>	<b>Uang Muka Dari Rekening KUN</b>
<b>11211</b>	<b>Uang Muka KUN UP</b>
112111	Uang Muka KUN UP - PP
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka KUN UP - PP
<b>1122</b>	<b>Uang Muka Dari Rekening Khusus</b>
<b>11221</b>	<b>Uang Muka Reksus UP</b>
112211	Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
<b>11222</b>	<b>Uang Muka Reksus Non UP</b>
112221	Uang Muka Reksus Kosong
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Reksus Kosong
<b>1123</b>	<b>Talangan kepada RKUN</b>
<b>11231</b>	<b>Talangan kepada RKUN</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
112311	Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
112312	Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
112313	Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
<b>113</b>	<b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>
<b>1131</b>	<b>Investasi dalam Deposito</b>
<b>11311</b>	<b>Investasi dalam Deposito</b>
113111	Investasi dalam Deposito Jangka pendek
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Deposito Jangka Pendek, termasuk penempatan investasi jangka pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN.
<b>1132</b>	<b>Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara</b>
<b>11321</b>	<b>Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara</b>
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
113211	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
<b>11322</b>	<b>Investasi Jangka Pendek pada Surat Berharga Negara</b>
113221	Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka stabilisasi pasar
	Digunakan untuk mencatat Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka stabilisasi pasar
113222	Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka optimalisasi kas
	Digunakan untuk mencatat Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka optimalisasi kas
<b>1133</b>	<b>Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum</b>
<b>11331</b>	<b>Deposito Jangka Pendek - BLU</b>
113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
113319	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
	Digunakan untuk mencatat Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
<b>1134</b>	<b>Bagian Lancar Investasi Non Permanen</b>
<b>11341</b>	<b>Bagian Lancar Investasi Non Permanen</b>
113411	Bagian Lancar Investasi Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Investasi Non Permanen.
<b>1139</b>	<b>Investasi Jangka Pendek Lainnya</b>
<b>11391</b>	<b>Investasi Jangka Pendek Lainnya</b>
113911	Investasi Jangka Pendek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Pendek Lainnya



AKUN	PENJELASAN
114	<b>BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA, DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA</b>
1141	<b>Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)</b>
11411	<b>Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)</b>
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Dan atas pengeluaran tersebut telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen2 yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dari pihak ketiga seperti kwitansi, invoice, dll.
114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pegawai Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114112	Belanja barang yang dibayar di muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja barang yang dibayar di muka ( <i>prepaid</i> )
114113	Belanja Pembayaran Bunga Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja pembayaran bunga dibayar di muka ( <i>prepaid</i> )
114114	Belanja Lain-lain Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-Lain Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114115	Belanja Modal Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Modal Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114116	Belanja Hibah Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114117	Belanja Subsidi Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114118	Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
1142	<b>Uang muka belanja (<i>prepayment</i>)</b>
11421	<b>Uang muka belanja pemerintah pusat (<i>prepayment</i>)</b>
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.
114211	Uang Muka Belanja Pegawai ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja pegawai ( <i>prepayment</i> )
114212	Uang Muka Belanja Barang ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja barang ( <i>prepayment</i> )
114213	Uang Muka Belanja Modal ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja modal ( <i>prepayment</i> )
114214	Uang Muka Belanja Pembayaran Bunga ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja pembayaran bunga ( <i>prepayment</i> )
114215	Uang Muka Belanja Subsidi ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja subsidi ( <i>prepayment</i> )
114216	Uang Muka Belanja Hibah ( <i>Prepayment</i> )

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja hibah ( <i>prepayment</i> )
114217	Uang Muka Belanja Bantuan Sosial ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja bantuan sosial ( <i>prepayment</i> )
114218	Uang Muka Belanja Lain-lain ( <i>prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Belanja Lain-Lain ( <i>prepayment</i> )
<b>11422</b>	<b>Uang muka transfer ke daerah (<i>prepayment</i>)</b>
114221	Uang muka dana perimbangan ( <i>prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat Uang muka belanja dana perimbangan ( <i>prepayment</i> )
114222	Uang muka otonomi khusus dan penyesuaian ( <i>prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat Uang muka belanja otonomi khusus dan penyesuaian ( <i>prepayment</i> ).
<b>1143</b>	<b>Pendapatan Yang Masih Harus Diterima</b>
<b>11431</b>	<b>Pendapatan Yang Masih Harus Diterima</b>
114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
	Digunakan untuk mencatat penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode pelaporan.
<b>115</b>	<b>PIUTANG</b>
	Digunakan untuk mencatat Piutang, meliputi jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara/Lembaga dan/atau Hak Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau akibat lainnya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
<b>1151</b>	<b>Piutang Perpajakan</b>
<b>11511</b>	<b>Piutang Pajak PPh Migas</b>
115111	Piutang PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Minyak Bumi
115112	Piutang PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Gas Bumi
115119	Piutang PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Migas Lainnya
<b>11512</b>	<b>Piutang Pajak PPh Non Migas</b>
115121	Piutang PPh Pasal 21
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 21
115122	Piutang PPh Pasal 22
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 22
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 22 Impor
115124	Piutang PPh Pasal 23
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 23
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 25/29 Badan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
115127	Piutang PPh Pasal 26
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 26
115128	Piutang PPh Final
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Final
115129	Piutang PPh Piutang PPh Fiskal Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Piutang PPh Fiskal Luar Negeri
<b>11513</b>	<b>Piutang Pajak PPN</b>
115131	Piutang PPN Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPN Dalam Negeri
115132	Piutang PPN Impor
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPN Impor
115139	Piutang PPN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPN Lainnya
<b>11514</b>	<b>Piutang Pajak PPnBM</b>
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPnBM dalam Negeri
115142	Piutang PPnBM Impor
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPnBM Impor
115149	Piutang PPnBM Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPnBM Lainnya
<b>11515</b>	<b>Piutang Pajak PBB dan BPHTB</b>
115151	Piutang PBB Pedesaan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Pedesaan
115152	Piutang PBB Perkotaan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Perkotaan
115153	Piutang PBB Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Perkebunan
115154	Piutang PBB Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Kehutanan
115155	Piutang PBB Pertambangan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Pertambangan
115156	Piutang BPHTB
	Digunakan untuk mencatat Piutang BPHTB
115159	Piutang PBB Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Lainnya
<b>11516</b>	<b>Piutang Cukai dan Bea Meterai</b>
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk mencatat Piutang Cukai Hasil Tembakau
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol
	Digunakan untuk mencatat Piutang Cukai Ethyl Alkohol

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
115163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
	Digunakan untuk mencatat Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai
115165	Piutang Bea Materai
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bea Materai
115169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Cukai Lainnya
<b>11517</b>	<b>Piutang Pajak Lainnya</b>
115171	Piutang Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penagihan PPh
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penagihan PPN
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penagihan PPnBM
115176	Piutang Bunga Penagihan PTL
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penagihan PTL
<b>11518</b>	<b>Piutang Pajak Perdagangan Internasional</b>
115181	Piutang Bea masuk
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bea masuk
115182	Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Pabean Lainnya
115185	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pajak/Pungutan Ekspor
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar
<b>11519</b>	<b>Piutang Bea Masuk Tindakan</b>
115191	Piutang Bea Masuk Antidumping
	Digunakan untuk mencatat piutang atas pendapatan negara yang berasal dari pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

AKUN	PENJELASAN
115192	Piutang Bea Masuk Imbalan
	Digunakan untuk mencatat piutang atas pendapatan negara yang berasal dari pungutan yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian.
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan
	Digunakan untuk mencatat piutang atas pendapatan negara yang berasal dari pungutan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.
<b>1152</b>	<b>Piutang Bukan Pajak</b>
	Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari PNBPN, meliputi seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah
<b>11521</b>	<b>Piutang Bukan Pajak</b>
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
	Digunakan untuk mencatat Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
115212	Piutang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang Lainnya
<b>11522</b>	<b>Piutang PT PPA</b>
115221	Piutang PT. PPA
	Digunakan untuk mencatat Piutang PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset (Persero)) yaitu perusahaan perseroan yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian pengelolaan aset.
<b>11523</b>	<b>Piutang transfer ke Daerah</b>
115231	Piutang Transfer Dana Perimbangan
	Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer Dana Perimbangan
115232	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
	Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
115239	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya
<b>11524</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah</b>
115241	Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
<b>11525</b>	<b>Piutang Transfer ke Daerah-Diestimasi</b>
115251	Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi
	Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi
115252	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian-Diestimasi
	Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian-Diestimasi
<b>11526</b>	<b>Piutang Subsidi</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
115261	Piutang Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Piutang Subsidi
<b>1153</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>11531</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
115311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
<b>11532</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU</b>
115321	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU
<b>1154</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>11541</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan</b>
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
<b>11542</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi</b>
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
<b>11543</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU</b>
115431	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU
<b>1155</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman</b>
<b>11551</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman</b>
115511	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
115512	Bagian Lancar RDI
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar RDI
115513	Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
	Digunakan untuk mencatat Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih.
<b>11552</b>	<b>Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman</b>
115521	Potensi tunggakan yang dapat ditagih
	Digunakan untuk mencatat Potensi tunggakan \ Yang dapat ditagih
115522	Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
115523	Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Piutang Denda Pemberian Pinjaman
115524	Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman.
115525	Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman.

AKUN	PENJELASAN
<b>11553</b>	<b>Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual</b>
115531	Piutang Bunga Pemberian Pinjaman Penyesuaian
	Digunakan untuk mencatat piutang bunga dan denda akrual pada akhir periode pelaporan
115532	Piutang Denda Pemberian Pinjaman Penyesuaian
	Digunakan untuk mencatat bunga Pemberian pinjaman akrual pada akhir periode pelaporan (semesteran).
<b>11559</b>	<b>Suspen Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman</b>
115591	Suspen Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.
115592	Suspen Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Bunga Pemberian Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.
115593	Suspen Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Denda Pemberian Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya
115594	Suspen Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.
115595	Suspen Piutang Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Biaya Lain-Lain Penerusan Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.
<b>1156</b>	<b>Piutang dari KUN</b>
<b>11561</b>	<b>Piutang dari KUN</b>
115611	Piutang dari BUN
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari BUN
115612	Piutang dari KPPN
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari KPPN
115613	Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima
	Digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Uang Persediaan. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Kas Di Bendahara Pengeluaran UP.
115614	Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan diterima
	Digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Tambahan Uang Persediaan. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP.
115615	Piutang dari Uang Muka Belanja Barang yang akan diterima

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait permintaan uang muka belanja barang. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun uang muka belanja barang.
115616	Piutang dari Uang Muka Belanja Modal yang akan diterima
	Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait uang muka belanja modal. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Uang Muka Belanja Modal.
115617	Piutang dari Persekot Gaji yang akan diterima
	Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait persekot gaji. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Uang Muka Belanja Pegawai.
<b>11563</b>	<b>Piutang dari Kas BLU</b>
115631	Piutang dari Kas BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Kas BLU
<b>11565</b>	<b>Piutang Kepada RKUN</b>
	Digunakan untuk mencatat Piutang Kepada RKUN, meliputi Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral
115651	Piutang Kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Piutang Kepada RKUN
<b>11566</b>	<b>Piutang Transito</b>
115661	Piutang dari Penerimaan Transito
	Digunakan untuk mencatat piutang dari penerimaan transito.
<b>11567</b>	<b>Piutang atas Komitmen <i>Treasury Dealing Room</i></b>
115671	Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
115672	Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
115673	Piutang Komitmen atas Transaksi SBN-TDR
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Transaksi SBN pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
115674	Piutang Komitmen atas Reverse Repo-TDR
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Reverse Repo.
115675	Piutang Komitmen atas Repo-TDR
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
115676	Piutang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange</i> -TDR
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange</i> pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
<b>11568</b>	<b>Piutang atas Transaksi <i>Treasury Dealing Room</i></b>
115681	Piutang Bunga Penempatan pada Bank Indonesia



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penempatan pada Bank Indonesia pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
115682	Piutang Bunga Penempatan pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penempatan pada Bank Umum pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
115683	Piutang Kupon SBN
	Digunakan untuk mencatat Piutang Kupon SBN pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
115684	Piutang Bunga Reverse Repo
	Digunakan untuk Piutang Bunga Transaksi Reverse Repo pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
<b>1157</b>	<b>Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum</b>
<b>11571</b>	<b>Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
115711	Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
115713	Piutang BLU Penunjang Konstruksi
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Penunjang Konstruksi
115714	Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
115719	Piutang BLU penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU penyedia Barang dan Jasa Lainnya
<b>11572</b>	<b>Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
115721	Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
115722	Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
115729	Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
<b>11573</b>	<b>Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
115731	Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
115739	Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
<b>11574</b>	<b>Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b>
115741	Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
<b>11579</b>	<b>Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
<b>1158</b>	<b>Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum</b>
<b>11581</b>	<b>Piutang Sewa - BLU</b>
115811	Piutang Sewa Tanah - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Tanah - BLU
115812	Piutang Sewa Gedung - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Gedung - BLU
115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Ruangan - BLU
115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU
115815	Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya - BLU
115819	Piutang Sewa Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Lainnya - BLU
<b>11582</b>	<b>Piutang dari Penjualan Aset - BLU</b>
115821	Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU
115829	Piutang dari penjualan Aset lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari penjualan Aset lainnya - BLU
<b>11583</b>	<b>Piutang dari Tukar Menukar Aset - BLU</b>
115831	Piutang dari Tukar Menukar Aset Tetap - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Tukar Menukar Aset Tetap - BLU
115839	Piutang dari Tukar Menukar Aset Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Tukar Menukar Aset Lainnya - BLU
<b>11589</b>	<b>Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional</b>
115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
<b>1159</b>	<b>Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya</b>
<b>11591</b>	<b>Piutang Lancar Kredit Pemerintah</b>
115911	Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat tagihan jangka pendek pokok/bunga/denda kredit pemerintah (KUMK).
115912	Piutang Bunga Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Kredit Pemerintah (KUMK)
115913	Piutang Denda Keterlambatan Bunga KUMK
	Digunakan untuk mencatat Piutang Denda Keterlambatan Bunga KUMK
115914	Piutang Denda Penyaluran KUMK
	Digunakan untuk mencatat Piutang Denda Penyaluran KUMK
<b>11592</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah</b>

AKUN	PENJELASAN
115921	Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat tagihan jangka pendek pokok/bunga/denda atas penjaminan pemerintah.
<b>11593</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang</b>
115931	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat bagian lancar yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atas Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
115932	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
	Digunakan untuk mencatat bagian lancar yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atas Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
115939	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat bagian lancar yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atas Piutang Jangka Panjang Lainnya.
<b>116</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>
<b>1161</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan</b>
<b>11611</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan</b>
116111	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Migas
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Migas
116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas
116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN
116114	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB
116116	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai
116117	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya
116118	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional
116119	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bea Masuk Tindakan
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Bea Masuk Tindakan yang terdiri dari atas Piutang Bea Masuk Antidumping, Piutang Bea Masuk Imbalan, dan Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
<b>1162</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</b>
<b>11621</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
<b>11622</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA</b>
116221	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA
<b>11623</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman</b>
116231	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
116232	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar RDI
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar RDI
<b>11624</b>	<b>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya</b>
116241	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
116242	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
116243	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
116244	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
116249	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya.
<b>11625</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman</b>
116251	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
116252	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
116253	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman
<b>11626</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penjaminan</b>

AKUN	PENJELASAN
	<b>Pemerintah</b>
116261	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
<b>11627</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Subsidi</b>
116271	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek Subsidi
<b>1163</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>11631</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
116311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
<b>1164</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>11641</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan</b>
116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
<b>11642</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi</b>
116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
<b>1165</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen</b>
<b>11651</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen</b>
116511	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
<b>1166</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU</b>
<b>11661</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
116611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
116613	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi
116614	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU

AKUN	PENJELASAN
	Penyedia Jasa Telekomunikasi
116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
<b>11662</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
116621	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
116622	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
116629	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
<b>11663</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
116631	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
116639	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
<b>11664</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b>
116641	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
<b>11669</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Operasional Lainnya BLU</b>
116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
<b>1167</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU</b>
<b>11671</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU</b>
116711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU
116712	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU

AKUN	PENJELASAN
116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
116714	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
116719	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
<b>11672</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset BLU</b>
116721	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
116722	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
<b>11673</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
116731	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
116732	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
<b>11679</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Operasional Lainnya BLU</b>
116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
<b>1168</b>	<b>Investasi Diragukan Realisasinya</b>
<b>11681</b>	<b>Investasi Jangka Pendek Diragukan Realisasinya</b>
116811	Investasi Jangka Pendek Pada SBN Diragukan Realisasinya
	Digunakan untuk mencatat akumulasi perubahan nilai wajar investasi jangka pendek pada SBN.
<b>117</b>	<b>PERSEDIAAN</b>
	Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
<b>1171</b>	<b>Persediaan</b>
	Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akuntansi

AKUN	PENJELASAN
	Pemerintahan
<b>11711</b>	<b>Persediaan Bahan untuk Operasional</b>
117111	Barang Konsumsi
	Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk kegiatan operasional satker berupa Barang Konsumsi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN, misalnya : ATK, buku nikah, plat nomor, dll.
117112	Amunisi
	Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Amunisi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
	Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Bahan untuk Pemeliharaan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117114	Suku Cadang
	Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Suku Cadang sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
<b>11712</b>	<b>Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat</b>
117121	Materai dan Leges
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Materai dan Leges sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
117122	Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda berupa Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117125	Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi



AKUN	PENJELASAN
	BMN
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda - Dalam Proses
	Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang dalam proses produksi untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
<b>11713</b>	<b>Persediaan Bahan untuk Proses Produksi</b>
117131	Bahan Baku
	Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk proses produksi berupa bahan baku sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117132	Barang dalam Proses
	Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang dalam proses produksi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
<b>11714</b>	<b>Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial</b>
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
	Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang yang digunakan dalam rangka Bantuan Sosial.
<b>11719</b>	<b>Persediaan Bahan Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat persediaan selain dari bahan untuk operasional, bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, dan bahan untuk proses produksi
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
	Digunakan untuk mencatat Persediaan bahan lainnya berupa persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga.
117192	Persediaan Barang Hasil Sitaan
	Digunakan untuk mencatat Persediaan bahan lainnya berupa Barang Hasil Sitaan
117199	Persediaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Lainnya
<b>1172</b>	<b>Persediaan Badan Layanan Umum</b>
	Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khusus satker Badan Layanan Umum
<b>11721</b>	<b>Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU sektor Penyedia Barang dan Jasa
117211	Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pelayanan Kesehatan
117212	Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pelayanan Pendidikan
117213	Persediaan BLU penunjang Konstruksi
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU penunjang Konstruksi
117214	Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	Digunakan untuk mencatat Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
117219	Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
<b>11722</b>	<b>Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
117221	Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Kawasan Otorita
117222	Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
117229	Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Kawasan Lainnya
<b>11723</b>	<b>Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
117231	Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Dana Investasi
117232	Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Dana Bergulir
117239	Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Dana Lainnya
<b>1179</b>	<b>Persediaan yang Belum Diregister</b>
<b>11791</b>	<b>Persediaan yang Belum Diregister</b>
117911	Persediaan yang Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap persediaan yang diterima.
<b>118</b>	<b>PIUTANG PFK</b>
<b>1181</b>	<b>Piutang PFK I</b>
<b>11811</b>	<b>Piutang PFK I</b>
118111	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai
	Digunakan untuk mencatat Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
118112	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
118113	Piutang PFK Beras Bulog

AKUN	PENJELASAN
	Piutang yang berasal dari penerimaan PFK Beras Bulog melalui potongan SPM Gaji. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.
118114	Piutang PFK 8% Gaji
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 8% Gaji
118115	Piutang PFK Tabungan Wajib Perumahan
	Piutang yang berasal dari penerimaan PFK Taperum melalui potongan SPM Gaji. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.
118116	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
118117	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja.
	Digunakan untuk mencatat Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
118118	Piutang PFK 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 2% Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
118119	Piutang PFK Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK Lain-Lain
<b>11812</b>	<b>Piutang PFK II</b>
118121	Piutang PFK Wesel Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK Wesel Pemerintah
118122	Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu.
118123	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain
	Digunakan untuk mencatat Piutang Dana PFK Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
118124	Piutang PFK 8% Gaji TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
	Piutang yang berasal dari penerimaan PFK 8% TNI/PNS Kemhan. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.
118125	Piutang Dana PFK Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Piutang Dana PFK Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
118126	Piutang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Piutang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja peserta pemerintah pusat.
<b>1182</b>	<b>Piutang Pengembalian Escrow ke RKUN</b>
<b>11821</b>	<b>Piutang Pengembalian Escrow Pajak</b>

AKUN	PENJELASAN
118211	Piutang Pengembalian <i>Escrow</i> Pajak
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pengembalian <i>Escrow</i> Pajak
<b>11822</b>	<b>Piutang Pengembalian <i>Escrow</i> PNB</b>
118221	Piutang Pengembalian <i>Escrow</i> PNB
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pengembalian <i>Escrow</i> Pajak
<b>12</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan
<b>121</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
<b>1212</b>	<b>Dana Restrukturisasi Perbankan</b>
<b>12121</b>	<b>Dana Restrukturisasi Perbankan</b>
121211	Dana Restrukturisasi Perbankan
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Dana Restrukturisasi Perbankan sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>1213</b>	<b>Dana Bergulir</b>
<b>12131</b>	<b>Program Kemitraan (PK)</b>
121311	Program Kemitraan (PK)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir berupa Program Kemitraan sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>12132</b>	<b>Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga</b>
121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir berupa Dana Bergulir yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>12133</b>	<b>Dana Bergulir Lainnya</b>
121331	Dana Bergulir Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir selain dari Program Kemitraan dan Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>1214</b>	<b>Investasi dalam Obligasi</b>
<b>12141</b>	<b>Investasi dalam Obligasi</b>
121411	Investasi dalam Obligasi
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Obligasi sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>1215</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
<b>12151</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
121511	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>1216</b>	<b>Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum</b>
<b>12161</b>	<b>Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa - Non Permanen</b>
121611	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen
121613	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen
121614	Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen
121615	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen
121619	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen
<b>12162</b>	<b>Investasi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu - Non Permanen</b>
121621	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Non Permanen
121622	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen
121629	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Non Permanen
<b>12163</b>	<b>Investasi BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat - Non Permanen</b>
121631	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen
121632	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen
121639	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen
<b>1219</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen Lainnya yang tidak memenuhi kriteria Investasi dalam Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dan BLU
<b>12191</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen Lainnya yang tidak memenuhi kriteria Investasi dalam Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dan BLU
121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

AKUN	PENJELASAN
<b>12192</b>	<b>Investasi Non Permanen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)</b>
121921	Investasi Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah
	Digunakan untuk mencatat aset atas Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah yang bersumber dari rupiah murni pengeluaran Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah
<b>122</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang mempunyai masa investasi lebih dari 12 (duabelas) bulan.
<b>1221</b>	<b>Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan Negara, BHMN, badan-badan internasional seperti IMF, ADB, serta badan hukum lainnya.
<b>12211</b>	<b>Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah</b>
122111	Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero
122112	Penyertaan Modal Pemerintah pada PERUM
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada PERUM
<b>12212</b>	<b>Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional</b>
122121	Penyertaan Modal Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Luar Negeri pada badan-badan internasional seperti IMF dan ADB
<b>12213</b>	<b>Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya yang tidak termasuk kriteria sebagai perusahaan negara/daerah dan badan-badan internasional.
122131	Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya
<b>1222</b>	<b>Investasi Permanen Badan Layanan Umum</b>
<b>12221</b>	<b>Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa - Permanen</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada BLU Penyedia Barang dan Jasa mencakup layanan kesehatan, pendidikan, penunjang konstruksi, jasa komunikasi dan penyedia barang dan jasa lainnya.
122211	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen
122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen
122213	Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen
122214	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen
122219	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen
<b>12222</b>	<b>Investasi BLU Pengelola Kawasan - Permanen</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada BLU Pengelola Kawasan mencakup pengelolaan kawasan otorita, kawasan ekonomi terpadu dan kawasan lainnya.
122221	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Permanen
122222	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen
122223	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Permanen
<b>12223</b>	<b>Investasi BLU Pengelola Dana - Permanen</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada BLU Pengelola Dana mencakup pengelolaan Dana Investasi, Dana Bergulir dan Dana Lainnya.
122231	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen
122232	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen
122239	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen
<b>1229</b>	<b>Investasi Permanen Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang lainnya, yaitu investasi permanen yang tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dan Badan Layanan Umum.
<b>12291</b>	<b>Investasi Permanen Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang lainnya yang terdiri dari Investasi dalam Obligasi, pada Otorita, pada Bank Indonesia dan Investasi Lain-lain.
122911	Investasi dalam Obligasi
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Obligasi
122912	Investasi pada Otorita
	Digunakan untuk mencatat Investasi pada Otorita
122913	Investasi pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Investasi pada Bank Indonesia
122919	Investasi Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat Investasi Lain-lain
<b>123</b>	<b>DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH</b>
<b>1231</b>	<b>Dana Bergulir Diragukan Tertagih</b>
<b>12311</b>	<b>Dana Bergulir Diragukan Tertagih</b>
123111	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir Diragukan Tertagih-Kementerian Negara/Lembaga.

AKUN	PENJELASAN
123112	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/ Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir Diragukan Tertagih-Program Kemitraan.
123113	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir Diragukan Tertagih-Lainnya.
<b>1232</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya</b>
<b>12321</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya</b>
123211	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
	Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya.
<b>1233</b>	<b>Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih</b>
<b>12331</b>	<b>Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Diragukan Tertagih</b>
123311	Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan Diragukan Tertagih
123312	Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan Diragukan Tertagih
123313	Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi Diragukan Tertagih
123314	Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Diragukan Tertagih
123319	Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Diragukan Tertagih
<b>12332</b>	<b>Investasi Non Permanen BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu Diragukan Tertagih</b>
123321	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita Diragukan Tertagih
123322	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Diragukan Tertagih
123329	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya Diragukan Tertagih
<b>12333</b>	<b>Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat Diragukan Tertagih</b>
123331	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Investasi Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Investasi Diragukan Tertagih
123332	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih
123339	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>
	Digunakan untuk mencatat aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
<b>131</b>	<b>TANAH</b>
	Digunakan untuk mencatat aset tetap berwujud tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.
<b>1311</b>	<b>Tanah</b>
	Digunakan untuk mencatat tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
<b>13111</b>	<b>Tanah</b>
131111	Tanah
	Digunakan untuk mencatat BMN berupa Aset Tetap - Tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
<b>1312</b>	<b>Tanah Belum Diregister</b>
<b>13121</b>	<b>Tanah Belum Diregister</b>
131211	Tanah Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Tanah yang diterima.
<b>1313</b>	<b>Tanah Badan Layanan Umum</b>
<b>13131</b>	<b>Tanah - BLU</b>
131311	Tanah - BLU
	Digunakan untuk mencatat tanah yang dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
<b>1314</b>	<b>Tanah Belum Diregister - BLU</b>
<b>13141</b>	<b>Tanah Belum Diregister - BLU</b>
131411	Tanah Belum Diregister - BLU
	Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Tanah yang diterima.
<b>132</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>
<b>1321</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>
<b>13211</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>
	Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dengan masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
132111	Peralatan dan Mesin

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin. Mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai kodefikasi BMN
<b>1322</b>	<b>Peralatan dan Mesin Belum Diregister</b>
<b>13221</b>	<b>Peralatan dan Mesin Belum Diregister</b>
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Peralatan dan Mesin yang diterima.
<b>1323</b>	<b>Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum</b>
<b>13231</b>	<b>Peralatan dan Mesin - BLU</b>
132311	Peralatan dan Mesin - BLU
	Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
<b>1324</b>	<b>Peralatan dan Mesin Belum Diregister - BLU</b>
<b>13241</b>	<b>Peralatan dan Mesin Belum Diregister - BLU</b>
132411	Peralatan dan Mesin Belum Diregister - BLU
	Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Peralatan dan Mesin yang diterima.
<b>133</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
<b>1331</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>
<b>13311</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>
133111	Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; rambu-rambu; dan tugu titik kontrol/pasti.
<b>1332</b>	<b>Gedung dan Bangunan Belum Diregister</b>
<b>13321</b>	<b>Gedung dan Bangunan Belum Diregister</b>
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Gedung dan Bangunan yang diterima.
<b>1333</b>	<b>Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum</b>
<b>13331</b>	<b>Gedung dan Bangunan - BLU</b>
133311	Gedung dan Bangunan - BLU
	Digunakan untuk mencatat seluruh Gedung dan Bangunan yang dibeli, diperoleh atau dibangun Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
<b>1334</b>	<b>Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU</b>
<b>13341</b>	<b>Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU</b>
133411	Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU
	Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap

AKUN	PENJELASAN
	Gedung dan Bangunan yang diterima.
<b>134</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>
<b>1341</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>13411</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
134111	Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat Jalan dan Jembatan. Jalan dan jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
134112	Irigasi
	Digunakan untuk mencatat Irigasi. Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
134113	Jaringan
	Digunakan untuk mencatat Jaringan. Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
<b>1342</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister</b>
<b>13421</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister</b>
134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Jalan dan Jembatan yang diterima.
134212	Irigasi Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Irigasi yang diterima.
134213	Jaringan Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Jaringan yang diterima.
<b>1343</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum</b>
<b>13431</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU</b>
134311	Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun atau diperoleh oleh Badan Layanan Umum serta dikuasai oleh satker BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
<b>1344</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU</b>
<b>13441</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU</b>
134411	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU
	Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diterima.
<b>135</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>
<b>1351</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
<b>13511</b>	<b>Aset Tetap Renovasi</b>
135111	Aset Tetap Renovasi

AKUN	PENJELASAN
	<p>Digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik entitas akuntansi, namun digunakan dalam kegiatan operasional entitas akuntansi yang melakukan renovasi.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan;</li> <li>2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi;</li> <li>3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset.</li> </ol>
<b>13512</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
135121	Aset Tetap Lainnya
	<p>Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan siap digunakan.</p>
<b>1352</b>	<b>Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum</b>
<b>13521</b>	<b>Aset Tetap Lainnya - BLU</b>
135211	Aset Tetap Lainnya - BLU
	<p>Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional satker BLU dan dalam kondisi siap digunakan.</p>
<b>13522</b>	<b>Aset Tetap Renovasi - BLU</b>
135221	Aset Tetap Renovasi - BLU
	<p>Digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik satker BLU, namun digunakan dalam kegiatan operasional satker BLU yang melakukan renovasi.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan;</li> <li>2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi;</li> <li>3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset.</li> </ol>
<b>136</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>
	<p>Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.</p>
<b>1361</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>
	<p>Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.</p>
<b>13611</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
<b>1362</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU</b>
<b>13621</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU</b>
136211	Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan oleh satker BLU, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
<b>137</b>	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>
<b>1371</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
<b>13711</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli.
<b>13712</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
137121	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
<b>1372</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
<b>13721</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
<b>13722</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU</b>
137221	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
<b>1373</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>13731</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi</b>
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Irigasi mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jaringan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
<b>13732</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU</b>
137321	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
<b>1374</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
<b>13741</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
<b>13742</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU</b>
137421	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
<b>139</b>	<b>ASET TETAP YANG BELUM DIREGISTER</b>
<b>1391</b>	<b>Aset Tetap yang Belum Diregister</b>
<b>13911</b>	<b>Aset Tetap yang Belum Diregister</b>
139111	Aset Tetap yang Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Aset Tetap yang diterima.
<b>14</b>	<b>DANA CADANGAN</b>
<b>141</b>	<b>DANA CADANGAN</b>
<b>1411</b>	<b>Dana Cadangan</b>
<b>14111</b>	<b>Dana Cadangan</b>
141111	Dana Cadangan
	Digunakan untuk mencatat dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
<b>15</b>	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>
<b>151</b>	<b>PIUTANG TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN</b>
<b>1511</b>	<b>Piutang Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>15111</b>	<b>Piutang Tagihan Penjualan Angsuran</b>
151111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Jumlah TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.
<b>1512</b>	<b>Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU</b>
<b>15121</b>	<b>Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum</b>

AKUN	PENJELASAN
151211	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah di satker BLU secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Jumlah TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.
<b>152</b>	<b>PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI</b>
<b>1521</b>	<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>15211</b>	<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri non bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah TPA/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan/ Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.
<b>1522</b>	<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
<b>15221</b>	<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum</b>
152211	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat jumlah tagihan yang timbul atas proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai non bendahara satker BLU dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/ pegawai non bendahara satker BLU tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah TPA/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan/ Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.
<b>153</b>	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG PEMBERIAN PINJAMAN</b>
<b>1531</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
<b>15311</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
153111	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah.
153112	Aset Lainnya RDI
	Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman berupa Aset lainnya RDI yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah
153113	Piutang yang belum tertagih ( <i>Unbilled</i> )

AKUN	PENJELASAN
	Posisi tagihan penerusan pinjaman yang belum ditagihkan dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun dan dicatat oleh satker Direktorat SMI
153114	Piutang yang belum teridentifikasi ( <i>Unidentified</i> )
	Piutang yang telah diketahui debiturnya atau customernya dari piutang penerusan pinjaman namun belum direkonsiliasi dengan piutang penerusan pinjamannya
153115	Selisih piutang ( <i>On Account</i> )
	Penerimaan standar yang tidak merujuk ke tagihan piutang
153116	Piutang yang belum terekonsiliasi ( <i>Unapplied</i> )
	Pengembalian piutang yang belum diketahui wajib setornya
153117	Aset Lainnya Kredit Program
	Piutang biaya komitmen timbul atas pinjaman yang belum dilakukan penarikan. Dokumen sumbernya Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman
153118	Piutang Pemberian Pinjaman yang belum disesuaikan
	Digunakan untuk mencatat penagihan pemberian pinjaman sebagai perantara sebelum disesuaikan dengan piutang jangka panjang pemberian pinjaman.
153119	Piutang Transito Pengalihan Pemberian Pinjaman
	Akun piutang transito untuk mencatat pengalihan piutang pemberian pinjaman.
<b>15319</b>	<b>Suspen Piutang Pemberian Pinjaman</b>
153191	Suspen Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.
<b>154</b>	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG KREDIT PEMERINTAH</b>
<b>1541</b>	<b>Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah</b>
<b>15411</b>	<b>Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan</b>
154111	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah KUT-TP 1999/2000
	Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit KUT-TP 1999/2000 oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154112	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah Dana Cadangan KUT-TP
	Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit cadangan KUT-TP oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154113	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah KKop Pangan MP2000
	Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit KKop Pangan MP2000 oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154114	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah PIR dan UPP Perkebunan



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit PIR dan UPP Perkebunan oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154115	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat tagihan jangka panjang pokok/bunga/denda kredit pemerintah.
154116	Piutang yang Belum Tertagih ( <i>unbilled</i> ) atas Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat Piutang yang Belum Tertagih ( <i>unbilled</i> ) atas Kredit Pemerintah (KUMK).
<b>15412</b>	<b>Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah</b>
154121	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit investasi oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154122	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah yang belum disesuaikan
	Digunakan untuk mencatat tagihan jangka panjang pokok/bunga/denda kredit investasi pemerintah.
<b>15413</b>	<b>Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah</b>
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat piutang atas Penjaminan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda.
<b>155</b>	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA</b>
<b>1551</b>	<b>Piutang Jangka Panjang lainnya</b>
<b>15511</b>	<b>Piutang Jangka Panjang lainnya</b>
155111	Piutang Jangka Panjang lainnya
	Digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah.
<b>15512</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
155121	Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Pemerintah kepada PT. Lapindo Brantas Inc./PT. Minarak Lapindo Jaya atas pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak Lumpur Sidoarjo.
<b>15513</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar</b>
155131	Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
	Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar.
<b>1552</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Subsidi</b>
<b>15521</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Subsidi</b>
155211	Piutang Jangka Panjang Subsidi

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Subsidi
<b>156</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG JANGKA PANJANG</b>
<b>1561</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>15611</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran</b>
156111	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Tagihan Penjualan Angsuran
<b>1562</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU</b>
<b>15621</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU</b>
156211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk satker BLU atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Tagihan Penjualan Angsuran BLU
<b>1563</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>15631</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
<b>1564</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
<b>15641</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
156411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk satker BLU atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
<b>1565</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
<b>15651</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
156511	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang jangka panjang Pemberian Pinjaman.
156512	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya RDI
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Aset Lainnya RDI.
156513	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya Kredit Program

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Aset Lainnya Kredit Program.
<b>1566</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah</b>
<b>15661</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah</b>
156611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Kredit Pemerintah bidang pertanian dan perkebunan.
156612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Kredit Investasi Pemerintah.
<b>15662</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah</b>
156621	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Penjaminan Pemerintah.
<b>1567</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG SUBSIDI</b>
<b>15671</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi</b>
156711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi
<b>1569</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya</b>
<b>15691</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya</b>
156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
<b>15692</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
156921	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
<b>15693</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Kepada Yayasan Supersemar</b>
156931	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
<b>16</b>	<b>ASET LAINNYA</b>
<b>161</b>	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>
<b>1611</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>
<b>16111</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>

AKUN	PENJELASAN
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).
<b>1612</b>	Aset Konsesi Jasa
<b>16121</b>	Aset Konsesi Jasa
161211	Aset Konsesi Jasa
	Digunakan untuk mencatat aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama entitas pemerintah pusat dalam suatu perjanjian konsesi jasa antara pemerintah pusat dengan mitra (badan usaha), dan aset dimaksud merupakan aset yang: (a) disediakan oleh mitra (badan usaha) yang: (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; dan/atau (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra (badan usaha); dan/atau (b) disediakan oleh entitas pemerintah pusat yang: (i) merupakan aset yang dimiliki oleh entitas pemerintah pusat; dan/atau (ii) merupakan peningkatan aset entitas pemerintah pusat.
<b>16122</b>	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Konsesi Jasa
161221	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Konsesi Jasa
	Digunakan untuk mencatat aset konsesi jasa yang pada tanggal neraca sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan atau belum beroperasi dalam penyediaan jasa sesuai dengan suatu perjanjian konsesi jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra (badan usaha).
<b>162</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>
<b>1621</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>
	Digunakan untuk mencatat aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
<b>16211</b>	<b>Goodwill</b>
162111	Goodwill
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Goodwill
<b>16212</b>	<b>Hak Cipta</b>
162121	Hak Cipta
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>16213</b>	<b>Royalti</b>
162131	Royalti
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Royalti

AKUN	PENJELASAN
<b>16214</b>	<b>Patent</b>
162141	Patent
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
<b>16215</b>	<b>Software</b>
162151	Software
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Software
<b>16216</b>	<b>Lisensi</b>
162161	Lisensi
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu
<b>16217</b>	<b>Hasil Kajian/Penelitian</b>
162171	Hasil Kajian/Penelitian
	Digunakan untuk mencatat aset tak berwujud lainnya berupa hasil kajian/penelitian.
<b>16219</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya</b>
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut
<b>1622</b>	<b>Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum</b>
<b>16221</b>	<b>Software-Badan Layanan Umum</b>
162211	Software-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Software pada Badan Layanan Umum
<b>16222</b>	<b>Hak Cipta BLU</b>
162221	Hak Cipta BLU
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada BLU
<b>16223</b>	<b>Royalti BLU</b>
162231	Royalti BLU
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Royalti pada BLU
<b>16224</b>	<b>Patent BLU</b>
162241	Patent BLU
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) pada satker BLU atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>16229</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum</b>
162291	Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Lainnya pada Badan Layanan Umum
<b>1623</b>	<b>Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
<b>16231</b>	<b>Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
<b>1624</b>	<b>Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Layanan Umum
<b>16241</b>	<b>Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Layanan Umum
162411	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Badan Layanan Umum
<b>163</b>	<b>DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA</b>
<b>1631</b>	<b>Dana Yang Dibatasi Penggunaannya</b>
<b>16311</b>	<b>Dana Yang Dibatasi Penggunaannya I</b>
163111	Cadangan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan reboisasi.
163112	Cadangan Dana Subsidi/PSO
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan subsidi/ PSO.
163113	Cadangan Dana Bagi Hasil SDA
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan bagi hasil SDA.
163114	Dana untuk Penyertaan Modal Negara (PMN)
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan penyertaan modal negara (PMN).
163116	DAU yang belum dibagi
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan DAU yang belum dibagi.
163117	Dana pada Bapertarum
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan pada Bapertarum.
163118	Cadangan Dana Sebelum disesuaikan
	Digunakan untuk mencatat Cadangan Dana Sebelum disesuaikan.
163119	Dana Lainnya

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Dana Lainnya.
<b>16312</b>	<b>Trust Fund</b>
163121	<i>Trust Fund</i>
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk <i>Trust Fund</i> .
<b>16313</b>	<b>Dana Yang Dibatasi Penggunaannya II</b>
163131	Dana Perhitungan Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat Dana Perhitungan Pihak Ketiga
163132	Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Non Public Goods
	Digunakan untuk mencatat Rekening Lainnya milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan Non Public Goods dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
163133	Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Public Goods
	Digunakan untuk mencatat Rekening Lainnya milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan Public Goods dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
163134	Dana di Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)
	Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari realisasi anggaran investasi, pendapatan bunga, dan pengembalian pokok investasi pemerintah PEN
163135	Dana di Rekening Khusus Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Cluster A
	Digunakan untuk mencatat Rekening Lainnya milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan Cluster A dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai Peraturan menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
163136	Dana di Rekening Khusus Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Cluster B
	Digunakan untuk mencatat Rekening Lainnya milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan Cluster B dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai Peraturan menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
<b>1632</b>	<b>Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri</b>
<b>16321</b>	<b>Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri</b>
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat saldo kas besi yang disediakan pada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk keperluan mendesak.
<b>164</b>	<b>DANA PENJAMINAN</b>
<b>1641</b>	<b>Dana Cadangan Penjaminan</b>
<b>16411</b>	<b>Dana Cadangan Penjaminan</b>
164111	Dana Cadangan Penjaminan
	Digunakan untuk mencatat dana cadangan penjaminan yang diberikan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.
<b>1642</b>	<b>Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi</b>
<b>16421</b>	<b>Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi</b>
164211	Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi
	Akun aset lainnya untuk mencatat penampungan kas dari dana penjaminan pihak ketiga (retensi).
<b>165</b>	<b>DANA KELOLAAN BLU</b>
<b>1651</b>	<b>Dana Kelolaan Badan Layanan Umum</b>
<b>16511</b>	<b>Dana Kelolaan Badan Layanan Umum</b>
165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan
	Digunakan untuk mencatat Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan
165112	Dana Kelolaan BLU yang Ditarik ke Rekening BUN
	Digunakan untuk mencatat Dana Kelolaan BLU yang Ditarik ke Rekening BUN.
<b>1652</b>	<b>Dana Jangka Panjang</b>
<b>16521</b>	<b>Dana Jangka Panjang</b>
165211	Dana Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Dana Jangka Panjang.
<b>166</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b>
<b>1661</b>	<b>Aset Lain-lain</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain milik pemerintah sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
<b>16611</b>	<b>Aset Lain-lain K/L</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain
166111	Aset Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.
<b>16612</b>	<b>Aset Lain-lain BUN</b>



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain BUN sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
166121	Aset Eks BPPN
	Digunakan untuk mencatat TP BPPN
166122	Aset yang diserahkan/dikelola Pada PT Perusahaan Pengelola Aset
	Digunakan untuk mencatat Aset Pada PT Perusahaan Pengelola Aset
166123	Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya
	Digunakan untuk mencatat Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya
166124	Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
	Digunakan untuk mencatat Aset Pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
166125	Aset Eks Kelolaan PT. PPA
	Digunakan untuk mencatat Aset Eks PPA
166126	Aset Eks Pertamina
	Digunakan untuk mencatat Aset Eks Pertamina
166127	Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B
	Digunakan untuk mencatat Aset PKP2B dan Idle Asset
166128	Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
	Digunakan untuk mencatat Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
166129	Aset Lain-lain BUN
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain BUN.
<b>1662</b>	<b>Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum</b>
<b>16621</b>	<b>Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain milik BLU sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
166211	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
166212	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi BLU
166213	Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
	Digunakan untuk mencatat Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
166214	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - Satker BLU.
<b>1663</b>	<b>Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi</b>
<b>16631</b>	<b>Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas yang berasal dari Reklasifikasi UP/TUP.
166311	Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-PFK Minus
	Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya Reklasifikasi UP/TUP dari Kas di Bendahara Pengeluaran-PFK Minus
166312	Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPPR Minus

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya Reklasifikasi UP/TUP dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPPR Minus
166313	Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPJ Minus
	Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya Reklasifikasi UP/TUP dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPJ Minus
<b>16632</b>	<b>Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi</b>
166321	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPPR Minus
	Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPPR Minus
166322	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPJ Minus
	Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPJ Minus
<b>1664</b>	<b>Aset Lainnya yang Belum Diregister</b>
<b>16641</b>	<b>Aset Lainnya yang Belum Diregister</b>
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Aset lainnya yang diterima.
<b>167</b>	<b>ASET LAINNYA DARI UNIT PEMERINTAH LAINNYA</b>
<b>1671</b>	<b>Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya</b>
<b>16711</b>	<b>Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari unit Badan Lainnya sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
167111	Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya
<b>168</b>	<b>ASET LAINNYA PEMBERIAN PINJAMAN</b>
<b>1681</b>	<b>Aset Lainnya Pemberian Pinjaman</b>
<b>16811</b>	<b>Aset Lainnya Pemberian Pinjaman</b>
168111	Aset Lainnya Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari Pemberian Pinjaman sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
168112	Aset Lainnya Piutang Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari Piutang Jangka Panjang sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
168113	Aset Lainnya RDI
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari RDI sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
168114	Aset Lainnya Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari penyaluran Kredit Program sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
<b>169</b>	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>
<b>1691</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset lainnya

AKUN	PENJELASAN
	mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli.
<b>16911</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga</b>
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169112	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa
	Digunakan untuk mencatat jumlah akumulasi atas estimasi perhitungan penyusutan Aset Konsesi Jasa sehubungan penurunan umur manfaat aset atau kapasitas aset.
<b>16912</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain K/L</b>
169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Lain-lain mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
<b>16913</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN</b>
169131	Akumulasi Penyusutan Aset Eks BPPN
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Eks BPPN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169132	Akumulasi Penyusutan Aset yang diserahkan/dikelola pada PT Perusahaan Pengelola Aset
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset yang diserahkan/dikelola pada PT Perusahaan Pengelola Aset mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169133	Akumulasi Penyusutan Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset dari BUMN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169134	Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset yang berasal dari KKKS mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169135	Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169136	Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset eks Pertamina mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169137	Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169138	Akumulasi Penyusutan Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Idle yang diserahkan ke DJKN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169139	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Lain-lain BUN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
<b>1692</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BLU</b>
<b>16921</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum</b>
169211	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset lain-lain mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
169212	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset tetap tidak digunakan dalam operasi pemerintah mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
<b>1693</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya</b>
<b>16931</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya</b>
169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi tak berwujud mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi hak cipta yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
169313	Akumulasi Amortisasi Royalti
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi royalti yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
169314	Akumulasi Amortisasi Paten
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi paten yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
169315	Akumulasi Amortisasi Software
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi software mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi lisensi mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.
<b>1694</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya BLU</b>
<b>16941</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud-Badan Layanan Umum</b>
169411	Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi software mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
169412	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi hak cipta yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
169413	Akumulasi Amortisasi Royalti BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi royalti yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
169414	Akumulasi Amortisasi Paten BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi paten yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
169415	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
169416	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - Satker BLU.
<b>19</b>	<b>AKUN SETUP</b>
<b>191</b>	<b>AKUN SETUP</b>
<b>1911</b>	<b>Akun Set up A</b>
<b>19111</b>	<b>Akun Set up A</b>
191111	Material
	Digunakan untuk mencatat Akun Set UP Material pada aplikasi SPAN yang digunakan oleh modul Aset
191112	<i>Deffered COGS</i>
	Digunakan untuk mencatat Akun Set UP Deffered COGS pada aplikasi SPAN yang digunakan oleh modul <i>Inventory</i>
<b>1912</b>	<b>Cross Currency Type Account</b>

AKUN	PENJELASAN
19121	<b>Cross Currency Type Account</b>
191211	Cross Currency Type Account
	Digunakan untuk mencatat akun set up Cross Currency Type Account pada aplikasi SPAN yang digunakan oleh modul <i>Cash Management</i> .
2	<b>KEWAJIBAN</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
21	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
211	<b>UTANG PERHITUNGAN Fihak KETIGA</b>
2111	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>
21111	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) I</b>
	Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pungutan Iuran Askes, Bulog, Taspen/Asabri dan Taperum serta badan lainnya. Termasuk akun ini antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bulog, Bapertarum, dan Askes.
211111	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
211112	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS dan Pejabat Negara berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
211113	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
211114	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 8% Gaji
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 8% Gaji
211115	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan
211116	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
211117	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.

AKUN	PENJELASAN
211118	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
211119	Utang Dana PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
<b>21112</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya</b>
211121	Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
211122	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat Bagian penerimaan PFK Penutupan rekening sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
211123	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah
<b>21115</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) II</b>
211151	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Asabri.
211152	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja pemerintah pusat
211153	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pekerja pemerintah daerah.
211154	Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pemberi Kerja Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana PFK Simpanan Peserta Tapera bagian Pemberi Kerja pemerintah daerah.
211155	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan.
211156	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG.
<b>21116</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok dan Pengalihan Piutang</b>
211161	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga setoran pajak rokok dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga setoran pajak rokok.

AKUN	PENJELASAN
211162	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengalihan Piutang
	Digunakan untuk mencatat utang antara lain atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga pengalihan piutang dan pengembalian non anggaran pihak ketiga pengalihan piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah induk yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru dan selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan dan pengeluaran non anggaran Pemotongan DAU Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan.
211163	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank dalam Likuidasi.
211164	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga pemotongan DAU atau DBH dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD).
211165	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Kontribusi Penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga kontribusi Penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan dan pengeluaran non anggaran setoran kontribusi penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan.
211166	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa dan pengeluaran non anggaran pihak ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa.
211167	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN
	Digunakan untuk mencatat dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN yang akan dibayarkan kembali pada lembaga keuangan.
<b>212</b>	<b>UTANG KEPADA PIHAK KETIGA</b>
<b>2121</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga I</b>
<b>21211</b>	<b>Belanja Pemerintah Pusat Yang Masih Harus Dibayar</b>
212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya belanja pegawai oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat utang karena belanja barang yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa



AKUN	PENJELASAN
	yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212113	Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat utang karena belanja modal yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212114	Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat utang karena belanja hibah yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212115	Belanja Bantuan Sosial Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat Belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar
212116	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar
212119	Belanja Lain-Lain Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain yang masih harus dibayar
<b>21212</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga BLU</b>
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU
	Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh BLU yang dapat berasal dari antara lain kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212122	Utang Usaha BLU
	Digunakan untuk mencatat Utang Usaha BLU
<b>21213</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar</b>
212131	Pengeluaran pembiayaan dalam negeri yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pembayaran Kembali Utang Dalam Negeri.
212132	Pengeluaran pembiayaan luar negeri yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pembayaran Kembali Utang luar Negeri.
212133	Penyertaan modal negara yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Penyertaan Modal Negara.
212134	RDI/RPD yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi RDI/RPD.
212135	Dukungan infrastruktur yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi dukungan infrastruktur
212136	Investasi pemerintah yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Investasi Pemerintah.
212137	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus

AKUN	PENJELASAN
	Dibayar
<b>21214</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran yang masih harus dibayar</b>
212141	Pengeluaran non anggaran PFK yang masih harus dibayar
	Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pengeluaran Non Anggaran PFK.
212142	Pelunasan wesel pemerintah yang masih harus dibayar
	Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pelunasan Wesel Pemerintah.
212143	Pembayaran prefinancing dan PFK BUN lainnya yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pembayaran Utang Pihak Ketiga Prefinancing dan Utang Pihak Ketiga BUN.
212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pengeluaran Transito.
212145	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga.
<b>21215</b>	<b>Utang Pihak Ketiga Migas</b>
212151	Utang Pihak Ketiga - Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga - Fee Penjualan Migas Bagian Negara.
212152	Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pemda atas Pajak Air Tanah akibat pengelolaan Migas yang masih harus dibayar dan telah diketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBPDJA dan sebelum dibayarkan ke Pemda yang berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212153	Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pemda atas Pajak Penerangan Jalan akibat pengelolaan Migas yang masih harus dibayar dan telah diketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBPDJA dan sebelum dibayarkan ke Pemda yang berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212154	Utang Pihak Ketiga Migas - PBB Migas dan Utang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Migas - PBB Migas dan Utang Lainnya.
212155	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Bagian KKKS
	Digunakan untuk mencatat bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atas Migas-Reimbursement DMO (Debt Manajemen Office) yang masih harus dibayar dan telah diketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBPDJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
212156	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
	Digunakan untuk mencatat bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atas Migas-Reimbursement PPN yang masih harus dibayar dan telah diketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBPDJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
212157	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atas Migas-Reimbursement Underlifting yang masih harus dibayar dan telah diketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBPDJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212158	Utang Pihak Ketiga Migas Transito
	Digunakan untuk mencatat utang pihak ketiga migas transito, korolari dari reklasifikasi penerimaan transito penerimaan ditangguhkan ke pendapatan migas transito.
212159	Utang Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara.
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
<b>21216</b>	<b>Utang Pihak Ketiga Non Migas</b>
212161	Utang Pihak Ketiga atas Penjualan SPN
	Digunakan untuk mencatat bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
212162	Utang Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212163	Utang Pihak Ketiga-Bunga Obligasi Negara DN
	Digunakan untuk mencatat bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212164	Utang Pihak Ketiga-Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat penerimaan Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
212165	Utang Pihak Ketiga-Bunga Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat penerimaan Bunga Obligasi Negara Valas yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212166	Utang Pihak Ketiga-Penerbitan Surat Utang Negara
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat penerimaan Surat Utang Negara yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212167	Utang Pihak Ketiga kepada Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
	Digunakan untuk mencatat Bagian PT Inalum yang masih harus dibayar atas penerimaan Pertambangan yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212168	Utang Pihak Ketiga Geothermal-Reimbursement PPN
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak Ketiga yang masih harus dibayar penerimaan PFK Panas Bumi yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212169	Utang Pihak Ketiga Non Migas Transito
	Akun untuk utang pihak ketiga non migas transito korolari dari reklasifikasi penerimaan transito penerimaan ditangguhkan ke pendapatan PBB non migas transito.

AKUN	PENJELASAN
<b>21217</b>	<b>Utang Pihak Ketiga Komitmen Treasury Dealing Room</b>
212171	Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212172	Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212173	Utang Komitmen atas Transaksi SBN-TDR
	Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Transaksi SBN pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212174	Utang Komitmen atas Reverse Repo-TDR
	Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Reverse Repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212175	Utang Komitmen atas Repo-TDR
	Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212176	Utang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange</i> -TDR
	Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange</i> pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212177	Utang Komitmen atas Kupon SBN-TDR
	Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Bunga SBN-TDR.
<b>21218</b>	<b>Utang Pihak Ketiga Transaksi Treasury Dealing Room</b>
212181	Utang Repo-TDR
	Digunakan untuk mencatat Utang Transaksi Repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
<b>21219</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya I</b>
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212192	Dana Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat saldo kas di rekening Bendahara Penerimaan yang akan disetorkan kepada pihak ketiga.
212193	Dana Pihak Ketiga BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana Pihak Ketiga BLU
212194	Utang Pihak Ketiga - PBB Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga - PBB Panas Bumi
212195	Utang Pihak Ketiga - Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga - Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi
212196	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – <i>Reimbursement</i> PPN
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – <i>Reimbursement</i> PPN
212197	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – PBB Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – PBB Panas Bumi

AKUN	PENJELASAN
212198	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – Penggantian Bonus Produksi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – Penggantian Bonus Produksi
212199	Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan
<b>2122</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga II</b>
<b>21221</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya II</b>
212211	Utang Pihak Ketiga - <i>Reimbursement</i> PPN Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga - <i>Reimbursement</i> PPN Panas Bumi
212212	Utang Transito Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Transito Panas Bumi
<b>213</b>	<b>UTANG BUNGA</b>
<b>2131</b>	<b>Utang Biaya Pinjaman</b>
<b>21311</b>	<b>Utang Bunga</b>
213111	Utang Bunga Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berasal dari luar negeri.
213112	Utang Bunga Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berasal dari dalam negeri.
213113	Utang Bunga-Pinjaman Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang Bunga-Pinjaman Dalam Negeri
<b>21312</b>	<b>Discount</b>
	Digunakan untuk mencatat discount yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
213121	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
213122	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
213123	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
213124	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing
213125	Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah
213126	Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah

AKUN	PENJELASAN
213127	Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
213128	Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Valuta Asing
<b>21313</b>	<b>Premium</b>
	Digunakan untuk mencatat Premium yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
213131	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.
	Digunakan untuk mencatat Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.
213132	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Valuta Asing
213133	Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
213134	Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
<b>21314</b>	<b>Utang Diskonto yang belum disesuaikan</b>
213141	Utang Diskonto yang belum disesuaikan
	Digunakan untuk mencatat Utang Diskonto yang belum disesuaikan.
<b>21315</b>	<b>Utang Bunga Transaksi <i>Treasury Dealing Room</i></b>
213151	Utang Bunga Repo-TDR
	Digunakan untuk mencatat bunga atas transaksi Repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
<b>214</b>	<b>UTANG SUBSIDI</b>
<b>2141</b>	<b>Utang Subsidi</b>
<b>21411</b>	<b>Utang Subsidi</b>
214111	Utang Subsidi
	Digunakan untuk mencatat utang subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur mengenai subsidi
214112	Utang Subsidi - Estimasi
	Digunakan untuk mencatat Utang Subsidi - Estimasi
<b>2142</b>	<b>Belanja subsidi yang masih harus dibayar</b>
<b>21421</b>	<b>Belanja subsidi yang masih harus dibayar</b>
	Digunakan untuk mencatat belanja subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur mengenai subsidi yang masih harus dibayar
214211	Belanja subsidi yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat belanja subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur mengenai subsidi yang masih harus dibayar
<b>215</b>	<b>UTANG TRANSFER</b>
<b>2151</b>	<b>Utang Transfer</b>
<b>21511</b>	<b>Transfer ke daerah yang masih harus dibayar</b>
215111	Transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar
215112	Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar
<b>21512</b>	<b>Transfer ke daerah yang masih harus dibayar - Estimasi</b>
215121	Transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar - Estimasi
	Digunakan untuk mencatat Transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar - Estimasi
215122	Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar - Estimasi
	Digunakan untuk mencatat Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar - Estimasi
<b>216</b>	<b>BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG</b>
<b>2161</b>	<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>
<b>21611</b>	<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Pinjaman</b>
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
<b>21612</b>	<b>Bagian Lancar Obligasi Negara-Rupiah</b>
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Obligasi Negara - Rupiah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>21613</b>	<b>Bagian Lancar Obligasi Negara-Valuta Asing</b>
216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Obligasi Negara - Valuta Asing yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>21614</b>	<b>Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah</b>
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>21615</b>	<b>Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing</b>
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>217</b>	<b>UTANG SURAT BERHARGA NEGARA</b>
<b>2171</b>	<b>Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek</b>
<b>21711</b>	<b>Utang Surat Perbendaharaan Negara Rupiah</b>

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Utang atas SPN - Rupiah yang diterbitkan pemerintah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca .
217111	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
217112	Utang Obligasi Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Utang Obligasi Negara dalam Rupiah
<b>21712</b>	<b>Utang Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing</b>
217121	Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
217122	Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing.
<b>21713</b>	<b>Utang Surat Berharga Syariah Negara-Rupiah Jangka Pendek</b>
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Surat Berharga Syariah Negara - Rupiah yang diterbitkan pemerintah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca .
217131	Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
217132	Surat Perbendaharaan Negara Syariah
	Digunakan untuk mencatat Surat Perbendaharaan Negara Syariah
<b>21714</b>	<b>Utang Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing Jangka Pendek</b>
217141	Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing
	Digunakan untuk mencatat Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing
<b>218</b>	<b>UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN</b>
<b>2181</b>	<b>Utang Yang Belum Ditagihkan</b>
<b>21811</b>	<b>Utang Yang Belum Diterima Tagihannya</b>
218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
	Utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh satker dengan dokumen sumber BAST.
<b>2182</b>	<b>Hibah Langsung yang Belum Disahkan</b>
<b>21821</b>	<b>Hibah Langsung yang Belum Disahkan</b>
218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Hibah Langsung yang Belum Disahkan
<b>219</b>	<b>UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</b>
	Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di Muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan dan utang jangka pendek lainnya.
<b>2191</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan</b>
<b>21911</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pajak</b>
219111	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran PPh
219112	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran PPN/PPnBM



<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
219113	Utang Kelebihan Bayar Cukai
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Cukai
219114	Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran PBB
219115	Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran BPHTB
219116	Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Bea Masuk
219117	Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Bea Keluar
<b>21912</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak</b>
219121	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Sumber Daya Alam
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Pendapatan Sumber Daya Alam
219122	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Bagian Laba BUMN
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Pendapatan Bagian Laba BUMN
219123	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya
<b>2192</b>	<b>Pendapatan Diterima di Muka</b>
<b>21921</b>	<b>Pendapatan Diterima di Muka</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang telah diterima dan disetor ke rekening kas umum negara namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak
219211	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Sewa yang telah Diterima Di Muka
219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima Di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bukan pajak lainnya yang telah Diterima di Muka
219214	Pendapatan Diterima Di Muka BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima Di Muka BLU
<b>21922</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk Diterima Dimuka</b>
219221	Pendapatan Bea Masuk Diterima Di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
219222	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka KITE Diterima Di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka KITE Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
219223	Pendapatan Pabean Lainnya Diterima Di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pabean Lainnya Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).

AKUN	PENJELASAN
219224	Pendapatan Bea Masuk Antidumping Diterima Di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Antidumping Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
219225	Pendapatan Bea Masuk Imbalan Diterima Di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Imbalan Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
219226	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Diterima Di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
<b>21923</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar Diterima Dimuka</b>
219231	Pendapatan Bea Keluar Diterima Di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Keluar Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
<b>2193</b>	<b>Uang Muka Rekening Khusus</b>
<b>21931</b>	<b>Uang Muka Rekening Khusus</b>
219311	Uang Muka Rekening Khusus
	Digunakan untuk mencatat Uang muka dari rekening khusus (valas)
<b>2194</b>	<b>Uang Muka</b>
<b>21941</b>	<b>Uang Muka dari KUN</b>
219411	Uang Muka dari KUN
	Digunakan untuk mencatat uang muka dari kas umum negara yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
219412	Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga
<b>2195</b>	<b>Uang Muka dari KPPN</b>
<b>21951</b>	<b>Uang Muka dari KPPN</b>
219511	Uang Muka dari KPPN
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari KPPN (uang persediaan dan tambahan uang persediaan) yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
<b>2196</b>	<b>Pendapatan Yang Ditangguhkan</b>
<b>21961</b>	<b>Pendapatan Yang Ditangguhkan</b>
219611	Pendapatan Yang Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke kas negara
219612	Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kupon SBN di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> yang belum disetorkan ke RKUN.
219613	Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Harga SBN di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> yang belum disetorkan ke RKUN.
219614	Pendapatan Bunga <i>Reverse Repo</i> Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bunga <i>Reverse Repo</i> di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> yang belum disetorkan ke RKUN.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>21962</b>	<b>Pendapatan Migas yang ditangguhkan</b>
219621	Pendapatan Panas Bumi Ditangguhkan
	Utang dari penerimaan sektor Panas Bumi yang masih belum diperhitungkan (bruto).
219622	Pendapatan Migas Ditangguhkan
	Utang dari penerimaan sektor Minyak dan Gas Bumi yang masih belum diperhitungkan (bruto)
219623	Pendapatan Setoran Pertambangan Ditangguhkan
	Utang dari penerimaan dari sektor pertambangan yang masih belum diperhitungkan (bruto)
219624	Pendapatan yang Ditangguhkan karena Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya
	Digunakan untuk mencatat utang dari transaksi penerimaan retur atas pembayaran kewajiban kontraktual pemerintah sektor migas dan panas bumi pada Rekening Lainnya.
<b>21963</b>	<b>Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan</b>
219631	Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Dalam Negeri
	Utang dari penerimaan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang belum diperhitungkan (bruto). Transaksi ini yang dicatat oleh satker BUN
219632	Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dalam Reksus yang ditangguhkan luar negeri.
<b>2197</b>	<b>Utang Kepada KUN</b>
<b>21971</b>	<b>Utang Kepada KUN</b>
219711	Utang Kepada KUN
	Digunakan untuk mencatat utang-utang kepada Kas Umum Negara
<b>21972</b>	<b>Utang Kepada kas BLU</b>
219721	Utang Kepada kas BLU
	Digunakan untuk mencatat Utang kepada Kas BLU.
<b>2198</b>	<b>Utang Kepada RPL</b>
<b>21981</b>	<b>Utang Kepada RPL</b>
219811	Utang Kepada RPL
	Digunakan untuk mencatat utang-utang kepada Rekening Pemerintah Lainnya
<b>21982</b>	<b>Utang Talangan</b>
219821	Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
219822	Utang Talangan Dana Cadangan DBH
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan DBH
219823	Utang Talangan Dana Cadangan PMN
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan PMN
<b>2199</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>
<b>21991</b>	<b>Utang Jangka Pendek lainnya</b>
219911	Utang Jangka Pendek Perbankan
	Digunakan untuk mencatat utang-utang Jangka Pendek perbankan

AKUN	PENJELASAN
219912	Dana yang akan diserahkan kepada BLU Bidang Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan diserahkan kepada Badan Layanan Umum di Bidang Pendidikan
219913	Utang Jangka Pendek Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat utang-utang Jangka Pendek Lain-lain
219914	Utang Retensi
	Digunakan untuk mencatat utang terkait potongan belanja dalam rangka jaminan pemeliharaan (retensi) atas pengajuan resume tagihan dari kontrak-kontrak yang mengharuskan pemeliharaan. Dalam transaksi ini rekanan tidak mengajukan jaminan pemeliharaan.
<b>21992</b>	<b>Utang Jangka Pendek dalam rangka rekening khusus</b>
219921	Pinjaman dalam rangka rekening khusus yang ditanggihkan Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang atas transaksi penerimaan dana pada Rekening Khusus dari Lender Dalam Negeri yang NOD-nya belum diterima oleh Dit. PKN.
219922	Pinjaman dalam rangka rekening khusus yang ditanggihkan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang atas transaksi penerimaan dana pada Rekening Khusus Lender Luar Negeri yang NOD-nya belum diterima oleh Dit. PKN.
219923	Utang Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu.
<b>21993</b>	<b>Utang Escrow</b>
219931	Utang Escrow Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat Utang dari dana escrow yang belum disalurkan kepada pihak ketiga dari penerimaan non anggaran (escrow) dan dicatat pada satker BUN dengan pencatatan jurnal korolari atas transaksi pembayaran yang dilakukan melalui Rekening Escrow.
219932	Utang Escrow Dana Subsidi/PSO
	Digunakan untuk mencatat utang escrow Subsidi/PSO.
219933	Utang Escrow dana Bagi Hasil SDA
	Digunakan untuk mencatat utang escrow Bagi Hasil SDA.
219934	Utang Escrow dana Penyertaan Modal Negara (PMN)
	Digunakan untuk mencatat Utang Escrow dana Penyertaan Modal Negara (PMN)
219935	Utang Pengembalian Escrow Pajak
	Digunakan untuk mencatat Utang Pengembalian Escrow Pajak
219936	Utang Pengembalian Escrow PNBPN
	Digunakan untuk mencatat Utang Pengembalian Escrow PNBPN
219937	Utang Dana Penjaminan
	Digunakan untuk mencatat Utang Dana Penjaminan
<b>21994</b>	<b>Utang Jangka Pendek Sementara</b>
219941	Utang Jangka Pendek Sementara karena kesalahan rekening pihak ketiga
	Utang dari penerimaan kas di rekening retur atas kesalahan nomor rekening
219942	Utang Jangka Pendek Sementara Pengembalian Uang Persediaan (UP)
	Digunakan untuk mencatat uang perantara yang terbentuk saat resume tagihan pengembalian UP (nihil), yang nilainya akan habis ketika diterbitkan SP2D pengembalian UP (nihil) dan menihilkan Kas di Bendahara Pengeluaran.

AKUN	PENJELASAN
219943	Utang Jangka Pendek Sementara Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP)
	Digunakan untuk mencatat utang perantara yang terbentuk saat resume tagihan pengembalian TUP (nihil), yang nilainya akan habis ketika diterbitkan SP2D pengembalian UP (nihil) dan menihilkan Kas di Bendahara Pengeluaran.
219944	Utang Jangka Pendek Sementara karena kesalahan Sistem Perbankan
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan.
<b>21995</b>	<b>Utang Permintaan Uang Muka Belanja</b>
219951	Utang Permintaan Persekot Gaji
	Utang atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pembayaran Persekot Gaji yang disertai dengan pengembalian Persekot Gaji.
<b>21996</b>	<b>Utang Bendahara</b>
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
	Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara.
219962	Utang perwalian Bendahara yang belum disampaikan kepada yang berhak
	Utang yang berasal dari dana titipan pihak ketiga yang berada dalam catatan bendahara pengeluaran.
219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor
	Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara penerimaan sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara.
219964	Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor
	Digunakan untuk mencatat Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor
<b>21997</b>	<b>Pembiayaan Surat Perbendaharaan Negara Ditangguhkan</b>
219971	Pembiayaan Surat Perbendaharaan Negara Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat pembiayaan SPN ditangguhkan.
219972	Pembiayaan Surat Perbendaharaan Negara Syariah Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat pembiayaan SPN Syariah ditangguhkan.
<b>21998</b>	<b>Pembiayaan yang diterima RKUN Yang Ditangguhkan</b>
219981	Pembiayaan yang diterima RKUN Yang Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat pembiayaan Yang Ditangguhkan pada RKUN.
<b>21999</b>	<b>Pembiayaan yang Ditangguhkan</b>
219991	Pembiayaan yang Ditangguhkan Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat pembiayaan Dalam Negeri yang ditangguhkan.
219992	Pembiayaan yang Ditangguhkan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pembiayaan Luar Negeri yang ditangguhkan.
219993	Pembiayaan Pinjaman Program yang Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pembiayaan Pinjaman Program yang Ditangguhkan
219994	Pembiayaan Pinjaman Proyek yang Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pembiayaan Pinjaman Proyek yang Ditangguhkan
<b>22</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>
<b>221</b>	<b>UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI</b>
<b>2211</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan</b>

AKUN	PENJELASAN
<b>22111</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari Utang Dalam Negeri Perbankan.
221111	Utang Perbankan Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Utang Perbankan Jangka Panjang
<b>22112</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban satker BLU yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang Dalam Negeri Perbankan.
221121	Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
	Digunakan untuk mencatat Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
<b>2212</b>	<b>Utang Jangka Panjang - Surat Berharga Negara</b>
<b>22121</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Obligasi Negara dalam Rupiah.
221211	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Obligasi Negara dalam Rupiah.
<b>22122</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing</b>
221221	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Obligasi Negara dalam Valuta Asing.
<b>22123</b>	<b>Utang Surat Berharga Syariah Negara Rupiah Jangka Panjang</b>
221231	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Surat Berharga Syariah dalam Rupiah.
<b>22124</b>	<b>Utang Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Panjang</b>
221241	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Surat Berharga Syariah dalam Valuta Asing.
<b>22125</b>	<b>Discount</b>
	Digunakan untuk mencatat jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
221251	Discount Obligasi Negara - dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Discount Obligasi Negara - dalam Rupiah
221252	Discount Obligasi Negara - dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Obligasi Negara - dalam Valuta Asing
221253	Discount SBSN - dalam Rupiah

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban ( <i>present value</i> ) dengan nilai jatuh tempo kewajiban ( <i>maturity value</i> ) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif pada Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang Rupiah
221254	Discount SBSN - dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Discount SBSN - dalam Valuta Asing
<b>22126</b>	<b>Premium</b>
221261	Premium Obligasi Negara - dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Premium atas Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto dalam mata uang rupiah.
221262	Premium Obligasi Negara - dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Premium atas Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto dalam mata uang asing.
221263	Premium SBSN - dalam Rupiah
	digunakan untuk mencatat Premium atas surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (Sukuk Negara), sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang Rupiah.
221264	Premium SBSN - dalam Valuta Asing
	digunakan untuk mencatat Premium atas surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (Sukuk Negara), sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam valuta asing.
<b>2213</b>	<b>Utang Kepada Dana Pensiun dan THT</b>
<b>22131</b>	<b>Utang Kepada Dana Pensiun dan THT</b>
221311	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
	Digunakan untuk mencatat Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
<b>2214</b>	<b>Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan</b>
<b>22141</b>	<b>Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan</b>
221411	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Surat Berharga Negara yang ditangguhkan.
<b>2215</b>	<b>Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN</b>
<b>22151</b>	<b>Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN</b>
221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
<b>2216</b>	<b>Utang Jangka Panjang Subsidi</b>
<b>22161</b>	<b>Utang Jangka Panjang Subsidi</b>
221611	Utang Jangka Panjang Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Subsidi
<b>2217</b>	<b>Utang Jangka Panjang - Pinjaman Dalam Negeri</b>
<b>22177</b>	<b>Utang Jangka Panjang - Pinjaman Dalam Negeri</b>
221771	Utang Jangka Panjang - Pinjaman Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang - Pinjaman Dalam Negeri
<b>2219</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>22191</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya</b>
221911	Utang Jangka Panjang Bapertarum
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Bapertarum
221912	Utang Jangka Panjang Rekening Pembangunan Hutan
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Rekening Pembangunan Hutan.
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
<b>22192</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU</b>
221929	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
<b>222</b>	<b>UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI</b>
<b>2221</b>	<b>Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri</b>
<b>22211</b>	<b>Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan</b>
	Digunakan untuk mencatat setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu yang berasal dari Perbankan luar negeri.
222115	Utang Program
	Digunakan untuk mencatat Utang Program yang diterima dari luar negeri.
222116	Utang Proyek
	Digunakan untuk mencatat Utang Proyek yang diterima dari luar negeri.
<b>2222</b>	<b>Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan</b>
<b>22221</b>	<b>Utang Sewa-Beli</b>
222211	Utang Sewa-Beli
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Luar Negeri yang berasal dari perjanjian Sewa Beli.
<b>2223</b>	<b>Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya</b>
<b>22231</b>	<b>Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya</b>
222311	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya diluar kategori Utang Perbankan dan Non Perbankan.
<b>225</b>	<b>UTANG TRANSFER JANGKA PANJANG</b>
<b>2251</b>	<b>Utang Transfer Jangka Panjang</b>
<b>22511</b>	<b>Utang Transfer Jangka Panjang</b>
225111	Utang Transfer Dana Perimbangan Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Utang Transfer Dana Perimbangan Jangka Panjang
225112	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Utang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Jangka Panjang
<b>226</b>	<b>KEWAJIBAN KONSESI JASA</b>
<b>2261</b>	<b>Kewajiban Konsesi Jasa</b>
<b>22611</b>	<b>Kewajiban Konsesi Jasa</b>
226111	Kewajiban Konsesi Jasa



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat kewajiban konsesi jasa yang timbul dari dampak pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian konsesi jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra (badan usaha).
226112	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pembayaran Kepada Mitra
	Digunakan untuk mencatat kewajiban konsesi jasa yang timbul dari dampak pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian konsesi jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra (badan usaha) dengan skema pembayaran kepada mitra.
226113	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra
	Digunakan untuk mencatat kewajiban konsesi jasa yang timbul dari dampak pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian konsesi jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra (badan usaha) dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra.
<b>23</b>	<b>DICADANGKAN UNTUK KOMITMEN BELANJA</b>
<b>231</b>	<b>DICADANGKAN UNTUK KOMITMEN BELANJA</b>
<b>2311</b>	<b>Dicadangkan untuk Komitmen Belanja</b>
<b>23111</b>	<b>Dicadangkan untuk Komitmen Belanja</b>
231111	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja
	Akun penyeimbang dari transaksi komitmen dari seluruh alokasi anggaran untuk mengontrol dana yang tersedia. Pencatatan komitmen dicatat untuk satker atas pelaksanaan anggarannya.
<b>29</b>	<b>AKUN SETUP</b>
<b>291</b>	<b>AKUN SETUP</b>
<b>2912</b>	<b>Akun Set up A</b>
<b>29121</b>	<b>Akun Set up</b>
291211	Inventory AP Accrual
	Digunakan untuk mencatat Inventory AP Accrual pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul <i>Inventory</i>
291212	Expenses AP Acrual
	Digunakan untuk mencatat Expenses AP Acrual pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul <i>Account payable</i> .
291213	Unearned Revenue
	Akun setup up untuk mencatat Unearned Revenue pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul <i>Account Receivable</i>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>
	Digunakan untuk mencatat pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
<b>31</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>311</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>3113</b>	<b>SAL dan SILPA BLU</b>
<b>31131</b>	<b>SAL BLU</b>
311311	SAL BLU
	Digunakan untuk mencatat SAL BLU
311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
311313	<b>SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi</b>
	Digunakan untuk mencatat SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi
311314	<b>Penggunaan SAL BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat Penggunaan SAL BLU
311315	<b>Penyesuaian SAL BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyesuaian SAL BLU
<b>31132</b>	<b>SILPA BLU</b>
311321	<b>SILPA BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat SILPA BLU
<b>3117</b>	<b>Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi</b>
<b>31171</b>	<b>Selisih Kurs</b>
311711	Selisih Kurs
	Digunakan untuk mencatat Selisih Kurs belum terealisasi sebelum direklas menjadi akun pendapatan LO/Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<b>3119</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar Lainnya</b>
<b>31191</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung</b>
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
<b>313</b>	<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>
<b>3131</b>	<b>Due to - Due from</b>
<b>31311</b>	<b>Ditagihkan ke Entitas Lain</b>
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain
	Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksi tersebut akan diseimbangkan dengan ditagihkan ke entitas lainnya.
<b>31312</b>	<b>Diterima dari Entitas Lain</b>
313121	Diterima dari Entitas Lain
	Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksinya akan diseimbangkan dengan diterima dari entitas lainnya
<b>3132</b>	<b>Transfer</b>
<b>31321</b>	<b>Transfer Keluar</b>
313211	Transfer Keluar
	Digunakan untuk mencatat Transfer Keluar
<b>31322</b>	<b>Transfer Masuk</b>
313221	Transfer Masuk
	Digunakan untuk mencatat Transfer Masuk
<b>31323</b>	<b>Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU</b>
313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU
	Digunakan untuk mencatat Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU
<b>39</b>	<b>EKUITAS</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>391</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>3911</b>	<b>Ekuitas</b>
<b>39111</b>	<b>Ekuitas</b>
391111	Ekuitas
	Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit Laporan Operasional.
391112	Surplus/Defisit-LO
	Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit-LO.
391113	Koreksi Nilai Persediaan
	Digunakan untuk mencatat koreksi nilai persediaan.
391114	Revaluasi Aset Tetap
	Digunakan untuk mencatat revaluasi aset tetap.
391115	Dana yang Disediakan Untuk Pengalihan Aset
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dana yang disediakan untuk pengalihan aset.
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan
	Digunakan untuk mencatat Penyesuaian Nilai Persediaan
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
	Digunakan untuk mencatat Koreksi pencatatan Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.
391119	Koreksi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Lainnya
<b>39112</b>	<b>Ekuitas Transaksi Lainnya</b>
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Transaksi Lainnya
391122	Ekuitas Badan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Badan Lainnya
<b>39113</b>	<b>Ekuitas Pengesahan Hibah</b>
391131	Pengesahan Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Pengesahan Hibah Langsung
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL
	Digunakan untuk mencatat Pengesahan Hibah Langsung yang diterima pada Tahun Anggaran Yang Lalu
<b>39114</b>	<b>Ekuitas Surplus BLU</b>
391141	Setoran Surplus BLU
	Digunakan untuk mencatat perubahan Ekuitas BLU atas transaksi setoran surplus Kas BLU ke Kas Negara atau pengembaliannya ke Kas BLU
391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU lain
	Digunakan untuk mencatat transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transfer Kas BLU dari Kementerian Keuangan

AKUN	PENJELASAN
391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU lain
	Digunakan untuk mencatat transfer masuk Kas BLU dari BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transafer Kas BLU dari Kementerian Keuangan
<b>39115</b>	<b>Koreksi Atas Reklasifikasi Aset</b>
391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
<b>399</b>	<b>EKUITAS KONSOLIDASI BUN</b>
<b>3999</b>	<b>Ekuitas Konsolidasi BUN</b>
<b>39991</b>	<b>Ekuitas Konsolidasi BUN I</b>
399911	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual dari Kas BP KL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga pada Neraca BUN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399912	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual dari Kas BLU KL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari Pencatatan Kas Badan Layanan Umum Kementerian Negara/Lembaga pada Neraca BUN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399913	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Akrual dari Kas Hibah KL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari Pencatatan Kas Hibah Kementerian Negara/Lembaga pada Neraca BUN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399914	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Akun Non Anggaran TAYL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan nilai akun non anggaran TAYL untuk kebutuhan perhitungan SAL. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399915	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Akun Aset/Kewajiban
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan nilai akun aset/kewajiban untuk kebutuhan perhitungan SAL. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399916	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas BUN
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas BUN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399917	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas RPL
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas RPL. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399918	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas KPPN
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas KPPN. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399919	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas BLU
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas BLU. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
<b>39992</b>	<b>Ekuitas Konsolidasi BUN II</b>
399921	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas Hibah
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas Hibah. Hanya

AKUN	PENJELASAN
	digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399922	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas Transitoris
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas Transitoris. Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.
399923	Ekuitas Konsolidasi BUN pada <i>Ledger</i> Kas dari Koreksi Kas <i>Escrow</i>
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dari pencatatan koreksi Kas <i>Escrow</i> . Hanya digunakan untuk keperluan Konsolidasi di LK BUN dan LKPP.

**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN PENDAPATAN-LO**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>
<b>411</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI</b>
<b>4111</b>	<b>Pendapatan Pajak Penghasilan</b>
<b>41111</b>	<b>Pendapatan PPh Migas</b>
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari PPh minyak bumi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPh Minyak Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB PPh Minyak Bumi; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Minyak Bumi.</li> </ul>
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan ke kas negara yang berasal PPh gas bumi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPh Gas Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB PPh Gas Bumi; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Gas Bumi.</li> </ul>
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPh Lainnya dari Gas Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Bumi;</li> <li>- SKPKB PPh Lainnya dari Gas Bumi; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Bumi.</li> </ul>
<b>41112</b>	<b>Pendapatan PPh Non-Migas</b>
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa/Angsuran Tahunan;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua,</li> <li>- Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);</li> <li>- SKPKB PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua,</li> <li>- Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon;</li> <li>- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);</li> <li>- SKPKBT PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua,</li> <li>- Uang Tebusan Pensiun, dan</li> <li>- Uang pesangon.</li> </ul>
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
	Pendapatan dari transaksi dalam negeri yang diatur berdasarkan ketentuan

AKUN	PENJELASAN
	dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa;</li><li>- PPh Penebusan Migas;</li><li>- PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri;</li><li>- PPh yang dipungut Bendaharawan; PPh yang dipungut Badan Pemungut Lainnya;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- SKPKB; SKPKB PPh Penebusan Migas;</li><li>- SKPKB PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri;</li><li>- SKPKBT;</li><li>- SKPKBT PPh Penebusan Migas; dan</li><li>- SKPKBT PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri.</li></ul>
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- SKPKB;</li><li>- SKPKBT.</li></ul>
411124	Pendapatan PPh Pasal 23
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa;</li><li>- Dividen;</li><li>- Bunga;</li><li>- Royalti;</li><li>- Jasa;</li><li>- PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- STP Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa;</li><li>- SKPKB;</li><li>- SKPKB Dividen, Bunga Royalti dan Jasa;</li><li>- SKPKB PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi;</li><li>- SKPKBT;</li><li>- SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti dan Jasa; dan</li><li>- SKPKBT PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi.</li></ul>
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"><li>· Masa/Angsuran;</li><li>· Tahunan;</li><li>· Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>· SKPKB; dan</li><li>· SKPKBT.</li></ul>

AKUN	PENJELASAN
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Masa/Angsuran</li> <li>· Tahunan;</li> <li>· Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>· SKPKB; dan</li> <li>· SKPKBT.</li> </ul>
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Masa/Angsuran;</li> <li>· Dividen;</li> <li>· Bunga;</li> <li>· Royalti;</li> <li>· Jasa;</li> <li>· Laba setelah pajak BUT;</li> <li>· Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>· STP Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT;</li> <li>· SKPKB;</li> <li>· SKPKB Dividen, Bunga Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT;</li> <li>· SKPKBT; dan</li> <li>· SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT.</li> </ul>
411128	Pendapatan PPh Final
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fiskal Luar Negeri;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan OP;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura OP;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar</li> </ul>



AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Orang Pribadi;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konsultasi Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Badan;</li> <li>· PPh Final Pasal 19 Revaluasi Aktiva Tetap Badan;</li> <li>· PPh Final Lainnya;</li> <li>· Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final;</li> <li>· SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi;</li> <li>· SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan;</li> <li>· SKPKB PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi;</li> <li>· SKPKB PPh Final Pasal 15 Badan;</li> <li>· SKPKB PPh Final Pasal 19 Badan;</li> <li>· SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi;</li> <li>· SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan;</li> <li>· SKPKBT PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi;</li> <li>· SKPKBT PPh Final Pasal 15 Badan;</li> <li>· SKPKBT PPh Final Pasal 19 Badan.</li> </ul>
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya
	<p>Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PPh Lainnya dari Minyak Bumi;</li> <li>· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi;</li> <li>· SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan;</li> <li>· SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi.</li> </ul> <p>Pendapatan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan</p>

AKUN	PENJELASAN
	penambangan Gas Alam, yang terdiri dari: · PPh Lainnya dari Gas Alam;
	· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam; · SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam; dan · SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.
<b>41114</b>	<b>Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah</b>
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah.
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah.
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah.
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah.
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah.
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah.
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah.
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah.
<b>4112</b>	<b>Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai</b>
<b>41121</b>	<b>Pendapatan PPN</b>
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: · Masa; · Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; · Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean; · Kegiatan Membangun Sendiri; · Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan;
	· STP; · SKPKB Masa;

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· SKPKB Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;</li> <li>· SKPKB Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;</li> <li>· SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri;</li> <li>· SKPKB Pemungut PPN;</li> <li>· SKPKBT Masa;</li> <li>· SKPKBT Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;</li> <li>· SKPKBT Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;</li> <li>· SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri;</li> <li>· SKPKBT Pemungut PPN;</li> <li>· PPN Final Membangun Sendiri;</li> <li>· Pemungut.</li> </ul>
411212	Pendapatan PPN Impor
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Masa;</li> <li>· STP;</li> <li>· SKPKB PPN Impor;</li> <li>· SKPKBT PPN Impor;</li> <li>· Pemungut.</li> </ul>
411219	Pendapatan PPN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari PPN, yang belum tertampung dalam pembagian jenis pendapatan PPN.
<b>41122</b>	<b>Pendapatan PPnBM</b>
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Masa/Angsuran;</li> <li>· STP;</li> <li>· SKPKB Masa;</li> <li>· SKPKB Pemungut PPn BM;</li> <li>· SKPKBT Masa;</li> <li>· SKPKBT Pemungut PPnBM;</li> <li>· Pemungut.</li> </ul>
411222	Pendapatan PPnBM Impor
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Masa;</li> <li>· STP;</li> <li>· SKPKB PPn BM Impor;</li> <li>· SKPKBT PPn BM Impor;</li> </ul>

AKUN	PENJELASAN
	· Pemungut.
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PPnBM, yang belum tertampung dalam pembagian jenis Pendapatan PPnBM.
<b>41124</b>	<b>Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah</b>
411241	Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah
411242	Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah – Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
<b>4113</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
<b>41131</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
411313	Pendapatan PBB Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PBB sektor perkebunan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411314	Pendapatan PBB Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PBB sektor kehutanan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PBB sektor pertambangan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
	Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. Mulai digunakan untuk tahun 2009.
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Panas Bumi. Mulai digunakan untuk tahun 2014.
411319	Pendapatan PBB Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PBB Lainnya.
<b>4115</b>	<b>Pendapatan Cukai</b>
<b>41151</b>	<b>Pendapatan Cukai</b>
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari cukai hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak menggunakan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1995 pasal 4 ayat (1) c.
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari cukai Ethyl Alkohol atau etanol meliputi barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari cukai MMEA adalah

AKUN	PENJELASAN
	semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung ethyl alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya dengan tidak menggunakan bahan antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky (pasal 4 a).
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Pendapatan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
411519	Pendapatan Cukai Lainnya
	Pendapatan cukai lainnya adalah pendapatan dari cukai yang tidak tertampung pada Cukai Hasil Tembakau, Ethyl Alcohol, Minuman Ethyl Alkohol dan Denda Administrasi Cukai (pasal 7 ayat (7) UU No. 11 tahun 1995).
<b>4116</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
<b>41161</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
411611	Pendapatan Bea Meterai
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penggunaan Bea Meterai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985.
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
	Pendapatan dana hasil Penjualan Benda Meterai oleh PT. Pos Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA.015).
411613	Pendapatan PPn Batubara
	Digunakan untuk mencatat Pajak Penjualan (PPn) yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penjualan bagi Kontraktor PKP2B Generasi I.
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 Tahun 2000.
<b>41162</b>	<b>Pendapatan Bunga Penagihan Pajak</b>
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPh yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Tahun 2000.
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPnBM yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PTLL yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
<b>41163</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah</b>
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung

AKUN	PENJELASAN
	Pemerintah.
<b>412</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL</b>
<b>4121</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
<b>41211</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
412111	Pendapatan Bea Masuk
	Pendapatan yang berasal dari pungutan bea atas barang-barang impor.
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah sesuai dengan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabean Pasal 25/26.
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean
	Pendapatan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
	Pendapatan bea masuk atas barang impor yang dibayar oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE denganmendapatkan fasilitas pengembalian Bea masuk.
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
	Dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabean, Ditjen Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau). Denda ini berasal dari penerapan peraturan pasal 4,7,8 dan 9 UU No 17 tahun 2006.
412116	Pendapatan BM-DTP
	Untuk mencatat pendapatan bea masuk yang ditanggung pemerintah dan pada saat bersamaan dibayarkan Belanja Subsidi BM-DTP.
412119	Pendapatan Pabean Lainnya
	Pendapatan pabean lainnya adalah Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari : · Sanksi administrasi berupa denda (pasal 37 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995); · Bunga (pasal 38 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995).
<b>41212</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk Tindakan</b>
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping
	Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05)
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

AKUN	PENJELASAN
	Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
<b>4122</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
<b>41221</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
412211	Pendapatan Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang diekspor (sebelumnya disebut pajak ekspor).
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari Denda Administrasi atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari beban Bunga atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
<b>419</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK LAIN-LAIN</b>
<b>4199</b>	<b>Pendapatan Pajak Lain-lain</b>
<b>41999</b>	<b>Pendapatan Pajak Lain-lain</b>
419999	Pendapatan Pajak Lain-lain
	Hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Pajak Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkat LKPP.
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>
<b>421</b>	<b>PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>4211</b>	<b>PENDAPATAN MINYAK BUMI</b>
<b>42111</b>	<b>Pendapatan Minyak Bumi</b>
421111	Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).
<b>4212</b>	<b>PENDAPATAN GAS BUMI</b>
<b>42121</b>	<b>Pendapatan Gas Bumi</b>
421211	Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan gas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (999.99).
<b>4213</b>	<b>PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>
<b>42132</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan usaha pertambangan di bidang Mineral dan Batubara dalam wilayah

AKUN	PENJELASAN
	pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42133</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan tembaga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan emas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan perak. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan nikel. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan timah. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan komoditi tambang selain batubara, tembaga, emas, perak, nikel, timah dan besi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42134</b>	<b>Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)</b>
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari bagian pemerintah atas keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>4214</b>	<b>PENDAPATAN KEHUTANAN</b>
<b>42141</b>	<b>Pendapatan Dana Reboisasi</b>
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)



<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42142</b>	<b>Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan</b>
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42143</b>	<b>Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)</b>
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) antara lain Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR).Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42144</b>	<b>Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan</b>
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>4215</b>	<b>PENDAPATAN PERIKANAN</b>
<b>42152</b>	<b>Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan</b>
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikanan bidang perikanan tangkap antara lain Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI)
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikanan bidang pembudidayaan ikan antara lain Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan dan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM).
<b>42153</b>	<b>Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan</b>
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam rangka penangkapan ikan antara lain Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
<b>4216</b>	<b>PENDAPATAN PANAS BUMI</b>
<b>42162</b>	<b>Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi</b>
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari setoran bagian pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)
<b>42163</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi</b>
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian

AKUN	PENJELASAN
	Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi perusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42164</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi</b>
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan perusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>422</b>	<b>PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)</b>
<b>4221</b>	<b>PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN</b>
<b>42213</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN</b>
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Non Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>42214</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan</b>
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>4222</b>	<b>PENDAPATAN DARI KND LAINNYA</b>
<b>42221</b>	<b>Pendapatan dari Surplus Lembaga</b>
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang menjadi bagian Pemerintah.
422219	Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus lembaga lainnya yang menjadi bagian Pemerintah.
<b>424</b>	<b>PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM</b>
<b>4241</b>	<b>Pendapatan Jasa Layanan Umum</b>
<b>42411</b>	<b>Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Penyedia Barang dan

AKUN	PENJELASAN
	Jasa dari hasil pelayanan jasa yang merupakan <i>core bussiness</i> -nya sebagaimana terlampir.
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan (BA 024) maupun kementerian lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> rumah sakit/instansi kesehatan walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti rumah sakit yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan pendidikan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti perguruan tinggi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari kegiatan Jasa layanan bantuan tenaga terampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan bantuan tenaga terampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU jasa layanan IT yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari jasa pencetakan dokumen, buku dan sejenisnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa pencetakan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa pencetakan yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari jasa kegiatan bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa kegiatan bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa pelabuhan yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Pendapatan BLU atas kegiatan layanan penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi melalui media atau sarana yang ada seperti alat telekomunikasi dan sejenisnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa telekomunikasi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa telekomunikasi yang

AKUN	PENJELASAN
	juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas layanan lainnya, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU atas jasa layanan kegiatan pemasaran produk-produk tertentu yang ditujukan bagi konsumen atau pengguna produk atau jasa yang ditawarkan. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan kegiatan pemasaran, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan kegiatan pemasaran yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan penyediaan barang untuk kepentingan masyarakat atau instansi pengguna lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan penyediaan barang, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan penyediaan barang yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan di luar penyediaan barang dan jasa lainnya selain dari yang telah dijelaskan pada akun 424111, 424112, 424113, 424114, 424115, 424116, 424117, dan 424118. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
42412	<b>Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu dari hasil pelayanannya termasuk pendapatan yang berasal dari kerjasama operasional dan sewa menyewa.
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Otorita yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Fasilitas Umum milik Pemerintah.
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
	Pendapatan BLU dari hasil diluar pengelolaan kawasan otorita, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan fasilitas umum lainnya.
42413	<b>Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat</b>
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan.
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan

AKUN	PENJELASAN
	Syariah.
424133	Pendapatan Program Modal Ventura
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program Modal Ventura.
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Sektoral.
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Syariah.
424136	Pendapatan Investasi
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang-bidang tertentu.
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
	Pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	Pendapatan BLU yang berasal dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana khusus lainnya.
<b>42414</b>	<b>Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang</b>
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil kelolaan BMN pada satuan kerja pengelola aset BUN. Dicatat pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (015).
<b>4242</b>	<b>Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang diterima oleh Satker BLU.
<b>42421</b>	<b>Pendapatan Hibah Terikat - Uang</b>
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Lembaga / Badan Usaha.
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Pemda.
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara.
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42422</b>	<b>Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang</b>
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan dalam bentuk uang.
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari lembaga/Badan Usaha dalam bentuk uang.
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari pemda dalam bentuk uang.
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan dalam bentuk uang.
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha dalam bentuk uang.
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara lain dalam bentuk uang.
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda dalam bentuk uang.
<b>42423</b>	<b>Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa</b>
424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa
	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan dalam bentuk barang/jasa.
424232	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa
	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk barang/jasa.
424233	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang/Jasa
	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda bentuk barang/jasa.
424234	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang/Jasa
	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan bentuk barang/jasa.
424235	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa
	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk barang/jasa.
424236	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Barang/Jasa
	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara bentuk barang/jasa.
424239	Pendapatan Hibah Terikat-Lainnya - Barang/Jasa
	Pendapatan Hibah Terikat-Lainnya bentuk barang/jasa.
<b>42424</b>	<b>Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa</b>
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan bentuk barang/jasa.
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa

AKUN	PENJELASAN
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk barang/jasa.
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda bentuk barang/jasa.
424244	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan bentuk barang/jasa.
424245	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk barang/jasa.
424246	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara bentuk barang/jasa.
424249	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya bentuk barang/jasa.
<b>4243</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dan sewa menyewa bagi semua BLU selain Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu.
<b>42431</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU</b>
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : perorangan.
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Lembaga/Badan Usaha.
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Pemda.
<b>4244</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b>
<b>42441</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b>
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU yang berasal dari DIPA sumber dana Rupiah Murni (RM), yang akan dieliminasi dalam proses konsolidasi LKKL
<b>42442</b>	<b>Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b>
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
<b>4249</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU lainnya yang tidak dapat

AKUN	PENJELASAN
	dikategorikan sebagai pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hasil kerja sama BLU, dan pendapatan hibah BLU, dengan rincian sesuai dengan kode akun 6 digitnya.
<b>42491</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari penempatan endowment fund dan dana cadangan pendidikan oleh BLU bidang pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan.
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
	Digunakan untuk mencatat Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lain-lain BLU
<b>42492</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa</b>
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
<b>42493</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU</b>
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
<b>42494</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN BLU</b>
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
<b>42495</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya Dari Asuransi BMN BLU</b>
424951	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU
	Digunakan untuk mencatat penerimaan klaim asuransi BMN dan penerimaan lain-lain terkait pengasuransian BMN di BLU sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>425</b>	<b>PENDAPATAN PNBP LAINNYA</b>
<b>4251</b>	<b>Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN</b>
<b>42511</b>	<b>Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang</b>
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya yang tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian dan/atau pengembangan. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penjualan dokumen lelang. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah dalam rangka menstabilkan harga beras di pasaran
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan selain kelompok pendapatan atas penjualan-penjualan di atas dan tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian/pengembangan, antara lain berasal dari hasil penjualan produk ekonomi kreatif, penjualan obat-obatan dan hasil farmasi. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
<b>42512</b>	<b>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN</b>
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah negara, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	Digunakan untuk mencatat pendapatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033) .
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Tanah, Gedung dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi dan jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>42513</b>	<b>Pendapatan dari Pemanfaatan BMN</b>
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua Kementerian/Lembaga.
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>42514</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang</b>
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari KKKS, baik masih berada dalam penguasaan KKKS maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik masih berada dalam penguasaan Kontraktor PKP2B maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

AKUN	PENJELASAN
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (999.99)
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari aset saham dan surat berharga lain eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa dividen, bunga dan denda keterlambatan. Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (999.99)
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi aset bekas milik Asing/Tionghoa.
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengelolaan barang pada pengelola barang selain yang berasal dari KKKS, Kontraktor PKP2B, aset eks BLBI dan aset bekas milik asing/Tionghoa, termasuk pendapatan atas pelunasan piutang kepada Yayasan Supersemar.
<b>42515</b>	<b>Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi</b>
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
<b>42516</b>	<b>Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas</b>
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang timbul akibat selisih harga beli BBM Pemerintah dari Badan Usaha (harga patokan) lebih rendah/kecil dari harga jual BBM Pemerintah kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Perpres. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari selisih antara nilai minyak mentah DMO / <i>Domestic Market Obligation</i> dengan harga ICP / <i>Indonesian Crude Price</i> dengan <i>DMO Fee</i> . Nilai minyak mentah DMO adalah hasil penjualan minyak mentah bagian KKKS (Kontraktor Kontrak kerja Sama) diserahkan kepada Pemerintah atau dibeli Pemerintah. Sedangkan <i>DMO Fee</i> adalah pembayaran atau harga beli Pemerintah atas penyerahan minyak mentah DMO bagian KKKS. Penerimaan ini bersifat kontijensi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha hulu migas antara lain penerimaan bonus dari KKKS, transfer material, dan <i>firm commitment</i> .
<b>42517</b>	<b>Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN</b>
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM.
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha niaga dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan klaim asuransi BMN dan penerimaan lain-lain terkait pengasuransian BMN sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>4252</b>	<b>PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM</b>
<b>42521</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum</b>
425211	Pendapatan Paspor
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia antara lain berupa paspor biasa, paspor pengganti, surat perjalanan laksana paspor, dan pas lintas batas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425212	Pendapatan Visa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Visa, antara lain berupa visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> )
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pemberian Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ) antara lain berupa izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan keimigrasian selain paspor, visa, dan izin keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ), antara lain berupa biaya beban keimigrasian, <i>Smart Card</i> , pembuatan Surat Keterangan Keimigrasian, pembuatan dan penggantian Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC) / <i>APEC Business Travel Card</i> (ABTC), pemberian fasilitas AFFIDAVIT. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan fidusia antara lain berupa pendaftaran jaminan fidusia dan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Badan Hukum antara lain berupa pendirian badan usaha, yayasan, dan perseroan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa hukum selain pelayanan fidusia dan pelayanan badan hukum, antara lain berupa Pendapatan dari pelayanan perdata umum, notariat, harta peninggalan, pengambilan sidik jari (daktiloskopi), partai politik, kewarganegaraan dan perwarganegaraan RI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan atas kekayaan intelektual antara lain berupa hak cipta, desain industri, rahasia dagang, desain

AKUN	PENJELASAN
	tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan indikasi geografis, dan Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum selain pelayanan keimigrasian, pelayanan jasa hukum dan pelayanan kekayaan intelektual, antara lain kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan masyarakat. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
<b>42522</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri</b>
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari visa Republik Indonesia di luar negeri. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari paspor Republik Indonesia di luar negeri, termasuk Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler. Antara lain pengesahan tandatangan/legalisasi salinan dokumen, surat keterangan jalan, surat keterangan usaha/ bisnis dan buku pengenalan diri ( <i>ID Book</i> ). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pelayanan pada KDEI di Luar Negeri, meliputi pendapatan paspor, visa, fasilitas keimigrasian ( <i>affidavit</i> ) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Dokumen Konsuler, dan pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh KDEI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan lainnya di luar negeri antara lain pendapatan fasilitas keimigrasian ( <i>affidavit</i> ) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Surat Keterangan Keimigrasian, pelayanan kepelautan, pelayanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, dan pelayanan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari administrasi di luar negeri antara lain pendapatan cicilan Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR), pengembalian <i>Value Added Tax (VAT)</i> , dan pendapatan administrasi lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
<b>42523</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi</b>
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengesahan surat di bawah tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005).
425232	Pendapatan Uang Meja ( <i>Leges</i> ) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Uang Meja ( <i>Leges</i> ) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005).
425233	Pendapatan Ongkos Perkara

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari ongkos perkara. Masuk Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005), Kejaksaan Agung (BA 006), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (093).
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari lelang barang-barang gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil sitaan dan/atau temuan berupa barang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana selain Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain berupa denda hasil tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kejaksaan dan peradilan lainnya, antara lain berupa pendaftaran pengangkatan sita, hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil orang yang berhak, hasil pemulihan kerugian negara, hasil kerja sama di bidang hukum dengan negara lain, sisa panjar biaya perkara, dan hak redaksi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Mahkamah Agung (BA 005).
<b>42524</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang</b>
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana korupsi dan hasil penjualan barang sita eksekusi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana korupsi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian uang Negara tanpa putusan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil sitaan dan/atau temuan berupa uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, antara lain berupa uang sitaan dari tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
<b>42525</b>	<b>Pendapatan Perizinan</b>
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (BA 026).
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan pengajuan Hak dan Perizinan di bidang pertanian antara lain berupa jasa pelayanan perlindungan varietas tanaman (PVT), jasa pendaftaran pupuk, jasa pendaftaran pestisida, jasa pendaftaran obat hewan, dan jasa sertifikasi obat hewan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), jasa pengujian dalam rangka persyaratan izin tanda pabrik dan izin tipe alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, izin usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan perizinan lainnya di bidang perdagangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan kefarmasian, perizinan alat kesehatan, izin edar alat kesehatan, dan izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (BA 024)



AKUN	PENJELASAN
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa iuran izin pemanfaatan kawasan, iuran izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (IUPJL), penerbitan izin lingkungan, dan penerbitan izin pengendalian pencemaran air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan selain perizinan Tenaga Kerja Asing, perizinan Pertanian, perizinan bidang perdagangan, perizinan bidang kesehatan dan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain berupa perizinan undian berhadiah serta perizinan penelitian, perizinan pelaksanaan reklamasi dan pengembangan bagi peneliti asing, iuran tahunan akibat penerapan hak, dan Penerbitan Rekomendasi Importir dan Eksportir Terdaftar Prekursor Narkotika Nonfarmasi.
<b>42526</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian I</b>
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425264	Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Ujian Keterampilan Mengemudi sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42527</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian II</b>
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesiasesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesiasesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak serta penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Satuan Pengaman, yaitu penerbitan kartu anggota satuan pengaman, penerbitan ijazah satuan pengaman, dan penerbitan surat izin operasional badan usaha jasa pengamanan sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu dan Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu termasuk pelatihan internal auditor obyek vital nasional dan objek tertentu dan jasa pengawalan terhadap uang/barang yang bersifat komersial, sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Kepolisian Lainnya, termasuk pelayanan penyelenggaraan assesment center Polri sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42528</b>	<b>Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi</b>
425281	Pendapatan Akreditasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari akreditasi antara lain akreditasi pada Badan Standardisasi Nasional. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga.
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari antara lain pendapatan dari sertifikasi benih, Jasa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jasa Pengujian Benih Tanaman Kehutanan, Pengujian Bibit Tanaman Hutan, dan Jasa Laboratorium. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (BA 019) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi serta pelayanan teknis mesin.
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (BA 090) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian kalibrasi dan verifikasi, pelayanan inspeksi teknik, pelayanan teknis mesin, pelayanan teknis sertifikasi, serta jasa tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus.
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (BA 024) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi dan pelayanan teknis sertifikasi.
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Rakyat (BA 033)
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian selain dari pengujian kendaraan bermotor, Sertifikasi, dan Kalibrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (BA 022) antara lain meliputi sertifikasi angkutan penyeberangan lintas dalam negeri, sertifikasi kompetensi pengawakan angkutan umum, sertifikasi SDM perkeretaapian, sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian, penerbitan lisensi dan sertifikasi bidang transportasi udara, dan kalibrasi peralatan penerbangan.
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi selain di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan pekerjaan umum, antara lain pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi di bidang tenaga nuklir dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
<b>4253</b>	<b>PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN</b>
<b>42531</b>	<b>Pendapatan Jasa Kesehatan</b>
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) termasuk yang berasal dari Dana Kapitasi dan Dana Klaim Nonkapitasi.
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya selain dari BPJS Kesehatan.
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa karantina kesehatan antara lain karantina kapal yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pemberian vaksin kesehatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari registrasi tenaga kesehatan, meliputi dokter, dokter gigi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
<b>42532</b>	<b>Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan</b>
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pengawasan obat dan makanan antara lain berupa pendaftaran, sertifikasi, dan pengujian obat dan makanan. Masuk Bagian Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BA 063).
<b>42533</b>	<b>Pendapatan Jasa Karantina</b>
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina pertanian dan peternakan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>42534</b>	<b>Pendapatan Jasa Agraria</b>
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, pelayanan pendaftaran tanah, pelayanan informasi pertanahan, pelayanan lisensi, dan pelayanan di bidang pertanahan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan penetapan tanah obyek penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda (P3MB) sesuai Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
<b>42535</b>	<b>Pendapatan Jasa Keagamaan</b>
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari hasil pelayanan Jasa Kantor Urusan Agama dari pencatatan nikah dan rujuk. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025).
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya, antara lain pendapatan dari pengelolaan asrama haji, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, dan pencetakan Al Qur'an. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025).
<b>4254</b>	<b>PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI</b>
<b>42541</b>	<b>Pendapatan Pendidikan</b>
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan pada Sekolah maupun Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP).
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Pendidikan di Sekolah maupun PTP yang dibayarkan selama masa pendidikan antara lain berupa uang kuliah tunggal, SPP, uang praktikum, cuti akademik, semester pendek, bimbingan karya ilmiah akhir, Praktik Kerja Lapangan, ujian remedial, dan ujian komprehensif.

AKUN	PENJELASAN
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah maupun PTP, antara lain kerjasama dengan instansi pemerintah/swasata dalam rangka kajian reorientasi pembangunan pedesaan, kajian dalam kebijakan strategis dalam pemetaan cluster sektor unggulan, kajian pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif).
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan pendidikan pada Sekolah maupun PTP selain pendapatan ujian masuk/seleksi masuk pendidikan, pendapatan biaya pendidikan, dan pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Antara lain berupa wisuda, kartu perpustakaan, penjualan hasil praktik pendidikan, dan pendapatan <i>try out</i> .
<b>42542</b>	<b>Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, termasuk pendidikan dan pelatihan investigasi bagi PNS dan Sertifikasi Satuan Pengamanan, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya di berbagai Kementerian/Lembaga selain layanan pendidikan dan/atau pelatihan serta assessment dan sertifikasi kompetensi. Antara lain berasal dari <i>assessment center</i> dan psikometri, sertifikasi kepabeanaan,sertifikasi <i>welding</i> , jasa registrasi kompetensi nasional bidang lingkungan hidup, dan sertifikasi penanggulangan bencana.
<b>42543</b>	<b>Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek</b>
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga, antara lain berupa pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>current meter type propeler OTT C2</i> (Jasa Instrumentasi Peralatan Lapang).
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain pengolahan data sosial ekonomi pertanian, jasa survey dan pemetaan dalam rangka survey hidro oseanografi.
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.Masuk Bagian Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BA 075).
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Penelitian/Riset dan hasil Pengembangan Iptek. merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan dari laboratorium bank gen.
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain peta laut navigasi, buku nautis, peta navigasi elektronik.

AKUN	PENJELASAN
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
	Digunakan untuk mencatat pendapatan royalti atas kekayaan intelektual. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan royalti dari kekayaan intelektual yang berasal dari alih teknologi hasil litbang kesehatan.
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Penelitian/Riset, Survei, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya, antara lain jasa penggunaan peralatan survey dan pemetaan, jasa penimbangan peralatan nautika dan tiket masuk kebun raya dan balai konservasi tumbuhan.
<b>42545</b>	<b>Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan</b>
425451	Pendapatan Museum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari museum antara lain berupa tiket masuk museum dan pameran. Merupakan penerimaan yang (bisa) ada di Kementerian/Lembaga, antara lain museum Basoeki Abdullah, Museum Nasional, museum Sumpah Pemuda, museum geologi.
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan di bidang sejarah dan kebudayaan lainnya antara lain kerja sama pengelolaan cagar budaya (contoh: Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Pawon, dan Candi Mendut).
<b>4255</b>	<b>PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
<b>42551</b>	<b>Pendapatan Jasa Transportasi</b>
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa pengujian kendaraan bermotor antara lain berupa uji tipe kendaraan, uji sampel kendaraan dan penerbitan surat sertifikat uji tipe (SUT) serta surat registrasi uji tipe (SRUT). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri antara lain berupa jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan orang, penggunaan sarana dan prasarana di pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi pelayaran antara lain berupa penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran, pelayanan jasa telekomunikasi pelayaran, pelayanan jasa salvage dan pekerjaan bawah air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerimaan uang perkapalan dan kepelautan antara lain berupa surat pengukuran kapal, dokumen kepelautan, dan pengawasan barang berbahaya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan di bandar udara antara lain berupa pelayanan jasa penumpang pesawat udara, pelayanan jasa pendaratan penempatan dan penyimpanan pesawat udara, jasa kargo dan pos pesawat udara, penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara serta penerbitan izin masuk daerah keamanan terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi penerbangan. antara lain <i>terminal navigation charge, enroute charge dan overflying</i> . Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari konsesi di bidang transportasi, antara lain konsesi jasa kepelabuhanan dan konsesi jasa kebandarudaraan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan di bidang transportasi selain pengujian kendaraan bermotor, penggunaan prasarana perkeretaapian, jasa kepelabuhanan, jasa navigasi pelayaran, jasa perkapalan dan kepelautan, jasa kebandarudaraan, jasa navigasi penerbangan, dan pendapatan dari konsesi bidang transportasi. Penerimaan Jasa Transportasi Lainnya antara lain berupa penerbitan izin angkutan jalan, penerbitan izin bidang perkeretaapian, penerbitan Surat izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), dan penerbitan izin bidang angkutan udara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
<b>42552</b>	<b>Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika</b>
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Pos. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).



AKUN	PENJELASAN
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
<b>42553</b>	<b>Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik</b>
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116).
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116).
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran yang meliputi jasa penyiaran, jasa digitalisasi penyiaran, jasa produksi program dan royalti atas hak kekayaan intelektual produksi program. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117).
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran yang meliputi jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian, jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi, jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi dan jasa multipleksing. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117).
<b>4256</b>	<b>PENDAPATAN JASA LAINNYA</b>
<b>42561</b>	<b>Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>
425611	Pendapatan Wisata Alam
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wisata alam di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam, pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam, pungutan jasa kegiatan wisata alam, dan karcis masuk di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pariwisata alam (KPA) dan taman buru (TB). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pembayarannya dilakukan secara periodik, antara lain berupa iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan, pungutan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pungutan usaha pemanfaatan air (PUPA), dan pungutan usaha pemanfaatan energi air (PUPEA). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan selain pendapatan wisata alam, dan pendapatan iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang, hasil silvopastoral system, hasil <i>silvofishery system</i> , penerbitan rekomendasi pengangkutan dan registrasi bahan berbahaya dan beracun (B3), pendapatan dari pengumpulan benih dan anakan dan transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42562</b>	<b>Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan</b>
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan
	Pendapatan dari pelayanan di pelabuhan perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan selain Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, antara lain berupa pungutan dari penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>42569</b>	<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga antara lain berupa jasa inspeksi, jasa surveilans dan jasa audit.
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga, antara lain jasa tenaga ahli, jasa perpustakaan, jasa rancang bangun dan perekayasaan, dan jasa konsultasi.
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa layanan jalan tol. Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033).
425694	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033).
425699	Pendapatan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk pendapatan atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PKP2B Generasi I pada Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>4257</b>	<b>PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>
<b>42571</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>
425711	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
425712	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari BPPN yang bersumber dari investasi/ pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas.
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan

AKUN	PENJELASAN
	biaya-biaya lainnya yang berasal dari pemberian kredit pemerintah termasuk kredit investasi pemerintah dan kredit bidang perkebunan dan kehutanan.
425715	Pendapatan Komitmen Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari biaya komitmen yang timbul akibat pemberian pinjaman, merupakan transaksi BA BUN Satker Direktorat SMI.
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga transaksi kredit program.
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
	Digunakan untuk mencatat PNBPN yang berasal dari bunga dari pengelolaan rekening pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
425719	Pendapatan Bunga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga selain yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya.
<b>42572</b>	<b>Pendapatan Gain on Bond Redemption</b>
425721	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih <i>carrying value</i> Obligasi yang dibeli kembali dengan <i>clean price</i> yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali Obligasi ( <i>buyback</i> ). <i>Carrying Value</i> Obligasi ialah nominal Obligasi setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau premium.
425722	Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i> .
425723	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing.
425724	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang.
425725	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valas Jangka Panjang.
<b>42573</b>	<b>Pendapatan Premium Atas Surat Berharga Negara</b>
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan pendapatan premium SUN berdenominasi Rupiah.
425732	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pengakuan pendapatan premium SUN berdenominasi Valuta Asing.
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan pendapatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Rupiah.
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pengakuan pendapatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Valuta Asing.
<b>42574</b>	<b>Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara</b>
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas imbal jasa penjaminan infrastruktur.
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Harga SBN.
425743	Pendapatan Kupon SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Kupon SBN.
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas transaksi <i>reverse repo</i> .
425745	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama. Masuk Bagian Anggaran 999.01 (Sistem Akuntansi Utang Pemerintah).
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan lain-lain atas rekening tujuan tertentu.
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan <i>Loss Limit</i>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan usaha yang menerima dukungan <i>Loss Limit</i> dalam rangka kegiatan dukungan penjaminan pemerintah.
<b>42575</b>	<b>Pendapatan dari Selisih Kurs</b>
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	Digunakan untuk mencatat untung selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat realisasi kentungan selisih kurs uang persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
	Selisih positif transaksi belanja dalam valuta asing antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda.
<b>42576</b>	<b>Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening</b>
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari layanan jasa perbankan.
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa bank akibat transaksi pemberian pinjaman.
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas biaya management fee, komitmen

AKUN	PENJELASAN
	fee dan fee-fee yang terjadi karena transaksi pemberian pinjaman.
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penutupan rekening pemerintah.
<b>42577</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara</b>
425771	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA. Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Umum. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> . Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Sentral. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penempatan uang sebelum rekonsiliasi.
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari remunerasi/imbal hasil atas pengelolaan rekening khusus (reksus) dana pinjaman dan/atau hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
<b>42578</b>	<b>Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara</b>
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 015).
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.

AKUN	PENJELASAN
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Pegadaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
<b>42579</b>	<b>Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara</b>
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
<b>4258</b>	<b>PENDAPATAN DENDA</b>
<b>42581</b>	<b>Pendapatan Denda I</b>
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari pelaku usaha yang telah mendapatkan putusan tetap dari peradilan. Masuk Bagian Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Administratif atas pelanggaran tidak mendaftar Prospektus dan Perjanjian Waralaba; Denda Administratif atas pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA. Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> . Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99)
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa denda, bunga, dan penalti keterlambatan terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas.
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda administrasi atas Keterlambatan dan Kekurangan Penyetoran Bagian Pemerintah dari Pengusahaan Panas Bumi.
<b>42582</b>	<b>Pendapatan Denda II</b>
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan menyalurkan dana SP2D/SP2D-R ke rekening yang berhak dan keterlambatan membukukan dana SP2D-R pada tanggal diterimanya dana ke Rekening RR SPAN/Rekening RR Gaji. Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman, merupakan transaksi BA BUN satker Direktorat SMI.
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan penerimaan denda karena bank yang ditunjuk terlambat menyalurkan dana kredit program kepada pihak yang berhak menerima.
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk juga imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur KUMK.
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur Pemberian Pinjaman.
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III.

AKUN	PENJELASAN
425829	<b>Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan (DPEH), denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, dan ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
<b>42583</b>	<b>Pendapatan Denda III</b>
425839	Pendapatan Denda Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda yang tidak termasuk ke dalam kelompok Pendapatan Denda I& II.
<b>4259</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>
<b>42591</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I</b>
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL.
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Subsidi TAYL.
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Hibah TAYL.
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Lain-lain TAYL.
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL.
<b>42592</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II</b>
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL.
<b>42593</b>	<b>Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan</b>
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran



AKUN	PENJELASAN
	belanja pegawai PNS yang sudah pensiun.
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Prajurit TNI/PNS Kemhan yang sudah pensiun.
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Anggota Polri/PNS Polri yang sudah pensiun.
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Pejabat Negara yang sudah pensiun.
<b>42598</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain I</b>
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali atas pelunasan piutang pemberian pinjaman yang telah dihapuskan, meliputi piutang pokok penerusan pinjaman dan piutang non pokok, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, serta penerimaan kembali atas aset lainnya kredit program yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya.
425982	Penerimaan Pengembalian dan Pencatatan Akumulasi luran Pensiun
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Akumulasi luran Pensiun yang disetorkan oleh Badan Penyelenggara yaitu PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) serta untuk mencatat Penerimaan Akumulasi luran Pensiun untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA 999.99).
425983	Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari sumbangan dana kampanye yang dilarang pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yang berdasar ketentuan harus disetorkan ke kas negara.
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi bagian Pemerintah.
<b>42599</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain II</b>
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Pembayaran Premi dalam rangka Penjaminan Perbankan Nasional.
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima Pemerintah dari Bank Umum atau PT Pos sebagai pengelola kas negara (Bank Operasional).
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak. Merupakan pendapatan BA 015.06 (Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan).
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN. Merupakan pendapatan BUN.
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan.
425998	Pendapatan dari Retur SP2D
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Retur SP2D yang disetorkan ke kas negara. Dibukukan pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus).
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>43</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>
<b>431</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</b>
<b>4311</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri</b>
<b>43111</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana</b>
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan
	Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
	Pendapatan hibah dalam negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
<b>43112</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga</b>
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk barang.
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk Jasa.
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga.
<b>43113</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang</b>
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
	Pendapatan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari Lembaga/Badan

AKUN	PENJELASAN
	Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah.
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
	Pendapatan hibah dalam negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).
<b>4312</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri</b>
<b>43121</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana</b>
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
	Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
	Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral. (BA 999.02).
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
	Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral. (BA 999.02).
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
	Pendapatan hibah luar negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. (BA 999.02).
<b>43122</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga</b>
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk barang.
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk Jasa.
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga.
<b>43123</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang</b>
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
	Pendapatan hibah luar negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
	Pendapatan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral (BA 999.02).
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
	Pendapatan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral (BA 999.02).
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
	Pendapatan hibah luar negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral (BA 999.02).
<b>43124</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan.
431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan.
431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan.
<b>439</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH LAIN-LAIN</b>
<b>4399</b>	<b>Pendapatan Hibah Lain-lain</b>
<b>43999</b>	<b>Pendapatan Hibah Lain-lain</b>
<b>439999</b>	Pendapatan Hibah Lain-lain
	Hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkat LKPP.
<b>49</b>	<b>PENDAPATAN PENYESUAIAN</b>
<b>491</b>	<b>PENDAPATAN PENYESUAIAN AKRUAL</b>
<b>4911</b>	<b>Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi</b>
<b>49111</b>	<b>Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi</b>
491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi
	Pendapatan akrual atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi. Akun ini dicatat oleh satker yang memiliki rekening bank dalam bentuk valuta asing (valas) misal satker BUN.
491112	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU
	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU
<b>4912</b>	<b>Pendapatan Amortisasi Premium</b>
<b>49121</b>	<b>Pendapatan Amortisasi Premium</b>
491211	Pendapatan amortisasi premium
	Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi akrual pendapatan yang berasal dari amortisasi premium dari obligasi negara.
<b>4913</b>	<b>Pendapatan Penyesuaian Lainnya</b>
<b>49131</b>	<b>Pendapatan Penyesuaian Lainnya</b>
491311	Pendapatan penyesuaian Lainnya
	Pendapatan akrual dengan jurnal penyesuaian lainnya
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs pada Kementerian Negara/Lembaga, dan akan dicatat pada Laporan Operasional sebagai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penyesuaian nilai investasi.
491314	Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penyesuaian investasi lainnya.
491315	Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa
	Digunakan untuk mencatat pengakuan pendapatan dari penyesuaian substansi pendapatan tangguhan yang mengurangi nilai kewajiban konsesi jasa skema

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	pemberian hak usaha kepada mitra.
<b>4914</b>	<b>Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa</b>
<b>49141</b>	<b>Pendapatan Pelepasan Aset</b>
491411	Pendapatan Pelepasan Aset
	Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi akrual Pendapatan dari Pendapatan Pelepasan Aset.
<b>49142</b>	<b>Pendapatan Perolehan Aset/Jasa</b>
491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Sitaan/Rampasan.
491422	Pendapatan Perolehan Jasa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan perolehan jasa, termasuk perolehan jasa yang bersumber selain dari APBN dan hibah.
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
<b>4915</b>	<b>Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset</b>
<b>49151</b>	<b>Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset</b>
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
<b>498</b>	<b>SUSPENSE PENDAPATAN</b>
<b>4981</b>	<b>Suspense Pendapatan</b>
<b>49811</b>	<b>Suspense Pendapatan</b>
498111	Suspense Pendapatan
	Digunakan untuk mencatat selisih Pendapatan antara Kementerian/ Lembaga dengan BUN.
<b>499</b>	<b>AKUN SET UP</b>
<b>4991</b>	<b>Akun Set up</b>
<b>49911</b>	<b>Akun set up</b>
499111	Akun set up
	Akun Set Up pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul Account Receivable.
499112	Unearned Discount
	Akun Set Up pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul Account Receivable.
499113	Sales Account
	Akun Set Up pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul Account Receivable.
<b>4999</b>	<b>Revenue</b>
<b>49999</b>	<b>Revenue</b>
499999	Revenue
	Revenue pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul Account Receivable.

**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN BEBAN**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>5</b>	<b>BEBAN NEGARA</b>
<b>51</b>	<b>BEBAN PEGAWAI</b>
<b>511</b>	<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN</b>
<b>5111</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan PNS</b>
<b>51111</b>	<b>Beban Gaji PNS</b>
511111	Beban Gaji Pokok PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
<b>51112</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan I PNS</b>
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri PNS.
511122	Beban Tunj. Anak PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak PNS.
511123	Beban Tunj. Struktural PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural PNS.
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan fungsional PNS.
511125	Beban Tunj. PPh PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh PNS.
511126	Beban Tunj. Beras PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kemahalan PNS.
511128	Beban Tunjangan Lauk Pauk PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511129	Beban Uang Makan PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang makan PNS.
<b>51113</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan II PNS</b>
511131	Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan perbaikan penghasilan PNS.
511132	Beban Tunj. Cacat PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan cacat PNS.
511133	Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus peralihan PNS.
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511136	Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus PNS Papua.
511139	Beban Tunjangan SAR PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan <i>Search and Rescue</i> untuk Pegawai Negeri Sipil.
<b>51114</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri</b>
511141	Beban Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN).
511142	Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN).
511143	Beban Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN).
511144	Beban Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN).
511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN).
511146	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN).
511147	Beban Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri.
511149	Beban Lokal Staff Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji, tunjangan dan uang lembur

AKUN	PENJELASAN
	lokal staff.
<b>51115</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan IV PNS</b>
511151	Beban Tunjangan Umum PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
511152	Beban Tunjangan Profesi Guru
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan profesi guru PNS yang telah lulus ujian sertifikasi guru dan mendapatkan NIRG (Nomor Induk Registrasi Guru).
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan profesi dosen PNS yang telah lulus ujian sertifikasi dosen.
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kehormatan profesor yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
511155	Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
511156	Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen PNS.
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Tunjangan Kemahalan Hakim.
511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
<b>51116</b>	<b>Beban Gaji- PNS TNI/Polri</b>
511161	Beban Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
511169	Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
<b>51117</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri</b>
511171	Beban Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri PNS TNI/Polri.
511172	Beban Tunj. Anak PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511173	Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511174	Beban Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan fungsional PNS TNI/Polri.
511175	Beban Tunj. PPh PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh PNS TNI/Polri.
511176	Beban Tunj. Beras PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras berbentuk uang maupun natura untuk PNS TNI/Polri.
511177	Beban Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kemahalan PNS TNI Polri.
511178	Beban Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat beban atas lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik) untuk PNS TNI/Polri.
511179	Beban Uang Makan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang makan PNS TNI/Polri.
<b>51118</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri</b>
511181	Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNI/Polri.
511182	Beban Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan cacat PNS TNI/Polri.
511183	Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus peralihan PNS TNI/Polri.
511184	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987.
511185	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511187	Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
511188	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
511189	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus PNS Papua.
<b>51119</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI</b>
511191	Beban Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Medis PNS TNI/POLRI.
511192	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511193	Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri.
511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI.
511195	Beban Tunjangan Operasi Pengamanan pada pulau terluar dan wilayah perbatasan PNS TNI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Operasi Pengamanan bagi PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
511196	Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.
511197	Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan dosen PNS TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar PNS TNI/Polri.
<b>5112</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri</b>
<b>51121</b>	<b>Beban Gaji TNI/POLRI</b>
511211	Beban Gaji Pokok TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok TNI/POLRI.
511219	Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok TNI/ POLRI.
<b>51122</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI</b>
511221	Beban Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri TNI/POLRI.
511222	Beban Tunj. Anak TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak TNI/POLRI.
511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural TNI/POLRI.
511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan fungsional TNI/POLRI.
511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh TNI/POLRI.
511226	Beban Tunj. Beras TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI.
511227	Beban Tunj. Kemahalan TNI/POLRI

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/16/X/2001.
511228	Beban Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511229	Beban Uang Makan TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang makan TNI/POLRI.
<b>51123</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI</b>
511231	Beban Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI.
511232	Beban Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI.
511233	Beban Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Babinsa TNI/POLRI.
511234	Beban Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI.
511235	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI.
511236	Beban Tunj. Brevet TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan brevet TNI/POLRI.
511237	Beban Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI.
511238	Beban Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan keterampilan khusus TNI/POLRI.
511239	Beban Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Operasi Pengamanan bagi prajurit TNI yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau terkecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
<b>51124</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI</b>
511241	Beban Tunjangan Medis TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Medis TNI/POLRI.
511242	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511243	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI.
511244	Beban Tunjangan Umum TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan umum/tambahan

AKUN	PENJELASAN
	tunjangan umum TNI/POLRI sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
511245	Beban Santunan Cacat TNI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban santunan yang diberikan kepada anggota TNI yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.
511246	Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Anggota POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.
511247	Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan dosen TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar TNI/Polri.
<b>5113</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara</b>
<b>51131</b>	<b>Beban Gaji Pejabat Negara</b>
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok pejabat Negara.
511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok pejabat negara.
<b>51132</b>	<b>Beban Tunjangan-Tunjangan I Pejabat Negara</b>
511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri pejabat negara.
511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak pejabat negara.
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural pejabat negara.
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh pejabat negara.
511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras pejabat negara.
<b>51133</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara</b>
511331	Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan komunikasi intensif pejabat negara.
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang kehormatan pejabat negara.
511333	Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan paket harian pejabat negara.
511334	Beban Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara.
511335	Beban Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara.

AKUN	PENJELASAN
511336	Beban Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat Negara.
511337	Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara.
511338	Beban Tunjangan Fasilitas KPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pejabat KPK seperti fasilitas yang diterima.
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas tunjangan penghasilan untuk Pejabat Negara (TPPN).
<b>5114</b>	<b>Beban Gaji Dokter PTT</b>
<b>51141</b>	<b>Beban Gaji Dokter PTT</b>
511411	Beban Gaji Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji Dokter dan Bidan PTT.
511412	Beban Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT.
511413	Beban Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT.
511414	Beban Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW).
<b>5115</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>
<b>51151</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>
511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
511513	Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban uang penghargaan bagi Wakil Menteri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Wakil Menteri.
511519	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi termasuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>51152</b>	<b>Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS</b>
511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS.
511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan tenaga penyuluh non PNS, termasuk tunjangan penyuluh agama non PNS.
511529	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS termasuk tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional.
<b>5116</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan PPPK</b>
<b>51161</b>	<b>Beban Gaji PPPK</b>
511611	Beban Gaji Pokok PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran gaji pokok PPPK.
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok PPPK.
<b>51162</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan I PPPK</b>
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PPPK.
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembayaran tunjangan anak PPPK.
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembayaran tunjangan jabatan struktural PPPK.
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional PPPK.
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511626	Beban Tunjangan Kemahalan PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembayaran tunjangan kemahalan PPPK.
511627	Beban Tunjangan Lauk Pauk PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para PPPK sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511628	Beban Uang Makan PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PPPK.
511629	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran tunjangan kompensasi kerja PPPK sebagaimana yang berlaku bagi PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No.SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No.SE 83-/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).
<b>51163</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan II PPPK</b>
511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PPPK.
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran tunjangan khusus PPPK yang bertugas/bekerja di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PPPK sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
<b>512</b>	<b>BEBAN HONORARIUM/LEMBUR/TUNJ. KHUSUS &amp; BEBAN PEGAWAI TRANSITO</b>
<b>5121</b>	<b>Beban Honorarium</b>
<b>51211</b>	<b>Beban Honorarium</b>
512111	Beban Uang Honor Tetap
	Digunakan untuk pengakuan beban honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan.
<b>5122</b>	<b>Beban Lembur</b>
<b>51221</b>	<b>Beban Lembur</b>
512211	Beban Uang Lembur
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
512212	Beban Uang Lembur PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran uang lembur PPPK termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
<b>5124</b>	<b>Beban Tunj. Khusus &amp; Beban Pegawai Transito</b>
<b>51241</b>	<b>Beban Tunj. Khusus &amp; Beban Pegawai Transito</b>
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512412	Beban Pegawai Transito
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
512413	Beban Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas uang kompensasi kepada PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>513</b>	<b>BEBAN KONTRIBUSI SOSIAL</b>
<b>5131</b>	<b>Beban Pensiun dan Uang Tunggu</b>
<b>51311</b>	<b>Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara</b>
513111	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Pusat dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513112	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban pensiun PNS Daerah dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513113	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
	Digunakan untuk pembayaran Beban pensiun PNS TNI/Kemhan dan uang tunggu bagi PNS TNI/Kemhan yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513114	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513115	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Eks Pegadaian dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51312</b>	<b>Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri</b>
513121	Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989.
513122	Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun Prajurit TNI dan uang tunggu bagi Prajurit TNI yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513123	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun anggota Polri dan uang tunggu bagi anggota Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51313</b>	<b>Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara</b>
513131	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun dan uang tunggu bagi



AKUN	PENJELASAN
	Pejabat Negara yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513132	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Hakim
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun dan uang tunggu bagi Hakim yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51314</b>	<b>Beban Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI</b>
513141	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api sebagai pelaksanaan dari PP No 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia.
<b>51315</b>	<b>Beban Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP</b>
513151	Beban Tunjangan Veteran
	Digunakan mencatat pengakuan beban tunjangan veteran RI.
513152	Beban Dana Kehormatan Veteran
	Digunakan mencatat pengakuan beban Dana Kehormatan Veteran.
513153	Beban Tunjangan PKRI dan KNIP
	Digunakan mencatat pengakuan beban tunjangan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dan Komite Nasional Indonesia Pusat.
<b>51316</b>	<b>Beban Tunjangan Hari Tua</b>
513161	Beban Tunjangan Hari Tua ( <i>Unfunded Liability</i> )
	Digunakan mencatat pengakuan beban yang atas kewajiban pemerintah berupa <i>Unfunded Liability</i> (kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai
<b>5132</b>	<b>Beban Program Jaminan Sosial Pegawai</b>
<b>51321</b>	<b>Beban Askes PNS/Pejabat Negara</b>
513211	Beban Askes PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS.
513212	Beban Askes Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Askes Pejabat Negara.
<b>51322</b>	<b>Beban Askes Penerima Pensiun</b>
513221	Beban Askes Penerima Pensiun
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Penerima Pensiun.
<b>51323</b>	<b>Beban Askes TNI/Kemhan</b>
513231	Beban Askes TNI/Kemhan
	Digunakan mencatat pengakuan beban Askes TNI/Kemhan.
<b>51324</b>	<b>Beban Askes Polri</b>
513241	Beban Askes Polri
	Digunakan mencatat pengakuan beban Askes Polri.
<b>51325</b>	<b>Beban Askes Veteran</b>
513251	Beban Askes Veteran

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Penerima Tunjangan Veteran yang ditanggung pemerintah pusat.
<b>51326</b>	<b>Beban Katastropik</b>
513261	Beban Katastropik
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban katastropik.
<b>51327</b>	<b>Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai</b>
513271	Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.
<b>51328</b>	<b>Beban Program Jaminan Kematian Pegawai</b>
513281	Beban Program Jaminan Kematian Pegawai
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Program Jaminan Kematian Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.
<b>5133</b>	<b>Beban Tunjangan Kesehatan Veteran</b>
<b>51331</b>	<b>Beban Tunjangan Kesehatan Veteran</b>
513311	Beban Tunjangan Kesehatan Veteran
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Non Tuvet yang ditanggung pemerintah pusat.
<b>5134</b>	<b>Beban Cadangan Perubahan <i>Sharing</i></b>
<b>51341</b>	<b>Beban Cadangan Perubahan <i>Sharing</i></b>
513411	Beban Cadangan Perubahan <i>Sharing</i>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban cadangan perubahan <i>sharing</i> kepada pegawai.
<b>5135</b>	<b>Beban Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pegawai</b>
<b>51351</b>	<b>Beban Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pegawai</b>
513511	Beban Program Tabungan Perumahan Rakyat dari Pemberi Kerja Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat bagian Pemerintah Pusat selaku Pemberi Kerja
<b>52</b>	<b>BEBAN BARANG DAN JASA</b>
<b>521</b>	<b>BEBAN BARANG</b>
<b>5211</b>	<b>Beban Barang Operasional</b>
<b>52111</b>	<b>Beban Barang Operasional</b>
521111	Beban Keperluan Perkantoran
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.</li> <li>- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya</li> </ul>

AKUN	PENJELASAN
	satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan bahan makanan.
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan bahan makanan/minuman/ obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja
	Digunakan untuk mencatat mencatat pengakuan beban atas honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNB (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honoronya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
521116	Beban Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Republik Indonesia di Luar Negeri yang tidak menghasilkan barang persediaan.
521119	Beban Barang Operasional Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang operasional yang tidak dapat ditampung dalam akun dalam kelompok Akun Beban Barang Operasional dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.
<b>52112</b>	<b>Beban Barang Operasional kepada BLU</b>
521121	Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
521122	Beban Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Akun beban ini akan dieliminasi pada

AKUN	PENJELASAN
	Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Pemerintah Pusat (LKPP).
<b>52113</b>	<b>Beban Barang Operasional - Darurat Bencana</b>
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Beban Barang Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>5212</b>	<b>Beban Barang Non Operasional</b>
<b>52121</b>	<b>Beban Barang Non Operasional</b>
521211	Beban Bahan
	Pengeluaran yang digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi/bahan makanan;</li> <li>- Dokumentasi; Spanduk;</li> <li>- Biaya fotokopi;</li> </ul> yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.
521212	Beban Barang Transit
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban barang pada satuan kerja-satuan kerja yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran / Kementerian Negara / Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.
521213	Beban Honor Output Kegiatan
	Digunakan untuk mencatat mencatat pengakuan beban atas Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat). Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
521215	Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun
	Digunakan untuk mencatat biaya yang diperlukan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) untuk operasional penyelenggaraan pembayaran dana belanja Pensiun.
521216	Beban Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
	Digunakan untuk mencatat Beban Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)
521217	Beban Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas denda keterlambatan pembayaran atas tagihan kepada negara sesuai dengan Peraturan Menteri

AKUN	PENJELASAN
	Keuangan yang mengatur mengenai Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Negara atas Tagihan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Belanja Negara.
521218	Beban dalam Rangka <i>Refund</i> Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat beban akibat kewajiban pemerintah untuk mengembalikan penarikan dana PHLN, termasuk penarikan dana PHLN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai dari PHLN kepada pemberi PHLN.
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun lainnya dalam kelompok Akun Beban Barang Non Operasional. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya <i>Crash Program</i> . Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Beban Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.
<b>52122</b>	<b>Beban Barang Non Operasional Kepada BLU</b>
521221	Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang non operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
521222	Beban Barang Non Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang non operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Pemerintah Pusat (LKPP).
<b>52123</b>	<b>Beban Barang Bantuan Pemerintah</b>
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521232	Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian beasiswa Non PNS dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

AKUN	PENJELASAN
<b>52124</b>	<b>Beban Barang Non Operasional - Darurat Bencana</b>
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Beban Barang Non Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>52125</b>	<b>Belanja Barang Ekstrakomptabel</b>
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi.
521253	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi.
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman.
<b>5215</b>	<b>Beban Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC</b>
<b>52151</b>	<b>Beban Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC</b>
521511	Beban Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Barang Pengganti PPN dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
521512	Beban Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Barang Pengganti PPh dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
521513	Beban Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Barang Pengganti Pajak Lainnya dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
<b>5217</b>	<b>Beban Kontribusi dan Kompensasi</b>
<b>52171</b>	<b>Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund</b>
521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99); dan pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
<b>52172</b>	<b>Beban Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan</b>
521721	Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan ( <i>Viability Gap Fund</i> )
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pemerintah yang merupakan dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).

AKUN	PENJELASAN
521722	Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek ( <i>Project Development Facility</i> )
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas bantuan teknis penyiapan dan transaksi proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan untuk menghasilkan <i>Bankable Business Case Project</i> dan dapat mencapai <i>Financial Close</i> . Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
521723	Beban Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )
	Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
521724	Beban Kompensasi Finansial Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJKP sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan sesuai dengan peraturan mengenai Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
521725	Beban Regres Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran regres/tagihan Penjaminan kepada PJKP atas apa yang telah dibayarkan Penjaminan kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial PJKP dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut ( <i>time value of money</i> ) sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
<b>52173</b>	<b>Beban Kompensasi Penugasan - Penanganan Pandemi COVID-19</b>
521731	Beban Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran kompensasi atas penugasan kepada PT Reasuransi Indonesia Utama untuk melaksanakan operasionalisasi Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Telah Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
521732	Beban Selisih Harga Biodiesel
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pembayaran Selisih Harga Biodiesel dari dana APBN Rupiah Murni sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
521733	Beban penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi
<b>522</b>	<b>BEBAN JASA</b>
<b>5221</b>	<b>Beban Jasa</b>
<b>52211</b>	<b>Beban Langganan Daya dan Jasa</b>
522111	Beban Langganan Listrik
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan listrik, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.
522112	Beban Langganan Telepon
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan telepon, termasuk

AKUN	PENJELASAN
	Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
522113	Beban Langganan Air
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan air, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan daya dan jasa lainnya, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.
52212	<b>Beban Jasa Pos dan Giro</b>
522121	Beban Jasa Pos dan Giro
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
52213	<b>Beban Jasa Konsultan</b>
522131	Beban Jasa Konsultan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir ( <i>brainware</i> ).
52214	<b>Beban Sewa</b>
522141	Beban Sewa
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
52215	<b>Beban Jasa Profesi</b>
522151	Beban Jasa Profesi
	Beban untuk mencatat pengakuan beban honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.
522152	Beban Imbalan Jasa Invensi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran belanja imbalan yang diberikan kepada Inventor dari sebuah Invensi yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Imbalan yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor
52216	<b>Beban Jasa kepada BLU</b>
522161	Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
522162	Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Pemerintah Pusat (LKPP).
52217	<b>Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan</b>



AKUN	PENJELASAN
522171	Beban <i>Fee</i> Pelayanan Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan <i>Treasury Single Account</i> (TSA).
522172	Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa ( <i>fee</i> ) Kustodian.
<b>52219</b>	<b>Beban Jasa Lainnya</b>
522191	Beban Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan ( <i>skillware</i> ) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Beban Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>523</b>	<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>
<b>5231</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>
<b>52311</b>	<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas: - Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan - Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/ TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
<b>52312</b>	<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan Kementerian Negara/Lembaga lain yang memiliki transaksi sejenis. BMP antara lain terdiri dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamina, Methanol. Serta Belanja atas SPO (Special Oil Non Pertamina), yaitu pelumas khusus yang tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkan untuk operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidroulic, Petronas Gear, Skydrol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, Shell Omala, Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Sapphire, Nycolube 22, Neox 800, dst. SPO ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli di Luar Negeri. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan darat/apung/udara bermotor atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
<b>52313</b>	<b>Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan

AKUN	PENJELASAN
	untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.
523137	<b>Beban Asuransi Jembatan</b>
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>52319</b>	<b>Beban Pemeliharaan Lainnya</b>
523199	<b>Beban Pemeliharaan Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.
<b>524</b>	<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>
<b>5241</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>
<b>52411</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>
524111	<b>Beban Perjalanan Dinas Biasa</b>
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.</p> <p>Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>b) Pengumandahan (Detasering);</li> <li>c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;</li> <li>d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;</li> <li>e) Memperoleh pengobatan;</li> <li>f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;</li> <li>g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;</li> <li>h) Mengikuti diklat;</li> <li>i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;</li> <li>j) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.</li> </ol>
524112	<b>Beban Perjalanan Dinas Tetap</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

AKUN	PENJELASAN
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.</p> <p>Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>b) Pengumandahan (Detasering);</li> <li>c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;</li> <li>d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;</li> <li>e) Memperoleh pengobatan;</li> <li>f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;</li> <li>g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;</li> <li>h) Mengikuti diklat;</li> <li>i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.</li> </ul>
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</li> <li>b) Biaya paket meeting (<i>halfday/fullday/fullboard</i>);</li> <li>c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;</li> <li>d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.</li> </ul>
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19
	<p>Digunakan untuk mencatat Beban Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p>
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</li> <li>b) Biaya paket meeting (<i>fullboard</i>);</li> <li>c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal</li> </ul>

AKUN	PENJELASAN
	<p>dari dalam kota maupun dari luar kota;                      d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.                      Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.</p>
<b>5242</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>
<b>52421</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.</p>
524212	Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.</p>
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga yang tidak tertampung di dalam pos Beban perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.</p>
<b>525</b>	<b>BEBAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)</b>
<b>5251</b>	<b>Beban Barang BLU</b>
<b>52511</b>	<b>Beban Barang dan Jasa BLU I</b>
525111	Beban Gaji dan Tunjangan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji dan tunjangan pegawai BLU.
525112	Beban Barang
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.</p>
525113	Beban Jasa
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.</p>
525114	Beban Pemeliharaan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemeliharaan BMN BLU.
525115	Beban Perjalanan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas pegawai BLU.
525116	Beban atas Pengelolaan Endowment Fund
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya-biaya yang digunakan untuk pengelolaan Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan sesuai maksud pembentukannya.</p>
525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	<p>Beban BLU yang digunakan dalam rangka pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</p>

AKUN	PENJELASAN
525118	Beban Ketersediaan Layanan BLU
	Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang dibayarkan oleh Satker BLU dengan sumber dana dari PNB BLU.
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.
<b>52513</b>	<b>Beban Asuransi BMN di BLU</b>
525131	Beban Asuransi BMN Gedung dan Bangunan - BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
525132	Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor - BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan darat/apung/udara bermotor di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
525133	Beban Asuransi BMN Jembatan - BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>52514</b>	<b>Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain</b>
525141	Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
525142	Beban Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU Lain yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
525143	Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
525144	Beban Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU Lain yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.

AKUN	PENJELASAN
<b>52515</b>	<b>Beban Barang dan Jasa BLU II</b>
525151	Beban Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup
	Digunakan untuk mencatat penyaluran dana program lingkungan hidup oleh BLU kepada penerima manfaat sesuai dengan mandat/perjanjian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
525152	Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Beban Barang BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Beban Jasa BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
525155	Beban Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Beban Pemeliharaan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
525156	Beban Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat Beban Perjalanan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>52516</b>	<b>Belanja Barang Ekstrakomptabel BLU</b>
525162	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel BLU
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi BLU
525163	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel BLU
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi BLU
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya – Ekstrakomptabel BLU
	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman BLU.
<b>526</b>	<b>BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA</b>
<b>5261</b>	<b>Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>
<b>52612</b>	<b>Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang</b>
526121	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526122	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam

AKUN	PENJELASAN
	bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan Dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung Dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk gedung/bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526124	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
52613	<b>Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda - Darurat Bencana</b>
526131	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat beban bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
5263	<b>Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>
52631	<b>Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk Rumah Aspirasi Anggota DPR. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
5263	<b>Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>
526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang sesuai



AKUN	PENJELASAN
	Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
526323	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Permda dalam bentuk jasa-Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk jasa sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
<b>54</b>	<b>BEBAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG</b>
<b>541</b>	<b>BEBAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG</b>
<b>5411</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek</b>
<b>54111</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara</b>
541111	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan surat Berharga lainnya.
541112	Beban Pembayaran Kupon SBN-TDR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban kupon SBN pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
541113	Beban Pembayaran Bunga Repo - TDR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga transaksi repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
541119	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga Surat perbendaharaan Negara.
<b>54112</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas</b>
541121	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas.
541122	Beban Pembayaran Kupon SBN Valas-TDR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban kupon SBN Valas pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
541123	Beban Pembayaran Bunga Repo Valas-TDR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga repo valas pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
541129	Beban Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas.
<b>5412</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang</b>

AKUN	PENJELASAN
<b>54121</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara</b>
541211	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga Obligasi Negara - Rupiah yang harus dibayar oleh pemerintah.
541219	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara.
<b>54122</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya</b>
541221	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan.
541229	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya.
<b>54123</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri</b>
541231	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri.
541232	Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman Dalam Negeri.
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN.
<b>54124</b>	<b>Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri</b>
541241	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri.
<b>54125</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas</b>
541251	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas.
541259	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara.
<b>5413</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara</b>
<b>54131</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang</b>
541311	Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541312	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Panjang.
<b>54132</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek</b>
541321	Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka Pendek.
541322	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan Surat Berharga Syariah

AKUN	PENJELASAN
	Negara Jangka Pendek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek.
<b>54133</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah</b>
541331	Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah.
541332	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah.
<b>54134</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas</b>
541341	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas.
541342	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas.
<b>54135</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas</b>
541351	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas.
541352	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Pendek Valas.
<b>5414</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang</b>
<b>54141</b>	<b>Beban Bunga Pinjaman program</b>
541411	Beban Bunga Pinjaman Program
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
541419	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.
<b>54142</b>	<b>Beban Bunga Pinjaman proyek</b>
541421	Beban Bunga Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.
541429	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek.
<b>54144</b>	<b>Beban Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman</b>
541441	Beban Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program.
541442	Beban Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek.
541449	Beban Biaya/Kewajiban Lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadualan kembali pinjaman.
<b>54146</b>	<b>Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri</b>
541461	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri.
<b>542</b>	<b>BEBAN PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA</b>
<b>5421</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara</b>
<b>54211</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara</b>
542111	Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan discount yang diberikan atas penerbitan surat perbendaharaan Negara.
542119	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara.
<b>54212</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara</b>
542121	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan discount yang diberikan atas penerbitan obligasi Negara.
542129	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara.
<b>54213</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas</b>
542131	Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas.
542139	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas.
<b>54214</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas</b>
542141	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas.
542149	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Discount Obligasi Negara Valas.
<b>544</b>	<b>BEBAN PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION</b>

AKUN	PENJELASAN
5441	<b>Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara</b>
54411	<b>Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara</b>
544111	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang timbul dari selisih lebih <i>clean price</i> yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN ( <i>buyback</i> ) dengan <i>carrying value</i> SUN. <i>Carrying value</i> SUN ialah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau <i>premium</i> .
544112	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN.
544113	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban <i>Pembayaran Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas.
544114	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valas.
545	<b>Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara</b>
5451	<b>Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara</b>
54511	<b>Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang</b>
545111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
545119	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
54513	<b>Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah</b>
545131	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah
545139	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah
54514	<b>Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas</b>
545141	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
545149	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas
54515	<b>Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas</b>

AKUN	PENJELASAN
545151	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
545159	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- <i>Discount</i> SPN Syariah Valas
<b>547</b>	<b>BEBAN DENDA</b>
<b>5471</b>	<b>Beban Pembayaran Denda</b>
<b>54711</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan Bunga</b>
547112	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas imbalan bunga atas pinjaman perbankan.
547113	Beban Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai.
547119	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
<b>55</b>	<b>BEBAN SUBSIDI</b>
<b>551</b>	<b>BEBAN SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA</b>
<b>5511</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Keuangan</b>
<b>55111</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Keuangan</b>
551111	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR.
<b>5512</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM</b>
<b>55121</b>	<b>Beban Subsidi BBM</b>
551211	Beban Subsidi Avgas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.
551212	Beban Subsidi Avtur
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur.
551213	Beban Subsidi Premium
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.
551214	Beban Subsidi Minyak Bakar
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.
551215	Beban Subsidi Minyak Solar

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.
551216	Beban Subsidi Minyak Diesel
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.
551217	Beban Subsidi Minyak Tanah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.
551218	Beban Subsidi Elpiji
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan elpiji.
551219	Beban Subsidi <i>Liquefied Gas for Vehicle (LGV)</i>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi LGV yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan LGV.
<b>5513</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM</b>
<b>55131</b>	<b>Beban Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya</b>
551311	Beban Subsidi Pangan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK dengan Harga Pokok Beras BULOG.
551312	Beban Subsidi Listrik
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero).
551313	Beban Subsidi Benih
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.
551314	Beban Subsidi Obat
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana.
551315	Beban Subsidi Gula
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551316	Beban Subsidi Pupuk
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551317	Beban Subsidi Perawatan Beras

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Subsidi Perawatan Beras.
551318	Beban Subsidi Pengawasan Pupuk
	Digunakan untuk mencatat Beban Subsidi Pengawasan Pupuk.
551319	Beban Subsidi Harga/Biaya Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih, subsidi pangan dan subsidi listrik.
<b>55132</b>	<b>Beban Subsidi Non-BBM - Pajak</b>
551321	Beban Subsidi PPh-DTP
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551323	Beban Subsidi BM-DTP
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
<b>55133</b>	<b>Beban Subsidi Non-BBM - Lainnya</b>
551331	Beban Subsidi Haji
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551332	Beban Subsidi Kendaraan Bermotor
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA, BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.
551339	Beban Subsidi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>55134</b>	<b>Beban Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II</b>
551341	Beban Subsidi Minyak Goreng
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi harga minyak goreng, berupa PPN penjualan minyak goreng yang ditanggung pemerintah, untuk mengendalikan harga minyak goreng agar terjangkau masyarakat.
<b>5514</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO</b>
<b>55141</b>	<b>Beban Subsidi dalam Rangka PSO</b>
551411	Beban Subsidi PT KAI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia.
551412	Beban Subsidi PT PELNI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI.
551413	Beban Subsidi PT Pos Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indonesia.
551414	Beban Subsidi TVRI



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada TVRI.
551415	Beban Subsidi BULOG
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada BULOG.
551419	Beban Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya.
<b>552</b>	<b>BEBAN SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA</b>
<b>5521</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Keuangan</b>
<b>55211</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Keuangan</b>
552111	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
552112	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bantuan uang muka yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana penyalur bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
<b>55212</b>	<b>Beban Subsidi - Bunga Kredit</b>
552121	Beban Subsidi Bunga KUT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT).
552122	Beban Subsidi Bunga KOP PIR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi.
552123	Beban Subsidi Bunga KOP
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop).
552124	Beban Subsidi Bunga KOP PRIM
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA).
552125	Beban Subsidi Bunga KPR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
552126	Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi.
552127	Beban Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program eks KLBI.
552128	Beban Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar

AKUN	PENJELASAN
	pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program Biofuel (Revitalisasi Perkebunan).
552129	Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya.
<b>55213</b>	<b>Beban Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing</b>
552131	Beban Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi imbalan jasa penjaminan KUR kepada lembaga penjaminan yang seharusnya dibayar oleh penerima KUR.
552132	Beban Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi klaim resiko yang harus dibayar pemerintah kepada Perusahaan Penjaminan terhadap Penyaluran KKP (KKP).
<b>55214</b>	<b>Beban Subsidi Kredit Program II</b>
552141	Beban Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Pemberian Pinjaman Kepada Pengusaha NAD dan Nias.
552142	Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).
552143	Beban Subsidi Kredit Resi Gudang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Subsidi Resi Gudang.
<b>5522</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan</b>
<b>55221</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non Keuangan</b>
552211	Beban Subsidi Lembaga Non Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
<b>553</b>	<b>BEBAN SUBSIDI - ESTIMASI</b>
<b>5531</b>	<b>Beban Subsidi - Estimasi</b>
<b>55311</b>	<b>Beban Subsidi - Estimasi</b>
553111	Beban Subsidi - Estimasi
	Digunakan untuk mencatat Beban Subsidi - Estimasi
<b>554</b>	<b>BEBAN SUBSIDI - DARURAT BENCANA</b>
<b>5541</b>	<b>Beban Subsidi - Darurat Bencana</b>
<b>55411</b>	<b>Beban Subsidi - Darurat Bencana</b>
554111	Beban Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Subsidi ini diberikan akibat harga jual

AKUN	PENJELASAN
	listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero).
554112	<p>Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan -Penanganan Pandemi COVID-19</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bantuan uang muka yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana penyalur bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p>
554113	<p>Beban Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi COVID-19</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p>
554114	<p>Beban Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit usaha rakyat dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p>
554115	<p>Beban Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 termasuk untuk PPh Pasal 21 DTP dan PPh Final UMKM DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p>
554116	<p>Beban Subsidi BM-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.</p>
554117	<p>Beban Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Lembaga Penyalur Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN terhadap Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.</p>
554118	<p>Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)-Penanganan Pandemi COVID-19</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran Subsidi imbal jasa penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus dibayar</p>

AKUN	PENJELASAN
	oleh Pemerintah kepada PT Jamkrindo, PT Askrindo, LPEI dan/atau PTPII sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Telah Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Telah Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
554119	<b>Beban Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran PPN yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 termasuk PPN DN DTP dan PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
<b>55412</b>	<b>Beban Subsidi - Darurat Bencana II</b>
554121	<b>Beban Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Belanja Subsidi Pupuk pada BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
554122	<b>Beban Subsidi PPnBM Ditanggung Pemerintah - Penanganan Pandemi COVID-19</b>
	Digunakan untuk mencatat Beban Subsidi pajak berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19
<b>56</b>	<b>BEBAN HIBAH</b>
<b>561</b>	<b>BEBAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI</b>
<b>5611</b>	<b>Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri</b>
<b>56111</b>	<b>Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri</b>
561111	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.
<b>562</b>	<b>BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL</b>
<b>5621</b>	<b>Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional</b>
<b>56211</b>	<b>Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional</b>
562111	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
<b>563</b>	<b>BEBAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>5631</b>	<b>Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah</b>
<b>56311</b>	<b>Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah</b>
563111	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah.

AKUN	PENJELASAN
<b>56312</b>	<b>Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah</b>
563121	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
563122	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
563123	Beban Hibah Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Hibah Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
<b>56313</b>	<b>Beban Hibah - Darurat Bencana</b>
563131	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk pengeluaran penyaluran Hibah Pariwisata dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah penerima Hibah.
<b>565</b>	<b>BEBAN HIBAH LAINNYA</b>
<b>5651</b>	<b>Beban Hibah Lainnya</b>
<b>56511</b>	<b>Beban Hibah Lainnya</b>
565111	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah
	Digunakan untuk mencatat beban pembayaran biaya yang terkait dengan pendapatan dan belanja hibah baik DN/LN. Biaya-biaya dimaksud antara lain banking commission, bank chargers dan fee lainnya. Akun ini hanya digunakan pada BA Es 999.02 (Pengelolaan Hibah).
<b>57</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
<b>571</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>5711</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial</b>
<b>57111</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial</b>
571111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
571112	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
571113	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Jasa

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
571114	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat beban bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
<b>572</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL</b>
<b>5721</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial</b>
<b>57211</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial</b>
572111	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
572112	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
572113	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Jasa
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
572114	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat beban bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan

AKUN	PENJELASAN
	menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
<b>573</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
<b>5731</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial</b>
<b>57311</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial</b>
573111	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalian potensi dan sumber daya;</li> <li>3. Penggalian nilai-nilai dasar;</li> <li>4. Pemberian akses; dan/atau</li> <li>5. Pemberian bantuan usaha.</li> </ol>
573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalian potensi dan sumber daya;</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penggalian nilai-nilai dasar;</li> <li>4. Pemberian akses; dan/atau</li> <li>5. Pemberian bantuan usaha.</li> </ol> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
573113	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Jasa
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalian potensi dan sumber daya;</li> <li>3. Penggalian nilai-nilai dasar;</li> <li>4. Pemberian akses; dan/atau</li> <li>5. Pemberian bantuan usaha.</li> </ol> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
573114	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	<p>Digunakan untuk mencatat beban bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.</p>
<b>574</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL</b>

AKUN	PENJELASAN
5741	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial</b>
57411	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial</b>
574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:<ol style="list-style-type: none"><li>1. bantuan langsung;</li><li>2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li><li>3. penguatan kelembagaan.</li></ol></li><li>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</li><li>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</li></ul>
574112	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:<ol style="list-style-type: none"><li>1. bantuan langsung;</li><li>2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li><li>3. penguatan kelembagaan.</li></ol></li><li>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</li><li>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</li></ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
574113	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jasa
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:<ol style="list-style-type: none"><li>1. bantuan langsung;</li><li>2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li><li>3. penguatan kelembagaan.</li></ol></li><li>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</li><li>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</li></ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
574114	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat beban bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri



AKUN	PENJELASAN
	Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
575	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>
5751	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>
57511	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>
575111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul>
575112	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
575113	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Jasa
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
575114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat beban bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
576	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA</b>
5761	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana</b>
57611	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana</b>
576111	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang</b>
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li> <li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li> <li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li> <li>- Santunan duka cita; dan</li> <li>- Santunan kecacatan.</li> </ul>
576112	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang</b>
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li> <li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li> <li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li> <li>- Santunan duka cita; dan</li> <li>- Santunan kecacatan.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
576113	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa</b>
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air</li> </ul>

AKUN	PENJELASAN
	bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian; - Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; - Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; - Santunan duka cita; dan - Santunan kecacatan. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
576114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat beban bantuan sosial dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
576116	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat beban bantuan sosial dalam bentuk jasa dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
<b>58</b>	<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>
<b>581</b>	<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>
<b>5811</b>	<b>Beban Lain-lain Dana Cadangan</b>
<b>58111</b>	<b>Beban Lain-lain Cadangan I</b>
581111	Beban Cadangan Umum
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran dalam rangka membentuk yang menggunakan dana cadangan umum.
581112	Beban Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang sifatnya darurat. Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Beban Lainnya).
581113	Beban Cadangan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.
581114	Beban Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban selisih harga beras PNS/TNI/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG.
581115	Beban Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang diberikan kepada Departemen Keuangan untuk membiayai kenaikan harga tanah pada saat pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.
581116	Beban Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro.
581117	Beban Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Stabilisasi Harga Pangan.
581118	Beban Cadangan Risiko Lifting
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Risiko Lifting.
581119	Beban Cadangan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Lainnya.
<b>58112</b>	<b>Beban Lain-lain Cadangan II</b>
581121	Beban Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik).
581122	Beban Cadangan Beras Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Beras Pemerintah.
581123	Beban Cadangan Benih Nasional
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Benih Nasional.
<b>5812</b>	<b>Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian</b>
<b>58121</b>	<b>Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian</b>
581211	Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian.
581212	Beban Operasional Kegiatan SKK Migas
	Digunakan untuk mencatat Beban Operasional Kegiatan SKK Migas.
<b>5813</b>	<b>Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN</b>
<b>58131</b>	<b>Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN</b>
581311	Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).
581312	Jasa Surveyor
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan survey yang dilakukan oleh pihak ketiga oleh Kementerian Negara/ Lembaga tertentu yang khusus dilakukan untuk keperluan tugas pokok fungsinya termasuk proses pengalihan ilmu/pembelajaran pada SDM K/L ybs dalam rangka survey tersebut.
581314	Jasa Pelayanan Bank Operasional
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran kepada Bank Operasional atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan
581315	Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS

AKUN	PENJELASAN
	Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (fee) Bank Kustodian.
581316	Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog.
581319	Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya.
<b>5814</b>	<b>Beban Lain-lain BUN</b>
<b>58141</b>	<b>Beban Lain-lain BUN</b>
581411	Beban Iuran ke Lembaga Internasional
	Digunakan untuk mencatat Beban Iuran ke Lembaga Internasional
581412	Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua.
581413	Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga.
581414	Beban Dana Penunjang (PHLN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pelaksanaan kegiatan Pemda yang bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda.
581415	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban rugi selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
581417	Beban Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.
581418	Beban Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum.
581419	Beban Lain-lain BUN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Lain-lain BUN Lainnya.
<b>58142</b>	<b>Beban Lain-lain BUN II</b>
581421	Beban Selisih Harga SBN
	Digunakan untuk mencatat Beban Selisih Harga SBN.
581422	Beban karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis BA Beban Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis yang dialokasikan dari BA 999.08 (Belanja Lainnya).
<b>5815</b>	<b>Beban Lain-lain Tanggap Darurat</b>
<b>58151</b>	<b>Beban Lain-lain Tanggap Darurat</b>
581511	Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga.
581512	Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana.
<b>58152</b>	<b>Beban Lain-Lain - Penanganan Pandemi COVID-19</b>
581521	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.
581522	Beban Lain-lain Program Kartu Prakerja-Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.
581523	Beban Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran Dana Bantuan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan dampak pandemi COVID-19 termasuk pemberian bantuan pembayaran tagihan listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan golongan industri, bisnis, dan sosial.
<b>5816</b>	<b>Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D</b>
<b>58161</b>	<b>Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D</b>
581611	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan <i>Exotic Currency</i>
	Selisih negatif transaksi belanja dalam valuta asing antara antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda serta selisih dari <i>Exotic Currency</i> .
<b>5819</b>	<b>Beban Lain-lain Lainnya</b>
<b>58191</b>	<b>Beban Lain-lain Lainnya</b>
581911	Beban Pemilu
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan.
581919	Beban Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban lainnya.
<b>59</b>	<b>BEBAN PENYESUAIAN</b>
<b>591</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP</b>
<b>5911</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
<b>59111</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Transaksi ini terjadi di satker yang non BLU
<b>59112</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU</b>
591121	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU

AKUN	PENJELASAN
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Transaksi ini terjadi di satker BLU
<b>5912</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
<b>59121</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Transaksi ini terjadi di satker yang non BLU
<b>59122</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU</b>
591221	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Transaksi ini terjadi di satker BLU
<b>5913</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>59131</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi</b>
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jalan dan Jembatan. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
591312	Beban Penyusutan Irigasi
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Irigasi. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
591313	Beban Penyusutan Jaringan
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jaringan. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
<b>59132</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU</b>
591321	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan. Transaksi ini terjadi di satker BLU
<b>5914</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
<b>59141</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap dalam kelompok aset lainnya. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
<b>59142</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU</b>
591421	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap dalam kelompok aset lainnya. Transaksi ini terjadi di satker BLU
<b>592</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>
<b>5921</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Lainnya</b>
<b>59211</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Lainnya</b>
592111	Beban Amortisasi Goodwill
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Goodwill pada satker Non BLU
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Hak Cipta pada satker Non BLU

AKUN	PENJELASAN
592113	Beban Amortisasi Royalti
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Royalti pada satker Non BLU
592114	Beban Amortisasi Paten
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa paten pada satker Non BLU
592115	Beban Amortisasi Software
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa software pada satker Non BLU
592116	Beban Amortisasi Lisensi
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa lisensi pada satker Non BLU
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset dalam kelompok aset tak berwujud lainnya pada satker Non BLU
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
<b>59212</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Lainnya-Badan Layanan Umum</b>
592121	Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Software pada satker BLU
592122	Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Hak Cipta pada satker BLU
592123	Beban Amortisasi-Royalti BLU
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Royalti pada satker BLU
592124	Beban Amortisasi-Paten BLU
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa paten pada satker BLU
592125	Beban Amortisasi-Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset dalam kelompok aset tak berwujud lainnya pada satker BLU
592126	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - Satker BLU
<b>5922</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lainnya</b>
<b>59221</b>	<b>Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>
592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
592212	Beban Penyusutan Konsesi Jasa
	Digunakan untuk mencatat beban estimasi perhitungan penyusutan aset konsesi jasa sehubungan penurunan umur manfaat aset atau kapasitas aset yang



AKUN	PENJELASAN
	menjadi beban tahun anggaran berjalan.
<b>59222</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain K/L</b>
592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain-lain.
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.
<b>59223</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN</b>
592231	Beban Penyusutan Aset Eks BPPN
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Eks BPPN
592232	Beban Penyusutan Aset yang Diserahkankelolakan pada PT. PPA
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset yang Diserahkankelolakan pada PT. PPA.
592233	Beban Penyusutan Aset BUMN yang Belum Ditetapkan Statusnya
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset BUMN yang Belum Ditetapkan Statusnya.
592234	Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
592235	Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA.
592236	Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Eks Pertamina.
592237	Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B.
592238	Beban Penyusutan Aset Idle yang Sudah Diserahkan ke DJKN
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Idle yang Sudah Diserahkan ke DJKN.
592239	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain-lain BUN.
<b>59224</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU</b>
592241	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain-lain BLU
592242	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU
<b>593</b>	<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>
<b>5931</b>	<b>Beban Persediaan</b>
<b>59311</b>	<b>Beban Persediaan Bahan untuk Operasional</b>
593111	Beban Persediaan konsumsi
	Penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan konsumsi karena sifat dan jenis barang

AKUN	PENJELASAN
593112	Beban Persediaan amunisi
	penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan amunisi karena sifat dan jenis barang
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
	penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai bahan pemeliharaan karena sifat dan jenis barang
593114	Beban Persediaan suku cadang
	penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan suku cadang karena sifat dan jenis barang
<b>59312</b>	<b>Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat</b>
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges
	penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan pita cukai, materai dan leges ke pihak lainnya
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
	Penjualan atau penyerahan aset persediaan tanah bangunan ke pihak lainnya
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
	Penjualan atau penyerahan aset persediaan hewan dan tanaman ke pihak lainnya
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
	Penjualan atau penyerahan aset persediaan peralatan dan mesin ke pihak lainnya
593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
	Penjualan atau penyerahan aset persediaan jalan, irigasi dan jaringan ke pihak lainnya
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
	Penjualan atau penyerahan aset persediaan aset tetap lainnya ke pihak lainnya
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
	Penjualan atau penyerahan aset persediaan aset lain-lain ke pihak lainnya
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
	Penjualan atau penyerahan aset persediaan lainnya ke pihak lainnya
<b>59313</b>	<b>Beban Persediaan untuk proses produksi</b>
593131	Beban Persediaan bahan baku
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan bahan baku ke pihak lainnya
593132	Beban Persediaan barang dalam proses
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan barang dalam proses ke pihak lainnya
<b>59314</b>	<b>Beban Persediaan Bahan Lainnya</b>
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan untuk tujuan strategis ke pihak lainnya

AKUN	PENJELASAN
593142	Beban Persediaan barang hasil sitaan
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan barang hasil sitaan ke pihak lainnya
593149	Beban persediaan lainnya
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan ke pihak lainnya
<b>5932</b>	<b>Beban Persediaan Badan Layanan Umum</b>
<b>59321</b>	<b>Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
593211	Beban Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pelayanan Kesehatan ke pihak lainnya
593212	Beban Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pelayanan Pendidikan ke pihak lainnya
593213	Beban Persediaan BLU penunjang Konstruksi
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU penunjang Konstruksi ke pihak lainnya
593214	Beban Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi ke pihak lainnya
593215	Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya ke pihak lainnya
<b>59322</b>	<b>Beban Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
593221	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita ke pihak lainnya
593222	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu ke pihak lainnya
593229	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu ke pihak lainnya
<b>59323</b>	<b>Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
593231	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Dana Investasi ke pihak lainnya
593232	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir ke pihak lainnya
593239	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya ke pihak lainnya
<b>5933</b>	<b>Beban Penyesuaian Nilai Aset</b>
<b>59331</b>	<b>Beban Penyesuaian Nilai Aset</b>

AKUN	PENJELASAN
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
<b>594</b>	<b>BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>
<b>5941</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan</b>
<b>59411</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan</b>
594111	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Migas
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PPh Migas
594112	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PPh Non Migas
594113	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PPN
594114	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPnBM
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PPnBM
594115	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PBB dan BPHTB
594116	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PBB dan BPHTB
594117	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang pajak Lainnya
594118	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Pajak Perdagangan Internasional
594119	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bea Masuk Tindakan
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Bea Masuk Tindakan
<b>5942</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</b>
<b>59421</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</b>
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPNBP
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PNBPNBP
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang piutang lainnya
<b>59422</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PT PPA</b>
594221	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PT PPA
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PT PPA
<b>59423</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman</b>
594231	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang pemberian pinjaman
594232	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar RDI
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang RDI
594233	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih

AKUN	PENJELASAN
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang potensi tunggakan yang dapat ditagih
594234	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
594235	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Denda Pemberian Pinjaman
<b>59424</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah dan Piutang Lainnya</b>
594241	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
594242	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Kredit Investasi Pemerintah
594243	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
594244	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
594249	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya.
<b>59425</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah</b>
594251	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Penjaminan Pemerintah
<b>59426</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Subsidi</b>
594261	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek Subsidi
594262	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Panjang Subsidi
<b>5943</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>59431</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
594311	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
<b>59432</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU</b>

AKUN	PENJELASAN
594321	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
<b>5944</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>59441</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
<b>59442</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
594421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
<b>5945</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Investasi Permanen</b>
<b>59451</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Investasi Permanen</b>
594511	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Investasi Permanen
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Investasi Permanen
<b>5946</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU</b>
<b>59461</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
594611	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
594613	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penunjang Konstruksi
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penunjang Konstruksi
594614	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
<b>59462</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
594621	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
594622	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan

AKUN	PENJELASAN
	Ekonomi Terpadu
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
594623	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
<b>59463</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
594631	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
594639	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
<b>59464</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Operasional Lainnya BLU</b>
594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
<b>59465</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b>
594651	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
<b>5947</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Non Operasional BLU</b>
<b>59471</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU</b>
594711	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Tanah BLU
594712	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Gedung BLU
594713	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Ruangan BLU
594714	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
594719	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Lainnya BLU
<b>59472</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset BLU</b>
594721	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
594722	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU

AKUN	PENJELASAN
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
<b>59479</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU</b>
594791	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
<b>5948</b>	<b>Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih</b>
<b>59481</b>	<b>Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih</b>
594811	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan
	Digunakan untuk mencatat Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan.
594812	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga.
594813	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya.
<b>59482</b>	<b>Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya</b>
594821	Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
	Digunakan untuk mencatat Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
594822	Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih
<b>5949</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang</b>
<b>59491</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran</b>
594911	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran
<b>59492</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran BLU</b>
594921	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran BLU
<b>59493</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi</b>
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
<b>59494</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
594941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU



AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
<b>59495</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
594951	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
594952	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya RDI
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya RDI
594953	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya Kredit Program
<b>59496</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Kredit Pemerintah</b>
594961	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
594962	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Kredit Investasi Pemerintah
594963	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Penjaminan Pemerintah
<b>59499</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya</b>
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya
594992	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang atas Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
594993	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang atas Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar
<b>595</b>	<b>BEBAN REKLASIFIKASI ASET</b>
<b>5951</b>	<b>Beban Aset Ekstrakomtabel</b>
<b>59511</b>	<b>Beban Aset Ekstrakomtabel</b>
595111	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable tanah. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal tanah yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595112	Beban Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable peralatan dan mesin. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal peralatan dan mesin yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595113	Beban Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable gedung dan bangunan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal gedung dan bangunan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595114	Beban Aset Ekstrakomtable Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable jalan, irigasi, dan jaringan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal jalan, irigasi, dan jaringan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595115	Beban Aset Ekstrakomtable Aset Tetap Lainnya
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable aset tetap lainnya. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal lainnya yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595116	Beban Aset Ekstrakomtable Konstruksi Dalam Pengerjaan
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable konstruksi dalam pengerjaan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal yang menghasilkan KDP yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595117	Beban Aset Ekstrakomtable Aset Tak Berwujud
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomtable aset tak berwujud. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal lainnya yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
<b>59512</b>	<b>Beban Aset Ekstrakomtable - BLU</b>
595121	Beban Aset Ekstrakomtable Tanah - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtable Tanah - BLU
595122	Beban Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin - BLU
595123	Beban Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan - BLU
595124	Beban Aset Ekstrakomtable Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtable Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
595125	Beban Aset Ekstrakomtable Aset Tetap Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtable Aset Tetap Lainnya - BLU
595126	Beban Aset Ekstrakomtable Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtable Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU

AKUN	PENJELASAN
595127	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud - BLU
<b>596</b>	<b>BEBAN PENURUNAN NILAI DAN LAINNYA</b>
<b>5961</b>	<b>Beban Pelepasan Aset</b>
<b>59611</b>	<b>Beban Pelepasan Aset</b>
596111	Beban Pelepasan Aset
	Transaksi akrual atas kerugian pelepasan aset dari nilai bukunya.
596112	Tuntutan Ganti Rugi
	Transaksi atas kerugian Tuntutan Ganti Rugi.
596113	Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan
	Digunakan untuk mencatat Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan termasuk penggunaan Material Persediaan yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
<b>59612</b>	<b>Beban Persediaan Rusak/Usang</b>
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang
	Digunakan untuk mencatat Beban Persediaan Rusak/Usang
<b>59613</b>	<b>Beban Penghapusan Piutang</b>
596131	Beban Penghapusan Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat selisih yang timbul karena nilai outstanding Piutang Pemberian Pinjaman yang dihapuskan lebih besar dari nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pemberian Pinjaman yang dihapuskan, meliputi piutang pokok penerusan pinjaman dan piutang non pokok, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman
596132	Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga
	Digunakan untuk mencatat penghapusan piutang TP/TGR yang masuk ke ranah hukum dan telah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( <i>inkracht</i> ).
<b>5962</b>	<b>Beban Belum Terealisasi</b>
<b>59621</b>	<b>Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi</b>
596211	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Digunakan untuk mencatat Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
596212	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU
<b>59622</b>	<b>Beban Penyesuaian Nilai Investasi</b>
596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyesuaian Nilai Investasi
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat beban penyesuaian investasi lainnya.
<b>5963</b>	<b>Beban Pihak Ketiga</b>
<b>59631</b>	<b>Beban Pihak Ketiga Migas</b>
596311	Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah ke Pemda
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah ke Pemda
596312	Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
596313	Beban Pihak Ketiga Migas - DMO Fee KKKS
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas - DMO Fee KKKS
596314	Beban Pihak Ketiga Migas - Reimbursement PPN KKKS
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas - Reimbursement PPN KKKS
596315	Beban Pihak Ketiga Migas - Underlifting KKKS
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas - Underlifting KKKS
596316	Beban Pihak Ketiga Migas - Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas - Fee Penjualan Migas Bagian Negara
596317	Beban Pihak Ketiga Migas - Beban Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas - Beban Lainnya
<b>59632</b>	<b>Beban Pihak Ketiga Non Migas</b>
596321	Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - <i>Reimbursement</i> PPN
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - <i>Reimbursement</i> PPN
596322	Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - <i>Penggantian Bonus Produksi</i>
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - <i>Penggantian Bonus Produksi</i>
596323	Beban diestimasi - <i>Reimbursement</i> PPN
	Digunakan untuk mencatat Beban diestimasi - <i>Reimbursement</i> PPN
596324	Beban diestimasi - PBB Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Beban diestimasi - PBB Panas Bumi
596325	Beban diestimasi - <i>Penggantian Bonus Produksi</i>
	Digunakan untuk mencatat Beban diestimasi - <i>Penggantian Bonus Produksi</i>
596326	Beban diestimasi - setoran kepada Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban diestimasi - setoran kepada Pemerintah
<b>5964</b>	<b>Beban Penyesuaian Lainnya</b>
<b>59641</b>	<b>Beban Penyesuaian Lainnya</b>
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyesuaian Selisih Kurs pada Kementerian Negara/Lembaga, dan akan dicatat pada Laporan Operasional sebagai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
<b>5965</b>	<b>Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara</b>
<b>59651</b>	<b>Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara</b>
596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara
	Digunakan untuk mencatat Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara
<b>5966</b>	<b>Beban Lain-Lain</b>
<b>59661</b>	<b>Beban Lain-Lain</b>
596611	Beban Lain-Lain
	Digunakan untuk mencatat Beban Lain-Lain yang digunakan pada Kegiatan Non Operasional Lainnya
596612	Beban Lainnya atas Pendapatan Perolehan Jasa

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat beban jasa yang berasal dari pendapatan perolehan jasa, termasuk perolehan jasa yang bersumber selain dari APBN dan hibah.
<b>597</b>	<b>PEMBULATAN</b>
<b>5971</b>	<b>Pembulatan</b>
<b>59711</b>	<b>Pembulatan</b>
597111	Pembulatan
	Akun penyeimbang pada proses transfer rekening kas negara valas ke dalam rekening rupiah.
<b>598</b>	<b>SUSPENSE BEBAN</b>
<b>5981</b>	<b>Suspense Beban</b>
<b>59811</b>	<b>Suspense Beban</b>
598111	Suspense Beban
	Digunakan untuk mencatat selisih Beban antara K/L dengan BUN.
<b>599</b>	<b>AKUN SET UP</b>
<b>5991</b>	<b>Akun Set up A</b>
<b>59911</b>	<b>Akun Set up</b>
599111	Earned Discount
	Akun Set Up up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
599113	Discount Taken
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
599114	Rounding
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
<b>5992</b>	<b>Akun Set up B</b>
<b>59921</b>	<b>Akun Set up</b>
599211	PO Rate Variance Gain
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
599212	PO Rate Variance Loss
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
599213	Purchase Price Variance
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Budget Commitment</i>
599214	Invoice Price Variance
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Budget Commitment</i>
<b>5993</b>	<b>Akun Set Up Bank</b>
<b>59931</b>	<b>Akun Set Up Bank</b>
599311	Kesalahan Bank ( <i>Bank Error</i> )
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Cash Management</i>
599312	Biaya Perbankan ( <i>Bank Charge</i> )
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Cash Management</i>

**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN TRANSFER KE DAERAH**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>6</b>	<b>BEBAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>
<b>61</b>	<b>BEBAN DANA BAGI HASIL</b>
<b>611</b>	<b>BEBAN DANA BAGI HASIL PAJAK</b>
<b>6111</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
<b>61111</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
611111	Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611112	Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
<b>6112</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil PBB</b>
<b>61121</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>
611211	Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611212	Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupaten/Kota sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611213	Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611214	Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611215	Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.
611216	Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota
	Digunakan untuk mencatat Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota.
<b>612</b>	<b>BEBAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>6121</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi</b>
<b>61211</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi</b>
612111	Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi.

AKUN	PENJELASAN
612112	Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
612113	Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
	Digunakan untuk pembayaran tambahan Dana Bagi Hasil minyak bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
<b>6122</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi</b>
<b>61221</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi</b>
612211	Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil.
612212	Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
612213	Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
	Digunakan untuk pembayaran tambahan dana bagi hasil gas bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
<b>6123</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum</b>
<b>61231</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum</b>
612311	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612312	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil.
<b>6124</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi</b>
<b>61241</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi</b>
612411	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612412	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612413	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
<b>6125</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan</b>
<b>61251</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan</b>
612511	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil.
612512	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota penghasil.

AKUN	PENJELASAN
612513	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi
	Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kabupaten/kota.
<b>6126</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Perikanan</b>
<b>61261</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Perikanan</b>
612611	Beban Dana Bagi Hasil Perikanan
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
<b>613</b>	<b>BEBAN DANA BAGI HASIL CUKAI</b>
<b>6131</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Cukai</b>
<b>61311</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Cukai</b>
613111	Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi sesuai dengan UU tentang APBN dan PP tentang Dana Perimbangan.
<b>62</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI UMUM</b>
<b>621</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI UMUM</b>
<b>6211</b>	<b>Beban Dana Alokasi Umum</b>
<b>62111</b>	<b>Beban Dana Alokasi Umum</b>
621111	Beban Dana Alokasi Umum
	Pengeluaran Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian Propinsi.
621114	Beban Koreksi Dana Alokasi Umum
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Dana Alokasi Umum.
<b>63</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>
<b>631</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>
<b>6311</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Reguler</b>
<b>63111</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Reguler</b>
631111	Beban Dana Alokasi Khusus Reguler
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Reguler.
631113	Beban Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler.
<b>6312</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan</b>
<b>63121</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan</b>
631211	Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
631212	Beban Dana Alokasi Khusus Penugasan
	Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik yang digunakan untuk mencapai sasaran prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah, dengan menu dan lokasi yang terbatas sesuai dengan UU APBN dan Perpres Rincian APBN.
<b>6313</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Afirmasi</b>
<b>63131</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Afirmasi</b>



AKUN	PENJELASAN
631311	Beban Dana Alokasi Khusus Afirmasi
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Afirmasi
<b>6314</b>	<b>Beban Tambahan DAK Fisik</b>
<b>63141</b>	<b>Beban Tambahan DAK Fisik</b>
631411	Beban Tambahan DAK Fisik
	Digunakan untuk mencatat tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik yang antara lain terdiri dari Penyelesaian DAK Fisik 2016, Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan, Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Irigasi.
<b>64</b>	<b>BEBAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN DANA INSENTIF DAERAH</b>
<b>641</b>	<b>BEBAN DANA OTONOMI KHUSUS</b>
<b>6411</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Aceh</b>
<b>64111</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Aceh</b>
641111	Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk NAD.
<b>6412</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Papua</b>
<b>64121</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Papua</b>
641211	Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
641212	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua.
<b>6413</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat</b>
<b>64131</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat</b>
641311	Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua Barat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
641312	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Barat.
<b>642</b>	<b>BEBAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>
<b>6421</b>	<b>Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>
<b>64211</b>	<b>Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>
642111	Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan PMK 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
<b>643</b>	<b>BEBAN DANA INSENTIF DAERAH</b>
<b>6431</b>	<b>Beban Dana Insentif Daerah</b>
<b>64311</b>	<b>Beban Dana Insentif Daerah</b>

AKUN	PENJELASAN
643111	Beban Dana Insentif Daerah
	Digunakan untuk mencatat Dana Insentif Daerah.
<b>65</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK</b>
<b>654</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK</b>
<b>6541</b>	<b>Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus</b>
<b>65411</b>	<b>Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus</b>
654111	Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)
	Digunakan untuk mencatat Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG).
654112	Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
	Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik yang memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yaitu desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
<b>6542</b>	<b>Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah</b>
<b>65421</b>	<b>Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah</b>
654211	Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran dana untuk Guru PNSD dan Tambahan Tunjangan Guru PNSD.
<b>6543</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>
<b>65431</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>
654311	Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
<b>6545</b>	<b>Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)</b>
<b>65451</b>	<b>Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)</b>
654511	Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
	Digunakan untuk mencatat Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).
<b>6546</b>	<b>Beban Dana Darurat</b>
<b>65461</b>	<b>Beban Dana Darurat</b>
654611	Beban Dana Darurat
	Digunakan untuk mencatat Dana Darurat.
<b>6547</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</b>
<b>65471</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana</b>
654711	Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan
654712	Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

AKUN	PENJELASAN
<b>65472</b>	<b>Beban Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)</b>
654721	Beban Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
	Digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan.
<b>6548</b>	<b>Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisata</b>
<b>65481</b>	<b>Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan</b>
654811	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
654812	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
654813	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
654814	Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
	Digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
<b>65482</b>	<b>Beban Dana Pelayanan Kepariwisata</b>
654821	Beban Dana Pelayanan Kepariwisata
	Digunakan untuk menyediakan dukungan dana bagi 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dengan fokus pada 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas.
<b>6549</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya</b>
<b>65491</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)</b>
654911	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
654912	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan
	Digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal.
<b>65492</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</b>

AKUN	PENJELASAN
654921	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya
	Digunakan untuk menyediakan dukungan pendanaan bagi pemeliharaan dan pemberdayaan museum dan taman budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.
<b>655</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK II</b>
<b>6552</b>	<b>Beban Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>
<b>65521</b>	<b>Beban Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>
655211	Beban Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
<b>6553</b>	<b>Beban Dana Fasilitas Penanaman Modal</b>
<b>65531</b>	<b>Beban Dana Fasilitas Penanaman Modal</b>
655311	Beban Dana Fasilitas Penanaman Modal
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitas penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>6554</b>	<b>Beban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>
<b>65541</b>	<b>Beban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>
655411	Beban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas dana yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
<b>66</b>	<b>BEBAN DANA DESA</b>
<b>662</b>	<b>BEBAN DANA DESA</b>
<b>6621</b>	<b>Beban Dana Desa</b>
<b>66211</b>	<b>Beban Dana Desa</b>
662111	Beban Dana Desa
	Digunakan untuk mencatat penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
<b>69</b>	<b>BEBAN TRANSFER LAIN-LAIN</b>
<b>698</b>	<b>BEBAN SUSPENSE TRANSFER</b>
<b>6981</b>	<b>Beban Suspense Transfer</b>

AKUN	PENJELASAN
69811	<b>Beban Suspense Transfer</b>
698111	Beban Suspense Transfer
	Digunakan untuk mencatat selisih Transfer antara Kementerian/ Lembaga dengan BUN.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



*Hadiyanto*  
HADIYANTO G